



UNIVERSITAS INDONESIA

***U.S.-JAPAN ROADMAP FOR REALIGNMENT
IMPLEMENTATION 2006***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**GANESH AJI WICAKSONO
0706291275**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ganesh Aji Wicaksono

NPM : 0706291275

Tanda Tangan : 

Tanggal : 3 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini diajukan oleh:

Nama : Ganesh Aji Wicaksono
NPM : 0706291275
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi :

“U.S.-Japan Roadmap for Realignment 2006”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Andi Widjajanto, M.S, M.Sc (.....)

Pembimbing 2 : Yeremia Lalisang, M.Sc (.....)

Penguji : Edy Prasetyono, Ph. D. (.....)

Ketua Sidang : Haryadi Wirawan, Ph. D. (.....)

Sekretaris Sidang : Aninda Tirtawinata, S. Sos, M.Litt (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

KATA PENGANTAR

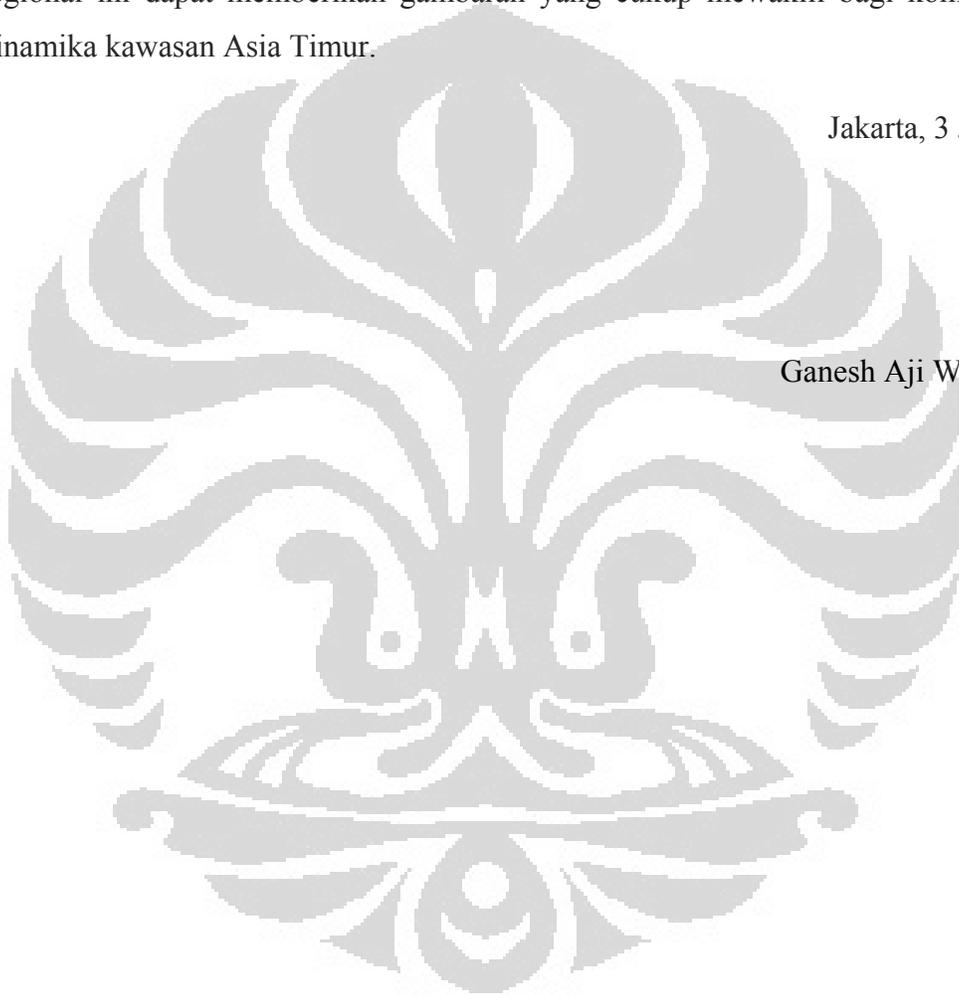
Skripsi merupakan sebuah idealisme dan upaya seseorang untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya mengenai apa yang membuatnya tertarik terhadap sebuah topik. Paling tidak, itulah gambaran awal penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ketertarikan penulis pada kemiliteran dan budaya Jepang berdampak pada pilihan topik skripsi ini, yaitu keamanan Jepang. Jepang lebih sering dikenal sebagai kekuatan ekonomi pasca Perang Dunia II dan sejauh pengamatan penulis, masih cukup jarang untuk menemukan skripsi Ilmu HI di departemen yang membahas mengenai pertahanan Jepang (salah satunya adalah skripsi Anthony Mula, 2006). Secara pribadi, penulis melihat isu ini sebagai tantangan dalam melakukan analisis lebih jauh terhadap kondisi pertahanan Jepang dan sistem yang mempengaruhinya. Apalagi Asia Timur merupakan satu wilayah yang kompleks dengan adanya kepemilikan nuklir dan militer dengan kapabilitas besar, keterkaitan dan kompetisi ekonomi, serta sentimen historis. Perubahan besar pada pertahanan Jepang sendiri baru berlangsung pada tahun 1980-an mulai dari lompatan anggaran militer hingga sekarang, dengan puncaknya berupa penandatanganan perjanjian relokasi Amerika Serikat dari Okinawa pada 2006 dan pengembangan kapabilitas *ballistic missile defense/theater missile defense* yang sukses diujicoba pada 2007. Dalam ranah realis, perkembangan Jepang tersebut dapat dikatakan serius, apalagi dari segi kapabilitas Jepang telah menjadi militer paling canggih di Asia Timur. Di sinilah Cina kemudian berperan sebagai sebuah *rising power*; pada akhir tahun 1990-an ekonomi Cina telah melampaui Jepang, ditambah pada 2004 anggaran militer Cina telah berhasil melampaui anggaran militer Jepang. Kompetisi yang dilakukan oleh kedua *regional power* ini, dalam konteks realis klasik dapat berpotensi menstabilisasi wilayah, apalagi satu pihak memiliki postur militer masif yang kapabilitasnya tengah dikembangkan lebih lanjut dan pihak yang lain memiliki keunggulan teknologi. Kenyataan yang ditemui, walaupun terjadi konflik (yang paling sering terlihat) berupa klaim wilayah dan krisis politik akibat opini publik masing-masing pihak, namun tidak pernah sampai pecah menjadi konflik bersenjata penuh. Penulis

menganggap bahwa hal ini merupakan keunikan tersendiri, dan kian menarik bila dikaitkan dengan perjanjian relokasi yang menggeser kehadiran Amerika Serikat ke Guam.

Akhir kata, melalui analisis terhadap hubungan antara Jepang, Cina, Amerika Serikat dan negara Asia Timur lainnya, penulis berharap bahwa penafsiran hubungan regional ini dapat memberikan gambaran yang cukup mewakili bagi kompleksitas dinamika kawasan Asia Timur.

Jakarta, 3 Juli 2012

Ganesh Aji Wicaksono



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis menghaturkan Shalawat dan Salam pada Nabi Muhammad SAW, penyampai firman-Nya yang bertindak sebagai contoh bagi umat Muslim agar senantiasa berusaha mencapai kebaikan.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-salamnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

- Kedua orangtua penulis: **Ir. Mudji Rahardjo** dan **Eko Arbawati**. Terima kasih bapak dan ibu untuk segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bisa menjadi jalan bagi penulis untuk lebih sukses dan membawa nama baik bapak dan ibu. Keluarga besar **Rahardjo** dan **Prihatin**, terima kasih atas kebersamaannya hingga penulis mampu menamatkan studinya;
- Dosen pembimbing penulis, **Andi Widjajanto, M.S., M.Sc** dan **Yeremia Lalisang, M.Sc**, terima kasih bimbingan dan kesabarannya menghadapi penulis yang kerap “menghilang” dalam upayanya menyelesaikan skripsi ini;
- Dewan penguji skripsi penulis, **Hariyadi Wirawan, Ph. D.** selaku ketua sidang, **Edy Prasetyono, Ph. D.** selaku penguji ahli, dan **Aninda Tirtawinata, S. Sos, M. Litt** selaku sekretaris sidang, terima kasih atas kelulusan dan predikat sarjana yang diberikan pada penulis .
- Dosen mata kuliah Seminar Pemilihan Masalah, **Dwi Ardhanariswari, M.Phil**, dan **Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si**, yang membantu penulis menyinkronkan ide yang berantakan pada Bab I skripsi;
- Dosen pembimbing akademik penulis, **Tirta Mursitama, Ph. D.** dan kemudian beralih ke **Prof. Zainuddin Djafar, M.A, Ph. D.**, terima kasih atas bimbingan akademik bagi penulis selama lima tahun;
- Mas **Roni** selaku petugas UPDHI, yang sering harus menunggu penulis beres-beres baru sesudahnya bisa pulang;

- Teman seangkatan dan seperjuangan, **Tri Andriyanto**, **Maria Firani Rosari**, dan **Irene Severina**, terima kasih atas bantuan dan saling menyemangati menuju final;
- Senior HI UI 2006 yang menginspirasi penulis untuk membahas transformasi Jepang lebih lanjut, **Anthony Mula**, **S.Sos.**
- Teman-teman HI UI 2007, terutama “geng “Counter-Strike” **Rifki Ahmad Z.S. (Sky)**, **Tanggung (Altria)**, **Theo Ekandarista Yunus (SilentStepper)**, dan **Yandri Mardani Sumardi (KucingAK)** dan “geng kereta” **Dyah Ayunico Ramadhani**, **S. Frisca L. Tobing**, **Winda**, **Yohanes Nindito**, dan **Yudha Virwanto Bagus Triady**. *It's a blast to know you fellas!* Kapan-kapan harus bisa rusuh bareng kalian lagi. Penulis ditinggal lulus oleh kalian, mudah-mudahan jadi motivasi untuk berkembang lebih baik. **Tanggung**, ditambah dengan **Adina Dwirezanti** dan **Priliantina Bebasari**, terima kasih atas dorongannya agar penulis cepat selesai dan tidak galau. **Anantama Fauzan Azhima**, terima kasih atas kritik yang cukup membuka perspektif penulis. **Aisyah Ilyas**, terima kasih buat tebengan dan curhatan soal cita-cita, **Laras Larasati**, terima kasih buat dukungan dan sukses merubah pemikiran penulis melalui “insiden” di awal kuliah, dan **Erika**, terima kasih karena bersedia diisengin selama kuliah. Teman se-cluster **Ahmad Naufal Da'i** terima kasih buat obrolan “inkonvensional” dan **Gabriella Cynthia Andries**, *jangan banyak-banyak siluman!*. *Last but not least*, **Amri Pitoyo Priyadi**, **Andi**, **Rosilala**, **Bajora Rahman Nasution**, **Carolina D. Rainintha Siahaan**, **Dian Novikrishna**, **Eryan Tri Ramadhani**, **Fatimah Az-Zahro**, **Ghita Yoshanti**, **Ken Swari Maharani**, **Muti Dewitari**, **Hani Sulastri**, **Resi Qurrata Aini**, **Riris Dwi Adianti**, **Ruth Yohanna**, **Tabhita Hutagalung**, **Teguh Prayogo** dan **Adyani “Dark Princess” Syahputri**. Kalian memberikan hidup yang sangat berwarna selama kuliah penulis di HI;
- Junior HI UI seperbimbingan, seperti **Dian Aditya Ning Lestari**, **Sorang Afril Srihayati Saragih**, dan **Yusdam Arrang**, atas “kasak-kusuk” selama mengerjakan skripsi. Junior *dynamic duo* **Bagus Fitriani Yudoprakoso** dan

Halimun Muhammad, terimakasih atas “transaksi”, obrolan dan semangat yang diberikan selama penulis *random*. **Muhammad Arip** dan **Sri Mulyati** atas pinjaman dua buku yang krusial dari UPDHI. Junior HI yang lain, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadiran kalian dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

- Sepupu penulis **Iwan Adi Suryo** dan *half-brother* **Alrizki Marino**, terima kasih atas dukungan dan ide-ide yang diberikan untuk membantu mengembangkan skripsi yang kerap *mandeg*;
- Teman-teman *The Fighting 21st (Black Cat)*: **Oom Fadjar**, **Emir Caesario**, **Anne Trendy**, **Emir Fahreza Joenoes**, **Hendry Adi**, **Joe Arifianto**, **Johanes Krisnawan**, **Marhendra**, **Moncha Wardani**, **Rizky Aditya**, dan **Rizky Julianto**, terima kasih atas pengalaman taktis dan “kegilaan” yang diberikan;
- Teman-teman *Project Touge*, **Ardian Pradana**, **Dea Hidayasa**, **Gagah Sasono**, **Tammy Natanael**, **Imanda-Mecky**, **Zendeedo S.S.** yang turut menguber penulis agar cepat menyelesaikan studinya dan menemani “sorti tengah malam”;
- Dan pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang mungkin terlupa oleh penulis.

Jakarta, 3 Juli 2012

Ganesh Aji Wicaksono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganesh Aji Wicaksono
NPM : 0706291275
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

U.S.-Japan Roadmap for Realignment 2006

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2012
Yang menyatakan



(Ganesh Aji Wicaksono)

ABSTRAK

Nama : Ganesh Aji Wicaksono
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : *U.S.-Japan Roadmap for Realignment 2006*

Jepang, telah mengalami banyak perkembangan sesuai Perang Dingin hingga menjadi salah satu militer terancang di Asia Timur. Pada 2006, Jepang dan sekutunya yaitu Amerika Serikat menandatangani perjanjian relokasi dari Okinawa, dimana 59% biaya relokasi ditanggung oleh Jepang. Intensi mempertahankan kehadiran Amerika Serikat tersebut memerlukan justifikasi berdasarkan perspektif Jepang terhadap wilayah sekitarnya. Penelitian ini akan menggunakan konsep *balancing* dan *bandwagoning* yang dikemukakan oleh Stephen Walt dalam menentukan kecenderungan strategi pertahanan yang dipraktikkan Jepang, ditambah faktor berupa intensi agresif dari Cina sebagai kompetitor Jepang, perimbangan kekuatan antara Cina dan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, serta kondisi lingkungan strategis Asia Timur.

Kata kunci:

transformasi pertahanan, aliansi keamanan, Jepang, Cina, Amerika Serikat

ABSTRACT

Name : Ganesh Aji Wicaksono
Study Program : International Relations
Title : *U.S.-Japan Roadmap for Realignment 2006*

Japan has experienced many changes since the Cold War until it became one of the most sophisticated military in East Asia. In 2006, Japan and U.S. signed a relocation agreement from Okinawa, in which Japan shared 59% of the cost. This intention of keeping U.S. presence needs to be justified from Japanese perspective of its surroundings. This research will utilize Stephen Walt's concept of balancing and bandwagoning besides considering several factors such as Chinese aggressive intent as Japan's competitor, balance of force between China and U.S.-Japan, and also strategic environment of East Asia.

Keywords:

defense transformation, security alliance, Japan, China, United States,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK, PETA, dan RUMUS	
DAFTAR TABEL	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Kerangka Pemikiran	12
1.2.1 Strategi <i>Balancing</i> dan <i>Bandwagoning</i>	12
1.2.2 Konsep Aliansi Keamanan	15
1.3 Metode Penelitian	16
1.3.1 Metodologi Penelitian	16
1.3.2 Operasionalisasi Teori	17
1.3.3 Asumsi dan Hipotesis Penelitian	25
1.4 Rencana Pembabakan Skripsi	26
1.5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	26
BAB 2 STRATEGI KEAMANAN JEPANG	27
2.1 Latar Strategi Keamanan Jepang	27
2.1.1 Keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur	27
2.1.2 Penempatan Militer Amerika Serikat di Asia Timur	31
2.1.3 Lingkungan Strategis Asia Timur dari Sisi Jepang	35
2.2. Kompleksitas Pertahanan Jepang pasca Perang Dingin	45
2.2. 1 Doktrin dan Struktur Organisasi	45
2. 2.2 Faktor Okinawa	54
2.3 Strategi Keamanan Jepang	60
2.3.1 Prinsip Utama Strategi Keamanan Jepang	60
2.3.2 Upaya <i>Balancing</i> sebagai Strategi Keamanan Jepang	62
2.3.2.1 <i>External Balancing</i> dalam Strategi Keamanan Jepang	62
2.3.2.2 <i>Internal Balancing</i> dalam Strategi Keamanan Jepang	68
BAB 3 PERTIMBANGAN KEAMANAN JEPANG	86
3.1 Intensi Cina sebagai Kompetitor Jepang	86
3.1.1 <i>Status Quo</i> atau <i>Revisionist State</i> ?	86
3.1.2 Kebijakan <i>Peaceful Rise</i> dan Strategi Keamanan Cina	90
3.1.2 Modernisasi Militer Cina	92
3.1.3 Sengketa Wilayah Cina terkait Konsep Pertahanan	99

3.1.4 Gelar Militer <i>forward presence</i> dalam Kasus Taiwan.....	107
3.2 <i>Balance of Force</i> Cina-Jepang Amerika Serikat.....	112
3.2.1 GDP dan Anggaran Militer Cina-Jepang-Amerika Serikat	113
3.2.2 Kekuatan dan Penggelaran Militer.....	117
3.2.2.1 Militer Cina.....	117
3.2.2.2 Militer Jepang	130
3.2.2.3 Militer Amerika Serikat di Jepang.....	136
3.3 Lingkungan Strategis Asia Timur.....	140
3.3.1 Hubungan Jepang-Cina.....	143
3.3.2 Hubungan Jepang-Korea Utara.....	147
3.3.3 Hubungan Jepang-Korea Selatan.....	151
3.3.4 Hubungan Jepang-Taiwan	155
3.4 Analisis <i>Balance of Force</i> Cina-Jepang-Amerika Serikat.....	159
3.5 Analisis Pilihan Strategi Keamanan Jepang, Intensi Cina, dan Lingkungan.....	179
Strategis Asia Timur	
BAB 4 Kesimpulan.....	187
DAFTAR PUSTAKA.....	189

DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK, PETA, dan RUMUS

Diagram 1.1. Kepentingan Negara Menurut <i>Balance of Interest</i>	19
Diagram 1.2. Operasionalisasi Konsep	25
Diagram 3.1. Persentase Kekuatan Militer Ofensif Cina-Jepang- Amerika Serikat 2006	177
Diagram 3.2 Persentase Kekuatan Militer Ofensif Cina-Jepang- Amerika Serikat 2011	178
Grafik 1.1. Dana Relokasi Guam (dalam miliar US\$).....	9
Grafik 3.1. GDP (PPP) Cina-Jepang Amerika Serikat 2006-2011 (dalam miliar US\$)	113
Grafik 3.2. Anggaran Militer Cina-Jepang-Amerika Serikat 2000-2006	113
(dalam miliar US\$)	
Grafik 3.3. Estimasi Anggaran Militer Cina 2007, sumber non-pemerintah.....	115
(dalam miliar US\$)	
Grafik 3.4. Estimasi DIA terhadap Anggaran Militer Cina 1994-2007.....	116
(dalam miliar US\$)	
Peta 1.1. Perbandingan Posisi Okinawa dan Guam	10
Peta 1.2. Lokasi Okinawa di Asia Timur	12
Peta 2.1. Penempatan Militer Amerika Serikat di Korea Selatan	32
Peta 2.2. Penempatan Militer Amerika Serikat di Jepang.....	33
Peta 2.3. Posisi Kepulauan Senkaku	40
Peta 2.4. Pulau Okinotorishima.....	42
Peta 2.5. Kepulauan Takeshima	43
Peta 2.6. Hoppou Ryoudo	44
Peta 3.1. Jangkauan MRBM dan ICBM Cina	94
Peta 3.2. “Rantai” Kepulauan sebagai Perimeter Pertahanan Cina.....	100
Peta 3.3. Jalur Laut Penting Cina	101
Peta 3.4. Jangkauan SAM Cina terhadap Taiwan	111
Peta 3.5. Jangkauan SRBM Cina	112
Peta 3.6. Penggelaran Kekuatan Darat Cina	121
Peta 3.7. Penggelaran Kekuatan Udara Cina.....	122
Peta 3.8. Penggelaran Kekuatan Laut Cina	125
Rumus 3.1 Indeks Kapal	171
Rumus 3.2 Indeks Pesawat.....	172
Rumus 3.3 Indeks Rudal	172
Rumus 3.4 Indeks Militer.....	173
Rumus 3.5 Indeks Militer Total	173
Rumus 3.6 Perbandingan Indeks Militer.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. GDP dan Anggaran Militer Asia Timur dan Amerika Serikat 2010.....	2
Tabel 1.2. <i>Military Balance</i> Negara Asia Timur dan AS (personel militer) 2010.....	2
Tabel 1.3. <i>Military Balance</i> Negara Asia Timur dan AS (alutsista maritim dan udara 2011)	3
Tabel 1.4. Dana Relokasi Guam (dalam miliar US)	9
Tabel 1.5. Variabel Penelitian	24
Tabel 3.1. Inventaris Rudal Cina.....	95
Tabel 3.2. Kekuatan Militer Cina di Selat Taiwan 2007.....	108
Tabel 3.3. Kekuatan PLA	118
Tabel 3.4. Kekuatan PLA-AF	122
Tabel 3.5. Kekuatan PLA-N.....	125
Tabel 3.6. Kekuatan PLA-M.....	129
Tabel 3.7. Kekuatan JGSDF.....	130
Tabel 3.8. Kekuatan JASDF.....	132
Tabel 3.9. Kekuatan JMSDF.....	134
Tabel 3.10. Kekuatan USARJ	136
Tabel 3.11. Kekuatan USAF <i>5th Air Force</i>	136
Tabel 3.12. Kekuatan US Navy <i>7th Fleet</i>	137
Tabel 3.13. Kekuatan USMC III MEF.....	139
Tabel 3.14. Kekuatan Nuklir Amerika Serikat.....	140
Tabel 3.15. Kandidat Sampel Alutsista.....	169
Tabel 3.16. Indeks Kapal.....	171
Tabel 3.17. Indeks Pesawat.....	172
Tabel 3.18. Indeks Rudal.....	173
Tabel 3.19. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Cina 2006/2011	174
Tabel 3.20. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Jepang 2006/2011	175
Tabel 3.21. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Amerika Serikat 2006/2011	176

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang sejarah hubungan internasional, elemen kekuasaan (*power*) dan keamanan (*security*) telah menjadi faktor dominan yang menjadi pertimbangan suatu negara.¹ Kaum Neorealis meyakini bahwa sistem internasional yang bersifat anarkilah yang membuat kedua elemen tersebut berperan sangat dominan dalam interaksi antar negara mempertahankan *status-quo*.² Waltz menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem yang anarki dimana tiap negara berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri (*self-help*) akan mempersulit terjadinya kerjasama antarnegara.³ Sedangkan Glaser menegaskan bahwa sistem internasional yang anarki tersebut akan menimbulkan kompetisi keamanan antarnegara, sehingga memiliki konsekuensi terjadinya perang apabila kompetisi tersebut meningkat.⁴ Kompetisi keamanan yang berlangsung, oleh Jervis disebut sebagai konsekuensi atas peningkatan kapabilitas *power* suatu negara yang akan membuat negara lain menjadi merasa tidak aman (*security dilemma*).⁵

Proposisi-proposisi tersebut dikembangkan dalam dinamika interaksi antar negara-bangsa (*nation-state*) di Eropa, dengan mengesampingkan peran dinamika interaksi antar negara di luar Eropa.⁶ Nilai-nilai dan proposisi-proposisi yang dihasilkan dari kajian terhadap dinamika di Eropa, kemudian juga diterapkan untuk menganalisis dinamika yang juga terjadi di Asia. Beberapa dekade terakhir, wilayah Asia telah muncul sebagai salah satu wilayah dengan potensi kuat sebagai subjek kajian hubungan internasional, terutama wilayah Asia Timur dengan perkembangan diplomasi, ekonomi, dan keamanan yang menandingi Eropa.⁷ Tiga negara di

¹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley, 1979). Waltz menggambarkan politik internasional sebagai upaya memperoleh rasa aman, yaitu menjamin eksistensi suatu negara.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Charles L. Glaser, "Realists as Optimists", dalam *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter, 1994/1995), hlm. 50 dan 55.

⁵ Robert Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma", dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2. (Jan., 1978), hlm. 167-214.

⁶ *Op cit.*

⁷ David C. Kang, "Getting Asia Wrong. The Need for New Analytical Frameworks", dalam *International Security*, Volume 27, Number 4, Spring 2003, hlm. 57-85 (Article).

kawasan tersebut (Cina, Korea, Jepang) memiliki latar sejarah dan budaya yang berbeda, selain hubungan sensitif yang tidak dapat dijelaskan melalui konsep keamanan klasik.⁸ Selain itu, terdapat satu kekuatan global yang turut berperan dalam pembentukan politik dan keamanan Asia Timur hingga menjadi seperti sekarang, yaitu Amerika Serikat.⁹ Kompleksitas tersebut sekaligus menjadikan Asia Timur sebagai subjek yang khas dalam kajian kontemporer hubungan internasional.

Negara-negara Asia Timur kebanyakan merupakan negara industri dengan kemampuan ekonomi yang kuat (kecuali Korea Utara). Amerika Serikat, sebagai satu kekuatan global yang hadir di Asia Timur pada Perang Dunia II, tentunya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari situ. Apalagi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga melakukan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Dari segi keamanan, *Balance of Power* di Asia Timur dapat diuraikan ke dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. GDP dan Anggaran Militer Negara di Asia Timur dan Amerika Serikat 2010 (dalam miliar US\$)

	Amerika Serikat	Cina	Jepang	Korea Utara	Korea Selatan	Taiwan
GDP	14.660	5.878	5.459	-	1.007	430,6
Anggaran Militer	687,105	114,3	51,42	-	24,27	8,535
% GDP	4,7	2,2	1	-	2,9	2,4

Ket. :

- Sumber GDP dari *CIA World Factbook*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> sedangkan sumber anggaran militer dan persentase GDP dari SIPRI, <http://www.sipri.org/>.
- Tidak ada data untuk Korea Utara pada 2010.¹⁰

⁸ *Ibid.* Menurut Kang, kondisi latar Asia yang berbeda dengan mengakibatkan hubungan yang terjadi antara negara-negara tidak bisa dijelaskan dengan konsep dan teori yang berlaku di Eropa. Contohnya prediksi terjadinya *arms race* atau konflik terbuka yang melibatkan great power Asia yang hingga kini tidak terjadi.

⁹ Evelyn Goh, “*Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia. Analyzing Regional Security Strategies*”, dalam *International Security*, Vol. 32, No. 3 (Winter 2007/08), hlm. 113–157. Goh menyatakan bahwa salah satu faktor penyumbang kestabilan Asia Timur adalah jaringan aliansi serta keterlibatan ekonomi dan strategis yang dimiliki Amerika Serikat.

¹⁰ Estimasi yang dilakukan oleh CSIS berdasarkan laporan dari Jane’s menghasilkan perkiraan bahwa pada 2009 Korea Utara sekurang-kurangnya mengalokasikan 22% dari GDP untuk

Tabel 1.2. Military Balance Negara Asia Timur dan AS (personel militer)¹¹

		Amerika Serikat*	Cina	Jepang	Korea Utara	Korea Selatan	Taiwan
Angkatan Laut	aktif	135.000	255.000	42.400	46.000	33.000	45.000
	cadangan	-	-	9.000	65.000	-	67.000
Angkatan Udara	aktif	39.000	315.000	34.800	189.000	64.000	45.000
	cadangan	-	-	7.000	-	-	90.000
Total		174.000	570.000	93.200	300.000	97.000	247.000

Ket. :

- Jumlah personel militer AS merupakan estimasi dari *U.S. Pacific Command Facts*, http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/printfacts.shtml.
- Sumber jumlah personel militer Asia Timur dari Cordesman & Hammond, *THE MILITARY BALANCE IN ASIA: 1990-2010. A Quantitative Analysis* (CSIS, 14 Sept 2010).

Tabel 1.3. Military Balance Negara Asia Timur dan AS (alutsista maritim dan udara)

Jenis alutsista	Amerika Serikat	Cina	Jepang	Korea Utara	Korea Selatan	Taiwan
Ofensif						
Kapal permukaan	90	645	116	603	283	625
Kapal selam	39	65	16	43	13	4
Tank	-	7.650	880	4.060	2.750	1.831
Ranpur*	-	4.620	850	2.500	2.880	1.175
Artileri	1 brigade	17.830	1.880	17.900	10.774	1.765
Pesawat	168	2.792	768	1.052	714	478

anggaran militer. Jumlah tersebut diterjemahkan menjadi anggaran militer sebesar 8,77 miliar US\$ dari 40 miliar US\$ GDP melalui perhitungan *Purchasing Power Parity* (PPP). Lihat Cordesman, et al. *Korean Military Balance. Comparative Korean Forces and The Forces of Key Neighboring States* (CSIS, Juli 2011). diakses dari http://csis.org/files/publication/110201_KoreaMilitaryBalanceMainRpt.pdf, pada 9 Nov 2011 pk 18.06 WIB.

¹¹ Jumlah SDM merupakan salah satu faktor penting selain logistik terkait dengan kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam perang terbuka. Selain itu,

sayap tetap***						
Helikopter	30 + 1 brigade combat aviation AD AS	665	608	302	712	475
Hanud**	1 brigade	24.590	948	24.400	1.468	1.078
Anti-tank	-	7.460	3.600	1.700	58	1.860

Ket:

- *Kendaraan tempur
- **Pertahanan udara
- ***termasuk pembom strategis yang dipangkalan di Guam.
- Sumber dari Cordesman & Hammond, *THE MILITARY BALANCE IN ASIA: 1990-2010. A Quantitative Analysis* (CSIS, 14 Sept 2010)

Grafik di atas menggambarkan kondisi teknis yang dihadapi oleh Jepang sebagai dampak dari suatu anomali. Alokasi anggaran militer Jepang walaupun besar secara nominal, namun persentasenya dari GDP-nya lebih kecil dari negara lain. Selain itu, jumlah personel yang dimiliki juga terbilang sedikit, bahkan Taiwan dengan wilayah yang lebih kecil justru memiliki lebih banyak personel militer. Lebih jauh lagi, Jepang juga memiliki kebijakan keamanan yang cenderung pasif bila dibandingkan dengan tradisi, kemampuan militer, maupun hasil industrinya. Kondisi demikian disebabkan oleh latar belakang sejarah yang unik, serta kompleksitas hubungan yang dimiliki Jepang dengan negara-negara di sekitarnya.

Pasca penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu pada 1945, Sekutu di bawah kepemimpinan Amerika Serikat (SCAP—*Supreme Commander of Allied Powers*) menduduki Jepang hingga 1952.¹² Dalam masa pendudukan ini, Sekutu berusaha mencegah kebangkitan kembali militerisme Jepang melalui demokratisasi dan demiliterisasi. Salah satu aturan formal mengenai penghapusan militer ini dapat

¹² Pasca kekalahan pada PD II, Jepang membutuhkan bantuan ekonomi langsung dari Amerika Serikat dan Sekutu (Australia, India, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru). Sistem militer yang masih dipertahankan mengakibatkan kondisi sosial yang buruk. Selengkapnya lihat Morton & Olenik, *Japan: Its History and Culture. Fourth Edition*.

dilihat dalam Pasal 9 Konsitusi Jepang 1947 yang dirancang oleh Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa:

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people, forever, renounce war as a sovereign right of the nation, or the threat or use of force, as a means of settling disputes with other nations. For the above purpose, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized.”^{13 14}

“Dengan didasarkan pada perdamaian dunia yang adil dan teratur, maka rakyat Jepang tidak lagi menganggap perang, ataupun memanfaatkan ancaman dan kekuatan sebagai cara penyelesaian masalah dengan negara lain, sebagai hak bagi negara yang berdaulat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka angkatan darat, laut, dan udara, maupun hal-hal lain yang berpotensi memicu perang tidak akan dipertahankan. Hak Negara untuk bertindak agresif tidak akan diakui.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa anomali utama Jepang terletak pada pencabutan hak Jepang sebagai suatu negara untuk berperang dalam memenuhi kepentingannya. Selain itu, terkait dengan demokratisasi dan pembebasan pemerintahan dari unsur militer, maka disebutkan dalam bagian Pasal 66 Konstitusi Jepang bahwa:

“... The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians. The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet.”

*“... Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara lainnya harus merupakan orang sipil. Sedangkan Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen (Diet) dalam penggunaan kekuasaan eksekutif.”*¹⁵

Pada 1950, perang pecah di Semenanjung Korea antara Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Korea Utara yang didukung oleh Cina dan Soviet Rusia. Bagi Amerika Serikat yang berpatokan pada doktrin *Containment*, hal ini mengkhawatirkan terkait dengan kemungkinan Komunisme menyebar ke Jepang. Sebagai akibatnya, prioritas demiliterisasi Jepang berubah menjadi pembangkitan militer secara terbatas, dengan tujuan agar Jepang mampu membela diri apabila diserang oleh dua negara komunis tersebut. Pada 8 September 1951 Amerika

¹³ *The Constitution of Japan*, diakses dari http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html, pada

¹⁴ *Op cit.* hlm. 193.

¹⁵ *Ibid.*

Serikat dan Jepang menandatangani *The Security Treaty* di San Francisco. Perjanjian ini menyatakan bahwa Jepang sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk turut serta dalam upaya keamanan kolektif internasional. Selain itu, perjanjian ini juga memberi hak bagi Amerika Serikat untuk tetap menempatkan pasukannya di dalam Jepang maupun sekitarnya, sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan Jepang membela diri sehubungan dengan militer yang belum terbentuk.¹⁶ Jepang memiliki hak mengajukan permohonan untuk menggunakan kekuatan Amerika Serikat ini dengan tujuan pengamanan internal, apabila memang ada campur tangan asing yang menyebabkan keamanan dalam negara terganggu.¹⁷

Perwujudan pembangkitan militer Jepang dapat dilihat pada Juli 1954 dengan berdirinya tersebut dikenal dengan nama Pasukan Beladiri Jepang (JSDF—*Japan Self-Defence Forces*) yang berada di bawah komando *National Defense Agency*.¹⁸ Berdirinya pasukan ini juga diprakarsai dengan adanya Doktrin Yoshida yang menekankan aliansi rapat dengan Amerika Serikat, pembangkitan militer minimal, dan pemulihan ekonomi.¹⁹ Kemudian pada 1957, pasukan Amerika Serikat (USFJ—*U.S. Forces, Japan*) mulai digelar di Jepang. Kekuatan tersebut disebar di 91 fasilitas militer yang terletak di Honshu, Kyushu, dan Okinawa.²⁰ Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1976 Jepang menyusun suatu perencanaan baru yang berfokus pada pengembangan kekuatan militer untuk menghadapi invasi skala kecil dari lawan regional yang menggunakan kekuatan konvensional. Selain itu, sama seperti *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan 1960*, konsep ini juga menekankan bahwa Jepang masih akan bergantung pada Amerika Serikat apabila Jepang mengalami serangan skala besar dari luar.²¹

¹⁶ Sebagai tanggapan atas pecahnya Perang Korea pada 1950, Jepang membentuk *National Police Reserve*, yang kemudian berkembang menjadi *National Safety Force* dan *Coastal Safety Force* pada 1952. Lihat *Article 9 Renunciation of War*, <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/article-9.htm>.

¹⁷ *Security Treaty between The United States and Japan; September 8, 1951*, diakses dari http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp, pada 10 Februari 2011 pk. 21.03.

¹⁸ *Japan - Introduction*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/intro.htm>, pada 28 Februari 2011 pk. 22.03.

Article 9 Renunciation of War, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/article-9.htm>, pada 28 Februari 2011 pk. 22.17.

¹⁹ Michael J. Green, *Japan's Reluctant Realism* (New York: Palgrave, 2001), hlm. 11.

²⁰ *U.S. Forces, Japan*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/usfj.htm>, pada 10 Februari 2011 pk. 21.03.

²¹ *Japan - Introduction, op cit.*

Pada 1979, invasi Soviet ke Afghanistan dan pembangunan militer Soviet di Timur Jauh hingga ke pulau-pulau kecil di sebelah utara Hokkaido (yang dikuasai Soviet namun diklaim Jepang sebagai miliknya), memicu Jepang untuk melakukan modernisasi JSDF, terutama dari kapabilitas pertahanan udara dan antikapal selam.²² Pada 1992, parlemen Jepang menyetujui *International Peace Cooperation Law (PKO Law)* yang memungkinkan Jepang menggelar pasukannya dengan untuk mendukung operasi *peacekeeping*. Perjanjian ini masih diteruskan dengan *Japan-U.S. Joint Declaration on Security Alliance for the 21st Century* pada 1996, yang berisi mengenai peran Jepang yang lebih aktif dalam pertahanan negara. Perjanjian ini juga mengkonfirmasi bahwa *nuclear deterrence* yang dimiliki Amerika Serikat masih menjadi syarat keamanan bagi Jepang.

Manifestasi Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang dapat dilihat dari persebaran pangkalan militer Amerika Serikat di tiga pulau, yaitu Honshu, Kyushu, dan Okinawa. Dari ketiga lokasi tersebut, Okinawa merupakan wilayah dengan konsentrasi militer terpadat di Jepang. Tercatat 75% dari fasilitas militer *U.S Forces, Japan* berpusat di Okinawa, walaupun besar Okinawa hanya 0,6% dari keseluruhan daratan Jepang.²³ Meninjau kembali sejarah penempatan militer ini, sesuai Perang Dunia II Okinawa diambil alih oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan militer yang didasarkan pada *San Francisco Peace Treaty 1951*. Selama penguasaan Amerika Serikat, penduduk asli wilayah tersebut tinggal di kamp tawanan perang, sedangkan lahan yang menjadi sumber penghidupan penduduk dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer. Pada 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa ke Jepang, namun pangkalan-pangkalan militernya tetap hadir dan beroperasi di pulau tersebut sebagai konsekuensi dari Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang.

Walaupun keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Jepang, namun keberadaan

²² *Ibid.*

²³ Fasilitas militer Amerika Serikat di Okinawa terdiri dari 37 pangkalan dan instalasi militer yang dihuni oleh 26.282 tentara. Jumlah tersebut merupakan sebagian besar dari keseluruhan 35.688 tentara Amerika Serikat di Jepang.

Sumber jumlah keseluruhan tentara Amerika Serikat di Jepang diperoleh dari Department of Defense *ACTIVE DUTY MILITARY PERSONNEL STRENGTHS BY REGIONAL AREA AND BY COUNTRY (309A)*, DECEMBER 31, 2009 sementara sumber jumlah tentara AS di Okinawa diperoleh dari *U.S. Military Issues in Okinawa 2003*.

pangkalan tersebut bukannya tanpa masalah. Pertama, posisi fasilitas militer yang berdesakan dengan rekonstruksi kota yang hancur pasca perang. Dengan posisi demikian, penduduk Okinawa mendapat bahaya dari aktivitas yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat, misal kecelakaan peralatan militer dan polusi. Selain itu, pangkalan yang berada di tengah kota besar menyebabkan masalah lain seperti kemacetan dan menghambat pengembangan tata kota.²⁴ Kedua, telah terjadi banyak tindak kriminal yang dilakukan personel Amerika Serikat. Sejak pengembalian Okinawa hingga 2003, tercatat sebanyak 5.269 kasus kejahatan dilakukan oleh personel militer dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan militer.²⁵ Sebagai akibatnya, kebanyakan penduduk Okinawa menentang kehadiran militer Amerika Serikat di pulau ini, bahkan meragukan kredibilitas Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang dalam menjamin keselamatan mereka.²⁶

Perkembangan posisi Jepang yang kian menguat ditunjukkan pada awal tahun 2000 dengan kebangkitan nasionalisme di Jepang.²⁷ Dampak kebangkitan ini juga dirasakan oleh Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, terutama pengangkatan kembali isu relokasi pangkalan dari Okinawa. Isu relokasi tersebut sebenarnya telah muncul sejak tahun 1995, seiring dengan protes yang disebabkan oleh tindak kriminal oleh personel militer Amerika Serikat terhadap anak usia sekolah di Okinawa.²⁸ Protes tersebut mendapat sorotan dari luar negeri, bahkan hingga menyebabkan Amerika Serikat menutup beberapa pangkalan militer di negara sekutunya seperti Filipina dan Panama. Hanya saja, pangkalan militer di Okinawa tetap bertahan. Protes masyarakat setempat terhadap pangkalan militer Amerika Serikat justru melemah, padahal permasalahan ini sebelumnya hampir menjadi krisis politik yang besar bagi Jepang.

Perkembangan menarik terjadi pada tahun 2006, ketika Jepang dan Amerika Serikat menandatangani *United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation* untuk melakukan relokasi 8.000 personel *III Marine Expeditionary*

²⁴ *U.S. Military Issues in Okinawa*, diakses dari <http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/7005/pamphlet%28English%29.pdf>, pada 11 Februari 2011 pk. 22.14, hlm. 8-11.

²⁵ *Ibid.*, 540 di antaranya merupakan kasus serius, selain 977 kasus penyerangan.

²⁶ *Ibid.*

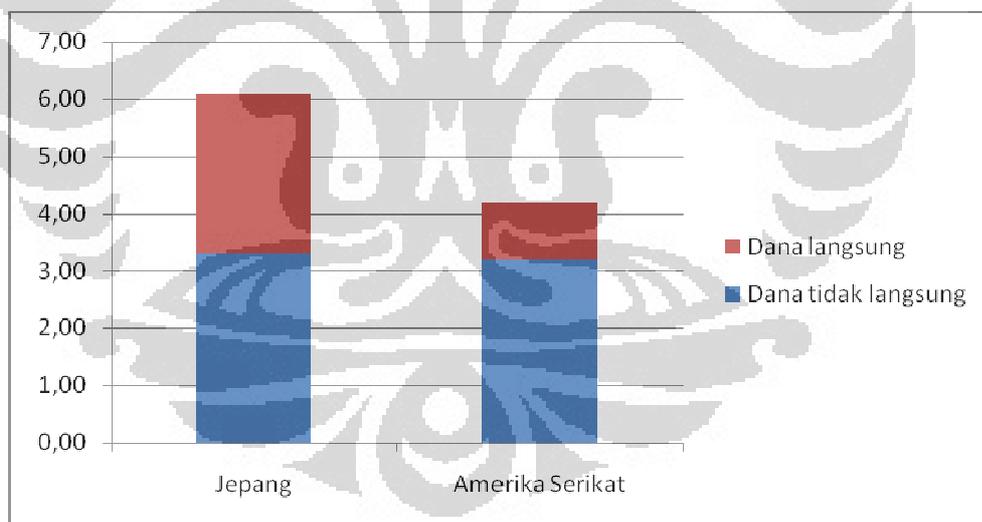
²⁷ Eugene Matthews, 2003, "Japan's New Nationalism", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 6 (Nov. - Des., 2003), hlm. 74-60

²⁸ *Op cit.*

Force (MEF) Amerika Serikat beserta 9.000 orang anggota keluarganya dari Okinawa ke Guam pada 2014.²⁹ Selain itu, disebutkan juga bahwa sekitar 5.002 hektar lahan—yang sebelumnya digunakan oleh III MEF—akan dikembalikan pada Jepang.³⁰ Relokasi tersebut memakan biaya sebesar 10.270.000.000 US\$, dengan biaya yang ditanggung bersama oleh Jepang dan Amerika Serikat. Jepang akan menanggung biaya sebesar 6.090.000.000 US\$, termasuk di dalamnya kontribusi dana langsung sebesar 2.800.000.000 US\$ untuk pengembangan infrastruktur di Guam. Amerika Serikat sendiri akan menanggung biaya sebesar 3.180.000.000 US\$ sebagai pengeluaran fiskal, ditambah 1.000.000.000 US\$ untuk pembangunan jalan di pangkalan tersebut.

Tabel 1.4. Dana Relokasi Guam (dalam miliar US\$)

	Dana tidak langsung	Dana langsung	Total
Jepang	3,29	2,80	6,099
Amerika Serikat	3,18	1,00	4,188
Total			10,27



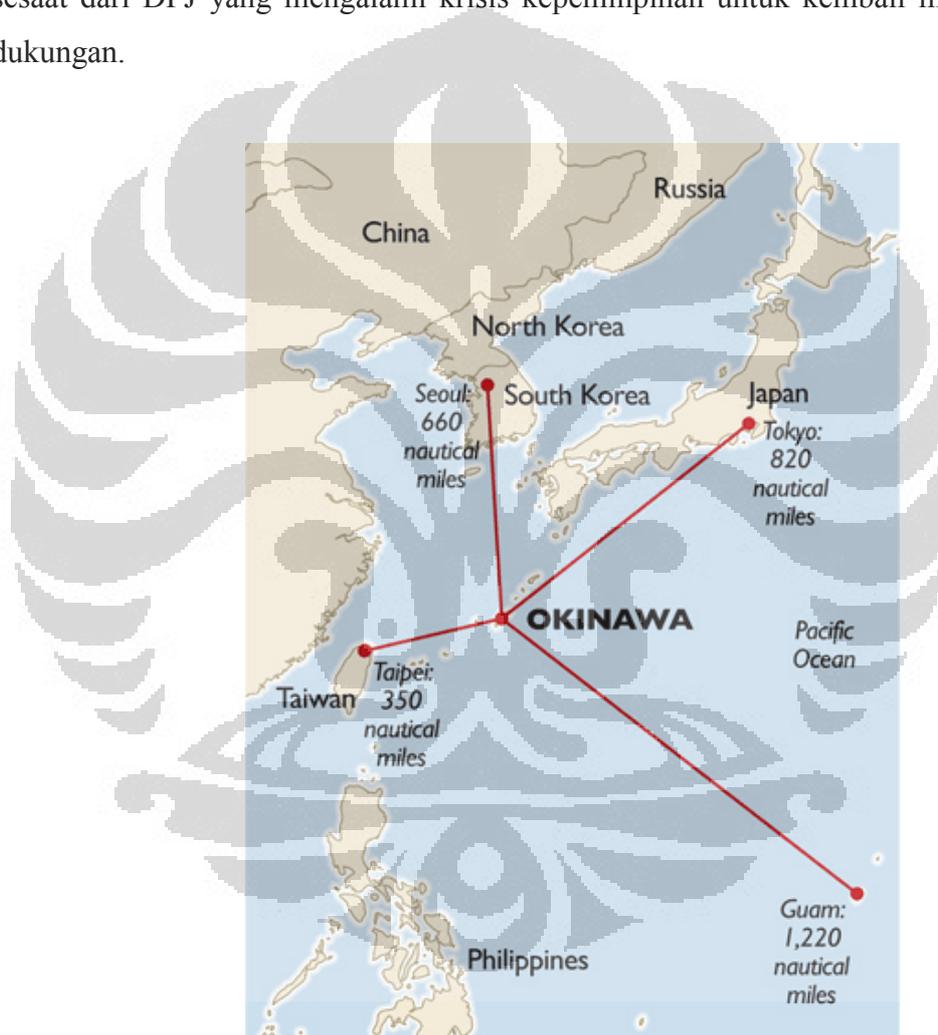
Grafik 1.1. Dana relokasi Guam (dalam miliar US\$)

Peta Jalan 2006 tersebut tidak menyebutkan mengenai keuntungan strategis yang akan diperoleh Jepang dari pembangunan infrastruktur yang akan dibiayainya, selain pengembalian (namun harus melalui pembicaraan lebih lanjut) beberapa

²⁹ *United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html>, pada 11 Februari 2011 pk. 22.14.

³⁰ *Op cit.* hlm. 14.

fasilitas militer di Okinawa.³¹ Padahal pembiayaan sebesar itu tidaklah murah mengingat ekonomi Jepang yang cenderung stagnan sejak era 1990-an. Kebanyakan pengamat mengidentifikasi peristiwa ini sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat Jepang atas kehadiran militer Amerika Serikat di tanah Jepang. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa relokasi ini disebabkan oleh keinginan Jepang untuk lebih aktif berperan dalam keamanan nasional maupun internasional. Namun ada pula yang berpendapat bahwa penandatanganan relokasi ini hanya dinilai sebagai upaya sesaat dari DPJ yang mengalami krisis kepemimpinan untuk kembali memperoleh dukungan.



Peta 1.1. Perbandingan Posisi Okinawa dan Guam

³¹ *Ibid.*

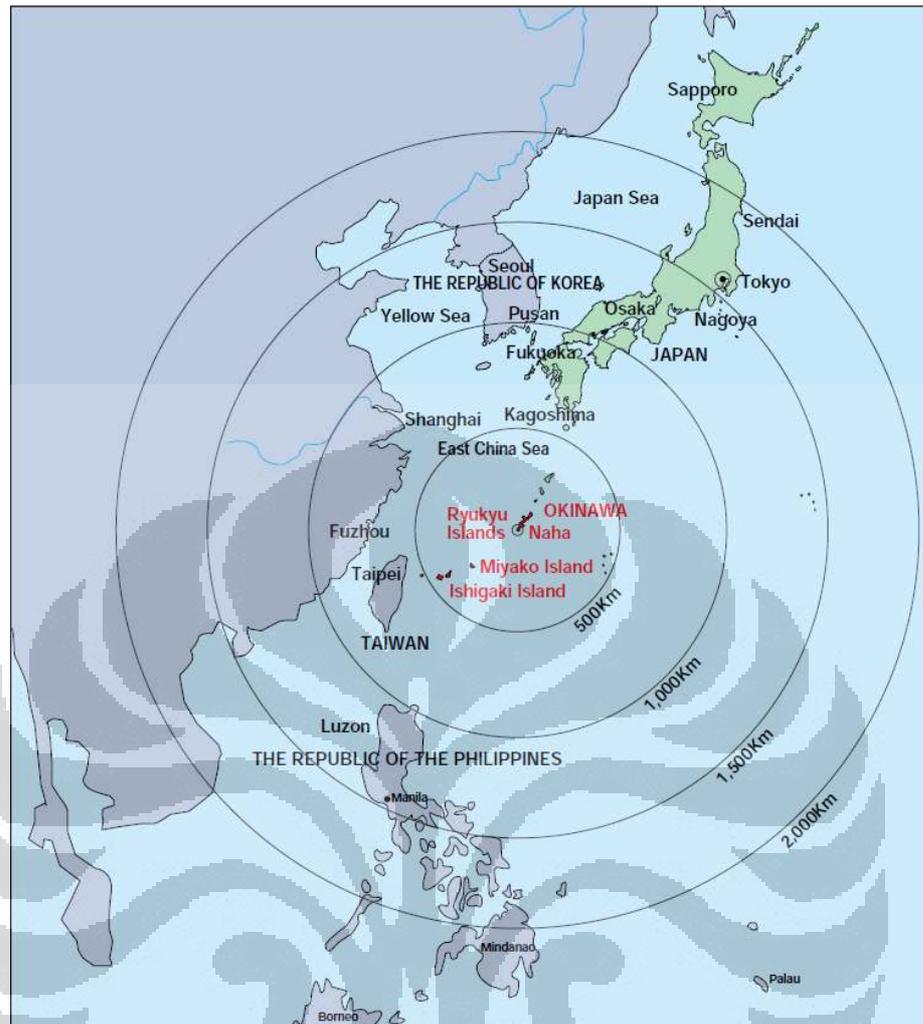
Pangkalan militer di Guam juga memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri.³² Keuntungan dari Guam adalah dapat difungsikan sebagai wilayah latihan skala penuh bagi militer, suatu hal yang cenderung sulit dilakukan dengan Okinawa. Apalagi bila relokasi pangkalan di Guam sekaligus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh sekutu Amerika Serikat. Diperkirakan pangkalan Guam bisa lebih aman dari friksi yang muncul akibat kedekatan lokasi dengan populasi penduduk. Kekuatan konvensional lawan juga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pangkalan di Guam. Sementara dari segi jarak, dalam konflik yang mungkin terjadi di Asia Timur Guam sekilas menjadi tidak efektif karena terlalu jauh dari garis depan. Pangkalan tersebut baru memiliki nilai strategis jarak apabila terjadi konflik di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan.

Apabila tetap mempertahankan pangkalan di Okinawa, maka keuntungan dan kerugian berikut yang harus menjadi pertimbangan. Dari segi geografis, posisi Okinawa dilihat sebagai “kunci wilayah Pasifik” oleh para perancang strategi militer karena berada di antara Taipei (630km), Shanghai (820km), Tokyo sendiri (1.550km), serta Korea dan Filipina (keduanya berada dalam radius 1.000-2.000km).³³ Faktor jarak ini menjadi penting terkait dengan waktu untuk bertindak (*response time*) serta mobilisasi yang mungkin dilakukan apabila terjadi konflik. Dalam skenario terburuk, Okinawa mampu difungsikan sebagai pangkalan aju bagi kekuatan militer (sebagaimana terjadi pada saat Perang Dunia II, Perang Korea dan konflik Taiwan). Hanya saja posisi pangkalan militer di Okinawa berhimpitan dengan populasi penduduk lokal. Hal ini mengakibatkan risiko keamanan bagi penduduk setempat sehubungan dengan aktivitas rutin militer. Selain itu, jarak yang dekat dari wilayah potensi konflik juga menimbulkan kerentanan karena lebih terjangkau oleh kekuatan konvensional lawan.

³² *Summary of the Report: Strategic Implications for Japan of the Buildup of U.S. Bases in Guam. September 2007*, diakses dari <http://www.rips.or.jp/english/seminars/guam.html>, pada 29 Maret 2011 pk. 17.22 WIB.

Sumber peta: *The Heritage Foundation*, diakses dari www.heritage.net.

³³ *U.S. Military Issues in Okinawa, op cit.*



Peta 1.2. Lokasi Okinawa di Asia Timur

*Sumber: *U.S. Military Issues in Okinawa*

Skripsi ini akan didasarkan pada pertanyaan penelitian “*apa yang menjelaskan keputusan Jepang untuk mempertahankan kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik?*” dengan studi kasus agenda relokasi pangkalan militer Amerika Serikat dari Okinawa ke Guam.

1.2 Kerangka Pemikiran

1.2.1 Strategi *balancing* dan *bandwagoning*

Terkait dengan pilihan strategi yang menjadi dasar bagi pemenuhan keamanan Jepang, maka teori yang akan digunakan adalah teori yang membahas dinamika *power* secara komprehensif, yaitu turunan dari *balance of power*.

Kritik terhadap *balance of power* sehubungan dengan definisinya yang terlalu luas memunculkan teori-teori lain yang diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih konkret. Teori *balance of threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt menyatakan bahwa negara tidak selalu melakukan *balancing* atas negara yang paling kuat (atau pemilik *power* dominan) dalam sebuah sistem, tetapi suatu negara justru melakukan *balancing* terhadap ancaman terbesar pada kepentingan mereka.³⁴ *Balancing*, sebagai kecenderungan tindakan yang akan diambil oleh sebuah negara apabila dihadapkan pada suatu ancaman serius, akan mendorong suatu negara untuk beraliansi dengan negara lain. Asumsi dasar Walt, negara-negara akan mendapatkan risiko apabila mereka gagal menghentikan suatu hegemon. Pertama, bersekutu dengan *dominant power* akan menyebabkan suatu negara menempatkan *trust* mereka di bawah kebaikan pemilik *power* tersebut. Akibatnya, negara menjadi rentan terhadap keinginan *dominant power*. Strategi yang lebih aman adalah dengan beraliansi dengan negara dengan *power* yang lebih rendah, atau negara yang tidak bisa mendominasi negara lain secara langsung. Kedua, beraliansi dengan negara yang lebih lemah akan meningkatkan pengaruh yang dimiliki suatu negara, terkait bantuan yang dibutuhkan oleh negara yang lebih lemah tersebut. Negara tidak mengalami kerentanan sebagaimana halnya bila bersekutu dengan *dominant power*, tetapi justru bisa mempengaruhi negara lain untuk melakukan sesuatu.³⁵

Berdasarkan pengertian *balancing* sebelumnya, maka *bandwagoning* oleh Walt dipahami sebagai beraliansi dengan sumber ancaman. *Bandwagoning* didorong oleh dua macam motif, yaitu defensif dan ofensif.³⁶ Negara yang memiliki motif defensif cenderung memilih *bandwagoning* sebagai bentuk *appeasement* dan bertujuan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang ada. Dengan bergabung bersama sumber ancaman, maka negara pelaku *bandwagoning* berharap bisa mengalihkan serangan yang semula ditujukan padanya ke tempat lain. Selanjutnya, motif ofensif membuat negara akan menggunakan *bandwagoning* sebagai cara

³⁴ Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power", dalam *International Security*, Vol. 9, No. 4 (Spring, 1985), hlm. 3-43

³⁵ Walt mencontohkan kebijakan aliansi Inggris yang dikemukakan Churchill "... bergabung dengan sisi yang lebih lemah dan mengalahkan tiran militer Kontinental." selain kebijakan *rapprochement* yang dilakukan Kissinger terhadap Cina.

³⁶ *Ibid.*

untuk berbagi kemenangan.³⁷ Diharapkan dengan bergabung bersama sumber ancaman, suatu negara akan memperoleh nilai tambah, seperti misalnya perluasan wilayah. Ketertarikan pada *power* ini membawa dua konsekuensi: Apabila suatu negara makin kuat dan dengan jelas mendemonstrasikan kekuatannya, maka makin besar kecenderungan negara lain untuk beraliansi dengan dirinya. Sedangkan penurunan posisi negara *dominant power* akan mengakibatkan sekutunya untuk bersikap netral, jika bukan berkhianat ke sisi lainnya. Walt menambahkan bahwa terdapat dua kondisi yang mendukung terjadinya *bandwagoning* oleh suatu negara. Pertama, kemampuan negara yang lemah mengakibatkan mereka cenderung melakukan *bandwagoning* dengan pihak yang lebih unggul.³⁸ Kondisi ini disebabkan terkait kecilnya kapabilitas yang bisa mereka sumbangkan baik ke pihak yang lebih unggul maupun pihak yang lebih lemah, selain kerentanan *weak state* terhadap tekanan *dominant power*.³⁹ Kedua, negara lemah memiliki kecenderungan untuk melakukan *bandwagoning* apabila tidak ada kemungkinan memperoleh sekutu.

Perlu diingat bahwa tindakan aliansi ini tidak ditentukan distribusi *power* semata tetapi oleh ancaman, sehingga mungkin saja terjadi kasus dimana negara-negara kuat akan bersekutu untuk melakukan *balancing* terhadap negara yang lebih lemah. Walt mencontohkan koalisi Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia) yang melawan Jerman di Eropa pada Perang Dunia II. Walaupun masing-masing memiliki keunggulan, keempat negara tersebut didorong oleh persepsi bersama bahwa ekspansionisme Jerman merupakan hal yang berbahaya. Untuk mengidentifikasi ancaman dan kecenderungan strategi negara, maka Walt merumuskan empat faktor selain *distribution of power* yang menentukan tingkat ancaman dan kecenderungan strategi negara, yaitu⁴⁰:

- Intensi agresif suatu negara, terkait persepsi suatu negara lain terhadap negara lainnya. Kian agresif suatu negara ditafsirkan oleh negara lain dalam sistem,

³⁷Walt memberi contoh dari Ulam, Deucher, dan Fest berupa motif defensif dan ofensif yang ada pada Pakta Nazi dan Soviet pada 1939. Pakta tersebut menyebabkan Jerman menguasai Polandia sedangkan Soviet tetap aman dari ancaman militer. Selain itu, pakta ini juga memungkinkan Soviet untuk melakukan ekspansi ke Skandinavia.

³⁸*Ibid.*

³⁹Walt merujuk penjelasan Rothstein dalam *Alliance and Small Powers*.

⁴⁰*Op cit.*

kian besar pula kemungkinan negara lain untuk melakukan *balancing* terhadap negara yang agresif tersebut.

- *Power* agregat, berarti total sumber daya yang dimiliki suatu negara (misal populasi, kemampuan industri dan militer, keunggulan teknologi). Makin besar sumber daya yang dimiliki, makin besar potensi ancaman yang dimiliki suatu negara. Namun, kecenderungan negara *dominant power* untuk menghukum lawan dan *me-reward* kawan juga akan menjadi motif untuk melakukan *balancing* maupun *bandwagoning*.
- Kedekatan geografis, yaitu jarak dari ancaman ke negara yang dituju. Kedekatan geografis berkaitan dengan kemampuan proyeksi *power*. Semakin dekat posisi suatu negara dengan negara lain, maka makin besar kemampuannya untuk melakukan proyeksi *power* yang efektif.
- Kapabilitas ofensif, yaitu kemampuan suatu negara pengancam untuk menguasai negara lain secara cepat. Selain itu, makin besar kapabilitas ofensif yang dimiliki, makin besar pula kemungkinan negara tersebut melakukan provokasi terhadap negara lainnya.⁴¹

1.2.2 Konsep Aliansi Keamanan

Dalam konsep aliansi yang dikemukakan Walt, aliansi pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama keamanan formal maupun informal yang terjadi antara dua negara berdaulat atau lebih. Walt mengasumsikan bahwa aliansi melambangkan tingkat komitmen tertentu dan pertukaran keunggulan masing-masing negara. yang bertujuan untuk menghadapi negara yang lebih kuat. Dalam upayanya merumuskan konsep aliansi dengan lebih jelas, Stefan Bergsmann menerjemahkan aliansi militer sebagai “*perjanjian eksplisit antar negara-negara dalam konteks keamanan nasional, dimana di dalam aliansi tersebut tiap sekutu menjanjikan bantuan dalam bentuk kontribusi sumber daya yang substansial,*

⁴¹ Dalam kasus negara yang berbatasan dengan negara pemilik *power* atau kapabilitas ofensif yang besar, Walt menyebutkan bahwa akan terjadi kemungkinan *bandwagoning* dengan lebih besar daripada *balancing*, dengan pertimbangan terlambatnya bantuan yang diberikan negara sekutu.

dalam menghadapi peristiwa tertentu yang sewaktu-waktu bisa terjadi (terutama gangguan keamanan dari negara lain). ”⁴²

Ideological solidarity disebut oleh Walt sebagai faktor pendorong paling kuat bagi negara-negara untuk membuat aliansi. Makin besar kesamaan ideologi yang dimiliki dua negara atau lebih, makin besar kecenderungan mereka untuk beraliansi. Kemudian, besarnya *foreign aid* yang diberikan suatu negara. Makin besar bantuan yang suatu negara berikan ke negara lain, makin besar kemungkinan mereka beraliansi. Besarnya bantuan tersebut juga menentukan pengaruh yang diberikan donor ke penerima, terkait ketergantungan negara penerima bantuan pada negara donor dan “balas jasa” yang dapat diminta negara donor pada negara penerima bantuan. Faktor terakhir, yaitu akses yang dimiliki suatu negara ke sistem politik negara lainnya. Akses politik yang luas, namun dengan tujuan spesifik, akan menjadi jembatan bagi bagi negara tersebut untuk melakukan kerjasama.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif, dengan penetapan indikator yang digunakan dalam analisis akan ditetapkan terlebih dahulu secara sistematis. Penelitian ini pada dasarnya akan menguji hipotesis yang didasarkan pada konsep. Alur berpikir yang dipergunakan adalah alur berpikir deduksi sebagai berikut:

Pengamatan → Hipotesis → Pengumpulan Data → Pengujian Hipotesis → Kesimpulan⁴³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian dokumentasi dan literatur untuk mengumpulkan informasi dalam materi-materi tertulis. Data berupa dokumen dalam hal ini mengacu pada teks atau apa saja yang tertulis, tampak secara visual atau diucapkan melalui medium

⁴² Stefan Bergsmann, *The Concept of Military Alliance*, diakses dari http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/05_small_states_04.pdf pada 2 Oktober 2011 pk. 18.02 WIB.

⁴³ Dr. Prasetya Irawan, M.Sc, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2006), h. 98.

komunikasi.⁴⁴ Data primer diperoleh dari sumber-sumber resmi, antara lain dokumen resmi *United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation* 2006 dan Buku Putih Pertahanan Jepang. Sementara data sekunder bersumber pada buku-buku, jurnal, maupun artikel digital dan hasil penelitian yang valid serta berhubungan dengan topik penelitian.

1.3.2 Operasionalisasi Teori

Berdasarkan pemaparan kerangka teori, dapat disimpulkan penggunaan beberapa variabel independen dalam penelitian ini. Dari pemaparan kerangka teori terdapat empat variabel independen yang signifikan untuk diteliti, yaitu variabel intensi agresif, *power* agregat, kedekatan geografis, dan kapabilitas ofensif. Dari keempat variabel ini, intensi agresif dan kapabilitas ofensif merupakan variabel tingkat unit, sedangkan *power* agregat dan kedekatan geografis merupakan variabel tingkat sistem.

Dalam menafsirkan persepsi mengenai intensi agresif suatu negara, maka penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp dan pilihan strategi serta intensi negara yang dikemukakan oleh Randall Schweller. Menurut Papp, kepentingan nasional merupakan seperangkat tujuan nasional dari suatu negara yang dirumuskan oleh pemimpin negara, ataupun sekelompok individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan serta sikap maupun tindakan negara dalam merespon fenomena internasional yang dihadapi.⁴⁵ Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai apa yang dikatakan pembuat kebijakan pada tingkat tertinggi dari pemerintahan.⁴⁶

Dalam *Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist States Back In*, Schweller menawarkan pemahaman strategi dan intensi negara yang lebih spesifik, yaitu tindakan *balancing* yang bertujuan untuk melakukan *self-preservation* dan melindungi nilai-nilai yang telah dimiliki (*status quo*), sedangkan *bandwagoning*

⁴⁴ Lawrence Neuman, *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Pearson Education Inc, 2004), hlm. 219.

⁴⁵ Daniel S. Papp, hlm. 43 – 46

⁴⁶ Key Concepts, hlm. 204

memiliki tujuan *self-extension* dan memperoleh nilai-nilai baru yang berharga (revisionis).⁴⁷

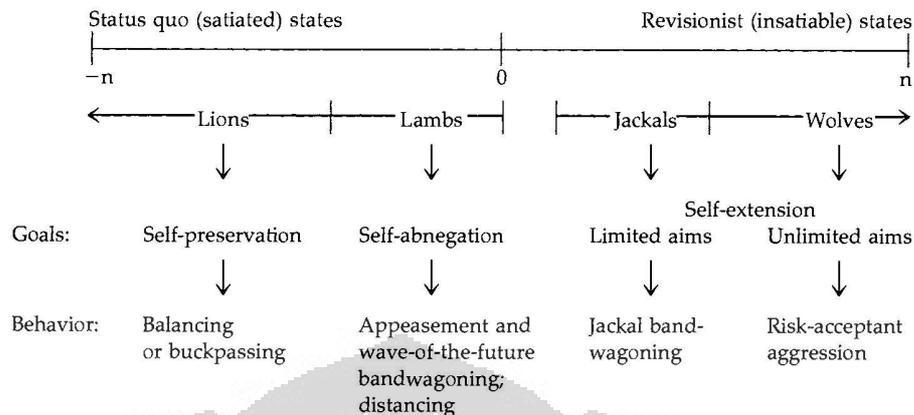
Negara *status quo* berfokus pada *security-maximizers*, dan bukan *power-maximizers*, sehingga negara *status quo* akan menghindari ekspansi non-keamanan serta besarnya biaya perang, hingga ke tahap menghindari upaya maupun penggunaan instrumen militer untuk mengembangkan nilai yang dimiliki. Ketertarikan mereka pada kekuatan militer berbeda-beda, tergantung tingkat ancaman pada nilai yang mereka miliki.

Berbeda dengan negara *status quo*, negara revisionis lebih mengutamakan keinginan ekspansi dan memperoleh hal baru daripada mempertahankan apa yang dia miliki. Negara ini berfokus pada *power-maximizer* demi merubah *status quo* dan memperluas nilai-nilainya. Bagi negara revisionis, keuntungan dari ekspansi non-keamanan dipandang lebih tinggi dari biaya perang. *Power* yang dibutuhkan untuk merubah *status quo* akan menyebabkan negara-negara revisionis berkumpul, terutama bila kemampuan mereka diperkirakan melebihi negara konservatif sehingga bisa memenuhi tujuan ekspansionisnya.

Dalam bentuk variabel, maka kepentingan negara (n) merupakan selisih antara biaya yang ditanggung apabila negara bertindak revisionis (x) dan biaya yang ditanggung oleh negara *status quo* (y). Fungsi n sebagai x dikurangi y akan menentukan bagaimana strategi suatu negara dipandang, nilai n positif berarti negara tersebut merupakan negara revisionis, sedangkan nilai n negatif berarti negara tersebut merupakan negara *status quo*.

⁴⁷ Randall Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In" dalam *International Security*, Vol. 19, No.1 (Summer, 1994),

Diagram 1.1. kepentingan negara menurut *balance of interest*



Perhitungan menggunakan variabel tersebut menghasilkan empat macam klasifikasi strategi negara, yaitu

- *Lions* sebagai negara yang melakukan strategi *balancing* atau *buck-passing*. Sikap tersebut merupakan implikasi dari posisi negara *lions* yang umumnya merupakan negara yang telah puas dengan posisi dan kekuasaannya dalam sistem internasional. Sebagai akibatnya, negara *lions* memiliki tujuan *security-maximizer* dan cenderung mengambil posisi defensif, selain akan berusaha *deter* negara-negara revisionis yang melakukan agresi. Apabila *deterrence* tersebut gagal, maka negara *lions* harus berperang untuk mengalahkan negara agresor tersebut. Posisi relatif, harga diri, serta *self-preservation* merupakan alasan bagi negara *lions* untuk melaksanakan tindakan tersebut, apalagi di bawah mereka biasanya terdapat negara-negara lain yang turut menciptakan tatanan yang ada, sehingga menjadi sebuah insentif tersendiri apabila negara ini berhasil mempertahankan *status quo*. Hanya saja, apabila ada negara lain yang lebih sanggup melakukan tanggung jawab tersebut, negara *lions* akan cenderung menyerahkan urusan *status quo* pada negara yang bersangkutan demi mengurangi biaya yang harus ditanggung.
- *Lambs*, sebagai negara yang melakukan strategi *bandwagoning*. Negara ini dicirikan dengan kapabilitas yang tidak seberapa, atau bermasalah dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bila dibandingkan dengan negara lainnya dalam sistem internasional, sehingga kerap dianggap sebagai mangsa. Berbeda dari *jackal*, negara *lambs* tidak bersedia untuk berkorban demi

memperluas kekuasaannya, sehingga kebijakan luar negerinya juga tidak didorong oleh tujuan ekspansionis. Selain *bandwagoning* yang umum dilakukan sebagai *appeasement* dan upaya mengalihkan serangan, negara *lambs* juga bisa memilih untuk menjauhkan diri dari negara yang terancam secara langsung. Empat alasan yang mendasari pilihan ini adalah 1.) harapan bahwa negara agresor sudah puas atau kelelahan sebelum bisa menaklukkan negara *lambs*, 2.) seiring naiknya kekuatan dan dukungan bagi negara agresor melalui penaklukan yang sukses, negara-negara *status quo* yang merasa terancam diharapkan akan bersatu untuk menghadapi negara-negara agresor ini, 3.) negara *status quo* bisa mengharapkan koalisi revisionis mengalami keruntuhan karena terpecah dalam pembagian tugas militer maupun hasil kemenangan, dan 4.) harapan bahwa tindakan ekspansionis negara agresor akan terlalu mahal bagi masyarakat domestiknya.

- *Jackals*, sebagai negara yang melakukan strategi *jackal bandwagoning*. Negara ini memiliki ciri akan rela mempertahankan apa yang dimilikinya dengan biaya tinggi, namun sekaligus ingin memperluas kekuasaannya. Sebagai akibatnya, negara ini cenderung oportunis dan tidak berminat mengambil risiko. Sesuai analoginya, maka negara *jackals* sering ditemukan mengikuti negara *wolves* (pemimpin revisionis), walaupun tidak menutup kemungkinan bagi negara ini untuk mengikuti negara *lions* yang hampir mencapai kemenangan.
- *Wolves*, sebagai negara yang melakukan agresi. Negara ini lebih suka memperluas kekuasaan daripada mempertahankan apa yang telah dimiliki, sekalipun dengan risiko kepunahan dari sistem internasional. Bagi mereka, tidak ada batasan bagi apa yang mereka inginkan sehingga negara *wolves* akan berfokus pada *power-maximizer*.

Dengan demikian untuk menentukan persepsi negara, penelitian ini akan menggunakan indikator berupa definisi ancaman serta konsep pemanfaatan militer dalam buku putih ataupun garis besar pertahanan yang dikeluarkan pemerintah Cina dan Jepang. Definisi ancaman tersebut bertindak sebagai persepsi negara atas potensi ancaman yang diterimanya.

Penghitungan *balance of force* akan dilakukan dengan perbandingan *power* agregat kapabilitas ofensif yang dimiliki Cina sebagai sumber ancaman,

serta Amerika Serikat dan Jepang sebagai aliansi yang merespon. Pengkategorian Amerika Serikat dan Jepang sebagai satu kekuatan menjadi relevan, sebab terdapat perjanjian resmi *U.S.-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security* dan *National Defense Program Guideline* (NDPG) Jepang yang menyatakan bahwa Amerika Serikat turut bertanggungjawab membantu Jepang apabila terjadi serangan militer skala penuh dari luar. Dalam konsep aliansi keamanan, juga disebutkan bahwa terjadi ekspektasi suatu negara yang menerima serangan militer asing terhadap bantuan negara anggota aliansi lainnya. Dalam menghitung kapabilitas ofensif, penulis akan menggunakan kekuatan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sebagai indikator. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, lingkungan Asia-Pasifik didominasi oleh lautan sehingga hanya matra udara dan laut yang mampu digunakan secara efektif dalam situasi konflik. Kedua, Cina memang mengejar pengembangan kapabilitas *blue-water navy* untuk memperluas proyeksi militer dan mengamankan SLOC yang penting bagi kesinambungan suplai energi dan ekonomi. Ketiga, kekuatan maritim dan udara milik Amerika Serikat merupakan kekuatan yang dominan di kawasan tersebut, contohnya dengan kehadiran tiga gugus tempur kapal induk di Pasifik, armada pembom di Guam, serta pesawat tempur tipe *air-superiority* maupun *multi-role* yang berada di Jepang, Korea Selatan, dan gugus udara kapal induk.

AL memiliki kemampuan pergerakan paling fleksibel, mampu memberikan “keberadaan” atau *forward presence* di suatu wilayah, dan masih didukung dengan teknologi persenjataan modern sehingga mampu menjadi sebuah kekuatan militer yang kredibel.⁴⁸ Implikasi dari *forward presence* AL tersebut adalah kemampuan untuk memberikan daya dukung yang efektif bagi kebijakan luar negeri suatu negara.⁴⁹ Aspek terpenting dari kemampuan tersebut adalah sebagai respon terhadap suatu krisis—termasuk penangkalan—dan mendemonstrasikan kehendak nasional (*national will*) sebagai elemen penting

⁴⁸ Lihat, NN, “Bukan Sekedar Alat Perang,” dalam Edisi Koleksi *Angkasa, Kapal Induk: Benteng Raksasa Yang Mendunia* (Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara), hlm. 6-11; NN, “Monster yang Mematikan,” dalam Edisi Koleksi *Angkasa, Kapal Selam: The Silent Warrior* (Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara), hlm. 3-6.

⁴⁹ Lihat, Mayor Laut (P) Salim, “Membedah Peran Universal TNI Angkatan Laut,” diakses dari <http://www.tandef.net/membedah-peran-universal-tni-angkatan-laut>, pada 1 Des 2009, pk 10.00 WIB.

dari strategi penangkalan (*deterrence*).⁵⁰ Hal ini membuat AL menjadi amat diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan politik sehingga turut mempengaruhi perilaku dan strategi negara dalam sistem internasional.

Linton F. Brooks dalam “*Naval Power and National Security: The Case for the Maritime Strategy*,” memaparkan bahwa terdapat beberapa keunggulan dengan adanya AL dalam sebuah negara, antara lain⁵¹:

- (1) Mendukung implementasi strategi penangkalan terhadap perang atau krisis dan mendukung kebijakan luar negeri negara. Kapabilitas kekuatan maritim yang impresif, ditambah kemampuan sebuah negara melakukan *forward presence* dari kapabilitas tersebut akan membantu negara mendemonstrasikan kehendak nasional-nya, sambil mendukung kebijakan luar negeri negara tersebut. Pergerakan kekuatan maritim sebuah negara seringkali menjadi bagian dari strategi penangkalan politik negara tersebut untuk menangkal terjadinya krisis, perang, atau hanya sekedar menyatakan komitmen terhadap negara sekutu.
- (2) Berkontribusi pula di masa damai dan mendukung persiapan perang melalui penjagaan atau justru menyumbat *Sea Lines of Communications* (SLOC); memberikan dukungan terhadap pertempuran di darat, yang areanya jauh di luar negara, melalui armada angkut dan logistik. Mendukung pergerakan Angkatan Udara negara sendiri dan berusaha menghancurkan Angkatan Udara musuh sebelum sampai di medan tempur darat. Dengan kemampuan pergerakan yang fleksibel, AL dapat membuka mandala-mandala perang baru sebagai salah satu strategi efektif untuk mengalahkan musuh.
- (3) Jika strategi penangkalan gagal, AL dapat berperan efektif untuk menghentikan perang (*war termination*), melalui ancaman kapabilitas persenjataan nuklir yang telah terintegrasi, misalnya melalui kapal selam dengan peluncur rudal balistik nuklir. Ancaman berubahnya perang konvensional menjadi perang nuklir menjadi strategi yang efektif menghentikan perang.

⁵⁰ Linton F. Brooks, “*Naval Power and National Security: The Case for the Maritime Strategy*,” dalam *International Security*, Vol. 11, No.2 (Autumn, 1986), hlm.69

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 69-74

Kedua, pada dasarnya, pemanfaatan AU dinilai mampu melumpuhkan lawan di seluruh tingkatan perang sekaligus menghindari jatuhnya banyak korban dalam kekuatan sendiri. Hal ini dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi seperti *stealth* dan teknologi munisi.⁵² Konsep pemanfaatan AU tercakup dalam empat tahapan dasar, yaitu *air supremacy*, *air superiority*, dan *local air superiority*, dan *air parity*.⁵³ Apabila dirumuskan menjadi sebuah kriteria, ketiga konsep yang disebutkan terlebih dahulu di atas cenderung menuntut penghancuran total dari angkatan udara lawan dan kekuatan pendukungnya (pesawat, fasilitas pemeliharaan dan pangkalan, situs C3, dan situs pertahanan udara) sebagai tujuan utama dari operasi udara, serta pemanfaatan aset-aset udara semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan tersebut.⁵⁴ Penguasaan udara ini bersifat obligatoris, diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu pertempuran dan kemenangan keseluruhan di suatu perang.⁵⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa AU adalah hal yang instrumental dalam mencapai tujuan ini, terutama bila dikaitkan dengan jangkauan yang luas dan kecepatan gerak suatu matra. Apalagi bila sebuah negara mampu merealisasikan unsur udara yang ditempatkan di armada angkatan laut, sehingga secara kasar membuat jangkauannya menjadi tidak terbatas.

Dalam perhitungan lingkungan strategis Asia Timur, maka indikator yang akan digunakan adalah konsep *regional security complex* (RSC) yang dikemukakan oleh Barry Buzan and Ole Wæver. Konsep ini menyatakan bahwa *national security* memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari kondisi regional. *Region*, menurut Buzan, merujuk pada tingkatan dimana negara atau unit lain terikat dengan cukup dekat, sehingga keamanan mereka tidak bisa dipertimbangkan sendiri-sendiri, atau dapat disebut sebagai *close security interdependence*.⁵⁶ Selain itu, dalam RSC terdapat juga negara di luar *region* yang

⁵² *Stealth*: teknologi “siluman” atau sulit dideteksi oleh radar, mis. objek tersebut hanya akan samar-samar terdeteksi di radar hingga batas jarak tertentu. Sedangkan teknologi munisi di sini terutama berupa munisi berpemandu dan munisi serang jarak jauh. Dua hal ini diperhitungkan mampu menekan jumlah korban jatuh dalam perang.

⁵³ *The Air Campaign*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/ops/air.htm>, pada 8 Mei 2010, pk. 21.13

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Barry Buzan and Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 27-30.

memiliki pengaruh hingga ke dalam suatu *region*. Konsep ini penulis nilai relevan dengan kondisi di Asia Timur, dimana perubahan yang ada dalam kapabilitas ataupun kebijakan suatu negara akan mempengaruhi langkah yang diambil negara lain. Sedangkan, peran negara *superpower* yang memiliki pengaruh ke berbagai negara di kawasan tersebut, terutama negara yang menjadi rekanan aliansinya, dimainkan oleh Amerika Serikat.

	Variabel	Kategori	Indikator
Dependen	Pilihan strategi keamanan Jepang	<i>Balancing</i>	Teori <i>balance of threat</i> yang dikemukakan oleh Walt.
		<i>Bandwagoning</i>	
Independen	Intensi negara lawan	<i>status quo state</i>	Indikator intensi negara yang dikemukakan Schweller dalam teori <i>balance of interest</i> .
		<i>revisionist state</i>	
	<i>Balance of force</i> Cina-Amerika Serikat-Jepang	Kekuatan AS-Jepang lebih besar daripada Cina	Perbandingan kapabilitas ofensif dan <i>power</i> agregat antara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Indikator kapabilitas ofensif berupa AL dan AU ketiga negara.
		Kekuatan AS-Jepang lebih kecil daripada Cina	
Lingkungan strategis Asia Timur	Menguntungkan Jepang	Kompleksitas keamanan di Asia Timur. Indikator sesuai konsep <i>regional security complex</i> yang dikemukakan oleh Buzan, berupa hubungan negara-negara Asia Timur dengan Jepang.	
	Tidak menguntungkan Jepang		

Tabel 1.1. Variabel Penelitian

Operasionalisasi dari variabel-variabel di atas akan menghasilkan model analisis seperti di bawah:



Diagram 1.2. Operasionalisasi Konsep

1.3.3 Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Sebelum menentukan hipotesis, maka ada beberapa proposisi yang perlu dibangun terlebih dahulu. Pada kasus relokasi pasukan Amerika Serikat dari Okinawa ke Guam:

- Jika Cina dianggap memiliki intensi mempertahankan *status quo*, maka Jepang akan melakukan strategi *bandwagoning* terhadap Cina.
- Jika Cina dianggap memiliki intensi melakukan revisi terhadap *status quo*, maka Jepang akan melakukan strategi *balancing* terhadap Cina.
- Jika *balance of force* menguntungkan Jepang, maka Jepang akan melakukan strategi *balancing* terhadap Cina.
- Jika *balance of force* tidak menguntungkan Jepang, maka Jepang akan melakukan strategi *bandwagoning* terhadap Cina.
- Jika lingkungan strategis Asia Timur menguntungkan Jepang, maka Jepang akan melakukan strategi *balancing* terhadap Cina.
- Jika lingkungan strategis Asia Timur tidak menguntungkan Jepang, maka Jepang akan melakukan strategi *bandwagoning* terhadap Cina.

Berdasarkan teori *balancing*, *bandwagoning*, serta konsep aliansi sebelumnya, penelitian ini memiliki hipotesis yang akan dibuktikan sebagai berikut:

1. Cina memiliki intensi mempertahankan *status quo*, sementara *balance of force* serta lingkungan strategis Asia Timur tidak menguntungkan Jepang, sehingga Jepang memilih untuk menjalankan strategi *bandwagoning*.
2. Cina memiliki intensi melakukan revisi terhadap *status quo*, sementara *balance of force* tidak menguntungkan Jepang, ditambah lingkungan

strategis Asia Timur yang menguntungkan Jepang, sehingga Jepang memilih untuk menjalankan strategi *balancing*.

1.4 Rencana Pembabakan Skripsi

Penelitian ini akan disusun ke dalam empat bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pertanyaan permasalahan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penelitian. Bab 2 akan berisi kajian literatur mengenai variabel dependen, yaitu sejarah keterlibatan Amerika Serikat di Pasifik dan strategi keamanan Jepang. Bab 3 akan menjelaskan variabel independen dalam penelitian dan analisa mengenai bagaimana variabel tersebut mempengaruhi keputusan Jepang untuk mempertahankan *military presence* Amerika Serikat di Pasifik. Bab 4 kemudian akan berisi kesimpulan dari penelitian sekaligus rekomendasi atau usulan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi penyebab Jepang mempertahankan *military presence* Amerika Serikat di Pasifik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang sedikit lebih jelas mengenai perkembangan keamanan Jepang yang selama ini cenderung terlihat pasif dalam kebijakan pertahanannya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan posisi Jepang dalam keamanan regional secara lebih lugas.

Sementara itu, dari segi signifikansi penelitian ini tidak mempunyai nilai praktis selain sebagai salah satu studi kasus realisme pasca Perang Dingin di Asia Timur. Namun penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap keamanan Asia Timur.

BAB 2

STRATEGI KEAMANAN JEPANG

Dalam pemahaman *balancing* yang dikemukakan oleh Walt, terdapat dua macam sikap balancing yaitu *internal balancing* dan *external balancing*. *Internal balancing* merupakan upaya mengimbangi ancaman dengan melakukan pembangunan kapabilitas internal suatu negara, termasuk di dalamnya adalah *arms buildup*, sedangkan *external balancing* merupakan upaya mengimbangi ancaman dengan memanfaatkan kerjasama eksternal, seperti aliansi keamanan. Dalam bab ini, penulis akan melakukan elaborasi terhadap latar strategi keamanan yang dilakukan oleh Jepang, konteks *realignment* yang dilakukan Amerika Serikat di Pasifik, kompleksitas pertahanan, strategi, dan transformasi pertahanan yang dilakukan oleh Jepang, serta faktor Okinawa yang kemudian menjadi pertimbangan dalam transformasi pertahanan selanjutnya. Elaborasi yang diberikan akan menunjukkan bahwa Jepang memiliki kecenderungan untuk melakukan *balancing* terhadap ancaman di sekitarnya, terutama dengan memanfaatkan aliansi keamanan yang dilakukan bersama dengan Amerika Serikat. Selain itu,

2.1 Latar Strategi Keamanan Jepang

2.1.1 Keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur

Strategi keamanan yang dilakukan oleh Jepang tidak terlepas dari peran Amerika Serikat di Asia Timur, mengingat ketergantungan yang diciptakan Amerika Serikat pada Jepang di Perang Dunia II melalui Konstitusi yang sangat membatasi kemiliteran. Amerika Serikat memiliki tujuan di Asia Timur berupa *balance of power* yang sesuai dengan kepentingan Amerika, termasuk kemakmuran ekonomi, serta penyebaran nilai demokrasi dan hak asasi manusia.⁵⁷ Instrumen militer dipandang penting dalam pemenuhan kepentingan ini, sehingga berakibat pada strategi penciptaan stabilitas regional melalui penempatan kekuatan militer di Pasifik. Instrumen militer ini juga menjadi dasar bagi

⁵⁷ U.S. Department of State, *Background Note: Japan*, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm> pada 31 Desember 2011 pk 23.09 WIB.

kredibilitas Amerika Serikat dalam hubungan antarnegara dan kemakmuran ekonomi regional.⁵⁸

Pada pembukaan Perang Dunia II di Pasifik, serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 membuat Amerika Serikat mengakhiri politik isolasionisnya. Walaupun tidak terhitung resmi, namun unit Sukarelawan Amerika Serikat (*American Volunteers Group—AVG*) juga terlibat di Cina dan Myanmar antara 1941-1942 untuk menghambat gerak maju Jepang di Asia.⁵⁹ Di akhir Perang Dunia II, melalui pendaratan di Iwo Jima Amerika Serikat kemudian menguasai Okinawa dan menjadikan wilayah tersebut untuk operasi akhir melawan Tokyo. Pada 15 Agustus 1945, dua hari setelah Hiroshima-Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengalami demiliterisasi secara total. Kekalahan Jepang di Pasifik ini berdekatan dengan naiknya Komunisme di Cina pada 1949. Amerika Serikat yang menghadapi penyebaran Komunisme di Eropa Timur dan Balkan segera setelah Jerman kalah, mengkhawatirkan situasi ini akan membawa seluruh Asia ke dalam Komunisme (*domino effect*). Sebagai akibatnya, Amerika Serikat tetap menjalankan politik *containment* di Asia dengan penempatan militer di Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.⁶⁰ Amerika Serikat juga melakukan remiliterisasi Jepang untuk menghadapi kemungkinan invasi Cina dan Soviet, demikian halnya dengan Korea Selatan dan Taiwan yang kemudian akan memiliki kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Strategi ini menimbulkan *proxy war* dan beberapa tindakan unilateral di wilayah tersebut, contohnya Perang Korea, intervensi Selat Taiwan, serta Perang Vietnam. Pada 1950-1953, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Korea membantu Korea Selatan menghadapi Korea

⁵⁸ David Jablonsky “*The Persistence of Credibility, Interests, Threats and Planning for the Use of American Military*”, dalam Cerami & Holcomb, eds., *U.S. Army War College Guide to Strategy*, Februari 2001, hlm. 42-52. Hanya saja, Jablonsky mengambil kesimpulan bahwa penggunaan instrumen militer secara nondiskriminatif (tanpa adanya kepentingan nasional yang jelas) menjadi tidak efektif dalam menjamin kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan oleh dorongan publik Amerika Serikat yang berpotensi tidak mentoleransi jatuhnya korban bila militer negaranya dikerahkan ke suatu tempat tanpa kepentingan yang jelas. Dalam situasi tersebut, konsekuensi logis berupa penarikan pasukan malah akan membuat kredibilitas Amerika Serikat menjadi buruk di mata sekutunya.

⁵⁹ Claire Chennault, “*The Flying Tigers*”, dalam Jon E. Lewis, ed., *The Mammoth Book of Fighter Pilots* (New York: Carroll & Graf Publishers, 2002), hlm. 335-338. Tulisan tersebut merupakan memoir Chennault ketika bertindak sebagai komandan AVG.

⁶⁰ Jablonsky, *ibid.*, hlm. 42-45.

Utara yang didukung Rusia dan Cina. Persis setelah pecahnya Perang Korea, Amerika Serikat sempat melakukan intervensi di Selat Taiwan pada Juni 1950 dengan melakukan blokade Selat Taiwan untuk menghindari kemungkinan saling serang antara rezim Nasionalis Taiwan dengan rezim Komunis Cina. Kemudian pada November 1950, Cina melakukan intervensi militer di palagan Korea. Kekuatan Cina dan Amerika Serikat menjadi berhadapan langsung. Selanjutnya pada 1965-1973, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam membantu Vietnam Selatan menghadapi Vietnam Utara yang didukung Rusia. Ketika hubungan Vietnam Utara dan Rusia memburuk, Hanoi kemudian berpaling pada Cina untuk menyediakan *military advisor* dan peralatan. Dalam kedua perang ini, Jepang dijadikan sebagai salah satu pusat transit bagi kekuatan Amerika yang akan digelar maupun kekuatan Amerika Serikat yang kembali dari garis depan.

Pertumbuhan ekonomi regional Asia Timur dalam kurun 1970-1990, ditambah permasalahan ekonomi internal sebagai dampak Perang Vietnam membuat Amerika Serikat sedikit mengendurkan pengaruhnya di wilayah bersangkutan. Tindakan tersebut tercantum pada *Nixon Doctrine 1969*, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat masih akan memberikan *nuclear shield* bagi negara sekutu maupun negara yang penting keamanan Amerika Serikat bila menghadapi ancaman nuklir, selain memberikan bantuan militer dan ekonomi untuk menghadapi agresi, asal negara yang bersangkutan telah berusaha untuk menjamin keamanannya sendiri.⁶¹ Secara nyata, tindakan tersebut salah satunya ditunjukkan dalam penarikan Divisi Ke-7 Angkatan Darat dari Korea Selatan pada 1971. Hanya saja, kejatuhan Uni Soviet pada 1990 dan perkembangan Asia Timur menyebabkan Amerika Serikat masih mempertahankan kehadiran militer demi stabilitas (analisis Barat memperkirakan beberapa faktor yang berpotensi mendestabilisasi Asia Timur, yaitu pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang pesat, kepemilikan nuklir oleh beberapa negara di Asia Timur, *historical animosity* atau rasa bermusuhan dan saling curiga yang dimiliki negara-negara Asia Timur, hilangnya Soviet sebagai ancaman strategis utama, hadirnya Cina sebagai kekuatan baru pesaing Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi Jepang,

⁶¹ *President Nixon's Speech on "Vietnamization*, November 3, 1969, diakses dari <http://vietnam.vassar.edu/overview/doc14.html>, pada 30 Desember 2011 pk 14.30 WIB.

menggantungnya peran Amerika Serikat di Asia Timur terkait kesibukan kampanye antiterorisme, dan situasi di Semenanjung Korea dan Taiwan.)⁶²

Komitmen pertahanan Amerika Serikat pada sekutunya di Asia Timur dapat dilihat dengan kerjasama dan aliansi keamanan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Pada dasarnya, kerjasama keamanan ini merupakan jaminan bahwa Amerika Serikat akan turun tangan membantu ketiga negara apabila mereka menghadapi ancaman dari luar, terutama invasi militer asing. Kerjasama dengan Korea Selatan didasarkan pada *U.S.-Republic of Korea Mutual Defense Treaty 1953*. Perjanjian ini memungkinkan Amerika Serikat menempatkan pasukannya di Korea Selatan untuk membantu mempertahankan Korea Selatan apabila ada serangan dari luar.⁶³ Kemudian, kerjasama keamanan dengan Jepang dilakukan Amerika Serikat melalui Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang yang didasarkan pada *U.S.-Japan Treaty of Mutual Cooperation 1960*. Masih sama dengan *Mutual Defense Treaty* Amerika Serikat-Korea Selatan, perjanjian ini menegaskan dukungan Jepang terhadap peran keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, terutama dengan mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan di Jepang.⁶⁴ Sedangkan, hubungan keamanan Amerika Serikat dengan Taiwan didasarkan pada *Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China 1954*. Perjanjian ini menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu Taiwan dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh komunisme.⁶⁵ Sebagaimana dua perjanjian sebelumnya, perjanjian ini juga menyatakan penerimaan Taiwan bila Amerika Serikat mau menempatkan kekuatan militernya di daratan Taiwan maupun di perairan sekitarnya.

Pada praktiknya dari sisi keamanan, ketiga perjanjian ini meliputi penyediaan persenjataan oleh Amerika Serikat, bantuan pelatihan bagi angkatan bersenjata ketiga negara, pembagian data intelijen, riset dan pengembangan

⁶² Contoh dari keraguan ini dikemukakan oleh Kang dalam “*Getting Asia Wrong*”, *op cit*.

⁶³ *Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953*, diakses dari http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp pada 2 Januari 2012 pk 11.20 WIB.

⁶⁴ *Japan-U.S. Security Treaty: Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html> pada 2 Januari 2012 pk 11.21 WIB .

⁶⁵ *Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China*, diakses dari <http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm> pada 3 Januari 2012 pk 20.15 WIB.

kapabilitas (termasuk transfer teknologi), latihan bersama, serta pengaturan militer lain apabila terjadi krisis. Dari sisi ekonomi, Amerika Serikat juga melakukan revitalisasi ekonomi pascaperang dengan memberikan bantuan ekonomi maupun kebijakan ekonomi yang membuat ketiga negara mampu mendapatkan akses pasar dan membangun kembali industrinya, selain menjamin kesinambungan suplai energi dan bahan baku industri dengan penempatan militer yang mampu mengawasi *sea lanes of communication* (SLOC) di Asia-Pasifik.

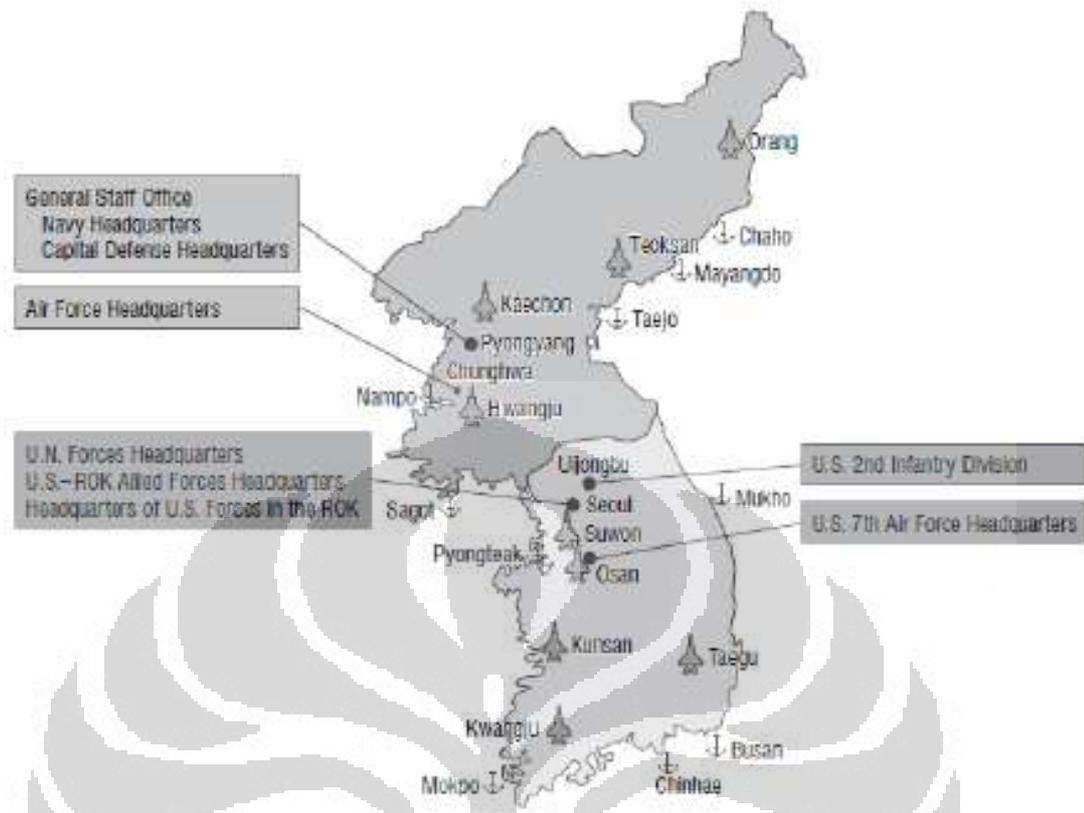
2.1.2 Penempatan Militer Amerika Serikat di Asia Timur

Konsentrasi militer Amerika Serikat terbesar dapat ditemukan di Jepang dan Korea Selatan sebagai rekanan aliansi keamanan. *U.S. Forces, Japan* (USFJ) merupakan kekuatan militer Amerika Serikat yang dipangkalan di Jepang. *U.S. Forces, Korea* (USFK) merupakan kekuatan militer Amerika Serikat yang dipangkalan di Korea Selatan. Kedua kekuatan ini berada di bawah *U.S. Pacific Command* (USPACOM) yang berbasis di Hawaii.

Koordinasi antara kekuatan militer Amerika Serikat ini dilakukan antarpemerintah, selain melibatkan komite setempat yang terdiri dari anggota militer dan sipil. Kerjasama yang melibatkan kekuatan USFJ dan militer Jepang diatur oleh *Subcommittee for Defense Cooperation* yang dibentuk pada 1976. Pimpinan USFJ bertindak sebagai perwakilan bagi *Commander-in-Chief Pacific* (CinCPac) terhadap kekuatan militer Amerika Serikat di Jepang, Duta Besar Amerika Serikat, serta *Japan Defense Agency* (JDA) dan organisasi pemerintah Jepang lainnya.⁶⁶ Sedikit berbeda dari Jepang, dalam melakukan koordinasi terhadap kekuatan USFK dan militer Korea, maka dibentuklah *Combined Forces Command* (CFC) pada 1978 yang terdiri dari anggota militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pimpinan CFC juga bertindak sebagai USFK dan *Commander of United Nations* (UNC), dan bertanggungjawab pada komando nasional tertinggi kedua negara.⁶⁷

⁶⁶ *US Forces, Japan (USFJ)*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/usfj.htm> 27 September 2011 pk 17.10 WIB.

⁶⁷ *U.S. Forces, Korea / Combined Forces Command / Combined Ground Component Command (GCC)*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/usfk.htm> pada 27 September 2011 pk 17.12 WIB.

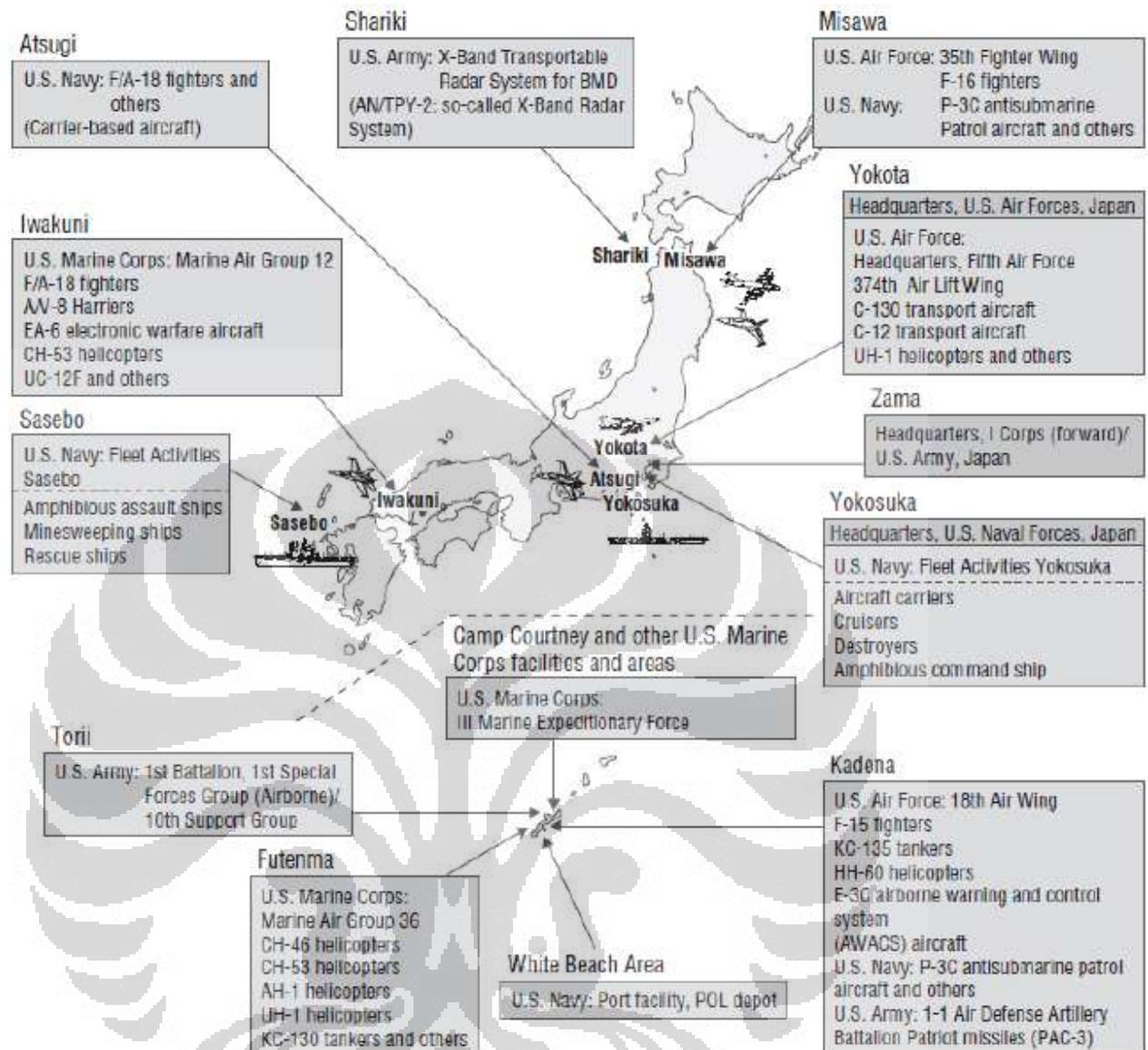


Peta 2.1. Penempatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan

*Sumber: Anthony H. Cordesman, *The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and Forces of Key Neighboring States*, CSIS, Juli 2011.

Kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan terutama terdiri dari Angkatan Darat (*8th Army*) dan Angkatan Udara (*7th Air Force*). Kekuatan *8th Army* terbagi ke dalam beberapa garnisun, yaitu Daegu, *Humphrey* (Pyeongtaek), *Red Cloud* (Uijeongbu), dan Yongsan (Seoul). *7th Air Force* terbagi ke dalam 2 Wing Tempur, yaitu *8th Fighter Wing* yang dipangkalan di Kunsan dan *51st Fighter Wing* yang dipangkalan di Osan. Kekuatan *U.S. Naval Forces, Korea* juga dibagi menjadi dua, yaitu *Fleet Activities* di Busan dan Detasemen Staf yang berada di Pohang. Sedangkan *Marine Corps Forces, Korea* masuk ke dalam markas besar (USFK) di Seoul.

Kekuatan Amerika Serikat di Jepang terutama terdiri dari Angkatan Laut (*7th Fleet*), Angkatan Udara (*5th Air Force*), dan Korps Marinir (*III MEF*) yang tergabung ke dalam komando *U.S. Forces, Japan* (USFJ). Lokasi penempatan kekuatan tersebut dapat dilihat dalam peta di bawah:



Peta 2.2. Penempatan militer Amerika Serikat di Jepang

***Sumber:** Anthony H. Cordesman, *The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and Forces of Key Neighboring States*, CSIS, Juli 2011.

Berkaitan dengan kehadiran kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, maka konteks dari *realignment* yang disebutkan dalam *U.S.-Japan Roadmap for Realignment Implementation* perlu diperjelas. Secara teknis, implementasi perjanjian ini akan berdampak pada digesernya skadron helikopter angkut berat Marinir Amerika Serikat dari Pangkalan Iwakuni mengikuti III MEF ke Guam, sedangkan posisi yang ditinggalkan di Iwakuni akan diisi oleh Skadron Tanker Udara Marinir yang sebelumnya menempati Pangkalan Futenma. Skadron tanker ini juga disebutkan akan melakukan rotasi ke Pangkalan Kanoya milik MSDF dan

Guam demi menjaga interoperabilitas.⁶⁸ Amerika Serikat sendiri secara resmi memandang *realignment* ini sebagai bagian dari upaya penyesuaian kembali terhadap postur kekuatan militernya di Pasifik pasca Perang Dingin.⁶⁹ Amerika Serikat memerlukan militer yang berorientasi pada kapabilitas dan fleksibilitas; salah satu poin dalam orientasi fleksibilitas adalah kebutuhan untuk mengakomodasi dinamika kawasan Asia Timur. Sementara itu dengan orientasi kapabilitas, maka kehadiran personel darat marinir (termasuk skadron helikopter angkut pendukungnya) menjadi kurang relevan bila dibandingkan dengan skadron *fighter-bomber* yang juga dimiliki Marinir Amerika Serikat di Iwakuni. Penyesuaian ini dilakukan dengan menyebar personel marinir Amerika Serikat dari Okinawa ke beberapa tempat seperti Hawaii, Guam, dan Darwin untuk memberikan *military presence* di negara-negara sekutu Amerika Serikat dengan lebih berimbang di Pasifik. *Realignment* ini juga bertujuan untuk kembali memenangkan dukungan publik Jepang bagi Aliansi Keamanan Amerika-Serikat-Jepang dengan menutup Pangkalan Futenma yang dinilai paling berbahaya bagi keamanan masyarakat dan membuat fasilitas pengganti di Camp Schwab yang relatif lebih sepi, ditambah dengan melakukan pengembalian lahan yang sebelumnya ditempati oleh III MEF pada SDF maupun penduduk sipil. Sedangkan dari segi kerjasama militer, maka *realignment* ini memberi kesempatan bagi SDF untuk mengembangkan jangkauan operasional yang lebih luas dengan pengembangan dan pemanfaatan bersama dari fasilitas militer di Guam. Ditambah dengan transformasi Jepang menjadi lebih aktif yang akan dijabarkan pada pertengahan bab ini, maka dapat dikatakan bahwa Jepang memiliki tiga opsi kebijakan untuk diimplementasikan ke depannya: mewujudkan kemandirian dengan tidak meneruskan aliansi keamanan dan mengejar kepentingan nasional dengan segala cara, mempertahankan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, atau “naik kelas” dengan lebih terlibat dalam situasi keamanan internasional hingga menjadi negara normal.

⁶⁸ *Agreement Between the Government of Japan and The Government of the United States of America Concerning the Implementation of the Relocation of III Marine Expeditionary Force Personnel and Their Dependents from Okinawa to Guam*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/agree0902.pdf> pada 29 Maret 2011, pk. 17.22 WIB.

⁶⁹ *Background Briefing on the U.S. Military Realignment in Japan*, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/04/188587.htm> pada 4 Juli 2012 pk. 02.00 WIB.

2.1.3 Lingkungan strategis Asia Timur dari sisi Jepang

Dalam *National Defense Program Guidelines 2005*, Jepang melakukan identifikasi terhadap lingkungan strategisnya ke dalam beberapa tahap⁷⁰:

- Pertama, secara global perkembangan ancaman telah bergeser ke arah ancaman nonkonvensional, diantaranya terorisme internasional dan proliferasi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction—WMD*). Terkait dengan terorisme, maka *deterrence* konvensional menjadi tidak efektif karena terorisme tidak memiliki kewarganegaraan maupun struktur pemerintahan sebagaimana negara. Kemudian, kerjasama internasional serta ketergantungan antarnegara sudah banyak meningkat pasca Perang Dingin. Sehubungan dengan kebutuhan negara-negara akan sistem internasional yang stabil, maka kerjasama tersebut harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan dan menjaga keamanan internasional, sesuai dengan yang tercantum dalam *framework* PBB. Jepang kemudian menyorot peran Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan mencegah proliferasi WMD. Selain itu terdapat pula transformasi penggunaan kekuatan militer dari sebatas merespon konflik bersenjata dan men-*deter* lawan menjadi pencegahan konflik dan bantuan rekonstruksi.
- Kedua, *security concern* di Asia Pasifik meliputi hubungan antara beberapa negara, dengan isu terbesar berupa modernisasi militer dan proliferasi WMD. Rusia, sebagai eks-*superpower* masa Perang Dingin, telah mengurangi jumlah persenjataannya tetapi masih memiliki eksistensi militer yang besar di Timur Jauh, termasuk kepemilikan senjata nuklir. Kemudian, situasi di Semenanjung Korea yang tidak bisa diperkirakan, dengan pengembangan, penggelaran, pemilikan senjata nuklir (berupa rudal balistik), serta keberadaan pasukan khusus Korea Utara (kerap melakukan penyusupan, penculikan, dan tindakan teror lainnya). Aktivitas militer ini menjadi faktor destabilisasi bagi keamanan regional maupun keamanan internasional, selain tantangan bagi rezim nonproliferasi. Selanjutnya, masih ada pula ketidakpastian di Selat Taiwan, dengan pertentangan antara Cina dan Taiwan.

⁷⁰ *National Defense Program Guidelines, FY 2005-*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf pada 21 November 2011 pk 03.16 WIB.

Cina sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Timur terus melakukan modernisasi terhadap kekuatan nuklir dan wahana peluncurnya, selain kekuatan konvensional berupa angkatan laut dan angkatan udaranya. Angkatan laut tersebut dimanfaatkan Cina untuk melebarkan wilayah operasinya di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga Jepang harus terus memperhatikan perkembangan ini untuk menjamin keamanan nasionalnya.

- Ketiga, walaupun invasi skala penuh makin tidak mungkin untuk terjadi, namun Jepang tertuntut untuk menangani ancaman baru dan situasi keamanan yang telah disebutkan sebelumnya, selain isu keamanan regional.
- Keempat, kerentanan Jepang disebabkan oleh kedalaman strategis yang terbatas, garis pantai yang panjang dan pulau kecil yang banyak, tingginya tingkat kepadatan penduduk, konsentrasi populasi dan industri di daerah perkotaan, banyak fasilitas penting di daerah pesisir, kecenderungan bencana alam terkait kondisi iklim dan geologis, serta keamanan jalur laut yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Apabila diuraikan, *security concern* di Asia Timur merupakan dampak dari dinamika *power* antara kekuatan regional. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan misalnya. Walau ketegangan di antara kedua negara menurun, namun Korea Utara tetap tidak bisa ditebak. Kemudian, ujicoba nuklir pada tahun 2006 membuktikan dugaan bahwa Korea Utara telah sukses memproduksi WMD. Tes tersebut menghasilkan daya ledak nuklir sebesar kurang dari satu kiloton (memang masih kurang kuat dari kebanyakan ujicoba yang dilakukan negara pemilik kapabilitas nuklir), sedangkan sebelum ujicoba tersebut Korea Utara diketahui telah memproduksi plutonium dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan setengah lusin senjata nuklir. Terlebih lagi, Korea Utara memiliki kecenderungan maupun kemampuan untuk mengekspor teknologi dari program senjata nuklirnya. Bahkan negara ini menunjukkan keinginan untuk memasarkan WMD di masa depan ke *rogue states* dan ekstremis Islam sebagaimana telah ditunjukkan dengan ekspor senjata nuklir ke Iran dan rudal balistik ke beberapa

negara Timur Tengah.⁷¹ Kekuatan militer Korea Utara merupakan yang terbesar ke-lima di dunia, terdiri dari 1,2 juta tentara, 10.000 artileri, dan lebih dari 800 rudal. Jarang jangkau rudal balistik Scud dan No Dong misalnya, merupakan ancaman serius dengan jarak jangkau yang mampu mencapai Jepang dan kekuatan Amerika Serikat di Asia Timur, bahkan untuk No Dong malah diperkirakan mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Dari segi kekuatan konvensional, Korea Utara kerap melakukan provokasi dengan menggunakan kekuatan pasukan khususnya, contoh kasus penculikan warganegara Korea Selatan pasca perjanjian gencatan senjata pada 1953 hingga awal 2000, pengeboman Penerbangan KAL 858 Korea Selatan pada 1987, hingga penculikan warganegara Jepang pada 1970-1980-an.

Dari segi perspektif, diperkirakan Pyongyang memandang kapabilitas militer yang dimilikinya lebih sebagai *deterrence* dan modal diplomasi koersif daripada alat berperang, selain pertimbangan pemakaian senjata nuklir hanya dalam situasi terjepit. Selain itu juga diperkirakan bahwa Korea Utara tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan kekuatan militer Amerika Serikat maupun sekutunya, kecuali rezim pemerintah berada di ambang kekalahan militer dan berisiko kehilangan kontrol tanpa mampu dipulihkan kembali. Pada 2007, Korea Utara kembali mengikuti *Six-Party Talks* dan memastikan kembali komitmen September 2005-nya, yaitu mulai melakukan denuklirisasi penuh serta penutupan fasilitas nuklir di Yongbyon. Hanya saja Korea Utara telah melewati batas 31 Desember 2007 untuk melakukan deklarasi penuh atas program nuklirnya, padahal batas tersebut telah disetujui dalam perundingan di bulan Oktober. Baru pada 2008 Korea Utara menonaktifkan fasilitas Yongbyon sepenuhnya dengan meruntuhkan menara pendingin reactor di depan media internasional.⁷² Rezim Pyongyang terlihat stabil, namun kesulitan ekonomi, bencana alam, serta ketidakpastian mengenai suksesi kepemimpinan menimbulkan potensi kekacauan domestik dengan konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan.

⁷¹ *Military Technology: World Defense Almanac 2008* (Jerman: Mönch Publishing, 2008), hlm. 27.

⁷² U.S. Department of State, *Background Note: North Korea*, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm> pada 1 Januari 2012 pk 01.22 WIB.

Negara lain dengan kapabilitas *power* yang besar adalah Cina, sekaligus sebagai rival Jepang sejak masa dinasti. Kedua negara ini tersangkut dalam *security dilemma* walaupun memiliki hubungan ekonomi yang positif.⁷³ Contohnya, modernisasi militer Cina yang menekankan proyeksi power ke timur membuat Jepang menggunakan strategi dua arah (kerjasama ekonomi sambil membendung pengaruh politik Cina).⁷⁴ Demikian halnya Cina yang melayangkan protes apabila kapabilitas militer Jepang bertambah atau terjadinya kerjasama keamanan Amerika Serikat-Jepang yang lebih erat.⁷⁵ Pasca Perang Dunia II, Jepang dan Cina telah melakukan normalisasi hubungan pada 1972, namun tetap ada beberapa konflik yang berpotensi melebar dan mengakibatkan ancaman lebih serius di kemudian hari.

Cina menganggap dirinya sebagai *power* regional dengan kepentingan di tingkat global.⁷⁶ Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, maka Cina membutuhkan akses terhadap pasar, sumber daya alam, serta teknologi. Selain itu, Cina juga melakukan modernisasi militer secara besar-besaran yang didorong oleh persepsi bahwa militer yang modern dan kompeten merupakan elemen esensial dari *great power*. Persepsi tersebut berkembang bahkan di rezim Cina yang demokratis sekalipun. Potensi konflik dengan Cina dapat ditunjukkan pertama dengan ujicoba nuklir Cina pada pertengahan tahun 1990-an.⁷⁷ Pada 15 Mei 1995, Cina melakukan ujicoba peledakan nuklir bawah tanah selama 40 detik di Lop Nur, yaitu gurun terpencil di sebelah selatan Mongolia. Tindakan tersebut mengejutkan Jepang, sekaligus menimbulkan krisis karena melonjaknya sentimen antinuklir di Jepang.⁷⁸ Sebagai akibatnya Jepang menahan bantuan dana sebesar 75 juta US\$ (aslinya merupakan bagian dari ODA) bagi Cina, setelah sebelumnya memperingatkan Cina bahwa tindakan tersebut akan mengganggu masyarakat Jepang yang sangat anti pada senjata nuklir. Namun Cina tidak menggubris Jepang, bahkan kembali melanjutkan ujicoba nuklir pada Agustus dan September 1995. Cina bahkan balik menentang dengan

⁷³ Richard C. Bush, *The Perils of Proximity: China-Japan Security Relations* (Washington: Brookings Institution Press, 2010), bab 4.

⁷⁴ Green, *Japan's Reluctant Realism*, *op cit.*, hlm. 78-79.

⁷⁵ Xu Heming, *The Redefinition of the U.S. Japan Security Alliance and Its Implications to China*. (Sigur Center for Asian Studies, 1998) diakses dari <http://www.gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP3-Xu.pdf>, pada 21 Feb 2011 pk 17.28 WIB.

⁷⁶ *Military Technology: World Defense Almanac 2008*, *op cit.* hlm. 30.

⁷⁷ Bush, *op cit.*, hlm. 80-82.

⁷⁸ Green, *op cit.*

mengatakan Jepang tidak memiliki hak untuk menahan bantuan dana tersebut, karena mengganggu urusan dalam negeri Cina. Selain itu, Cina juga berkeras bahwa Jepang harus tetap membayar dana tanggungan atas kesalahannya pada Perang Dunia II. Krisis ini baru mereda ketika Cina mengakhiri ujicoba nuklirnya pada 30 Juli 1996 dan mengumumkan bahwa Cina telah siap untuk bergabung dalam *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT).

Selanjutnya, masih ada pula pertentangan antara Cina dan Taiwan. Tercatat telah tiga kali terjadi krisis di Selat Taiwan, terkait dengan klaim wilayah dan anggapan Cina bahwa pemerintah Taiwan adalah ancaman bagi kedaulatannya.⁷⁹ Bahkan modernisasi militer Cina juga disebut sebagai persiapan apabila seandainya konflik terbuka dengan Taiwan benar-benar terjadi.⁸⁰ Kebijakan administratif Amerika Serikat dalam hal ini adalah menggunakan segala cara untuk mempertahankan Taiwan dari serangan militer Cina sebagaimana tercantum dalam bagian 2 *Taiwan Relations Act*.⁸¹ Apabila sampai terjadi perang terbuka antara Cina dan Taiwan, bukan tidak mungkin bagi Jepang sebagai anggota Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang ikut terseret dalam permasalahan tersebut.

Modernisasi militer Cina dilakukan dengan mengembangkan kapabilitas dan sistem yang menambah risiko bagi Jepang dan Amerika Serikat sebagai sekutunya di wilayah Asia Timur.⁸² Kapabilitas yang dimaksud adalah rudal jelajah dan rudal balistik jarak mandala (*theatre-range*) yang mampu mencapai pangkalan maupun kekuatan bergerak Jepang dan Amerika Serikat. Cina juga mengembangkan sistem serang jarak pendek serta rudal balistik jarak pendek-menengah dengan hulu ledak berpemandu yang mampu bermanuver. Terlebih lagi, Cina juga memprioritaskan sistem kontra-komando, kontrol, dan sensor yang mencakup pengacau (*jammer*) satelit komunikasi maupun senjata antisatelit. Beijing berpendapat bahwa modernisasi kekuatan strategis Cina dilakukan untuk menjamin survivabilitas sistem tersebut dalam menghadapi kemajuan negara asing dalam bidang pengintaian strategis, kapabilitas serang presisi, dan *missile*

⁷⁹ Andrew Scobell, *China's Use of Military Force. Beyond the Great Wall and the Long March*, (Cambridge University Press, 2003), bab 8.

⁸⁰ *World Defense Almanac 2007*, *op cit*.

⁸¹ *Taiwan Relations Act*, diakses dari <http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html> pada 3 Januari 2012 pk 20.18 WIB.

⁸² *Op cit*.

defence. Sebagai akibatnya, diperkirakan bahwa sepuluh tahun mendatang kemampuan nuklir Cina akan meningkat dengan cepat dari segi jarak, letalitas, dan survivabilitas. Cina sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Timur juga melakukan modernisasi kekuatan konvensional berupa angkatan laut dan angkatan udaranya. Contohnya, dengan pembangunan kapabilitas *blue-water navy* bagi angkatan laut, untuk kemudian dimanfaatkan Cina untuk melebarkan wilayah operasinya di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan pembangunan angkatan udara dilakukan dengan program pesawat tempur generasi ke-4.5 maupun generasi ke-5, selain pembangunan armada pembom strategis.

Ketiga, potensi konflik timbul dari saling klaim atas beberapa kepulauan, di antaranya Kepulauan Senkaku/Diaoyudai dan Okinotorishima (Jepang-Cina), Takeshima/Dokdo (Jepang-Korea), dan Hoppou Ryoudo/Kuril (Jepang-Rusia).⁸³



Peta 2.3. Posisi Kep. Senkaku

Senkaku/ Diaoyudai terletak kurang lebih 120nm di sebelah timur laut Taiwan, 200nm di sebelah timur Cina daratan, dan 200nm di sebelah tenggara Okinawa. Senkaku terdiri dari delapan pulau yang tidak berpenghuni, dengan tiga pulau terbesar adalah Uotsuri/Diaoyu, Kobi-sho/Huangwei Yu, dan Akao-sho/Chiwei Yu. Perairan di sekitar kepulauan ini kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, selain lokasinya yang berdekatan dengan jalur

⁸³ Dr. Richard P. Cronin, "China's Activities in Southeast Asia and the Implications for U.S. Interests", Testimoni pada Komisi Kajian Ekonomi dan Pertahanan AS-Cina, Henry L. Stimson Center, 4 Februari 2010, hlm. 12-14.

perkapalan internasional.⁸⁴ Baik Jepang maupun Cina melakukan klaim atas Senkaku/Diaoyudai berdasarkan sejarah. Jepang menyatakan bahwa Senkaku merupakan wilayah tidak berpenduduk, selain tidak ada bukti penguasaan dari negara manapun sejak survei yang dilakukan Jepang pada 1885. Dengan demikian, maka Jepang menandai Senkaku sebagai wilayah kekuasaannya sejak tahun 1895. Jepang juga mengklaim bahwa Senkaku termasuk wilayah yang dipindahtangankan oleh Amerika Serikat pada pengembalian Okinawa di tahun 1972, selain tercantum sebagai wilayah Jepang dalam *US-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security 1960*.⁸⁵ Di sisi lain, Cina dan Taiwan mengklaim kepemilikan pulau ini berdasarkan penemuan dan penggambaran Senkaku dalam peta Cina sejak 1403, selain pemanfaatan Senkaku sebagai basis bagi aktivitas nelayan Cina. Cina maupun Jepang juga berargumen bahwa lokasi Senkaku terletak dalam batas ZEE sejauh 200nm dari garis pantai masing-masing (padahal lebar Laut Cina Timur hanya 360nm).

Menyikapi hal ini, pada Juli 1996 Jepang membangun mercusuar di Pulau Uotsuri dan melarang siapapun untuk melakukan kunjungan ke pulau maupun mercusuar tersebut. *Japan Coast Guard* (JCG) juga melakukan patroli rutin di sekeliling Kepulauan Senkaku untuk mencegah pendaratan dari aktivis maupun kelompok politik di Asia Timur yang dinilai akan mengganggu proses penyelesaian konflik. Kemudian, setelah insiden kapal selam Cina pada November 2004, di bulan Februari 2005 Jepang mendeklarasikan kepemilikan formal terhadap Senkaku. Cina memberi peringatan keras ke Jepang untuk menganulir deklarasi tersebut, jika tidak “Jepang harus bertanggungjawab terhadap segala akibatnya.”

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸⁵ *The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html> pada 13 Okt 2011 pk. 23.40 WIB. *Recent Developments in Japan-China Relations -Basic Facts on the Senkaku Islands and the Recent Incident -*, Oktober 2010, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/pdfs/facts1010.pdf> pada 13 Okt 2011 pk. 23.41 WIB.



Peta 2.4. Pulau Okinotorishima

Kepulauan Okinotorishima terletak di kumpulan terumbu karang sebelah tenggara Iwo Jima, kurang lebih sejauh 1.080 mil dari Tokyo. Jepang melakukan klaim atas Okinotorishima berdasarkan aneksasi yang dilakukan pada 1931 setelah yakin bahwa Okinotorishima benar-benar bersih dari penguasaan negari lain. Jepang juga berusaha mencegah erosi yang terjadi dengan perkuatan beton, pembuatan suar (*beacon*), serta pendirian bangunan penelitian di pulau tersebut.⁸⁶ Upaya ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Pemerintah Jepang bahwa sebagai pulau, Okinotorishima memiliki garis batas ZEE sejauh 200 mil, sehingga Jepang juga memiliki kontrol ekonomi terhadap wilayah perairan dalam batas tersebut. Cina mempermasalahkan hal ini, dengan argumen bahwa Okinotorishima hanya merupakan sekumpulan batu karang tanpa adanya kehidupan manusia, sehingga berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), pulau tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan ZEE. Diperkirakan bahwa posisi Okinotorishima mendukung untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas perairan dari dan menuju Taiwan, sehingga berakibat pada debat antara Jepang dan Cina.

⁸⁶ Yukie Yoshikawa, *The US-Japan-China Mistrust Spiral and Okinotorishima*, diakses dari <http://www.japanfocus.org/-yukie-yoshikawa/2541> pada 13 Okt 2011 pk. 23.43 WIB.



Peta 2.5. Kepulauan Takeshima

Kepulauan Takeshima/Dokdo sejauh ini berada dalam penguasaan Korea Selatan. Pulau ini terdiri atas dua pulau kecil setinggi 500 kaki di atas permukaan laut yang terletak di antara Laut Jepang dan Pulau Ulleung yang ditinggali penduduk Korea Selatan. Baik Jepang maupun Korea Selatan memiliki klaim historis yang didasarkan pada peta, catatan kunjungan, serta dokumen resmi lain yang tumpang tindih. Pada masa pendudukan Amerika Serikat di Jepang, Takeshima juga tidak termasuk dalam wilayah yang kekuasaan Jepang. Dengan demikian maka Takeshima tidak menjadi wilayah yang dikembalikan Amerika Serikat pada Jepang di akhir pendudukannya pada 1952. Di bawah Presiden Korea Selatan Syngman Rhee yang anti-Jepang, pada 1953 terjadi insiden bersenjata yang terjadi di Dokdo yang mengakibatkan kematian dan penahanan beberapa nelayan Jepang. Pemerintah Korea Selatan telah memperkuat posisinya di kepulauan tersebut, termasuk dengan menempatkan aparat kepolisian, mendirikan bangunan serta landasan helikopter, hingga melaksanakan penghijauan untuk memperkuat posisi Dokdo sesuai definisi pulau dalam UNCLOS. Sedangkan kapal turis dari Pulau Ulleung tidak pernah sampai mendarat di Takeshima, tetapi hanya berlayar di sekeliling pulau tersebut.

Isu mengenai Takeshima/Dokdo sesekali muncul ke permukaan. Contohnya pada 2005, ketika sidang dewan di Prefektur Shimane (yang mengklaim yurisdiksi atas Takeshima) menyatakan tanggal 22 Februari sebagai "*Takeshima Day*". Insiden lain terjadi pada 2006 ketika dua kapal survei Jepang berlayar dekat dengan Takeshima, sehingga mengundang respon Korea Selatan dengan mengirim beberapa

kapal patroli dan protes diplomatik. Isu ini kian memuncak dengan adanya laporan bahwa dasar perairan di sekitar Takeshima memiliki simpanan sumber daya alam. Hanya saja, Pemerintah Korea Selatan tidak mau membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.⁸⁷



Peta 2.6. Hoppou Ryoudo

Hoppou Ryoudo (*Northern Territories*), atau Kepulauan Kuril secara umum, diklaim oleh Jepang maupun Rusia. Jepang mendefinisikan *Northern Territories* terdiri dari dua pulau besar, yaitu Kunashiri dan Etorofu (Kunashir dan Iturup dalam bahasa Rusia), beserta Shikotan dan kepulauan kecil Habomai. Di akhir Perang Dunia II, Rusia mengambil alih seluruh Kepulauan Kuril sebagai rampasan perang, setelah sebelumnya kembali menguasai Sakhalin sebelah selatan yang menjadi milik Jepang setelah penandatanganan *Treaty of Portsmouth 1905*. Rusia juga melakukan deportasi atas penduduk Jepang dan bangsa Ainu yang tinggal di kedua wilayah yang dirampas. Tindakan Rusia tersebut dikonfirmasi oleh arahan SCAP bulan Januari 1946. Jepang kemudian membantahnya dengan berpegang pada klaim historis Tokugawa, selain kekuasaan Jepang atas Kuril (Kunashir, Iturup, Shikotan, dan Habomai) yang tercantum pada *San Francisco Peace Treaty*, sedangkan Soviet maupun Rusia tidak menandatangani perjanjian tersebut. Sementara Rusia mendasarkan klaim atas kekalahan Jepang pada 1945 dan hasil Konferensi Yalta 1945, dimana Jepang tidak menandatangani hasil Konferensi Yalta karena tidak menyetujui hasil konferensi tersebut. Pada masa Perang Dingin, Rusia memiliki kekuatan udara dan kapal selam yang dipangkalan di Kuril dalam jumlah

⁸⁷ Isu ini terutama dibahas dalam pamflet dari Kementerian Luar Negeri Jepang yang berjudul “*10 Issues of Takeshima*”, diakses dari http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/pamphlet_e.pdf pada 3 Januari 2012 pk 20.19 WIB.

substansial; kebanyakan dari fasilitas militer ini ditinggalkan begitu saja pada keruntuhan Uni Soviet. Pasca Perang Dingin tercatat hanya terdapat garnisun kecil Rusia di pulau utama yang bertanggungjawab terhadap keamanan tiga komunitas Rusia di Kuril (masing-masing terletak di Shikotan, Paramushiru, Kunashiri, dan Etorofu).

Klaim atas Kuril ini juga masih terkait dengan sumberdaya alam, terutama perikanan dan rumput laut. Contohnya, Etorofu yang merupakan tempat penangkapan ikan salmon dan pabrik pengalengan ikan maupun kepiting milik Jepang di Shikotan sebelum 1945. Selain itu, kepulauan ini juga ideal untuk dijadikan objek wisata. Upaya Jepang untuk memperoleh kembali kepulauan ini berhadapan dengan tembok bernama Rusia. Pada masa Soviet, pemerintah Rusia masih memberikan indikasi kemungkinan pengembalian Shikotan dan Habomai, asalkan Jepang mau mengembalikan Etorofu dan Kunashiri. Namun dengan keruntuhan Soviet dan pemerintahan Putin yang nasionalis, rencana pengembalian tersebut masih menjadi pertanyaan.⁸⁸

2.2 Kompleksitas pertahanan Jepang pasca Perang Dingin

2.2.1 Doktrin dan Struktur Organisasi

Pembangunan militer Jepang memiliki kompleksitas terkait dengan struktur dan sejarahnya. Dari segi kemampuan teknologi, contoh inovasi militer Jepang dapat dilihat mulai dari program pengembangan infanteri masa depan (integrasi kemampuan C4I, peningkatan letalitas dan survivabilitas)⁸⁹, kendaraan tempur tak berawak, pesawat tempur, dan kapal tempur berkemampuan *stealth*⁹⁰ hingga program luar angkasa untuk pertahanan.⁹¹ Jepang juga tercatat telah sukses

⁸⁸ Isu territorial ini dibahas dalam pamflet lain dari Kementerian Luar Negeri Jepang, “*Japan’s Northern Territories: For a Relationship of Genuine Trust*”, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/pamphlet.pdf> pada 3 Januari 2012 pk 20.15 WIB.

⁸⁹ *Summary of Future Soldiers Program*, (Sept 2009), diakses dari <http://dmilt.com/docs/Future%20Soldier.pdf>, pada 13 Oktober 2011 pk. 22.46 WIB.

⁹⁰ Richard D. Fisher, Jr., *Japanese Military Technology Advances*, diakses dari http://www.strategycenter.net/research/pubID.173/pub_detail.asp, pada 13 Okt 2011 pk. 21.34 WIB.

⁹¹ Kate Wilkinson, *Japan’s Evolving Space Program: An Interview with Saadia Pekkanen*, diakses dari http://www.nbr.org/downloads/pdfs/NBR/NARP_Pekkanen_interview_09092011.pdf, pada 13 Okt 2011 pk. 21.34 WIB.

melakukan ujicoba sistem pertahanan terhadap rudal balistik pada Maret 2007.⁹² Namun kemampuan teknologi tersebut menemui tantangan sehubungan dengan kondisi regional maupun struktur internal. Jepang dikelilingi oleh wilayah yang tidak memiliki struktur keamanan kolektif, institusi multilateral, ataupun aliansi yang benar-benar konkret di luar aliansi bilateral dengan Amerika Serikat. Ditambah dengan peran defensif yang ambigu serta politik domestik yang konservatif, maka terciptalah kompleksitas yang menjadi tantangan bagi transformasi militer.

Fungsi SDF sebagai mutlak hanya untuk bertahan memiliki beberapa permasalahan. Pasal 9 Konstitusi Jepang dan masyarakat yang pasifis telah melemahkan otoritas dan keefektifan operasional SDF dalam melaksanakan operasi militer. Telah disebutkan sebelumnya, pada pasal 9 konstitusi Jepang tertulis bahwa perang bukanlah tujuan Jepang sehingga angkatan bersenjata tidak akan dipertahankan. Memang Pemerintah Jepang menerjemahkan pasal tersebut sebagai “*Jepang selaku negara berdaulat masih memiliki hak tidak terbantahkan untuk melakukan beladiri apabila diserang.*”⁹³ Hanya saja, implikasi penerjemahan pasal tersebut—sebagaimana dapat dilihat dalam *Basic Policy of National Defense 1957* yang menjadi dasar bagi kebijakan keamanan Jepang—menegaskan bahwa fokus Jepang terletak pada pembangunan domestik yang difungsikan sebagai jaminan bagi keamanan internal. Upaya bertahan dari ancaman eksternal akan dilakukan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Kebijakan keamanan Jepang juga dirumuskan secara eksklusif hanya untuk bertahan; Jepang tidak akan menjadi suatu kekuatan militer yang mengancam negara lain, serta tidak menjadi pemilik, pembuat, maupun memasukkan senjata nuklir ke dalam negeri.⁹⁴ Bahkan, dalam *1954 Ban on Overseas Dispatch Law* tercantum bahwa Jepang tidak boleh mengirimkan kekuatan militer ke luar negeri. Kebijakan ini masih diperkuat dengan pembatasan

⁹² Program *Ballistic Missile Defense* (BMD) tersebut dimulai Jepang pada 2004 dan diharapkan mencapai kapabilitas penuh pada 2011/2012. Pengembangan BMD ini dilakukan bersama dengan Amerika Serikat, meliputi sistem senjata, wahana peluncur, sensor deteksi, dan kontrol persenjataan. Lihat Ministry of Defense, Japan, *Overview of Japan's Defense Policy* hlm. 14-16, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/english.pdf, pada 18 Nov 2010 pk. 22.48 WIB.

⁹³ “...beladiri memanfaatkan kekuatan minimum untuk bertahan”, dalam *Fundamental Concepts of National Defense*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html, pada 18 Nov 2010 pk. 22.48 WIB.

⁹⁴ *Op cit.*, hlm. 3

anggaran pertahanan (*1976 One Percent of GNP Ceiling on Military Expenditures*), pelarangan wajib militer, larangan ekspor persenjataan (*1967 Three Principles on Arms Exports*) dan keputusan kabinet 1976 yang meluaskan larangan ekspor ke seluruh negara), pelarangan pengeluaran penyapu ranjau (kebijakan administrasi Perdana Menteri Sato pada 1972), serta pemanfaatan luar angkasa dengan damai (Resolusi Diet 1967).

Dari segi organisasi, keamanan di Jepang terbagi menjadi tanggungjawab dua institusi, yaitu SDF dan JDA. SDF merupakan organisasi bersenjata yang melakukan aktivitas pertahanan negara dan semacamnya. Organisasi tersebut berada di bawah JDA, yaitu organisasi administratif sipil yang bertanggungjawab terhadap operasional serta manajemen SDF. JDA, yang dibentuk berdasarkan *Defense Agency Law 1954*, merupakan bagian dari kantor perdana menteri, dengan tujuan memastikan kontrol militer tetap ada di tangan sipil.⁹⁵ Sebagai akibatnya tiap anggota SDF secara teknis tetap merupakan orang sipil; seragam kesatuan berfungsi sebagai lambang dari pelayan sipil istimewa (bawahan dari JDA). Tidak ada hukum rahasia militer, dan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh personel militer akan ditindak melalui pengadilan sipil tanpa dibedakan. Dampak lain dari juga dapat dilihat dalam perumusan kebijakan keamanan yang kaku di sektor militer yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat empat badan yang bertugas merumuskan kebijakan keamanan nasional Jepang, yaitu *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA), *Ministry of Finance* (MOF), *Ministry of International Trade and Industry* (MITI), dan JDA. MOFA berperan dalam keseluruhan kebijakan keamanan Tokyo yang berpusat pada kestabilan hubungan dengan Washington, sedangkan MOF berperan sebagai kontrol sipil terbesar yang mengerem pertumbuhan SDF dan industri pertahanan. MITI sendiri berperan sebagai pendorong penggunaan teknologi tinggi sebagai faktor utama pendukung ekonomi Jepang.⁹⁶

Dalam konteks ekonomi pertahanan, sebenarnya hubungan antara pemerintah dan industri Jepang amat erat, apalagi perasaan rawan terhadap bahan

⁹⁵ JDA memiliki kedudukan birokratis yang lebih rendah dari kementerian penuh. Dari 10 birokrat yang menjadi anggota JDA, 4 di antaranya merupakan anggota kementerian lain. *Japan Ministry of Defense*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jda.htm>, pada 4 Des 2010 pk. 19.21 WIB.

⁹⁶ Michael W. Chinworth, *Inside Japan's Defense: Technology, Economics, & Strategy*, (Washington D.C.: Brassey's, 1992), hlm. 12-20.

baku mendorong komitmen kedua pihak pada isu keamanan ekonomi dan otonomi teknologi.⁹⁷ Industri militer dan strategis Jepang didasarkan pada teknonasionalisme yaitu gabungan antara industri, teknologi, dan kebijakan keamanan nasional.⁹⁸ Gabungan ini telah ada sejak masa sebelum perang, ketika Jepang masih menggunakan cara-cara militer untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Proses ini bersandar pada substitusi impor melalui produksi dalam negeri, difusi teknologi (pembagian dan pemanfaatan teknologi secara vertikal dalam sektor industri maupun horizontal dalam sektor komersial lainnya), serta komitmen yang diarahkan oleh negara untuk berkembang dan berbagi informasi. Apalagi konsumen militer dan sipil merupakan pemegang peran utama dalam ekonomi tunggal Jepang. Di era 1950 hingga 1970-an, Jepang memperoleh banyak alih teknologi dari Amerika Serikat dan mengembangkannya menjadi keuntungan komersil.⁹⁹ Contoh, NEC yang membuat komputer bagi sipil maupun sistem pemandu bagi rudal.¹⁰⁰ Jepang juga melakukan pembelian *hardware* dari Amerika Serikat dalam jumlah besar sehingga memungkinkan interoperabilitas dalam tingkatan tertentu antara kedua negara.

Permasalahannya, lisensi peralatan militer dari Amerika Serikat menjadi kian rumit ketika Jepang berhasil mengembangkan produksi pertahanan otonom yang lebih maju. *Arms Manufacturing Law 1954* memberikan kuasa bagi MITI untuk mengontrol partisipasi di industri pertahanan, sehingga memunculkan sistem dimana JDA menyebarkan atau menunjuk kontraktor-kontraktor tertentu untuk memenuhi kontrak jangka panjang. Tindakan tersebut menimbulkan hubungan erat antara pemerintah dan industri pertahanan, selain hubungan informal antara

⁹⁷ Tindakan ini dapat dilihat sejak masa awal Kekaisaran Meiji, ketika Jepang mulai membangun militernya dengan memegang slogan “*rich nation, strong army*”. Berdasarkan pengamatan pada negara-negara imperialis, maka Jepang memiliki keyakinan bahwa suatu negara yang kaya harus didukung oleh militer yang kuat. demi memenangkan kompetisi untuk memperoleh sumber daya alam dan wilayah yang lebih besar, apalagi wilayah asli Jepang terbilang miskin sumber daya alam.

⁹⁸ *Kokusanka*, atau industri pertahanan dalam negeri yang mandiri, melibatkan sinergi antara sipil dan militer dan teknologi *dual-use*. Pembahasan mengenai industri pertahanan Jepang akan didasarkan pada Declan Hayes, *Japan, The Toothless Tiger*, (Boston: Tuttle Publishing, 2001), hlm. 123-144 dan Michael W. Chinworth, *Inside Japan's Defense: Technology, Economics, & Strategy*, (Washington D.C.: Brassey's, 1992) .

⁹⁹ Declan Hayes, hlm. 124.

¹⁰⁰ Jane's Sentinel Security Assesment, *Defence Production R & D Japan*, (Jane's Information Group, 29 Maret 2012), hlm. 2.

perusahaan-perusahaan dalam suatu sektor industri.¹⁰¹ Secara historis ongkos produksi dalam negeri Jepang untuk suatu sistem senjata rata-rata dua hingga tiga kali lebih mahal dibandingkan impor sistem senjata dengan kapabilitas yang sama.¹⁰² Jepang cenderung menetapkan kebutuhan misi berdasarkan pertimbangan politik dan karakter sistem pertahanannya, selain pembatasan teknologi dan ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan kompetisi untuk memenangkan kontrak dan mempersulit interoperabilitas domestik maupun internasional. Proyek pertahanan yang berbau politis tersebut, selain kompetisi dalam industri pertahanan, telah membuat tiap cabang SDF melakukan pembelian alutsista yang berlapis. Apalagi Jepang mengejar pembelian sistem senjata melalui pemilihan produk domestik untuk menunjang ketahanan logistik (dari segi biaya, ketersediaan suku cadang, dan waktu pemeliharaan) dan penguasaan teknologi, bukan *combat efficiency* yang menjadi keunggulan produk luar negeri.¹⁰³ Sebagai akibatnya, industri pertahanan Jepang belum bisa dikatakan sebagai *military industrial complex* yang kuat dan mampu bergerak secara otonom (bahkan tidak signifikan dalam standar Amerika Serikat). Indikator-indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:

Industri pertahanan tidak memiliki kapasitas produksi yang besar. Hasil produksi industri pertahanan Jepang hanya mencapai kurang dari 0,6% dari total jumlah hasil industri keseluruhan, terkait kecilnya jumlah pembelian dan banyaknya perusahaan yang terlibat dalam memproduksi satu unit alutsista. Kapasitas ini dicontohkan dalam pembuatan *destroyer* kelas 4.400 ton yang melibatkan 2.500 perusahaan (60% merupakan perusahaan kecil).¹⁰⁴ Atau, kasus historis pada Perang

¹⁰¹ Mayor Lynn H. Winward, *Bigger Shield: Alliance, Politics, and Military Change in Japan*, (Monterey: Naval Postgraduate School, Maret 2006), diakses dari <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA445333>, pada 19 Mei 2011 pk. 23.19 WIB, hlm. 20. Winward mengutip pernyataan ini dari Norman D. Levin, Mark Lorell and Arthur J. Alexander, *The Wary Warriors: Future Directions in Japanese Security Policies* (Santa Monica, CA: RAND, 1993), hlm. 78.

¹⁰² Kesimpulan diambil berdasarkan mempertimbangkan harga per unit dari alutsista produksi mandiri Jepang dan produksi asing. Misal, harga per unit rudal AAM-3 mencapai 267.000 US\$ dibandingkan dengan harga per unit rudal AIM-9 Sidewinder produksi Amerika Serikat sebesar 85.000 US\$. Atau penempur F-2 dengan harga per unit sebesar 110 juta US\$ dibandingkan dengan F-16 *Fighting Falcon* produksi terakhir yang harga per unitnya berkisar 30-50 juta US\$.

¹⁰³ Norio Iwata, "Procurement Policy and Defense Industry in Japan", dalam *The DISAM Journal*, Summer 1999, hlm. 90-93, diakses dari http://www.disam.dsca.mil/pubs/v.21_4/iwata.pdf pada 9 Maret 2011 pk. 23.19 WIB

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 92.

Dunia II, dimana ketahanan industri Jepang dalam jangka panjang tidak mampu menandingi industri pertahanan Sekutu.

Pendanaan *research and development* (R&D) pertahanan yang rendah. Nilai R&D Jepang, pasca Perang Dingin sekalipun dengan kenaikan anggaran, terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara sekitar maupun rekanan aliansinya. Contohnya, Amerika Serikat membelanjakan lebih dari lima triliun yen dalam R&D pertahanan, kontras dengan Jepang yang membelanjakan kurang dari 100 miliar yen untuk tujuan yang sama (5% di Jepang dibandingkan 60% di Amerika Serikat yang diperhitungkan sebagai persentase keseluruhan R&D pemerintah dalam negeri).¹⁰⁵ Di awal 1970, menyikapi biaya pertahanan yang meningkat dan pemersenjataan kembali yang terkesan tidak ada akhirnya, Diet menyatakan bahwa proses tersebut telah selesai dan biaya pertahanan hanya akan dialokasikan untuk memelihara kekuatan pertahanan yang ada.¹⁰⁶ Hal ini mendasari pemberlakuan *1976 One Percent of GNP Ceiling on Military Expenditures*. Padahal, pendanaan R&D pada dasarnya merupakan kelangsungan hidup dari sebuah industri, terkait pengembangan dan prospek produksi barang yang harus terus memenuhi tuntutan zaman.

Kecilnya pesanan dari dalam negeri. Pembatasan jumlah aset militer Jepang dalam konsep *Basic Defense Forces* menyebabkan produksi peralatan militer tidak bisa dilakukan sebagaimana negara lain lakukan. Contoh, pabrikan Shenyang di Cina yang menerima pesanan langsung sebanyak 200 unit pesawat tempur J-11 pada 1996.¹⁰⁷ Ataupun contoh lain berupa pesanan awal F-16 pada 1975 sebanyak 650 unit dari USAF, ditambah 384 unit untuk Belgia, Belanda, Denmark, dan Norwegia. Total produksi F-16 bagi USAF dan angkatan udara dunia telah mencapai 4.000 unit dalam kurun waktu Agustus 1975 hingga April 2000.¹⁰⁸

Pembatasan ekspor secara legislatif. *1967 Three Principles on Arms Exports* menekankan bahwa peralatan dan teknologi militer yang dikembangkan Jepang

¹⁰⁵ Winward, dikutip dari Richard J. Samuels, *"Rich Nation, Strong Army": National Security and the Technological Transformation of Japan*, hlm. 321.

¹⁰⁶ *Ibid*, dikutip dari Michael J. Green and Patrick M. Cronin, eds., *The U.S.-Japan Alliance: Past, Present, and Future* (New York: Council on Foreign Relations Press, 1999), hlm. 77.

¹⁰⁷ *Jian-11 Multirole Fighter Aircraft*, diakses dari <http://www.sinodefence.com/airforce/fighter/j11.asp> pada 20 Mei 2011 pk. 23.21 WIB.

¹⁰⁸ *F-16 Events from 1975*, diakses dari http://www.f-16.net/timeline_1975.html pada 20 Mei 2011 pk. 23.23 WIB

tidak boleh diekspor kepada negara dengan tiga kriteria berikut: 1.) anggota blok komunis, 2.) berada di bawah embargo yang ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, dan 3.) negara yang sedang terlibat ataupun akan terlibat dalam konflik.¹⁰⁹ Namun pada Februari 1967, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa terjadi perubahan terkait posisi Jepang sebagai negara yang tidak akan melakukan peperangan, maka ekspor militer tidak berlaku bagi seluruh dunia. Jepang juga akan sangat mengontrol investasi langsung dalam pengembangan persenjataan di luar negeri maupun partisipasi dalam pembangunan fasilitas militer di luar negeri. Terlebih lagi, ekspor teknologi yang berhubungan langsung dengan desain, produksi, dan fungsi persenjataan juga diklasifikasikan sama dengan ekspor senjata itu sendiri. Poin-poin tersebut berlaku bagi semua negara terkecuali Amerika Serikat, sebab pembatasan ekspor militer dinilai akan mengganggu keefektifan Aliansi Keamanan. Sebagai akibatnya, negara yang memiliki keuntungan dari pencapaian teknologi *dual-use* maupun teknologi mutakhir Jepang lainnya hanyalah negara sekutu dalam Aliansi Keamanan, yaitu Amerika Serikat.¹¹⁰ Sedangkan Jepang sendiri tidak mungkin memperoleh keuntungan tambahan dari ekspor produksi alutsista maupun peralatan militer lainnya. Peraturan ini baru dikendurkan pada akhir Desember 2011, dengan perwujudan nyata pada Maret 2012 ketika Jepang menawarkan kapal patroli ke Penjaga Pantai Filipina sebagai bentuk dari bantuan pengembangan luar negeri.¹¹¹

Dampaknya adalah ketidakmampuan untuk mengoperasikan, mendesain, mengembangkan, dan memproduksi sistem militer yang *cost-effective* namun mampu menemui standar kompetisi pasar persenjataan dunia.¹¹² Contohnya terjadi pada program FSX yang kemudian melahirkan pesawat tempur F-2.¹¹³

¹⁰⁹ *Japan's Policies on the Control of Arms Exports*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/index.html> pada 21 Mei 2011 pk. 19.51 WIB

¹¹⁰ Contoh dari R&D bersama antara Jepang-Amerika Serikat dapat dilihat dalam buku putih *Defense of Japan 2008*, hlm. 259, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2008/32Part3_Chapter2_Sec3.pdf pada 21 Mei 2011 pk. 20.00 WIB.

¹¹¹ Jane's Sentinel Security Assessment, *Defence Production R & D Japan*, *op cit.*, hlm. 4-5.

¹¹² Kazuhisa Uryu, "Government Procurement as Industrial Policy: In Support of Japan's Defense Aircraft, Start-up and Venture Companies, and Information", *USJP Occasional Paper* 06-14, diakses dari <http://www.wefia.harvard.edu/us-japan/research/pdf/06-14.uryu.pdf> pada 21 Mei 2011 pk. 20.15 WIB, hlm. 4-5.

¹¹³ *F-2 Attack Fighter, Japan*, diakses dari <http://www.airforce-technology.com/projects/f2/> pada 20 Mei 2011 pk. 23.24 WIB

Pengembangan pesawat tempur ini dilakukan Jepang pada 1987 sebagai upaya modernisasi kekuatan ASDF. FSX ditargetkan untuk beroperasi sebagai pendamping bagi F-15, namun dengan ongkos pengembangan dan operasional yang lebih murah, selain harus lebih modern dari pesawat tempur F-1 yang digantikannya. Sebagai tujuan tambahan dari program ini, pemerintah Jepang berusaha memperoleh teknologi penerbangan dan manufaktur yang lebih mutakhir. Pemerintah Jepang kemudian menunjuk Mitsubishi Heavy Industries, yang kemudian menggandeng Lockheed Martin sebagai rekanan untuk mengembangkan pesawat tersebut dengan memanfaatkan F-16 sebagai basis. Namun program ini menemui cukup banyak sandungan dalam memenuhi ambisi mandiri Jepang. Kongres Amerika Serikat membawa bermacam isu dalam kerjasama ini, termasuk keengganan transfer teknologi, jaminan pembagian kerja bagi industri dirgantara Amerika yang menjadi rekan kerja, kemungkinan Jepang mengembangkan dan mengekspor pesawat tempur yang lebih unggul dari milik Amerika Serikat, hingga penggunaan teknologi hasil transfer oleh Jepang untuk mengembangkan industri dirgantara tingkat dunia. Kondisi ini berdampak pada Lockheed yang setengah hati dalam melakukan transfer teknologi terkait sistem milik F-16. Bahkan isu tersebut juga menyebabkan negosiasi sempat terhenti pada Agustus 1989 selain penghentian transfer data teknis F-16 untuk sementara oleh Angkatan Udara Amerika Serikat.¹¹⁴ Sebagai akibatnya, Jepang harus mengembangkan lebih lanjut sistem kontrol *fly-by-wire* yang pernah diujicoba pada proyek CCV 1983-1986.¹¹⁵ Jepang juga harus mengembangkan avionik secara mandiri yang turut meningkatkan ongkos produksi F-2. Upaya Jepang memanfaatkan teknologi baru dalam pembuatan sayap komposit F-2 untuk menekan ongkos produksi dengan hasil akhir yang lebih kuat juga menemui masalah: pada penerbangan perdana pada 1995, prototipe F-2 ditemukan mengalami kendala struktural sehingga harus melalui proses desain ulang dan penguatan.¹¹⁶ Penempur ini pun baru bisa memasuki dinas aktif pada 2001, namun

¹¹⁴F-2, diakses dari <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/f-2.htm> pada 20 Mei 2011 pk. 23.26 WIB

¹¹⁵F-2, diakses dari <http://airforceworld.com/fighter/eng/f2.htm> pada 20 Mei 2011 pk. 23.29 WIB

¹¹⁶ Avionik yang dikembangkan Jepang untuk F-2 meliputi radar tipe *active electronically-scanned array* (AESA), *electronic countermeasure*, sistem navigasi laser, komputer misi, serta lapisan *radar-absorbing material* (RAM). RAM berfungsi sebagai pelapis struktur yang mampu menyerap gelombang radar, dibanding kulit pesawat konvensional yang memantulkan gelombang radar kembali ke sumbernya.

pemerintah Jepang memangkas jumlah pesanan F-2 dari 131 unit menjadi hanya 94 unit pada 2004, sehingga harga per unitnya pun melambung hingga mencapai 110 juta US\$ (kurang lebih setara empat unit F-16, atau satu hingga dua unit pesawat tempur generasi 4.5 buatan Eropa).

Situasi tersebut, ditambah *joint planning* yang hampir tidak pernah dilakukan, hubungan antarcabang SDF yang terbatas, serta kurangnya integrasi operasional, berdampak pada karakter militer Jepang yang tidak seimbang.¹¹⁷ Dibandingkan dengan negara industri lainnya, walaupun didukung sistem senjata teknologi tinggi yang jumlahnya kian bertambah, SDF tidak dapat mencakup seluruh spektrum misi modern terutama proyeksi kekuatan dan operasi ofensif. MSDF sekalipun, yang disebut paling kuat dalam kesiapan operasional karena interaksi dekatnya dengan *U.S. Navy* pasca Perang Dunia II, tetap masih tergantung pada operasi gabungan dan kekuatan *7th Fleet* sebagai pendukung. Perlengkapan modern MSDF juga tidak diiringi dengan dukungan udara seperti kapal induk, selain kemampuan suplai dan transpor amfibi yang terbatas. Sementara itu GSDF dinilai sebagai cabang SDF yang paling lemah dari segi perlengkapan dan kesiapan operasional. Pada mulanya, GSDF memiliki fokus utama pada jumlah personel karena ditargetkan untuk menghadapi kemungkinan invasi Soviet. Tujuan ini berakibat pada GSDF tidak memiliki wilayah latihan dan fasilitas yang mencukupi posturnya sendiri, selain kemampuan penggelaran taktis maupun strategis. Sedangkan ASDF memang memiliki alutsista paling modern serta kapabilitas tinggi sejak era 1970-1980-an dengan adanya perubahan. Namun ASDF terlambat dalam memiliki kapabilitas *air refueling* selain hampir tidak memiliki kapabilitas serang ke wilayah musuh yang signifikan. Ditambah dengan terbatasnya jumlah transpor

Teknologi *co-cured*, dimana struktur sayap dan kulit pesawat dibentuk secara bersamaan, berbeda dengan metode sebelumnya dimana struktur dibuat terlebih dahulu dan baru setelah itu kulit pesawat dikencangkan di atasnya. Jepang berusaha menerapkan teknologi ini berdasarkan perhitungan bahwa sayap yang dibuat dengan metode *co-cured* akan lebih ringan, selain mampu menahan beban lebih kuat dan tekanan gravitasi ketika bermanuver. Lihat GM Karnath, B. Ramanaiah, Kundan K. Venna, dan M Subba Rao, *Static Environmental Testing of a Cocured Aircraft Wing Test Box*, Advanced Composites Division, National Aerospace Laboratories, Bangalore.

¹¹⁷ Michael W. Chinworth, *op cit.*, hlm. 10-11.

udara jarak jauh, ketahanan ASDF dalam situasi perang pun menjadi dipertanyakan.¹¹⁸

2.2.2 Faktor Okinawa

Kerjasama keamanan dengan memangkalkan kekuatan Amerika Serikat di Jepang bukannya tanpa masalah. Kekuatan asing tersebut kerap bersinggungan dengan kehidupan penduduk setempat, apalagi terjadi di Okinawa yang tidak memiliki korelasi baik dengan pendudukan militer. Analisis Okinawa menekankan bahwa terdapat tiga episode sejarah konflik dan pendudukan yang pada akhirnya turut memunculkan sentimen terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa.¹¹⁹ Ketiga sejarah tersebut, masing-masing adalah aneksasi Jepang atas Kerajaan Ryukyu, peristiwa berdarah pada Perang Dunia II, serta pendudukan militer Amerika Serikat hingga 1972.

Kerajaan Ryukyu pada awalnya merupakan kerajaan kepulauan yang mandiri. Ekonomi Ryukyu ditunjang oleh perdagangan internasional dan penduduknya dikenal ramah terhadap pendatang asing. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan Cina dan Kelompok Satsuma di Jepang daratan, namun tidak memiliki militer yang kuat. Pada tahun 1609, Satsuma memutuskan untuk menyerang Ryukyu hingga berhasil menaklukkannya. Hanya saja oleh Satsuma, Ryukyu diberikan kemerdekaan tituler serta diwajibkan membayar upeti kepada Satsuma dan harus mendapatkan persetujuan Satsuma apabila Ryukyu ingin membuat pengaturan dagang baru dengan Cina. Kemudian pada masa restorasi Meiji 1879, Ryukyu dianeksasi secara paksa oleh Tokyo dengan polisi dari Jepang daratan yang bertindak sebagai otoritas di wilayah

¹¹⁸ Pesawat jet angkut Kawasaki C-1 milik Jepang hanya sanggup mencapai jarak 1.000km, sedangkan pesawat angkut C-130 *Hercules*, walaupun memiliki kemampuan terbang sejauh 4.000km, daya muat yang lebih banyak (apalagi dengan penambahan kapabilitas *air refueling* pada 2009), dan lebih efisien, namun memiliki kecepatan yang lebih rendah sehubungan dengan penggunaan mesin *turboprop*. Jumlah C-130 dalam inventaris Jepang juga lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah C-1.

¹¹⁹ Uraian kasus Okinawa didasarkan pada tiga tulisan berikut:

Alexander Cooley & Kimberley Marten, 2006, "*Base Motives. The Political Economy of Okinawa's Antimilitarism*", dalam *Armed Forces & Society*, Vol. 32 No. 4, Juli 2006, hlm. 566-583

Okinawa: Effects of Long-term US Military Presence, diakses dari

<http://www.genuinesecurity.org/partners/report/Okinawa.pdf> pada 14 Juli 2011 pk. 00.46 WIB.

Japanese Communist Party, *Problem of U.S Military Bases in Okinawa*, Februari 2000, diakses dari <http://www.jcp.or.jp/tokusyu/okinawa/Okinawa.pdf> pada 29 Maret 2011 pk 15.46 WIB.

Ryukyu. Walaupun Ryukyu berusaha melakukan negosiasi untuk mempertahankan statusnya sebagai kerajaan mandiri, namun Tokyo tetap memaksa Ryukyu tunduk di bawah kekuasaannya, untuk selanjutnya dijadikan prefektur Okinawa. Peristiwa aneksasi tersebut mengakibatkan masyarakat Okinawa memiliki kecurigaan pada tiap kekuatan militer asing yang besar.

Kemudian, salah satu sumber paling signifikan dari sentimen antimiliter Okinawa di zaman modern adalah kenangan dan sejarah lisan mengenai Pertempuran Okinawa pada 1945. Perang tersebut—yang memakan korban tentara Amerika Serikat paling banyak dalam Perang Pasifik—menghancurkan pulau Ryukyu dan menelan korban sipil antara 150.000 hingga 200.000 jiwa, kira-kira sepertiga dari total penduduk Okinawa. Hingga hari ini, masyarakat Okinawa menuduh militer Jepang yang sengaja menjadikan pulau mereka sebagai tumbal untuk menghambat gerak maju pasukan Amerika Serikat tanpa memperkuat pertahanan yang ada. Selain itu, Tentara Kekaisaran juga dituduh melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap penduduk Okinawa. Contohnya, perwira Jepang menginstruksikan penduduk Okinawa untuk bunuh diri daripada membiarkan tentara Amerika Serikat menangkap mereka. Terdapat sebuah tugu peringatan untuk mengenang 210 siswi sekolah dan guru mereka yang meledakkan diri dengan granat yang diberikan oleh militer Jepang, ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah dikepung oleh tentara Amerika Serikat. Kemudian, saat Tentara Kekaisaran ditarik mundur ke Jepang daratan, mereka dilaporkan telah menembak mati ribuan penduduk Okinawa tanpa diadili dengan alasan menjadi mata-mata Amerika Serikat. Masyarakat Okinawa menuntut Kementerian Pendidikan Jepang untuk mengakui kejadian ini secara resmi melalui revisi buku pelajaran sejarah.¹²⁰ Pada Juni 1995, Okinawa mengenang 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II dengan membuat Monumen Perdamaian yang bertuliskan 240.000 lebih nama korban yang jatuh pada Pertempuran Okinawa.

Sumber ketiga dari sikap antimiliter Okinawa adalah pendudukan militer Amerika Serikat dari 1945 hingga 1972. Pasca Pertempuran Okinawa, perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Jepang daratan membuat

¹²⁰ Mark Selden dan Yoshiko Nozaki, *Japanese Textbook Controversies, Nationalism, and Historical Memory: Intra- and Inter-national Conflicts*, diakses dari <http://japanfocus.org/-Yoshiko-Nozaki/3173> pada 23 Februari 2012 pk. 00.00 WIB.

militer Amerika Serikat di Okinawa menggiring penduduk setempat ke dalam kamp tahanan yang penuh sesak untuk mencegah mereka membantu tentara Jepang. Setelah penyerahan Jepang, dengan alasan mencegah militerisme Jepang bangkit kembali dan melindungi Jepang dari ancaman eksternal, Amerika Serikat mengambil 85 persen dari tanah di Okinawa untuk melakukan pembangunan pangkalan militer tanpa memperhatikan kebutuhan penduduk lokal. Pada awal 1950, pecahnya Perang Korea juga mengakibatkan Amerika Serikat terus mempertahankan penguasaan atas Okinawa sebagai pangkalan strategis terdepan untuk menghadapi komunisme. Baru pada 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa ke Jepang, namun pangkalan-pangkalan militernya tetap hadir dan beroperasi di pulau tersebut sebagai konsekuensi dari Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang. Sebagai akibatnya, masyarakat Okinawa merasa bahwa Tokyo memperlakukan mereka sebagai alat tukar untuk memperoleh kemerdekaan dari Amerika.

Walaupun keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Jepang, namun keberadaan pangkalan tersebut bukannya tanpa masalah. Sebagai pembanding, kasus penutupan dan pemindahan pangkalan militer Amerika di Jerman disebabkan oleh lima faktor.¹²¹ Pertama, pertimbangan terhadap sifat ancaman. Kedua, lokasi geografis dari instalasi tersebut (optimal untuk mendukung misi yang tengah dilakukan, jarak dengan ancaman, dan jarak dengan aset transportasi). Ketiga, jumlah dan tipe kekuatan yang dipangkalan serta dukungan logistik mereka. Keempat, kompatibilitas antara fasilitas yang ada dengan kemungkinan penugasan masa depan, usia bangunan dan infrastruktur, serta biaya pemeliharaan dan dukungan lokal. Terakhir, perjanjian dengan negara dimana pangkalan tersebut berada, termasuk perjanjian-perjanjian yang relevan dan pembatasan terhadap jumlah dan tipe senjata yang digelar di negara tersebut. Secara teoritis penutupan pangkalan asing di Jerman merupakan hal baik.¹²² Pertama, kehadiran fasilitas militer memang cukup signifikan untuk mengalirkan dana ke dalam ekonomi

¹²¹ Keith B. Cunningham & Andreas Klemmer, *Restructuring the United States Military Bases in Germany: Scope, Impacts, and Opportunities*, (Bonn: Bonn International Center for Conversion, Juni 1995),

¹²² *Ibid.*, hlm. 6.

Jerman, namun aliran dana tersebut kurang besar apabila dibandingkan dengan fasilitas yang seluruh tenaga kerjanya merupakan orang Jerman. Kedua, adanya kebutuhan yang tinggi akan tanah yang siap dikembangkan, sedangkan kebanyakan Komunitas Militer Angkatan Darat Amerika Serikat ditempatkan di dekat pusat-pusat kota Jerman. Namun pada praktiknya, penutupan ini membebani masyarakat yang tinggal di daerah yang kurang berkembang, seperti pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan, walaupun pengangguran yang ditimbulkan oleh penutupan pangkalan ini dampaknya hanya sementara; dalam waktu yang relatif singkat kebutuhan tenaga kerja di kota tersebut mampu menyerap kelompok pengangguran tersebut. Kebalikannya bagi masyarakat pedesaan, penutupan pangkalan militer justru berdampak pada hilangnya lapangan kerja yang paling besar dan menjanjikan. Walaupun pemerintah dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memberikan kompensasi, namun di lingkungan pedesaan lapangan kerja yang mampu menampung jumlah pengangguran tersebut amat sedikit, jika tidak ada sama sekali. Hal demikian juga dirasakan pemilik tanah yang digunakan untuk pangkalan militer tersebut, karena mereka kehilangan biaya sewa tanah yang menjadi sumber penghidupan. Belum lagi fasilitas militer yang akan diberdayakan kembali sebagai aset sipil juga tersendat pengembangannya karena sering di wilayah tetangga telah ada fasilitas serupa yang lebih lengkap ataupun telah lebih dahulu dikembangkan.

Sedikit berbeda dengan di Jerman, tuntutan relokasi pangkalan militer Amerika Serikat dari Okinawa diperburuk oleh beberapa faktor. Pertama, posisi fasilitas militer yang berdesakan dengan rekonstruksi kota yang hancur pasca perang. Dengan posisi demikian, penduduk Okinawa mendapat bahaya dari aktivitas yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat, misal kecelakaan peralatan militer serta polusi.¹²³ Pangkalan-pangkalan di Okinawa juga kebanyakan berada di tengah kota besar, sehingga turut menyebabkan seperti kemacetan dan menghambat pengembangan tata kota.¹²⁴ Contoh kendala kedekatan fasilitas militer ini adalah tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas di sekitar Pangkalan AU Kadena

¹²³ *Impact on the Lives of the Okinawan People (Incidents, Accidents and Environmental Issues)*, diakses dari <http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=14&id=586&page=1> pada 4 Februari 2011 pk. 23.17 WIB.

¹²⁴ *U.S. Military Issues in Okinawa*, diakses dari <http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/7005/pamphlet%28English%29.pdf>, pada 11 Februari 2011 pk. 22.14 WIB, hlm. 8-11.

dan Pangkalan Udara Marinir Futenma, selain jalur penerbangan yang melintasi fasilitas umum dan rumah penduduk. Kemudian, contoh kepadatan yang terjadi dapat dilihat pada kasus Pangkalan Kadena yang telah mengambil 83 persen dari luas total Kota Kadena, sehingga berakibat pada tempat tinggal penduduk setempat dan fasilitas umum yang memadati 17 persen wilayah sisanya. Itupun dengan selisih jarak hanya beberapa ratus meter dari landas pacu pangkalan. Hal yang sama juga terjadi dengan Kota Kin, Chatan, dan Desa Ginoza yang lebih dari 50 persen wilayahnya digunakan oleh Amerika Serikat sebagai pangkalan militer.¹²⁵ Ditambah dengan kenyataan bahwa tanah yang digunakan oleh Amerika Serikat merupakan tanah yang baik bagi ekonomi tradisional ataupun potensial sebagai wilayah industri lokal, sehingga berdampak pada Okinawa menjadi prefektur termiskin di Jepang.¹²⁶

Kedua, telah terjadi banyak tindak kriminal yang dilakukan personel Amerika Serikat. Sejak pengembalian Okinawa hingga 2003, tercatat sebanyak 5.269 kasus kejahatan dilakukan oleh personel militer dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan militer.¹²⁷ Kasus tersebut menambah tindak kriminal yang dilakukan personel Amerika Serikat selama berada di Jepang, terutama sebelum pengembalian. Hal ini berimbas pada kebanyakan penduduk Okinawa menentang kehadiran militer Amerika Serikat di pulau ini, bahkan meragukan kredibilitas Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang dalam menjamin keselamatan mereka.¹²⁸

Isu relokasi yang benar-benar kuat pertama kali muncul pada tahun 1995, seiring dengan protes yang disebabkan oleh tindak perkosaan yang dilakukan personel militer Amerika Serikat terhadap anak usia sekolah di Okinawa.¹²⁹ Situasi kian memanas ketika pejabat pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa mengomentari masalah tersebut dengan kata-kata yang menutupi tindakan personel militer Amerika Serikat yang bersangkutan.¹³⁰ Protes tersebut mendapat sorotan

¹²⁵ Japanese Communist Party, *op cit.*

¹²⁶ Cooley & Marten, *loc cit.*

¹²⁷ *Ibid*, 540 di antaranya merupakan kasus serius, selain 977 kasus penyerangan.

¹²⁸ Sheila, A. Smith, "Japan's Uneasy Citizens and the U.S.-Japan Alliance", *Asia Pacific Issues: Analysis from the East-West Center* No.54, September 2001, hlm. 3-4.

¹²⁹ *Op cit.*

¹³⁰ Robert D. Eldridge, "Okinawa and U.S.-Japan Relations in the 21st Century: Bilateral and Trilateral Approaches to a Sounder Okinawa Policy", *RIPS Occasional Paper* Maret 2002, hlm. 3-5, diakses dari

dari luar negeri, bahkan hingga menyebabkan Amerika Serikat menutup beberapa pangkalan militer di negara sekutunya seperti Filipina dan Panama. Persinggungan lain dapat ditemukan dalam kasus pencemaran limbah berat berupa merkuri dan bahan kimia *polychlorinated biphenyls* (PCB) yang ditemukan dalam situs komunikasi Onna pada 2002. Pemerintah Jepang menemukan bahwa situs ASDF tersebut yang dikembalikan oleh Amerika Serikat pada 1995, tercemar melebihi batas yang telah ditentukan dalam standar lingkungan yang ditetapkan. Sebagai dampaknya, pemerintah Jepang harus mengeluarkan dana dan tenaga ekstra untuk mengamankan lokasi tersebut, selain Gubernur Okinawa Keiichi Inamine mengeluarkan pernyataan kemarahan atas penemuan tersebut.¹³¹ Pada 13 Agustus 2004 terjadi peristiwa lain yang membuat hubungan Amerika Serikat-Jepang menjadi tegang; sebuah helikopter angkut CH-53D milik Marinir AS jatuh menimpa Universitas Internasional Okinawa (OIU) karena kegagalan mekanis. Reruntukan helikopter ini tersebar hingga sejauh 300 meter dan menyebabkan banyak kerugian material, walaupun tidak sampai menelan korban jiwa karena terjadi pada masa libur musim panas. Namun, penanganan militer Amerika Serikat terhadap kecelakaan ini dinilai tidak simpatik; tindakan mereka dideskripsikan sebagai “invasi” terhadap wilayah OIU dengan menutup seluruh wilayah sekitar kampus. Marinir yang dikerahkan untuk mengamankan lokasi jatuh dinilai tidak peduli dengan kondisi penduduk sekitar, hanya berfokus pada reruntukan helikopter tersebut, bahkan dianggap tidak kooperatif dengan aparat setempat dalam pengamanan situasi.¹³²

Walaupun sempat terjadi beberapa kali demonstrasi dan menyebabkan krisis politik di Jepang, namun pangkalan militer di Okinawa masih bertahan hingga detik ini. *United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation* yang ditandatangani pada 1 Mei 2006 di masa kepemimpinan Perdana Menteri Koizumi pada awalnya hanya menyorot pemindahan pangkalan Futenma yang berada di tengah Kota Ginowan ke pesisir Okinawa yang lebih kosong, ditambah dengan

https://ssl60.secureserver.jp/~rips/rips.or.jp/english/publications/special_reports/pdf/eldridge_okinawa.pdf pada 4 Maret 2011 pk. 21.58 WIB.

¹³¹ “High Level of PCBs Detected at ASDF Base in Okinawa”, *Kyodo News* 12 April 2002.

¹³² *U.S. Marines Invade the University*, diakses dari

http://noflyzone.homestead.com/files/the_invasion.htm pada 4 Februari 2012 pk. 20.54 WIB.

Occupation of the University, diakses dari

http://noflyzone.homestead.com/files/the_occupation.htm pada 4 Februari 2012 pk. 20.55 WIB.

pemindahan III *Marine Expeditionary Force* (MEF) dari Okinawa ke Guam.¹³³ Namun masyarakat Okinawa tetap berkeras bahwa pangkalan militer Amerika Serikat manapun tidak boleh ada lagi di Okinawa sehingga implementasi perjanjian tersebut turut terhambat. Sandungan politik yang terjadi contohnya ada pada kampanye Perdana Menteri Hatoyama yang menjanjikan untuk memindahkan seluruh militer Amerika ke luar Okinawa, namun akhirnya Hatoyama memutuskan untuk mundur dari jabatan karena tidak berhasil memenuhi janji tersebut. Amerika Serikat yang gusar karena hal ini juga memutuskan untuk menunda relokasi ke Guam sampai Jepang “menyampaikan dengan jelas apa sebenarnya keinginan mereka.” Pada 2012, Amerika Serikat dan Jepang telah menyatakan siap untuk melakukan pemindahan pertama sebanyak 4.700 orang prajurit ke Guam, sedangkan pembangunan fasilitas pengganti Futenma masih ditangguhkan. Pemerintah Jepang masih berusaha untuk meyakinkan penduduk Okinawa mengenai penggantian tersebut.¹³⁴

2.3 Strategi keamanan Jepang

2.3.1 Prinsip utama strategi keamanan Jepang

Menyikapi ancaman-ancaman dan tantangan dalam negeri yang sudah disebutkan sebelumnya, Jepang memiliki beberapa prinsip utama dalam keamanan nasional.¹³⁵

Prinsip pertama, mencegah ancaman apapun untuk mencapai Jepang. Secara mandiri, Jepang akan menciptakan dasar keamanan nasional dengan menjaga stabilitas politik domestik, serta mengembangkan kekuatan pertahanan yang efisien. Dalam situasi terburuk ketika ancaman tersebut sampai ke Jepang, maka ancaman bersangkutan harus segera dipukul mundur untuk meminimalkan kerusakan.

Prinsip kedua, memajukan lingkungan keamanan internasional untuk mengurangi potensi ancaman mencapai Jepang. Melalui aliansi keamanan yang

¹³³ Berita pemilihan tempat relokasi ini ada pada buletin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang, *Japan Defense Focus* No. 18, Agustus 2010.

¹³⁴ “Japan, U.S. discussing revised plan for relocating Marines from Okinawa”, *Japan Today* 5 Februari 2012, diakses dari <http://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-u-s-discussing-revised-plan-for-relocating-marines-from-okinawa> pada 28 Februari 2012 pk. 01.27 WIB.

¹³⁵ *National Defense Program Guidelines, FY 2005-*, *ibid.*

ada, Jepang akan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Kemudian Jepang akan mendukung kegiatan PBB untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internasional, termasuk menjalankan upaya diplomatik demi melancarkan kerjasama dengan komunitas internasional.

Prinsip ketiga, respon terintegrasi dalam kondisi terburuk. Apabila ancaman berhasil mencapai daratan Jepang, maka Pemerintah Jepang akan mengambil suatu respon terintegrasi, yaitu membuat keputusan dengan cepat melalui berbagai mekanisme. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengembangkan kapabilitas pengumpulan dan analisis informasi. SDF, kepolisian, *Japan Coast Guard* (JCG), serta organisasi lain yang relevan akan mengembangkan kerjasama melalui pembagian peran, peningkatan pembagian data intelijen, latihan gabungan, selain peningkatan kapabilitas masing-masing angkatan. Pemerintah juga akan membentuk suatu sistem perlindungan nasional, termasuk di dalamnya terdapat unit penanggulangan bencana yang spesifik, dengan membuat jaringan peringatan bencana selain mempererat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah lokal.

Prinsip keempat, *Japan Self-Defense Force* (JSDF, atau sering disingkat hanya sebagai SDF) merupakan jaminan utama keamanan nasional Jepang, melambangkan niat dan kemampuan Jepang untuk menangkal ancaman apapun yang mungkin mencapai wilayah teritorialnya. Pengembangan SDF didasarkan pada NDPG 2005 (keputusan Dewan Keamanan dan Kabinet 28 November 1995) yang mencantumkan *Basic Defence Force Concept*. Konsep kekuatan dasar tersebut menekankan Jepang sebagai negara mandiri harus memiliki kekuatan pertahanan, namun dengan jumlah minimum (sebatas diperlukan untuk melindungi wilayah teritorial) sehingga tidak membahayakan kestabilan wilayah Asia Timur. Kekuatan SDF yang dikombinasikan dengan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, terbukti telah sukses mencegah terjadinya invasi militer terhadap Jepang. Jepang juga akan terus memegang prinsip dasar untuk mengembangkan kekuatan pertahanan terbatas yang berada di bawah kontrol sipil, selain tetap menjalankan tiga prinsip nonnuklir (*nondevelopment, nondeployment, nonproliferation*).¹³⁶

¹³⁶ *National Defense Program Guidelines, FY 2005-, ibid.*

Dalam kasus ancaman dari senjata nuklir, maka Jepang akan bergantung pada *nuclear deterrent* yang dimiliki Amerika Serikat, sembari memainkan peran aktif untuk mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Peran aktif dilakukan dengan cara perlucutan nuklir dan usaha non-proliferasi WMD apapun, termasuk wahana peluncurnya. Pengembangan tersebut konsekuensi dengan Konstitusi Jepang dan filosofi perwujudan kekuatan militer yang tidak menjadi ancaman bagi negara lain.

2.3.2 Upaya balancing sebagai strategi keamanan Jepang

Contoh nyata dari strategi keamanan Jepang yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya dapat dilihat dari upaya *balancing* yang dilakukan oleh Jepang. *Internal balancing* yang dilakukan Jepang merujuk pada pengembangan kapabilitas pertahanan dan transformasi pertahanan, sedangkan *external balancing* dilakukan terutama melalui Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang. Transformasi pertahanan yang dilakukan Jepang terutama bertujuan untuk membuat peran SDF menjadi lebih efektif dan melancarkan kerjasama dalam aliansi keamanan (salah satu unsurnya, pengurangan friksi militer-masyarakat dengan usaha relokasi kekuatan asing).

2.3.2.1 External balancing dalam strategi keamanan Jepang

Dalam NDPG 2005, Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang disebut sebagai “tidak tergantikan” untuk menjamin keamanan Jepang. Kehadiran militer Amerika Serikat juga dianggap penting oleh Jepang untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas Asia Pasifik, terkait dengan ketidakpastian serta situasi yang tidak dapat diperkirakan. Jepang akan melakukan pembahasan strategis dan kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat terkait isu keamanan seperti ancaman terorisme dan rudal balistik, maupun isu aliansi seperti pembagian peran dan postur militer Amerika Serikat di Jepang.

Sejarah aliansi keamanan ini bermula pada 8 September 1951 ketika Amerika Serikat dan Jepang menandatangani *The Security Treaty* di San Francisco. Perjanjian ini menyatakan bahwa Jepang sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk turut serta dalam upaya keamanan kolektif internasional.

Selain itu, perjanjian ini juga memberi hak bagi Amerika Serikat untuk tetap menempatkan pasukannya di dalam Jepang maupun sekitarnya, sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan Jepang membela diri sehubungan dengan militer yang belum terbentuk.¹³⁷ Jepang memiliki hak mengajukan permohonan untuk menggunakan kekuatan Amerika Serikat ini dengan tujuan pengamanan internal, apabila memang ada campur tangan asing yang menyebabkan keamanan dalam negara terganggu.¹³⁸ Hak istimewa tersebut masih ditambah dengan beberapa syarat, yaitu Jepang tidak boleh mengizinkan penempatan militer asing lainnya tanpa persetujuan Amerika Serikat dan Amerika Serikat berhak untuk menggunakan pangkalan tersebut untuk tujuan keamanannya tanpa ada persetujuan dari Jepang sebagai *host country*. Jepang juga diharapkan mampu berperan dalam menjamin keamanannya sendiri. Perdana Menteri Shigeru Yoshida menekankan bahwa Jepang harus mengembangkan keamanan melalui pertumbuhan ekonomi dan *soft-diplomacy*, bukan melalui pembangunan kekuatan militer ataupun diplomasi yang koersif. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, pada 1957 pasukan Amerika Serikat (USFJ—*U.S. Forces, Japan*) mulai digelar di Jepang dengan disebar di 91 fasilitas militer yang terletak di Honshu, Kyushu, dan Okinawa.¹³⁹

Pada 1960, di masa kepemimpinan Perdana Menteri Nobusuke Kishi, terjadi perubahan kedua dalam hubungan keamanan Amerika Serikat-Jepang yang kemudian dikenal dengan nama *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan*. Perjanjian ini menggantikan *The Security Treaty 1951* dan menegaskan bahwa kedua negara harus saling bekerjasama menghadapi serangan yang ditujukan terhadap teritori Jepang, sekalipun Jepang tidak memiliki keharusan untuk membantu Amerika Serikat bila teritori Amerika Serikat berada dalam serangan. Selain itu, Amerika Serikat juga diizinkan menggunakan fasilitas dan wilayah Jepang sebagai kontributor keamanan dan stabilitas Asia Timur, dan tidak diwajibkan untuk melakukan rekondisi bila

¹³⁷ Sebagai tanggapan atas pecahnya Perang Korea pada 1950, Jepang membentuk *National Police Reserve*, yang kemudian berkembang menjadi *National Safety Force* dan *Coastal Safety Force* pada 1952. Lihat *Article 9 Renunciation of War* dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/article-9.htm>.

¹³⁸ *Security Treaty between The United States and Japan; September 8, 1951, op cit.*

¹³⁹ *U.S. Forces, Japan*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/usfj.htm>, pada 10 Februari 2011 pk. 21.03.

fasilitas tersebut telah selesai digunakan. Perjanjian ini tidak mencantumkan tanggungjawab Amerika Serikat terhadap keamanan Jepang secara spesifik sebagaimana *The Security Treaty 1951*, tetapi menekankan konsultasi rutin antara Amerika Serikat dan Jepang dalam mengimplementasikan perjanjian ini apabila keamanan Jepang dan Asia Timur terancam. *Agreement regarding the Status of United States Armed Forces in Japan* (seterusnya dikenal dengan *SOFA Agreement*) juga disetujui kedua negara sebagai pelengkap *Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang menegaskan hak-hak khusus yang dimiliki militer Amerika di Jepang dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴⁰

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat pada tahun 1978 ketika Amerika Serikat dan Jepang mengesahkan *Guidelines for U.S.-Japan Defence Cooperation*, dimana terdapat tindakan-tindakan spesifik yang akan dilakukan untuk memenuhi *Treaty of Mutual Cooperation and Security*. Poin utama dari garis besar pertahanan ini adalah perlunya Jepang memiliki kapabilitas pertahanan yang posturnya disesuaikan dengan tujuan beladiri, dimana peran Jepang sebatas menangkal serangan skala kecil sedangkan Amerika Serikat baru membantu bila Jepang tidak sanggup menghadapi serangan yang dimaksud karena faktor skala, tipe, atau kendala lainnya. Peran SDF juga dideskripsikan dengan lebih gamblang di sini, yaitu operasi pertahanan di darat, perairan, dan udara sekitar teritorial Jepang. Amerika Serikat akan menangani wilayah-wilayah yang berada di luar batasan SDF, selain memberikan *nuclear deterrent* serta *forward-deployment* dari pasukan dan alutsista. Lingkup kerjasama keamanan juga disebutkan dengan spesifik, seperti operasi gabungan, dukungan logistik, dan intelijen.¹⁴¹ Pentingnya kerjasama ini menyebabkan mantan Perdana Menteri Zenko Suzuki menggunakan istilah aliansi (*domei*) dalam kunjungan ke Washington pada 1981.¹⁴² Kemudian, aliansi keamanan ini menjadi lebih erat pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone, dengan Nakasone menyebut Jepang sebagai “kapal

¹⁴⁰ *Japan-U.S. Security Treaty*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html> pada 5 September 2011 pk. 04.00 WIB.

¹⁴¹ *Agreement regarding the Status of United States Armed Forces in Japan*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/2.html> pada 19 Januari 2012 pk. 21.02 WIB.

¹⁴² Arpita Mathur, “*Japan’s Changing Role in the US-Japan Security Alliance*”, dalam *Strategic Analysis*, Vol. 28, No. 4, 2004, hlm. 506.

induk yang tidak dapat ditenggelamkan” bagi sekutunya.¹⁴³ Landasan kerjasama ini juga menjadi lebih konkret dengan *Special Measures Agreement* (SMA) sejak 1978 yang membahas dengan lebih spesifik mengenai kurun waktu dan pembagian pembiayaan dalam kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang.

Pada pecahnya Perang Teluk di tahun 1991, Jepang dikritik oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain sebagai “*free-rider*” yang tidak memiliki peran konkret dalam keamanan internasional, apalagi respon Jepang terhadap krisis tersebut sebatas memberikan dana bagi negara-negara yang melakukan intervensi sebesar 13 miliar US\$ yang dikenal dengan “*checkbook diplomacy*”. Tuntutan ini menyebabkan Jepang berusaha menyesuaikan kebijakannya, sehingga kemudian pada 1992 parlemen Jepang menyetujui *International Peace Cooperation Law* (*PKO Law*) yang memungkinkan Jepang menggelar pasukannya untuk mendukung operasi *peacekeeping*, namun bukan sebagai pihak yang memegang senjata (*peace enforcement*). Kemudian pada 27 September 1995, Jepang dan Amerika Serikat menyetujui *Agreement on the Host Nation Support* yang menerangkan lebih jauh mengenai posisi Jepang sebagai penyandang sebagian dana bagi para pekerja pendukung lokal (sejak tahun anggaran 1978), ditambah pelatihan relokasi (sejak 1996), pengembangan dan perawatan fasilitas (sejak 1979), serta biaya serbaguna bagi anggota USFJ (sejak 1991).

Pada 17 April 1996 *Japan-U.S. Joint Declaration on Security Alliance for the 21st Century* ditandatangani oleh Perdana Menteri Hashimoto dan Presiden Clinton. Deklarasi ini menegaskan kelanjutan kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Jepang, selain menyatakan pentingnya kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, ditambah perlunya mengkaji lebih lanjut kerjasama bilateral yang telah berlangsung agar lebih efektif menghadapi situasi masa depan yang berkembang di sekeliling Jepang. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi ini, maka pada September 1997 Amerika Serikat dan Jepang mengesahkan revisi dari *Guidelines for U.S.-Japan Defence Cooperation*, yang menegaskan bahwa kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang meliputi tiga wilayah, yaitu dalam situasi damai, sebagai respon atas serangan terhadap Jepang, dan respon terhadap “wilayah sekitar Jepang yang

¹⁴³ *Ibid.*

dinilai berpengaruh banyak terhadap keamanan Jepang”.¹⁴⁴ Perumusan kerjasama ini dilakukan dengan penekanan pada geografis, dimana terdapat kalimat “area sekitar Jepang”. Kedua pemerintah merumuskan lingkup dan fungsi kerjasama ke dalam empat hal¹⁴⁵: 1.) Kerjasama dalam tindakan yang diinisiasi salah satu pemerintah, termasuk bantuan kemanusiaan dan penanganan pengungsi, kegiatan SAR, serta evakuasi nonkombatan, 2.) Jepang mendukung kegiatan militer Amerika Serikat berupa mengizinkan penggunaan bandara sipil dan pelabuhan, maupun fasilitas dan pangkalan militer SDF; Jepang juga akan memberikan wilayah latihan maupun unsur bantuan lainnya, 3.) *Rear Area Support*, atau dukungan logistik Jepang terhadap militer Amerika Serikat (pembangunan kantor, fasilitas, dan suplai lain dalam lingkungan pangkalan Amerika Serikat), transportasi (transportasi darat, laut, dan udara bagi personel dan material), pemeliharaan kendaraan militer, pelayanan medis, keamanan fasilitas dan wilayah militer Amerika Serikat, komunikasi, serta lain-lain seperti pasokan air dan listrik, 4.) Kerjasama operasional Amerika Serikat-Jepang yang meliputi pengamatan, penyapuan ranjau, serta manajemen jalur perairan dan ruang udara.

Serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat juga membawa perubahan pada kerangka kerja aliansi. Perdana Menteri Koizumi melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan mengekspresikan bahwa Jepang mendukung kampanye *war on terror* Presiden Bush melalui “kerjasama yang sesuai dengan kekuatan nasionalnya”. Selain itu, pengkajian ulang juga dilakukan terhadap tindakan konkret Jepang sebagai implementasi dari pasal 9 ketika Amerika Serikat memulai serangan udara terhadap Afghanistan. Motif tindakan ini adalah penghindaran dari kemungkinan pecahnya aliansi maupun pengulangan kecaman internasional 1991 bila Jepang tetap berlaku pasif. Jepang juga memberlakukan *Anti-Terrorism Special Measures Law* yang memungkinkan SDF melakukan bantuan nontempur dan kemanusiaan bagi Amerika Serikat dan pasukan koalisi. Contoh konkretnya, pemberangkatan kapal induk USS *Kitty Hawk* dari Yokosuka

¹⁴⁴ *The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html> pada 20 Januari 2012 pk. 17.04 WIB.

¹⁴⁵ *The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation Annex*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/item.html> pada 20 Januari 2012 pk. 17.07 WIB.

ke Samudera Hindia yang diiringi pengawalan MSDF yang terdiri dari *destroyer*, penyapu ranjau, maupun kapal JCG. Kemudian, Jepang juga mengirimkan kapal suplai JDS *Hamana*, *helicopter-carrying destroyer* JDS *Kurama*, dan *destroyer* JDS *Kirisame* dari Pangkalan Sasebo ke Diego Garcia sebagai pendukung garis belakang (fungsi pengisian bahan bakar) bagi kapal perang Amerika Serikat dan Inggris yang melakukan siaga tempur dalam *Operation Enduring Freedom* (OEF), maupun kapal yang menjalani OEF-MIO (*Operation Enduring Freedom-Maritime Interdiction Operation*) yang bertujuan untuk menghentikan perpindahan senjata, obat-obatan terlarang, dan kelompok teroris dari daerah konflik dan sekitarnya.¹⁴⁶

Kemudian pada 2004, dalam Operasi *Iraqi Freedom* yang dilakukan Amerika Serikat, Jepang juga mengirimkan personel SDF sebagai kontingen *peacekeeping* ke Irak walaupun terdapat dua latar yang jelas: area tersebut masih merupakan zona tempur tanpa *safe zone* dan tidak adanya sanksi PBB yang mendukung tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut. Tindakan tersebut didasarkan pada *War Contingency Legislation* yang menyatakan pengiriman pasukan sebagai dukungan atas Amerika Serikat dalam situasi konflik. Perdana Menteri Koizumi menyatakan bahwa tindakan ini tidak memiliki tujuan untuk melakukan perang, serta merupakan tindakan yang terhormat demi mencapai perdamaian dunia.¹⁴⁷ Jepang mempertahankan kehadiran militernya di Irak sebagai bagian dari kekuatan multinasional hingga setelah peralihan kepemimpinan pada 25 Juni 2004. Dalam melaksanakan tugas ini, SDF memiliki komandonya sendiri sekalipun beroperasi di bawah kerangka kerja DK PBB sebagai elemen bantuan rekonstruksi. Sedangkan untuk menghindari keterpaksaan kontak senjata yang melanggar konstitusi, maka kekuatan SDF dipangkalkan di daerah yang relatif bebas insurjensi.

¹⁴⁶ *For the Eradication of International Terrorism and for World Peace: Japan's Contributions Based on the Anti-Terrorism Special Measures Law*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/pamphlets/pdf/trr_0710/p2-3.pdf pada 9 Januari 2012 pk. 11.43 WIB.

¹⁴⁷ *Press Conference by Prime Minister Junichiro Koizumi (The Basic Plan regarding the measures based on the Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq)*, diakses dari http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2003/12/09press_e.html pada 9 Januari 2012 pk. 11.45 WIB.

2.3.2.2 *Internal balancing* dalam strategi keamanan Jepang

Periode lima puluh tahun terakhir telah menunjukkan bahwa Jepang sanggup mengembangkan kekuatan pertahanannya dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Dasar ini menempatkan SDF dalam posisi militer dengan teknologi paling unggul di Asia Timur (setelah Amerika Serikat) dengan kekuatan militer yang dapat dibandingkan dengan Inggris. Jepang juga telah mengembangkan jangkauan fungsional maupun geografis dari fungsi defensifnya, ditambah memfasilitasi kenaikan kerjasama keamanan Amerika Serikat dalam bentuk interoperabilitas dan kesiapan militer. Ekspansi ini terjadi dengan stabil dalam situasi regional yang tidak pasti; kekuatan dan komitmen Amerika Serikat di Asia Timur mulai menurun dan dipertanyakan oleh negara-negara lain di kawasan tersebut. Jepang memiliki banyak kesempatan untuk bereaksi merubah *balance of power* di Asia Timur, namun yang dilakukannya justru tetap mempertahankan komitmen pada Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang.

Dalam menghadapi tuntutan keamanan nonkonvensional pasca Perang Dingin, SDF harus beradaptasi agar bisa menjalankan fungsi barunya dengan efektif, selain tidak bertentangan dengan elemen *Basic Defense Force Concept*. Pertimbangan lain bagi pengembangan SDF adalah kondisi internal Jepang berupa kurangnya sumber daya manusia dengan usia muda karena tingkat kelahiran yang rendah, serta kondisi ekonomi yang memburuk. Menyikapi hal ini, maka SDF harus memiliki sifat yang fleksibel, multifungsi dan efektif. Selain itu, SDF juga harus memiliki kesiapan yang tinggi, mampu digelar dengan cepat, serta dilengkapi dengan teknologi tinggi yang setara dengan negara lainnya. Hanya saja, demi mencegah postur SDF menjadi terlalu besar, maka Jepang akan melakukan rasionalisasi serta mengurangi jumlah personel, peralatan, serta struktur operasional untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan kriteria tersebut, maka peran SDF dalam NDPG 2005 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Respon efektif terhadap ancaman baru yang bervariasi. Respon efektif memiliki makna kecepatan reaksi dan kemampuan penggelaran yang sesuai dengan karakter geografis Jepang, selain kemampuan koordinasi dengan kepolisian maupun organisasi yang berperan dalam penanganan ancaman dan

situasi tertentu. Secara spesifik, ancaman dan situasi yang dimaksud meliputi a.) serangan rudal balistik, b.) serangan gerilyawan dan pasukan khusus, c.) serangan terhadap pulau Jepang di lepas pantai, d.) kebutuhan terhadap patroli dan pengamatan di perairan dan angkasa yang mengelilingi Jepang, selain menghadapi intrusi dari *special-purpose ship* yang dipersenjatai atau sejenisnya, dan e.) bencana skala besar atau bencana khusus (melibatkan nuklir, biologi, kimia, dan radiologi).

- Persiapan skenario terburuk berupa invasi skala penuh dari luar. Sehubungan dengan berkurangnya kemungkinan invasi dan keharusan memiliki postur yang tidak mengancam, maka Jepang akan merubah konsep pengembangan kapabilitas pertahanan yang masih berorientasi pada Perang Dingin (anti-tank, anti-kapal selam, dan anti-serangan udara) serta mengurangi jumlah personel dan peralatan secara signifikan yang awalnya difungsikan untuk menangkal invasi skala penuh. Perubahan di atas akan dilakukan secara progresif dengan memanfaatkan teknologi untuk mengisi kekosongan jumlah personel.
- Usaha proaktif memperbaiki lingkungan keamanan internasional. Dalam konteks kegiatan *peace cooperation*, maka akan dibentuk sistem pelatihan dan pendidikan bagi para personel SDF, penyediaan infrastruktur pendukung untuk penggelaran dan kesinambungan misi SDF di luar negeri, postur kekuatan yang responsif bagi unit yang relevan, serta menjadikan kegiatan *peace cooperation* sebagai salah satu prioritas misi bagi SDF. Selain itu, SDF juga akan dikirim untuk mengikuti latihan bersama demi persahabatan antarnegara.

Lynn H. Winward menuliskan dalam *Bigger Shield: Alliance, Politics, and Military Change in Japan* bahwa perubahan Jepang dalam segi militer diakibatkan oleh unsur politik domestik yang juga berevolusi. Winward melihat hal ini melalui tiga studi kasus: pemersenjataan kembali Jepang di bawah kontrol Amerika Serikat dan empat rencana pertahanan di tahun 1950-1960, perimeter pertahanan 1.000nm dan kerjasama militer regional pada 1980-an, serta *collective self-defense* serta BMD/TMD pasca Perang Dingin, tepatnya mulai dari 1996 hingga

sekarang.¹⁴⁸ Pada tiga kasus tersebut, beliau menyebutkan bahwa terdapat tiga macam kecenderungan yang membawa militer Jepang dan isu keamanan menjadi lebih fleksibel. Pertama, tekanan dari Amerika Serikat agar Jepang lebih berpartisipasi dalam pertahanan. Kedua, politik dalam negeri yang terus bertindak sebagai pembentuk isu pertahanan, apalagi ketika konflik ideologi yang melingkupi kebijakan pertahanan berkurang dan kenyataan fiskal mengambi fokus utama. Ketiga, pemerintah Jepang yang mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat walaupun terjadi konflik antara keduanya dalam urusan tertentu dan komitmen Amerika Serikat di Asia Timur yang masih dipertanyakan. Winward mengidentifikasi bahwa wujud dari kecenderungan ini berbeda-beda. Contoh, apabila pada dua kasus pertama masih cukup banyak politisi yang berpendapat bahwa aliansi keamanan dan SDF bertentangan dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang sehingga mereka tidak mendukungnya dan cenderung mengandalkan Amerika Serikat, pada kasus terakhir perubahan politik yang terjadi justru mendukung respon pemerintah terhadap ancaman eksternal.

Pasca 1945, nasionalisme di Jepang telah “terpinggirkan” dalam debat publik di Jepang, bahkan hingga ke tahap dimana Jepang merasa takut pada dirinya sendiri. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemikiran bahwa kekuasaan yang diberikan pada militer akan menyebabkan kerugian pada negara, selain kemungkinan rakyat Jepang kembali memegang militerisme. Matthews menyebutkan bahwa kebangkitan nasionalisme Jepang didorong oleh faktor domestik dan regional. Secara domestik, kelompok nasionalis di Jepang mengharapkan Jepang kembali dipandang serta memiliki *power* sebagai salah satu kontributor utama dalam ekonomi dan dinamika internasional. Selain itu, ketakutan Jepang terhadap dirinya sendiri terkait militerisme dan telah menghilang. Sedangkan secara regional, situasi regional telah bergerak ke arah yang kurang menguntungkan bagi Jepang, misalnya menurunnya kemampuan Amerika untuk menjadi pelindung mutlak bagi Jepang, ancaman nuklir dari Korea Utara dan naiknya ekonomi Cina. Strategi yang dilakukan Jepang sebagai dampak dari perubahan-perubahan ini mengakibatkan Jepang menjadi apa yang disebut Michael Green sebagai “*reluctant realists*”.¹⁴⁹ Richard J. Samuels

¹⁴⁸ Winward, *op cit.*, hlm. 36.

¹⁴⁹ Eugene A. Matthews, *op cit.*, hlm. 74-90.

mendefinisikan lebih lanjut mengenai perspektif yang mendasari strategi keamanan ini ke dalam empat pemikiran pokok:

- *Pacifists*. Kelompok ini berusaha mencari otonomi melalui kemakmuran, bergantung pada *soft power*, pengurangan kekuatan militer dan pembatasan terhadap sisa kekuatan militer, ditambah penolakan terhadap aliansi.
- *Middle-power internationalists*. Kelompok ini berusaha mencapai *prestige* di dunia internasional dengan meningkatkan kemakmuran dan mengurangi jejak keamanan global Jepang yang bertambah. Pada esensinya, upaya tersebut akan mengembalikan Jepang pada Doktrin Yoshida.
- *Normal nationalists*. Kelompok ini berusaha mencapai *prestige* dengan membangun kekuatan nasional. Mereka akan meningkatkan kekuatan militer Jepang melalui pembangunan kapabilitas yang lebih kuat dan penyeimbangan peran dalam aliansi keamanan. Keamanan nasional kolektif akan ditanggung pula oleh Tokyo, serta JSDF akan dimanfaatkan untuk menjalani berbagai operasi internasional bekerjasama dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat.
- *Neoautonomists*. Kelompok ini mencari otonomi dengan membangun kekuatan nasional. Mereka menginginkan JSDF diperkuat dan melayani kebijakan keamanan mandiri Jepang. Untuk melakukan hal ini, maka JSDF perlu memenuhi seluruh spektrum kapabilitas militer, termasuk senjata nuklir. Perubahan tersebut “akan menggeser doktrin Jepang dari realisme defensif yang terkekang menjadi realisme ofensif yang tidak terbatas”¹⁵⁰

Dari keempat perspektif di atas, Samuels menarik kesimpulan bahwa *normal nationalists* merupakan perspektif *mainstream* yang berlaku di antara pemikir keamanan dan pembuat kebijakan Jepang. Hanya saja bermacam alasan domestik maupun eksternal membatasi keinginan mereka untuk menekankan prestise di atas otonomi maupun menempatkan kekuatan militer di atas kemakmuran. Pendekatan yang muncul adalah “*Goldilocks consensus*”, yaitu pendekatan yang memosisikan Jepang dalam jarak tertentu dari hegemon pelindungnya, sehingga masih mampu mendapatkan kekuatan lebih dan memberikan pilihan keamanan baru yang lebih

¹⁵⁰ Richard J. Samuels, “*Securing Japan: The Current Discourse*”, dalam *Journal of Japanese Studies* Vol. 33 No. 1, 2007, diakses dari <http://www.risingpowersinitiative.org/wp-content/uploads/samuels1.pdf> pada 19 Juni 2011 pk. 10.20 WIB.

komprehensif, namun tetap tidak mengancam bagi negara lainnya.”¹⁵¹ Debat antar perspektif ini telah menjatuhkan maupun mempopulerkan banyak perdana menteri Jepang (termasuk menimbulkkan beberapa krisis politik), namun pada akhirnya dorongan nasionalisme ini membawa Jepang untuk menjamin keamanannya dengan lebih aktif.

Contoh kasus pertama yang dikemukakan oleh Winward adalah pemersenjataan kembali Jepang. Dalam Jepang pascaperang, terjadi debat antara kelompok pasifis dan realis sehubungan dengan kehadiran Amerika Serikat di tanah Jepang dan sikap yang diambil Jepang dalam pertahanan.¹⁵² Harapan umum yang berlaku di Jepang adalah, bahwa PBB suatu hari nanti akan memiliki otoritas dan kemampuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia, walaupun harapan tersebut sempat menurun dengan adanya Perang Dingin (termasuk Perang Korea sebagai dampaknya). Perbedaan pandangan mereka ada pada kelompok pasifis yang tidak menginginkan terbentuknya aliansi keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang, berdasar kekhawatiran bahwa Blok Timur akan menganggap mereka sebagai lawan. Di lain pihak, kelompok realis berpendapat bahwa Jepang sanggup dan memiliki keharusan untuk memberikan kontribusi personel untuk tugas-tugas PBB. Argumen kelompok realis, kontribusi personel dalam gugus tugas PBB tidak melanggar konsitusi karena bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia; peran Jepang dalam PBB juga akan menjamin keamanan Jepang. Perdana Menteri Yoshida dalam dua kali masa jabatannya (1946-1947 dan 1948-1954) tidak mungkin mengambil posisi yang jelas antara kedua kelompok tersebut, mengingat kerentanan posisi Jepang sebagai pihak yang kalah perang. Sebagai akibatnya, beliau berusaha mengambil jalan tengah dengan memanfaatkan pemersenjataan kembali sehubungan dengan terjadinya Perang Korea, walaupun tetap bergantung pada Amerika Serikat sebagai pihak yang memiliki kedudukan militer di Jepang.¹⁵³ Apalagi Amerika Serikat menyatakan dalam *Truman Doctrine*

¹⁵¹ Richard J. Samuels, “*Japan’s Goldilocks Strategy*”, dalam *The Washington Quarterly*, Autumn 2006, hlm. 111-127, diakses dari <http://www.gees.org/documentos/Document-01444.pdf> pada 19 Juni 2011 pk. 11.20 WIB.

¹⁵² Yutaka Kawashima, *Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century* (Washington: Brookings, 2003), hlm. 23-28.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 28.

bahwa Amerika Serikat akan membantu pertahanan suatu negara asalkan negara tersebut mau berusaha mempertahankan keamanannya sendiri.¹⁵⁴

Kenaikan komunisme dalam Perang Korea dan dorongan Amerika Serikat bahwa Jepang harus mempunyai struktur keamanan internal sendiri menyebabkan Jepang mengembangkan *National Police Reserve* yang telah dibentuk pada 1950 menjadi *National Safety Force* dan *Coastal Safety Force* pada 1952. Pembentukan organisasi keamanan yang lebih konkret selanjutnya dapat dilihat pada pendirian *National Defense Agency*, SDF, dan *Joint Staff Council* (JSC) pada Juli 1954.¹⁵⁵ JSC ini terdiri dari Kepala Staf JSDF dari ketiga matra (darat, laut, udara) dan memiliki fungsi utama mengelola SDF secara komprehensif dan administratif. Organisasi ini juga berfungsi mengkoordinasikan antara militer Amerika Serikat dan Jepang dalam operasi bersama, namun posisi dasarnya memungkinkan tiap militer beroperasi dengan doktrin masing-masing. Pada 1955, kondisi politik di Jepang membaik dengan Partai Liberal dan Partai Demokrat menggabungkan diri dalam satu Partai Liberal Demokrat (LDP). Kestabilan yang diperoleh dari posisi sentral kelompok konservatif dalam partai tersebut mendorong terwujudnya *Basic Policy for National Defense* pada 1957. BPND 1957 ini menyatakan posisi Jepang sebagai negara mandiri yang akan mengembangkan pertahanan secara bertahap di bawah kerangka Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang. Sebagai penindaklanjutan BPND, maka *Four Defense Plan* dilaksanakan untuk membangun kekuatan SDF.¹⁵⁶ *First Defense Plan* (1958-1960) merumuskan perlunya revisi *security treaty* 1951 agar peran Jepang dan Amerika Serikat menjadi lebih seimbang, sehingga mampu mengurangi jumlah personel militer Amerika Serikat yang ada di Jepang. Namun, upaya Perdana Menteri Kishi yang berfokus pada kapabilitas pertahanan ini menimbulkan konflik dari masyarakat yang khawatir Jepang akan kembali kepada

¹⁵⁴ *Truman Doctrine*, diakses dari http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp pada 12 Januari 2012 pk. 16.37 WIB.

¹⁵⁵ *Japan Ministry of Defense History*, diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/about/history.html> pada 6 Sept 2011 pk. 14.23 WIB.

¹⁵⁶ Winward, *op cit.*, hlm. 27-37. Winward menyusun deskripsi *Four Defense Plan* berdasarkan Christopher W. Hughes, *Japan's Security Agenda: Military, Economic, and Environmental Dimensions* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004), Glenn D. Hook and others, *Japan's International Relations: Politics, Economics and Security*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2005), James L. McClain, *Japan, a Modern History* (New York: W.W. Norton & Co., 2002), Joseph P. Keddell, *The Politics of Defense in Japan: Managing Internal and External Pressures* (London: M.E. Sharpe, 1993).

militerisme. Apalagi persetujuan Kishi untuk memperpanjang Aliansi Keamanan dengan Amerika Serikat dinilai publik Jepang sebagai upaya melancarkan kepentingan pribadi.¹⁵⁷ Sebagai dampaknya, Kishi meletakkan jabatan pada 1960 dan digantikan oleh Perdana Menteri Hayato Ikeda.

Untuk mendamaikan situasi, Ikeda mengambil langkah ekonomi dengan program “*income doubling*” dan (secara kasar) pengembalian pada Doktrin Yoshida dengan pembuatan kebijakan yang pasif.¹⁵⁸ SDF, sebagai salah satu unsur penuai kontroversi pada masa Perdana Menteri Kishi, hanya dikembangkan sedikit demi sedikit. Upaya ini sukses dan Jepang berhasil menjadi ekonomi dunia tertinggi kedua pada 1970 (masa kepemimpinan Perdana Menteri Eisaku Sato) dengan pertumbuhan lebih dari 10 persen per tahun. Walaupun demikian, tekanan yang berkelanjutan dari Amerika Serikat dan situasi keamanan yang kembali memburuk dengan memanasnya Indocina membuat Jepang mengambil kompromi dan menjalankan *Second Defense Plan* (1962-1966). Rencana pertahanan ini menekankan pembangunan kapabilitas MSDF dan ASDF melalui pengadaan sistem senjata. Namun Jepang tidak memiliki kerjasama militer langsung dengan Amerika Serikat; Jepang tetap berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi dan sebatas menyediakan barang kebutuhan perang dan garis belakang di wilayahnya bagi pasukan Amerika Serikat yang bertempur di Asia Tenggara. Amerika Serikat yang tertekan dengan kondisi di Vietnam, memutuskan memangkas bantuan militer secara bertahap, hingga puncaknya berupa penghentian *direct military aid* bagi Jepang pada 1968. Hingga September 1966, bantuan ini telah menyediakan peralatan senilai 5,7 miliar yen dan hampir memenuhi artileri serta senjata antitank Jepang, ditambah sepertiga total tonase kapal MSDF, dan setengah dari pesawat tempur ASDF. Akibatnya, SDF terpaksa memohon dana lebih besar (hingga mencapai dua persen dari GNP untuk lima tahun ke depan) yang tidak didukung oleh sebagian besar anggota parlemen.

¹⁵⁷ Richard J. Samuels, *Kishi and Corruption: An Anatomy of the 1955 System*, JPRI Working Paper No. 83, Desember 2001, diakses dari <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp83.html> pada 14 Mei 2012 pk. 12.03 WIB

¹⁵⁸ Green, *op cit.*, hlm. 15.

Andrew Gordon, *A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present* (New York: Oxford, 2003) hlm. 279.

Dalam masa kepemimpinan Perdana Menteri Sato, walaupun bekerjasama secara tidak langsung dengan Amerika Serikat di Vietnam, Jepang masih tetap membatasi dirinya untuk melakukan kerjasama militer penuh. Contohnya dengan larangan ekspor persenjataan ke negara-negara komunis dan tiga prinsip nonnuklir yang diumumkan dan diterapkan secara besar-besaran pada 1968 sebagai tanggapan ujicoba nuklir Cina sejak 1964. *Third Defense Plan* (1967-1971) yang dijalankan juga disebut kontroversial terkait pembangunan kapabilitas pertempuran udara dan antikapalselam secara spesifik; rudal SAM *Nike Hercules* yang dapat dipasang hulu ledak nuklir dan penempur F-4 *Phantom* yang mampu bertindak sekaligus sebagai penyerang darat didebatkan dengan kemampuan ofensif mereka. Perspektif pasifis yang ada rupanya masih cukup kuat, sebab persenjataan ini dinilai menggeser kapabilitas SDF ke arah ofensif, sehingga berujung pada pencabutan sistem pengeboman dan peralatan *air refuelling* dari penempur *Phantom* pada 1973.¹⁵⁹ Perkembangan selanjutnya, menyikapi goyahnya ekonomi dunia karena krisis moneter Amerika Serikat pasca Vietnam dan embargo minyak Timur Tengah, Jepang menginisiasi *Fourth Defense Plan* (1971-1976) untuk menyesuaikan perannya dalam aliansi keamanan. Pasalnya, Jepang merasa terancam dengan krisis yang menghantam ekonominya (pertumbuhan ekonomi nol persen pada 1974 yang berdampak pengangguran besar-besaran). Faktor lain penyebabnya adalah pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur telah menurun, selain potensi konflik yang timbul dari surplus dagang Jepang dengan Amerika Serikat. Namun pelaksanaan rencana tersebut menyebabkan kontroversi politik lain; proyeksi biaya yang terlalu tinggi dengan jumlah 5,7 hingga 6,5 triliun yen, diperburuk dengan peningkatan per tahun diperkirakan melebihi 18,5 persen. Saran Direktur JDA Nakasone juga turut memperpanas situasi: revisi BPND agar SDF berperan sentral dalam pertahanan Jepang, selain postur pertahanan lebih otonom yang mampu mencapai *air and naval superiority* di sekitar Jepang. Padahal normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Cina pada 1971 dan adanya *détente* dengan Soviet pada dekade tersebut sudah sedikit menurunkan kekhawatiran Jepang terhadap ancaman eksternal. Untuk menangani permasalahan ini, Perdana Menteri Sato tidak

¹⁵⁹ Joe Baugher, *Phantom with Japan*, diakses dari http://www.f-4.nl/f4_47.html pada 6 Januari 2012 pk. 13.34WIB.

melanjutkan kajian terhadap proposal pengembangan dan revisi tersebut, tetapi membatasi anggaran militer melalui Kebijakan Satu Persen GNP dan mengatur pengembangan kapabilitas dalam NDPO 1976.

Namun pada 1977, Dirjen JDA Nakasone membuat pernyataan umum bahwa Jepang harus mempertahankan jalur transportasi kunci yang berada dalam jarak 1.000nm dari pesisir Jepang. Pernyataan ini salah satunya dipengaruhi oleh perasaan rentan yang timbul di Jepang dengan adanya konflik Timur Tengah (Perang Yom Kippur 6 Oktober - 25 Oktober 1973) yang mengakibatkan krisis energi 1973.¹⁶⁰ Terlebih lagi di tahun 1979, Soviet menginvasi Afghanistan dan melakukan pembangunan militer di Timur Jauh¹⁶¹ hingga ke *Northern Territories* (yang dikuasai Soviet namun diklaim Jepang sebagai miliknya) sehingga menyelesaikan *détente*.¹⁶² Situasi dan perubahan ini juga mendukung gerak maju kebijakan pertahanan Jepang yang dapat dilihat pada pengumuman Perdana Menteri Suzuki di bulan Mei 1981 pasca pertemuan rutin Amerika Serikat-Jepang di Washington; fokus 30 tahun SDF untuk mempertahankan perairan teritorial sejauh 12nm diperluas menjadi mempertahankan SLOC sejauh 1.000nm. Pada 1983, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat Perdana Menteri Nakasone menyatakan perlunya bagi Jepang untuk menjadi “kapal induk yang tidak dapat ditenggelamkan” yang mampu mengontrol selat-selat di Laut Jepang. Beliau juga memulai kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. Dampaknya, Jepang melakukan modernisasi JSDF, terutama dari kapabilitas pertahanan udara dan antikapal selam untuk menyesuaikan tuntutan tersebut.¹⁶³ Selain itu, upaya

¹⁶⁰ Mathur, *op cit.*

¹⁶¹ Salah satunya berupa Pangkalan Angkatan Laut Vietnam di Cam Ranh yang digunakan oleh Angkatan Laut Soviet. Gambaran prediksi dari pangkalan ini dapat ditemukan dalam Ray Bonds, ed., *The Illustrated Directory of Modern Soviet Weapons*, (London: Salamander Books, 1986), hlm. 166.

Wolf Mendl, “*Japan and Its Giant Neighbours*”, dalam *The World Today*, Vol. 39, No. 6 (Juni 1983), hlm. 206-215. Mendl menyebutkan bahwa perluasan perimeter pertahanan oleh Jepang juga dipicu oleh berkurangnya kehadiran Amerika Serikat di kawasan, seperti proposal pengurangan kekuatan militer di Korea yang dikemukakan oleh administrasi Carter penarikan mundur militer Amerika Serikat dari Vietnam, serta pengiriman *7th Fleet* ke Samudera Hindia pada Revolusi Iran 1979-1980 yang mengakibatkan kekosongan kekuatan laut Amerika di Pasifik.

¹⁶² *Japan - Introduction, loc cit.*

¹⁶³ Masaru Tamamoto menyebutkan bahwa Nakasone merupakan “peruntuh batas” anggaran militer yang hanya boleh mencapai 1 persen dari GDP., sehubungan dengan keyakinan beliau bahwa Jepang harus kembali menjadi negara normal. Lihat “*Japan's Search for a World Role*”, dalam *World Policy Journal*, Vol. 7, No. 3 (Summer, 1990), hlm. 493-520.

modernisasi dan kesediaan Jepang untuk mengambil peran militer di tingkatan regional ini juga mendukung strategi Amerika Serikat di Asia Timur.

Pasca kejatuhan Uni Soviet, Jepang memiliki pandangan bahwa ancaman yang dihadapi bersumber dari perubahan-perubahan berikut ini. Pertama, *rogue states* dan WMD yang dimiliki (Korea Utara). Kemudian, kebangkitan negara tetangga yang amat cepat (Cina), terorisme (Al-Qaidah dan Korea Utara), serta efek destabilisasi dari *failed states*.¹⁶⁴ Mulai pada pertengahan tahun 1990, perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang mengadakan perundingan untuk membahas kelangsungan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang. Upaya perundingan ini terutama ditujukan untuk menjawab permasalahan Perang Teluk pertama, dimana Jepang sebatas menjalankan "*checkbook diplomacy*" atau sekadar menyumbang dana bagi operasi yang dilakukan oleh rekanan aliansinya. Tindakan tersebut disebabkan oleh politik domestik Jepang yang tidak memungkinkan Jepang untuk memberikan dukungan yang dapat ditafsirkan sebagai bertentangan dengan konstitusinya. Sebagai akibatnya, Amerika Serikat dan dunia internasional mengkritik Jepang untuk bertindak lebih aktif, sesuai dengan situasi keamanan pasca Perang Dingin yang memiliki kompleksitas lebih tinggi. Pada periode 1993-1997, berdasarkan kekhawatiran bahwa Cina dan Korea Utara terus mengembangkan kapabilitas nuklir dan peluncurnya, Jepang memulai konsultasi BMD dengan Amerika Serikat. Sedangkan secara mandiri, Jepang melakukan studi kelayakan yang mencakup arsitektur sistem BMD, estimasi biaya, serta isu lain terkait penggelaran sistem ini.

Pada 31 Agustus 1998, Korea Utara melakukan ujicoba rudal balistik yang melintasi Jepang sebelah utara. Peristiwa ini mengejutkan Jepang dengan tidak adanya peringatan dari Amerika Serikat sebagai rekanan aliansi yang memiliki banyak aset pengamatan/pengintaian di Asia Timur. Frustrasi yang diungkapkan oleh media dan politisi Jepang atas keharusan mengandalkan satelit mata-mata Amerika Serikat untuk memonitor situasi di Laut Jepang mengakibatkan Jepang memulai program pengembangan satelit intai mandiri. Perdana Menteri Keizo Obuchi mengumumkan pada 10 September 1998 bahwa Jepang kemungkinan akan meluncurkan satelit sendiri demi mengembangkan kapabilitas militer bagi Jepang

¹⁶⁴ *World Defense Almanac, op cit.*
NDPG 2005-, *op cit.*

dan mengawasi penggelaran rudal nuklir Korea Utara.¹⁶⁵ Kemudian, iklim politik di Jepang memberikan penerimaan terhadap konsep BMD yang akan dikaji lebih lanjut bersama Amerika Serikat. Pasca pengkajian konsep BMD, pada Agustus 2003 JDA untuk pertama kalinya meminta pendanaan untuk mengakuisisi sistem BMD kepada MOF. Desember 2003, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mengintroduksi sistem BMD ke dalam pertahanan nasional. Sistem ini terbagi menjadi dua yaitu BMD yang diluncurkan dari darat (rudal *Patriot/PAC-3*) maupun BMD yang diluncurkan dari laut (rudal *Standard/SM-3* yang ditembakkan dari *destroyer AEGIS*). Penggelaran sistem TMD di darat dan modifikasi kapal pembawa BMD dilakukan pada kurun 2004-2010, sementara radar pendukung bagi rudal tersebut (FPS-5 dan FPS-3) dilakukan dalam kurun waktu 2006-2011. Sebagai landasan hukum beroperasinya sistem persenjataan ini, maka Diet melakukan amandemen terhadap *SDF Law* mengenai penanganan serangan rudal balistik dan mengesahkannya pada Juli 2005. Uji pencegahan oleh rudal PAC-3 berhasil dilaksanakan pada Maret 2007, sedangkan uji terbang rudal SM-3 berhasil dilakukan di atas *destroyer JDS Kongo* pada Desember 2007. Ujicoba ini bahkan juga memberikan angin segar politik untuk mengeluarkan hukum yang menspesifikasi peran yang dapat diambil SDF dalam mengembangkan wilayah sekitar Jepang. Contohnya, *Japan Basic Space Law 2008* yang mengubah posisi Jepang dalam pemanfaatan luar angkasa. Hukum ini memungkinkan Jepang untuk memanfaatkan luar angkasa untuk tujuan perdamaian, perbaikan hidup warganegara dan keamanan nasional, serta mengembangkan industri yang berhubungan dengan aktivitas luar angkasa.¹⁶⁶ Dalam *Basic Plan for Space Policy 2009*, terdapat indikasi bahwa Jepang berusaha untuk menunjukkan prestise nasionalnya dengan melakukan peluncuran program aktivitas luar angkasa.¹⁶⁷

Pada 2002, tercatat kontribusi finansial Jepang terhadap aliansi keamanan telah melebihi 60% dari seluruh kontribusi sekutu-sekutu Amerika Serikat

¹⁶⁵ *Information Gathering Satellites: Imagery Intelligence*, diakses dari <http://www.fas.org/spp/guide/japan/military/imint/index.html> pada 18 Januari 2012 pk. 09.40 WIB.

¹⁶⁶ Dubes Yasuyoshi Komizo, "*Japanese Space Policy - Basic Space Law -*", diakses dari <http://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2009/pres-09.pdf> pada 20 Januari 2012 pk. 15.40 WIB.

¹⁶⁷ "*Basic Plan for Space Policy - Wisdom of Japan Moves Space -*", diakses dari http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/basic_plan.pdf pada 20 Januari 2012 pk. 15.45 WIB.

lainnya, termasuk menanggung 75% dari ongkos operasional USFJ.¹⁶⁸ Jumlah ini secara bertahap naik sejak 1978 hingga 2001, namun telah menurun kembali sehubungan dengan tekanan masyarakat terhadap pemerintah Jepang dan stagnansi ekonomi yang dialami Jepang pasca Perang Dingin. Namun biaya tersebut masih bertahan; pada 2008 pemerintah Jepang mengalokasikan total sebanyak 208,3 miliar yen dalam kerjasama pendanaan USFJ dengan Amerika Serikat (penurunan sebesar 4,1% dari tahun sebelumnya). Dari jumlah tersebut 146,3 miliar yen merupakan upah dan tunjangan pekerja, 36,2 miliar yen merupakan biaya pengembangan dan perawatan fasilitas, 25,3 miliar yen merupakan biaya serbaguna, serta lima ratus juta yen merupakan biaya pelatihan relokasi. Total keseluruhan anggaran yang telah dikeluarkan Jepang untuk USFJ sejak 1987 (termasuk pengeluaran di sekitar pangkalan dan hibah) sebesar 12,96 triliun yen.

Pada awal 2011, dukungan finansial bagi USFJ (yang telah dilakukan Jepang sejak 1978) menjadi penangkal bagi memanasnya debat anggaran di Jepang.¹⁶⁹ Pada 2010 Jepang menyediakan dana sebesar 3,3 miliar US\$ bagi USFJ untuk digunakan dalam berbagai keperluan di pangkalan militer hingga pembangunan fasilitas di Guam (bahkan hingga ke dana hiburan bagi personel militer). Dana tersebut masuk ke dalam kategori “*host-nation support*”, walau kebanyakan masyarakat Jepang menyebutnya “anggaran simpati” secara menyindir. Ketika AS meminta Jepang untuk meningkatkan jumlah dari *host-nation support* tersebut, mereka menghadapi penolakan umum dari otoritas Jepang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Jepang terbagi antara menurunnya dukungan bagi AS dan kebutuhan militer Jepang sendiri. Hanya saja peristiwa September 2010 membuat hubungan antara Cina dan Jepang memanas, terkait peristiwa penangkapan dan penahanan nelayan-nelayan Cina yang kapalnya menabrak kapal patrol penjaga pantai Jepang. Peristiwa ini menyebabkan sikap Jepang terhadap Amerika Serikat melunak. Kekesalan terhadap Beijing mengakibatkan opini publik menjadi condong ke arah AS, sehingga pada awal

¹⁶⁸ “*Cost sharing*”, dalam *Allied Contributions to the Common Defense*, diakses dari http://www.defense.gov/pubs/allied_contrib2003/Allied2003_Chap_2.html pada 21 Januari 2012 pk. 11.34 WIB.

¹⁶⁹ Eric Heginbotham, Ely Ratner, dan Richard J. Samuels, “*Tokyo’s Transformation*”, dalam *Foreign Affairs* Vol. 90 No. 5, September/Oktober 2011, hlm. 138-148.

2011, pemerintah Jepang setuju untuk mempertahankan *host-nation support* senilai anggaran tahun sebelumnya. Apabila tidak ada ketegangan dengan Cina, dukungan keuangan terhadap militer AS mungkin sudah dipotong secara substansial.¹⁷⁰

Pada 2001-2004, Jepang untuk pertama kalinya melakukan penggelaran SDF ke luar batas teritorial. Tindakan ini mencerminkan transformasi pertahanan Jepang termasuk pemikiran strategis yang mulai menasar pada keamanan energi dan proyeksi *power*. Valérie Niquet menyebutkan dalam *Energy Challenges in Asia* bahwa ketergantungan Jepang terhadap sumber energi dari luar amat besar. 100% dari kebutuhan minyak mentah Jepang merupakan hasil impor, sedangkan minyak mentah merupakan setengah dari campuran energi yang dikonsumsi oleh Jepang.¹⁷¹ Pasca tahun 2000, kebijakan Jepang dalam *energy security* telah berubah dari ekonomi pasar untuk menjamin kestabilan suplai energi menjadi upaya kontrol terhadap suplai energi. Hal ini terkait dengan upaya Jepang untuk berkembang menjadi “*normal state*” dan debat domestik mengenai *energy security* sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh Jepang apabila ingin menjadi negara normal.¹⁷² Niquet menyebutkan bahwa strategi Jepang untuk mendapatkan sumber energi yang lebih dekat dengannya mendapat tantangan dari Cina yang cenderung agresif dalam mengamankan pasokan energinya. Tokyo memandang hal ini sebagai hubungan yang sulit antara kedua negara, sehingga berakibat pada Jepang memposisikan diri dalam suatu *balance of power* dengan Cina demi memperoleh akses pasar, walaupun Jepang lebih cenderung melakukannya melalui diplomasi energi.¹⁷³ Dalam kasus pengiriman kapal-kapal MSDF sebagai kekuatan pendukung dalam *Operation Iraqi Freedom*. Direktur JDA Shigeru Ishiba menyatakan bahwa tindakan tersebut didorong oleh kepentingan nasional Jepang, sehingga Jepang melakukan kontingensi untuk menstabilkan wilayah asal dari sumber energi Jepang selain sebagai upaya mempererat aliansi dengan Amerika Serikat.¹⁷⁴ Pada tahun 2007, JDA berubah menjadi Kementerian Pertahanan yang memiliki fungsi penuh.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Valérie Niquet, *Energy Challenges in Asia* (Paris: IFRI, Oktober 2007), hlm. 4.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁷⁴ “*Iraq effort a defining moment for Japan: Troop deployment represents Tokyo’s shift from pacifism*”, *International Herald Tribune* 17 Oktober 2003, hlm. 1.

Perubahan tersebut disebabkan oleh upaya Jepang mewujudkan komponen pertahanan yang lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan pertahanan modern selain menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh rekanan aliansinya.¹⁷⁵

Walaupun JSDF telah digelar dalam beberapa misi “kerjasama internasional”, namun nilai antimiliter dan kebijakan eksklusif untuk bertahan tetap terlihat jelas. Aturan tersebut tercantum dalam kerangka kerja legislatif secara mendetil, seperti misalnya lima kondisi sebagai syarat partisipasi Jepang dalam PKO *law* 1992:

- Pihak yang bertikai harus mencapai persetujuan gencatan senjata
- Pihak yang bertikai harus menyetujui kekuatan PBB dan partisipasi Jepang di dalamnya.
- Kekuatan PBB tidak bersekutu dengan salah satu pihak yang bertikai.
- Jepang harus memastikan ketiga prinsip awal tersebut dipenuhi, jika tidak Jepang dapat menarik pasukannya dari misi tersebut.
- Penggunaan senjata oleh personel JSDF harus dibatasi seminimal mungkin dalam sebuah kontingensi“ yang mungkin dibutuhkan untuk melindungi hidup (mereka)”¹⁷⁶

Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah mengurangi kesempatan di mana personel JSDF harus menggunakan kekuatan mematikan dalam situasi taktis atau bahkan strategis. Dalam penggelaran GSDF di Irak, kekhawatiran terhadap serangan insurjen Irak menyebabkan pemerintahan Koizumi berkeras bahwa kontingen asing lainnya harus melindungi kontingen Jepang.¹⁷⁷ Kemudian, *Anti-Terrorism Special Measures Law 2001* menekankan bahwa dukungan dari kontingen Jepang (meliputi pengisian bahan bakar, *search and rescue*, transportasi, pemeliharaan/perbaikan, serta bantuan medis atau rekonstruksi) dapat dilakukan di lautan maupun wilayah suatu negara, asalkan bebas dari

¹⁷⁵ Mengenai kebijakan rekanan aliansi yang harus direspon pada Jepang pasca 2004, lihat Masashi Nishihara, “*US Security Strategy in Asia and Prospects for an Asian Regional Security Regime*” dalam Konferensi IIPS *A New Horizon for Japan’s Security Policy—Basic Concept and Framework*, diakses dari www.iips.org/04sec/04asiasec_nishihara.pdf

¹⁷⁶ Jane’s Sentinel Security Assesment, *Armed forces, Japan*, (Jane’s Information Group, 2001)

¹⁷⁷ *Ibid.*

pertempuran dan mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan.¹⁷⁸ Hal yang sama juga tercantum dalam *Law Concerning Special Measures for Humanitarian and Reconstruction Alliance in Iraq 2003* yang menegaskan peran kontingen SDF terbatas dalam bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi, serta tidak akan terlibat dalam tindak pertempuran apapun.¹⁷⁹

Transformasi militer dan politik Jepang dan kompleksitas Okinawa memang pada akhirnya menuntut pergeseran Marinir Amerika Serikat dari Okinawa ke Guam. Sebagai tindak lanjut dari *U.S.-Japan Roadmap for Realignment Implementation*, pada 17 Februari 2009, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani perjanjian Implementasi Relokasi III MEF dari Okinawa ke Guam. Perjanjian ini memprioritaskan pemindahan III MEF, juga menerangkan kontribusi Jepang terhadap pendanaan yang mencapai 2,8 miliar US\$.¹⁸⁰ Dari jumlah ini, 336 juta US\$ merupakan biaya bagi desain dan pengembangan infrastruktur di daerah Finegayan, Pangkalan AU AS Andersen, dan Pelabuhan Apra.¹⁸¹ Sedangkan pada 2010 tercatat Jepang masih menyediakan dana kontribusi langsung sebanyak 497 juta US\$ yang dialokasikan bagi kelengkapan atau biaya serbaguna di pangkalan Amerika, selain pembangunan fasilitas relokasi di Guam.¹⁸² Kemudian pada 10 hingga 30 Oktober 2011, Amerika dan Jepang melaksanakan *Aviation Training Relocation* (ATR) di Pangkalan AU AS Andersen yang melibatkan 20 pesawat tempur F/A-18 *Hornet* dan sekitar 400

¹⁷⁸ *The Anti-Terrorism Special Measures Law*, diakses dari http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/2001/anti-terrorism/1029terohougaiyou_e.html pada 20 Januari 2012 pk. 17.04 WIB.

¹⁷⁹ *The Basic Plan regarding the measures based on the Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq*, diakses dari http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2003/12/09press_e.html pada 20 Januari 2012 pk. 17.04 WIB.

¹⁸⁰ MOFA Japan Press Release, *Signing of the Agreement between the Government of Japan and the Government of the United States of America concerning the Implementation of the Relocation of the III Marine Expeditionary Force Personnel and Their Dependents from Okinawa to Guam*, diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/2/1188058_1128.html pada 20 Januari 2012 pk. 17.04 WIB.

¹⁸¹ MOFA Japan Press Release, *Agreement between Japan and the US on the implementation of the relocation of III marine expeditionary force personnel and their dependents from Okinawa to Guam*, diakses dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/7/1193664_1138.html pada 20 Januari 2012 pk. 17.04 WIB.

¹⁸² Shirley A. Kan, "Guam: U.S. Defense Deployments", *CRS Report for Congress* 16 September 2011, hlm. 5, diakses dari www.fas.org/sgp/crs/row/RS22570.pdf pada 12 Maret 2011 pk. 18.27 WIB.

personel pendukungnya.¹⁸³ Armada ini aslinya berasal dari *Marine Air Group* (MAG)-12 yang dipangkalan di Iwakuni. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional antara Jepang dan Amerika Serikat dan, selagi mengurangi dampak pelatihan di Jepang dengan menyebar wilayah pelatihan ke berbagai fasilitas militer di Pasifik. Latihan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian program ATR tahun 2007, dimana setelah penandatanganan perjanjian tersebut telah dilakukan 25 kali latihan (lebih dari 750 sorti penerbangan) per Juli 2011. Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2011 kembali ditandatangani perjanjian tambahan yang kemudian memperluas lokasi ATR ke wilayah kekuasaan Amerika Serikat, seperti Guam ataupun Hawaii. Secara teknis, sebelum perjanjian perluasan ini diadakan, terdapat dua tipe ATR yaitu Tipe I yang melibatkan 1-5 pesawat dan berlangsung selama 1-7 hari, serta Tipe II yang melibatkan 6-12 pesawat dan berlangsung selama 8-14 hari. Perjanjian perluasan menambahkan satu tipe ATR lagi, yaitu ATR Tipe III yang melibatkan 20 pesawat dan armada pendukungnya selama 15-20 hari. Upaya Jepang untuk tetap mempertahankan kehadiran Amerika Serikat juga dapat dilihat dalam ATR ini, dimana Jepang menanggung biaya pelatihan sebesar 75% sedangkan Amerika Serikat menanggung biaya sebesar 25%. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya dan efisiensi operasi dengan wilayah keamanan yang meluas.

Relokasi ini sekilas terlihat merugikan karena Guam lebih jauh sekitar 1.000nm dari Okinawa, sehingga lebih memakan waktu untuk melakukan respon seandainya pecah konflik di Asia Timur. Namun Guam adalah kandidat terbaik karena memang merupakan bagian dari koloni Amerika Serikat di Pasifik.¹⁸⁴ Guam juga merupakan alternatif pangkalan terdekat dari Asia Timur. Pasca tutupnya pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina seperti Pangkalan AU Clark pada 1991 dan Pangkalan AL Subic Bay pada 1992 (yang bahkan lebih jauh

¹⁸³ U.S. Forces, Japan Press Release, *Japan-based aircraft to conduct training from Guam*, diakses dari <http://www.usfj.mil/2011%20Releases/ATR%20Release%2010052011.pdf> pada 30 Januari 2012 pk. 15.45 WIB.

¹⁸⁴ Beberapa pertimbangan soal Guam dapat dilihat pada Shirley A. Kan, *ibid.*, dan Kolonel Jerry M. Rivera, *Guam USA: America's Forward Fortress in Asia Pacific*, (Pennsylvania: U.S. Army War College, 2002), diakses dari <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA404522> pada 30 Januari 2012 pk. 15.47 WIB.

dari Asia Timur) AS praktis tidak memiliki pangkalan aju untuk melakukan kontingensi apabila pecah konflik di Asia Timur, kecuali pangkalan di Jepang dan Korea Selatan. Penempatan kekuatan militer di wilayah negara lain, misal di Asia Tenggara seperti Thailand atau Singapura, dinilai akan lebih kompleks karena fasilitas militer setempat yang lebih terbatas, selain memerlukan izin khusus ataupun perjanjian kerjasama keamanan tersendiri. Penempatan ini juga berpotensi mengundang konflik internal dalam negara tersebut, maupun konflik eksternal dengan negara tetangga yang mencurigai intensi penempatan kekuatan militer tersebut. Di sinilah penduduk Guam berperan dengan menyambut baik upaya relokasi tersebut, berdasarkan pandangan mereka bahwa relokasi ini merupakan kesempatan bagi Guam untuk berperan dalam keamanan regional. Pertimbangan lain untuk melakukan relokasi ini adalah penurunan ketegangan dengan Cina maupun negara Asia lainnya yang tidak ingin melihat ekspansi militer Amerika Serikat di area sekitar mereka, sehingga diharapkan tindakan ini akan mampu menurunkan dorongan bagi *competing powers* untuk melakukan ekspansi dan modernisasi angkatan bersenjata.¹⁸⁵ Dalam menyikapi waktu reaksi menghadapi konflik yang mungkin terjadi, salah seorang anggota militer menyatakan bahwa dukungan intelijen berperan untuk meyakinkan tidak akan ada eskalasi konflik di Asia Timur hingga ke tahap serius dalam waktu singkat, sehingga waktu respon beberapa hari dengan menggunakan kapal—atau beberapa jam dengan menggunakan pesawat—masih bisa diterima. Selanjutnya, upaya Amerika Serikat mempertahankan *deterrence* akan dilakukan dengan meningkatkan kehadiran grup tempur kapal induk di Pasifik Barat. Untuk melakukan hal tersebut, maka *Secretary of the Navy*¹⁸⁶ sedang mengkaji pilihan penambahan tiga hingga empat unit *surface combatants* dan kapal selam nuklir strategis di wilayah tersebut. Sedangkan *Secretary of the Air Force* juga akan membuat rencana perluasan pangkalan yang akan digunakan untuk kontingensi di Pasifik Barat, dengan salah satu tujuannya menjamin kelancaran suplai

¹⁸⁵ Declan Hayes, *Japan, The Toothless Tiger* (Boston: Tuttle Publishing, 2001), hlm. 69. Hayes menulis bahwa kapasitas Cina untuk melakukan serangan pada negara yang bertindak sebagai *host* dari kekuatan militer Amerika Serikat, menyebabkan pertimbangan tambahan bila Jepang ingin memperkuat FOB yang ditempati oleh kekuatan asing tersebut. Dikhawatirkan, melakukan perkuatan justru akan memicu serangan Cina atau memperburuk krisis di Asia Timur.

¹⁸⁶ Posisi setara Ditjen di Kemenhan RI.

logistik dan bahan bakar bagi unit yang beroperasi di wilayah tersebut. Di sisi lain, Jepang juga dapat melihat Guam sebagai pangkalan alternatif bagi SDF terkait dengan pembiayaan relokasi yang signifikan.¹⁸⁷ Apalagi melihat contoh latihan gabungan rutin antara ASDF dan USAF bersandi *Cope North* sejak 1978, dimana latihan tahunan tersebut merupakan satu-satunya kesempatan bagi ASDF untuk berlatih menggunakan munisi aktif. Kesempatan latihan juga kian didukung dengan sedikitnya lalu lintas udara dan lokasi Pangkalan AU Andersen di ujung sebelah utara Guam, sehingga memberikan ruang manuver yang lebih baik dan mengurangi kebisingan serta risiko bagi penduduk lokal.¹⁸⁸



¹⁸⁷ *Summary of the Report: Strategic Implications for Japan of the Buildup of U.S. Bases in Guam September 2007*, diakses dari <http://www.rips.or.jp/english/seminars/guam.html> pada 29 Maret 2011 pk. 17.22 WIB.

¹⁸⁸ *Cope North*, diakses dari <http://www.andersen.af.mil/library/events/copenorth/index.asp> pada 30 Januari 2012 pk. 15.49 WIB.

Japan, U.S. train side-by-side in Cope North, diakses dari <http://www.kuam.com/Global/story.asp?S=11961639> pada 30 Januari 2012 pk. 15.52 WIB.

U.S. military exercise to be shifted to Guam, diakses dari <http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T111004005485.htm> pada 30 Januari 2012 pk. 16.00 WIB.

BAB 3

PERTIMBANGAN KEAMANAN JEPANG

Pada bab 3 penelitian ini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor di sekitar Jepang yang turut mendorong tindakan Jepang untuk melakukan *balancing*. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu 1.) intensi Cina untuk bertindak revisionis untuk tetap melakukan reunifikasi dengan Taiwan, termasuk dengan membangun kapabilitas perang modern untuk mendukung pelaksanaan strategi antiakses, 2.) *balance of force* Cina-Jepang-Amerika Serikat dimana keseluruhan kekuatan militer Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang masih unggul dibandingkan dengan militer Cina, sekalipun anggaran militer Cina telah melampaui Jepang dan Cina telah melakukan peningkatan kapabilitas alutsista cukup signifikan dan 3.) kompleksitas wilayah Asia Timur yang terbelah masih cukup menguntungkan bagi Jepang untuk melakukan *balancing* terhadap Cina, termasuk dengan kehadiran Amerika Serikat, hubungan keamanan yang dimiliki Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Taiwan, serta hubungan ekonomi antara ketiga negara.

3.1 Intensi Cina sebagai kompetitor Jepang

3.1.1 *Status quo* atau *Revisionist State*?

Pertimbangan Jepang dalam pemilihan strategi keamanan tentunya tidak terlepas dari ancaman yang diperkirakan timbul dari negara di sekitarnya. Cina, sebagai rival Jepang dari masa dinasti, masih tetap dilihat sebagai ancaman besar, apalagi melihat modernisasi militer Cina yang sangat pesat serta pemikitan awam bahwa Cina cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Dalam bagian ini penulis akan memaparkan analisis mengenai persepsi terhadap Cina, apakah Cina dianggap memiliki intensi mempertahankan *status quo* atau akan berusaha merevisi *status quo*.

Koro Bessho mengungkapkan bahwa Cina memiliki identitas ganda sebagai negara berkembang maupun *world power*.¹⁸⁹ Cina tidak pernah melihat dirinya sebagai negara *superpower*, calon *superpower* atau berpihak pada negara-negara

¹⁸⁹ Koro Bessho, "*Identities and Security in East Asia*", IISS *Adelphi Paper* 325, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 31.

maju, tetapi justru memposisikan diri sebagai pemimpin dari negara-negara berkembang sehubungan dengan *three-world theory* yang dianutnya. Contohnya, Cina ikut memprakarsai Konferensi Asia-Afrika 1955 yang menjadi dasar bagi Gerakan Non-Blok. Hanya saja posisi ini menjadi sulit untuk dipertahankan terkait aliansi strategis Cina dengan Amerika Serikat pada 1970 melawan Soviet. Dunia multipolar pasca Perang Dingin yang dikonsepsikan oleh Cina sepertinya tetap berdasar pada dirinya sebagai inti, serta Amerika Serikat dan Rusia sebagai “rekan strategisnya”.¹⁹⁰ Walaupun kapabilitas militer dan kekuatan ekonomi Cina masih berada di bawah Amerika Serikat, namun Cina telah bertindak secara politis sebagai *world power*. Posisi Cina sebagai *world power* juga ditegaskan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, dan sumber daya yang signifikan.

Dari segi sejarah dinasti, Cina melihat dirinya sebagai sebuah dunia sendiri, dengan Kaisar sebagai penguasa yang merupakan titisan Dewa.¹⁹¹ Bessho mengemukakan bahwa sejarah ini juga melihat tidak ada batas fisik antara Cina dan Eropa, tetapi hanya sebagai daerah ‘barbar’ yang memiliki kesetiaan pada Kaisar dalam tingkatan berbeda. Sehingga benua Asia sekalipun juga dilihat hanya sebagai periferi, bukan sebagai daerah asal. Akibatnya, terdapat kepercayaan bahwa Cina adalah *world power*, sedangkan hubungan strategis dengan negara-negara Asia lainnya tidak terlalu diperhatikan.

Memang perspektif Cina sebagai *world power* dapat ditarik dari masa Dinasti, namun tetap harus ada penjelasan yang lebih konkret mengenai bagaimana Cina memandang negara lain, terutama negara-negara yang memainkan peranan dalam dinamika *power* di Asia Timur. Cina melihat Aliansi Keamanan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai dua macam ancaman: 1.) aliansi tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana *containment* terhadap Cina, dan 2.) jika bukan *containment*, aliansi tersebut merupakan bentuk *hedging* ataupun semacam upaya *balancing* terhadap Cina. Pendapat tersebut terutama didasarkan pada sikap ambigu aliansi keamanan pada kasus Taiwan sekalipun Amerika Serikat memiliki intensi yang jelas untuk membantu Taiwan.¹⁹²

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Xu Heming, *The Redefinition of the U.S. Japan Security Alliance and Its Implications to China*, (Sigur Center for Asian Studies, 1998), hlm. 8 dan 14, diakses dari

Kesulitan dalam pembahasan mengenai aspek strategis Cina adalah menemukan informasi yang benar-benar akurat. Pemerintah Cina cenderung menutupi informasi strategis yang esensial dari warganegara, terlebih lagi bagi orang asing.¹⁹³ Sikap tidak transparan ini yang kerap menyebabkan negara-negara mencurigai intensi Cina sebenarnya. Dalam melihat perilaku Cina, kalangan akademisi umumnya berpendapat bahwa Cina berkembang menjadi lebih agresif. Pendapat tersebut muncul dengan karena empat aspek¹⁹⁴: 1.) bertambahnya sumber-sumber informasi yang bisa dianalisis pasca Perang Dingin, 2.) interpretasi terhadap sejarah komunisme dalam perkembangan Cina, 3.) berkembangnya persepsi bahwa Cina telah menjadi ancaman strategis melalui kekuatan ekonomi dan perkembangan militer, 4.) penerjemahan sikap Cina di masa sekarang dipengaruhi oleh transformasi politik dalam negeri.

Gelombang pertama kajian *use of force* Cina mengambil sudut pandang tahun 1960-1980 dengan menggunakan sumber sekunder dan ditambah dengan sumber primer yang terbatas, sedangkan gelombang kedua kajian keamanan Cina berfokus pada intervensi Cina di Korea melalui ingatan dan wawancara pemimpin militer utama. Kedua kajian ini masih sependapat dengan interpretasi John K. Fairbank yang menyatakan bahwa Cina mengutamakan penghindaran perang dan sangat terbuka dalam memberi tanda kemungkinan mulainya perang melalui *deterrence*. Bila perang tetap terjadi, maka pemimpin Cina akan berusaha membatasi lingkup dan durasi dari perang tersebut. Akan tetapi kajian ketiga mengambil kesimpulan yang berbeda dari dua kajian sebelumnya, walaupun masih menggunakan studi kasus yang sama. Kajian ini lebih menyorot pada sikap konfrontatif Cina, kecenderungan untuk melakukan intervensi, dan tujuan awal Cina yang ambisius untuk mengeluarkan PBB dari Korea yang didasarkan pada analisis terhadap dokumen Cina era-1950 yang telah dibuka untuk umum, serta kesaksian

<http://www.gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP3-Xu.pdf> pada 29 Maret 2011 pk. 17.28 WIB. Posisi ini dikaitkan juga dengan komitmen Amerika Serikat dalam *Taiwan Relations Act 1979*.

¹⁹³ Cina memiliki kecenderungan untuk menutupi informasi strategis negara, sekalipun bagi warganegaranya sendiri. Opini ini diperkuat oleh hasil analisis Office of Secretary of Defense terhadap kekuatan militer Cina 2007/2010 yang menyatakan bahwa Cina cenderung menggunakan kerahasiaan dan strategi pengelabuan dalam upaya *decision-making* keamanan nasional. Kerahasiaan dan pengelabuan tersebut digunakan terkait upaya memberikan mispersepsi pada lawan dan mengamankan posisi yang lebih strategis terlebih dahulu.

¹⁹⁴ Andrew Scobell, *China's Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March* (New York: Cambridge 2003), hlm. 16-19.

yang baru mengemuka dari para pemimpin militer di era tersebut dan analisis sejarah baru (salah satunya penerjemahan sejarah komunisme di Cina yang melibatkan kejahatan rezim). Sebagai akibatnya, Cina dianggap asertif dan agresif.

Penerjemahan sikap Cina ini juga berkaitan dengan perspektif elit pemerintah terhadap situasi yang mengelilingi mereka. Pada masa dinasti, Cina masih memandang dirinya sebagai pusat dari dinamika hubungan luar negeri, sehingga Cina berusaha membangun gambaran bahwa dirinya merupakan negara yang penuh dengan kebaikan dan perdamaian. Berbeda di awal abad ke-20; Cina memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya dimana, dirinya sebagai negara yang miskin dan lemah harus berjuang dalam meningkatkan derajatnya secepat mungkin. Sebagai akibatnya, Cina cenderung bertindak lebih asertif untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat suatu negara untuk mencari kejelasan soal apa yang pemimpin mereka lakukan, pemerintah Cina perlu meyakinkan warganegaranya bahwa negara akan berusaha semaksimal mungkin menjamin keamanan dan kemakmuran mereka.

Penafsiran sikap tersebut, menurut Andrew Scobell, menimbulkan apa yang disebutnya sebagai “*Chinese Cult of Defense*” dalam pertahanan dan keamanan Cina.¹⁹⁵ Scobell berargumen bahwa kondisi tersebut muncul dari budaya strategis yang bersifat dualistik; satu sisi didasarkan pada perspektif Confucius yang cenderung menghindari konflik dan berorientasi defensif, sedangkan sisi lainnya didasarkan pada Realpolitik yang cenderung memanfaatkan solusi militer dan berorientasi ofensif. Sebagai akibatnya, pemimpin Cina akan menggunakan operasi militer ofensif untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, sambil merasionalisasi bahwa tindakan tersebut murni bersifat defensif dan digunakan sebagai *last resort*. Cina disebutkan memiliki dua prinsip keamanan utama, yaitu kesatuan nasional dan persepsi ancaman yang selalu dalam kondisi siaga. Dalam menghadapi ancaman eksternal, prinsip ini diperkuat dengan dua prinsip lainnya, yakni Cina hanya akan terlibat dalam *just war* dan Cina memegang erat konsep strategis *active defense*. Sedangkan dalam menghadapi ancaman dalam negeri, Cina memiliki ketakutan yang amat sangat terhadap perpecahan atau kekacauan dalam negeri, selain

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm.15.

penekanan bahwa komunitas berada di atas individu. Menurut penelitian Scobell, strategi ini berlangsung konstan, namun perkembangan pesat kapabilitas militer Cina menyebabkan strategi ini menjadi lebih berbahaya bagi negara ataupun entitas lain yang berusaha mengganggu kedaulatan atau bersilangan kepentingan nasionalnya dengan Cina.¹⁹⁶

3.1.2 Kebijakan *Peaceful Rise* dan Strategi Keamanan Cina

Secara resmi, Cina memiliki kebijakan *peaceful rise* yang tercantum dalam buku putih *China's Peaceful Development Road 2005*. Kebijakan ini terdiri atas lima prinsip yaitu¹⁹⁷:

- *Peaceful development* sebagai cara modernisasi Cina yang tidak terelakkan.
- Mewujudkan kedamaian dan pertumbuhan dunia dan melalui pertumbuhan Cina.
- Berkembang dengan mengandalkan kekuatan, perubahan, dan inovasi mandiri.
- Mencari *mutual benefit* dan *common development* bersama dengan negara lain.
- Membangun *sustained peace* dan *common prosperity* di dunia.

Sekilas memang prinsip *peaceful rise* ini menyimpulkan upaya Cina untuk membangun gambaran dirinya sebagai *great power* yang bertanggungjawab membangun stabilitas internasional pasca Insiden Tiananmen 1989, serta ujicoba nuklir dan Krisis Selat Taiwan 1995-1996. Dimulai dari penanganan Beijing terhadap pengembalian Hong Kong dan transisi kepemimpinan setelah Deng Xiaoping meninggal pada 1997, Cina mulai berbenah diri dalam hubungannya dengan negara-negara lain.¹⁹⁸ Pada Oktober 1997, Jiang Zemin melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk “membangun *strategic partnership*”. Dalam kunjungan tersebut, Jiang mengekspresikan ketertarikan Cina untuk mengurangi proliferasi nuklir dan pengurangan tarif pada 2005. Kunjungan ini berbuah diangkatnya embargo barang-barang nuklir oleh Amerika Serikat. Cina juga berusaha menampilkan sikap “tegas pada prinsip namun pragmatis” dengan pelepasan Wei Jiangsheng, salah seorang tokoh (terkait pendapat Beijing mengenai

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹⁷ *White Paper on Peaceful Development Road Published*, diakses dari <http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/152669.htm> pada 21 Desember 2011 pk. 11.05 WIB.

¹⁹⁸ Bessho, *op cit.*, hlm. 27-28.

HAM). Clinton melakukan kunjungan balasan pada Juni-Juli 1998, sekaligus meresmikan hubungan kemitraan antara kedua negara.

Selain dengan Amerika Serikat, Cina juga melakukan perbaikan hubungan dengan negara lain.¹⁹⁹ Cina menyelesaikan masalah perbatasan yang berlarut dengan Rusia pada November 1997 dan berusaha untuk meningkatkan hubungan kedua negara dari “*constructive cooperation*” menjadi “*strategic partnership*”. Kemudian ujicoba nuklir Cina yang mengakibatkan ketegangan dalam hubungan dengan Jepang, sehingga Jepang menghentikan bantuan dana bagi ekonomi Cina. Hubungan ini membaik ketika pada September 1997 Perdana Menteri Hashimoto dari Jepang melakukan kunjungan ke Cina, yang dibalas oleh kunjungan ke Jepang oleh Perdana Menteri Li Peng dua bulan kemudian. Pada Februari 1998, Menteri Pertahanan Cina Chi Haotian berkunjung ke Jepang untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Dalam kunjungan tersebut kedua negara menyetujui untuk meningkatkan pertukaran staf dalam angkatan bersenjata, termasuk kunjungan timbal balik antara kepala staf, serta (kemungkinan) angkatan laut masing-masing. Termasuk dengan kunjungan Jiang Zemin ke India pada Desember 1996 yang tercatat sebagai kali pertama kepala negara Cina berkunjung ke India, maka terlihat Cina berusaha memposisikan dirinya sebagai anggota komunitas internasional yang penting, bertanggungjawab, dan setara dengan *major power*. Cina juga berusaha memainkan peran bertanggungjawab terhadap isu-isu yang berpotensi men-destabilisasi Asia Timur. Contohnya, peran Cina sebagai satu-satunya negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan ketiga negara (Amerika Serikat dan dua Korea) dalam *Four-Party Talks*. Kemudian sejak akhir 1997, Cina menghimbau Taiwan untuk kembali melakukan perundingan antar-Selat, yang kemudian terwujud pada tahun 1998.

Melihat ke dalam dasar pertahanan Cina, buku putih *China's National Defense in 2004* menyatakan bahwa tujuan Cina adalah memiliki militer yang modern dan revolusioner untuk menjamin keamanan nasional.²⁰⁰ Sedangkan, buku

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29.

²⁰⁰ *China's National Defense 2004* diakses dari http://english.gov.cn/official/2005-07/28/content_18078.htm pada 21 Desember 2011 pk. 10.35 WIB.

Referensi bagi modernisasi alutsista menurut *Office of Secretary of Defense* adalah sebagai berikut:

putih *China's National Defense in 2006* mengidentifikasi bahwa ancaman utama bagi keamanan nasional dan integritas teritorial Cina adalah kemungkinan terjadinya deklarasi kemerdekaan Taiwan yang didukung oleh Amerika Serikat.²⁰¹ Perkembangan ini meneruskan *Anti-Secession Law* yang dikeluarkan Cina pada Maret 2005 yang mengizinkan penggunaan kekuatan secara formal terhadap Taiwan apabila yang bersangkutan mendeklarasikan kemerdekaannya, atau pilihan reunifikasi secara damai sudah tidak bisa diwujudkan sama sekali.²⁰² Namun, dalam buku putih tersebut Cina juga menyatakan akan mewujudkan kebijakan pertahanan yang murni bersifat defensif, menekankan kembali bahwa Cina akan tetap mempertahankan kebijakan *no first use* bagi senjata nuklir, dan memanfaatkan kapabilitas bersangkutan hanya sebagai strategi nuklir defensif. Berbeda dengan buku putih sebelumnya, buku putih 2006 tidak menyebutkan konflik asimetris, namun mendeskripsikan *strategic realignment* yang dilakukan Amerika Serikat sebagai “faktor tunggal yang menambah kompleksitas keamanan regional”. Tujuan modernisasi militer disebutkan sebagai pencapaian “dasar yang kokoh” pada 2010 dan berlanjut pada “*decisive progress*” di 2020, ditambah mencapai kapabilitas agar Cina dapat memenangkan *network centric warfare* di tahun 2050.

3.1.3 Modernisasi militer Cina

Tujuan kunci dari modernisasi militer Cina adalah pengembangan kapabilitas demi melakukan *strategic coercion* dan *strategic denial*—terutama

-*Surface combatant* merupakan sebuah *platform* multimisi, atau minimal memiliki kapabilitas signifikan dalam dua area peperangan. Misal, *destroyer* kelas *Luzhou* yang mampu digunakan dalam misi antikapal ataupun misi pertahanan udara.

-Kapal selam harus mampu menembakkan rudal jelajah antikapal. Misal, kapal selam kelas *Shang* yang mampu menembakkan rudal jelajah YJ-83.

-Pesawat tempur generasi ke-4 (Su-27, J-10) yang memiliki kemampuan manuver yang baik dan mampu menggunakan munisi berpemandu, atau minimal memiliki kapabilitas generasi ke-4 (JH-7).

-SAM jarak jauh dengan kemampuan deteksi *stealth* dan sasaran yang terbang sangat rendah, selain tahan terhadap gangguan dari pengacau elektronik. Misal, rudal SA-10 “*Grumble*” dan SA-21 “*Growler*”.

²⁰¹ Bab I, “*The Security Environment*”, dalam *China's National Defense 2006*, diakses dari <http://www.china.org.cn/english/features/book/194486.htm> pada 21 Desember 2011 pk. 11.21 WIB.

²⁰² *Anti-Secession Law (Full text)*, diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2005-03/14/content_2694317.htm pada 21 Desember 2011 pk. 11.25 WIB.

ditujukan pada Amerika Serikat.²⁰³ Tujuan ini ditunjukkan pada akhir tahun 1995 dengan pernyataan Jenderal Xiong Guangkai selaku Kepala Departemen Staf Jenderal *People Liberation Army* (PLA—Angkatan Bersenjata Cina), bahwa intervensi Amerika Serikat dapat menyebabkan serangan nuklir terhadap Los Angeles.²⁰⁴ Kemudian, pada Agustus 1996 seorang pejabat *arms control* dari Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa sebagai bagian dari Cina, maka kebijakan *no first use* dari senjata nuklir Cina menjadi tidak berlaku bagi Taiwan.²⁰⁵ Contoh lain dapat dilihat dalam tanggapan Jenderal Zhu Chengdu terhadap pertanyaan jurnalis Danny Gittings pada 2005, terkait “taktik Cina yang mungkin dilaksanakan dalam perang konvensional di Taiwan.” Jenderal Zhu menyatakan bahwa, “Bila Amerika ikut campur dalam konflik ini, bila Amerika mengarahkan rudal dan munisi berpemandu lain pada sasaran di wilayah Cina, maka sepertinya Cina harus membalasnya dengan senjata nuklir”.²⁰⁶ Gittings juga menyatakan bahwa Jenderal Zhu mengatakan tindakan tersebut dapat berdampak pada hancurnya “seratus hingga dua ratus” kota di Amerika. Richard Fisher menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya pemaparan mengenai doktrin nuklir Cina secara gamblang, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai penekanan pada strategi nuklir defensif, selain penggunaan ancaman nuklir untuk melakukan koersi pada lawan. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin militer Cina ingin membuat Amerika Serikat percaya bahwa Cina tidak akan segan untuk menggunakan senjata nuklir apabila Amerika Serikat bersikeras mempertahankan Taiwan dari serangan Cina. Posisi ini ditunjukkan dengan penggelaran ICBM tetap dan bergerak milik Cina, rencana penggelaran ICBM bergerak yang memiliki jarak lebih jauh, serta penggelaran SLBM jarak jauh. Rudal-rudal ini—tiga tipe diantaranya mungkin memiliki hulu ledak MIRV—direncanakan akan aktif sebelum 2010.

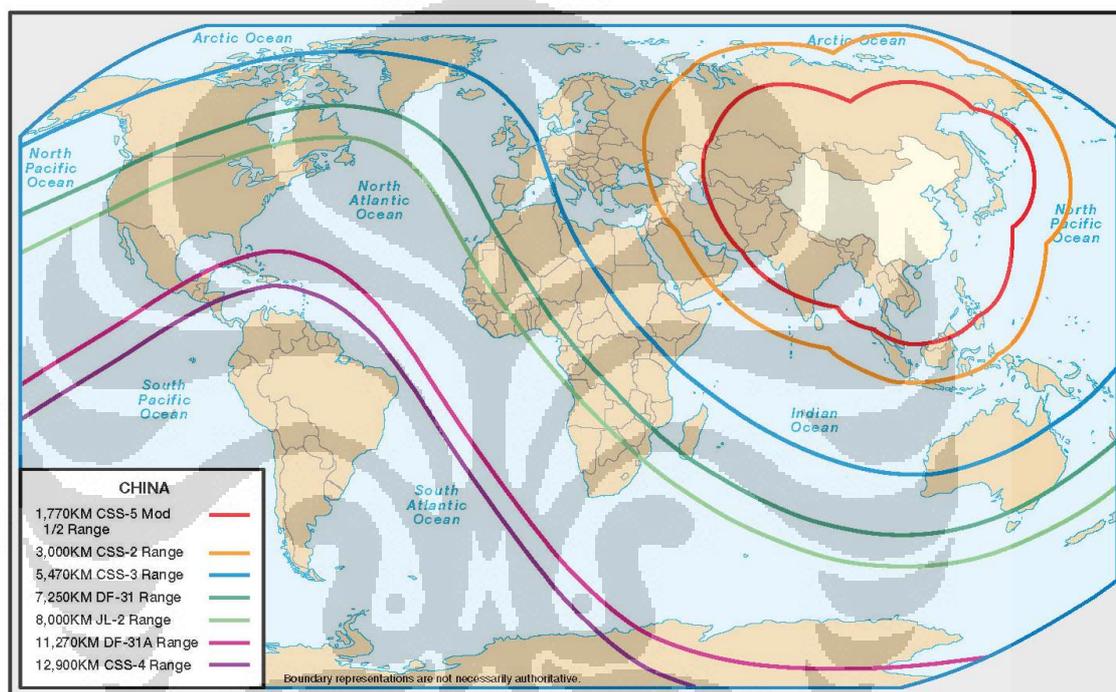
²⁰³ Richard D. Fisher, Jr., “China’s Military Power: An Assessment from Open Sources”, *Testimony Before the Armed Services Committee of the U.S. House of Representatives*, 27 Juli 2005 hlm. 3, diakses dari, http://www.strategycenter.net/docLib/20050731_TestRDFHASC072705.pdf pada 22 September 2011 pk. 02.23 WIB.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Op cit.*, Fisher mengutip tulisan Gittings, “General Zhu Goes Ballistic,” pada *Wall Street Journal*, 18 Juli 2005.

Berbicara nuklir dan proyeksi kekuatan, maka doktrin militer Cina juga tidak dapat ditinggalkan. Cina memiliki doktrin ofensif-defensif dalam penggunaan kekuatan militer yang menyatakan bahwa Cina dapat melakukan *preemptive strike* terhadap lawan sebagai tindakan membela diri, dengan syarat lawan Cina tersebutlah yang melakukan inisiasi konflik. *Preemptive strike* juga hanya ditargetkan pada pihak yang menginisiasi konflik, bukan sekutu mereka yang akan turut serta dalam kontingensi militer bila mengetahui sekutunya diserang.²⁰⁷



Peta 3.1. Jangkauan MRBM dan ICBM Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

Deterrence nuklir Cina merupakan tanggungjawab dari *Strategic Missile Force* (SMF) atau *Second Artillery Corps* yang mengontrol seluruh rudal strategis yang diluncurkan dari darat, termasuk *theatre missile* konvensional. SMF melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah yang diteruskan dari struktur komando CMC -> pangkalan rudal -> brigade rudal -> batalion peluncur, dan

²⁰⁷ Michael P. Flaherty, "Red Wings Ascendant. The Chinese Air Force Contribution to Antiaccess", dalam *Joint Force Quarterly issue 60*, (NDU Press, caturwulan pertama 2001), hlm. 97. Diakses dari http://www.ndu.edu/press/lib/images/jfq-60/JFQ60_95-101_Flaherty.pdf pada 21 Desember 2011 pk. 10.58 WIB.

memiliki enam pangkalan operasional yang diidentifikasi berdasarkan penomoran 51st - 56th. Pangkalan 51st, 52nd, 55th, dan 56th merupakan pangkalan “*Army Level*”, sedangkan dua pangkalan lainnya, 53rd dan 54th, merupakan pangkalan “*Sub-Army Level*” atau berada setengah tingkat lebih rendah dalam hierarki PLA. Selain enam pangkalan ini, terdapat satu pangkalan pendukung, yaitu Pangkalan Ke-22 yang terletak di Baoji, Provinsi Shaanxi. Pangkalan “*Army-Level*” ini secara resmi digunakan untuk latihan dan ujicoba, namun analis pertahanan Barat memperkirakan Pangkalan Ke-22 juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hulu ledak bagi rudal Cina.²⁰⁸

Tabel 3.1. Inventaris Rudal Cina

Jenis Rudal	Jumlah		Jarak Jangkauan
	2006	2011	
ICBM			
DF-4/CSS-3	10-14/20-24	10	5.470+km
DF-5A/CSS-4	20/20	20	8.460-12.900+km
DF-31/CSS-X-9	pengembangan	12	7.250+km
DF-31A/CSS-9	pengembangan	24	11.270+km
IRBM/MRBM			
DF-3/CSS-2 IRBM	6-10/14-18	2	2.790+km
DF-21/CSS-5 Mod 1	34-38/19-50	80	1.770+km
DF-21A/CSS-5 Mod 2			
DF-21C/CSS-5 Mod 3 MRBM		36	
SLBM			
JL-1/CSS-N-3	10-14/10-14	20	1.770+km
JL-2/CSS-NX-4	pengembangan	110	8.000+km
SRBM			

²⁰⁸ *Chinese Strategic Missile Force*, diakses dari <http://www.sinodefence.com/strategic/default.asp> pada 21 Desember 2011 pk. 13.10 WIB.

DF-11/CSS-7	100-120/435- 475	108	600km
DF-15/ CSS-6	70-80/275-315	96	300km

Sumber:

- Office of the Secretary of Defense, *ANNUAL REPORT TO CONGRESS: Military Power of the People's Republic of China 2006 & 2007*
- Cordesman & Hammond, *THE MILITARY BALANCE IN ASIA: 1990-2010. A Quantitative Analysis* (CSIS, 14 Sept 2010)
- www.missilethreat.com

Selain melakukan pengembangan di atas, PLA juga mengembangkan kapabilitas pertahanan udara, perang udara, luar angkasa, serta perang laut yang terintegrasi untuk menutup akses kekuatan Amerika Serikat ke daerah di sekitar Taiwan. Contohnya, pengembangan kapabilitas pertahanan udara terintegrasi yang terdiri dari SA-10, SA-20, HQ-9, dan HQ-15 yang dikoordinasikan dengan modul kontrol dan komando milik SAM jarak jauh S-300PMU2. Kemudian dari segi kekuatan udara, Cina melakukan pengembangan penempur *stealth* J-XX, penempur generasi 4.5 (J-11B, J-10), pembom tempur JH-7, serta membeli penempur multiperan Su-30MKK dari Rusia pada 2003-2004. Sebagai unsur dukungan udara dan kontrol peperangan, Cina juga menambah armada *air refueling* dengan pengadaan tanker Il-78 "Midas" dari Rusia pada 2005, pengadaan pesawat AWACS²⁰⁹ KJ-2000 pada 2006-2007, serta satelit komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan ISR, maka Cina melakukan pembelian UCAV *Harpy* dari Israel pada 1994 dan mengembangkan UAV *Xianglong* secara mandiri.²¹⁰ Selanjutnya dari segi kekuatan maritim, Cina membeli kapal induk 65.000 ton eks-*Varyag* dari Ukraina pada 1998 dan menyelesaikannya secara mandiri.²¹¹ Kapal induk tersebut telah menjalani ujicoba sebanyak dua kali, yang

²⁰⁹ *Airborne Early Warning and Control System*, atau Sistem Peringatan Dini dan Kontrol Udara. KJ-2000 didasarkan pada A-50 "Mainstay" Rusia. Cina memutuskan mengembangkan KJ-2000 secara mandiri, terkait protes Amerika Serikat ketika Cina ingin membeli A-50I dengan kelengkapan radar *Phalcon* dari Israel, dengan alasan sistem tersebut memiliki kapabilitas setara dengan AWACS yang dioperasikan oleh USAF. KJ-2000 dilengkapi dengan radar AESA lokal dengan perkiraan jarak deteksi sejauh 300 hingga 400km. Lihat *KongJing-2000 Airborne Warning & Control System*, <http://www.sinodefence.com/airforce/specialaircraft/kj2000.asp>, dan *PLA-AF Airborne Early Warning & Control Programs*, <http://www.ausairpower.net/APA-PLA-AWACS-Programs.html>.

²¹⁰ *Harpy Unmanned Aerial Vehicle*, diakses dari <http://www.sinodefence.com/airforce/uav/harpy.asp> pada pada 21 Desember 2011 pk. 13.17 WIB.

²¹¹ *The Rising Sea Dragon in Asia: Varyag Transformation*, diakses dari <http://www.jeffhead.com/redseadragon/varyagtransform.htm> pada pada 21 Desember 2011 pk.

pertama pada 9 Oktober hingga 14 Oktober 2011 dan yang kedua pada 29 November hingga 11 Desember 2011. Oleh pembuatnya, kapal ini diklasifikasikan sebagai “*heavy aircraft-carrying cruiser*” dengan misi utama melakukan dukungan dan pertahanan udara bagi armada Soviet (kapal selam pembawa rudal balistik, *surface combatants*, dan pesawat serang maritim).²¹² Namun belum diketahui apabila Cina memutuskan untuk tidak menggunakan peluncur rudal SS-N-19 yang tersedia pada *Shi Lang* (nama yang diberikan pada eks-Varyag) demi memperluas hangar pesawat sebagaimana yang Rusia lakukan.²¹³ Armada udara konvensional yang dimaksud mencakup penempur kelas Su-33 “*Naval Flanker*” serta helikopter AEW&C dan helikopter antikapal selam Ka-28 “*Helix*”. Amerika Serikat dan Jepang menuntut Cina memberikan penjelasan atas akuisisi alutsista ini, namun menurut Cina kapal induk tersebut hanya akan digunakan sebagai sarana latihan dan riset.²¹⁴

Ilustrasi strategi antiakses ini dapat dikemukakan sebagai berikut.²¹⁵

Pergeseran fungsi pertahanan udara Cina dari pertahanan bagi infrastruktur militer, industri, dan politik menjadi Pertahanan Udara Terpadu. Konsep ini menekankan integrasi jaringan pertahanan udara yang memanfaatkan prinsip kontraoperasi udara defensif maupun ofensif. Profil tindakan kontraoperasi ini melebihi sekadar pertahanan udara bagi wilayah Cina, namun juga berupa serangan terhadap pangkalan dan logistik lawan (seperti kapal induk dan jalur suplai) untuk menurunkan kemampuan lawan melaksanakan operasi udara. Apabila intervensi militer benar-benar terjadi, PLAAF akan memanfaatkan laser darat maupun senjata antisatelit untuk menghancurkan aset luar angkasa Amerika Serikat (misalnya satelit mata-mata dan satelit deteksi peluncuran rudal yang penting bagi Washington). Pada

13.39 WIB. Kapal ini aslinya merupakan kapal kedua dari kelas *Admiral Kuznetsov* milik Soviet, namun dengan runtuhnya Soviet pembangunan kapal ini dihentikan pada 1992 dan kepemilikannya dialihkan ke Ukraina.

²¹²Chris Miller & David Miller, *Modern Naval Combat* (London: Salamander Books, 1986), hlm. 110. Kelas *Kuznetsov* masih memiliki misi yang sama dengan *Kiev*.

²¹³*Rebuilding the carrier: new look of Admiral Kuznetsov*, diakses dari <http://rusnavy.com/nowadays/concept/reforms/rebuildingthecarrier/> pada 21 Desember 2011 pk. 13.43 WIB.

²¹⁴*Varyag Aircraft Carrier*, diakses dari <http://www.sinodefence.com/navy/surface/varyag.asp> pada 21 Desember 2011 pk. 13.48 WIB.

²¹⁵ Ilustrasi ini disusun berdasarkan data yang didapat dari:

Michael P. Flaherty, *Red Wings Ascendant. The Chinese Air Force Contribution to Antiaccess*

Richard D. Fisher, Jr., “China’s Military Power: An Assessment from Open Sources”

Office of Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of People’s Republic of China 2006 & 2007*

Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011*.

Military Technology: World Defense Almanac 2008, (Jerman: Mönch Publishing, 2008)

waktu yang bersamaan, penempur dan pembom tempur yang dipersenjatai rudal antikapal maupun munisi presisi lainnya akan melakukan serangan terhadap kekuatan laut Amerika Serikat. Armada penyerang ini akan dikawal oleh penempur-penempur PLAAF lain yang siap melakukan pertempuran udara dan didukung tanker udara, sehingga memiliki jangkauan serang yang lebih jauh. Kemudian, armada UAV danUCAV Cina akan bertindak sebagai alternatif pengintai dan penyerang. PLAAN mengembangkan kapabilitasnya dengan melakukan pembelian dan pengembangan ranjau maritim, kapal selam, pesawat serang maritim, serta *surface combatants* yang dilengkapi ASCM dan SAM jarak jauh berteknologi mutakhir untuk mendukung strategi antiakses. Dalam kasus intervensi asing, *destroyer* PLAAN akan siap untuk melakukan operasi antikapal permukaan serta kontrol udara bergerak, selain melindungi kapal selam serang konvensional maupun nuklir yang akan melaksanakan serangan rudal jarak jauh terhadap kekuatan laut Amerika Serikat. Ketiga matra juga mungkin memanfaatkan rudal balistik yang dapat bermanuver, rudal jelajah jarak jauh, maupun LACM non-nuklir yang diluncurkan kapal selam untuk menyerang sasaran darat maupun laut. Pasukan Khusus PLA dapat difungsikan untuk melakukan infiltrasi dan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii, Alaska, atau Pantai Barat. Serangan tersebut akan dikoordinasikan melalui berbagai sensor elektronik (darat maupun udara), yang telah dirintis melalui pengembangan. Spektrum kapabilitas elektronik ini sekaligus membawa aspek terakhir dalam antiakses, yaitu kontrol terhadap informasi. Cina berusaha “mengamankan” informasi mengenai *state power* maupun operasional militer agar tidak keluar dari dalam negeri, selagi tetap menjamin kelancaran pasokan informasi yang berhubungan dengan keamanan dari luar. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kapabilitas perang elektronik dan informasi, termasuk pembatasan akses informasi dan propaganda yang dijalankan oleh Beijing. Konsep ini juga dinilai akan dilanjutkan ke tingkatan luar angkasa, terkait media pemerintah yang mengklaim beberapa peneliti Amerika Serikat “telah melakukan survei ilegal terhadap teritori Cina sehingga membahayakan keamanan Cina.” Hasil penelitian tersebut mengungkapkan fasilitas militer yang dimiliki PLA, seperti pangkalan kapal selam dan fasilitas tiruan skala penuh dari wilayah konflik antara India dan Cina serta pangkalan udara Taiwan. Artikel tersebut merujuk pada *China’s Surveying and Mapping Law 2002* yang menyatakan bahwa “orang asing yang mengumpulkan dan mengumumkan informasi geografis Cina secara ilegal akan dihukum berat”. Perwujudan spektrum kapabilitas luar angkasa tersebut dapat dilihat

dalam keberhasilan Cina sebagai negara ketiga yang mengirim manusia ke orbit bumi pada 2005, peluncuran satelit-satelit sipil maupun militer, termasuk di dalamnya satelis CBERS-1/2, satelit kontrol/pengawasan lingkungan Huanjing, ditambah empat satelit BeiDou dengan resolusi 20 meter. Cina menargetkan kapabilitas multispektral dan *synthetic aperture radar* sebagai kelengkapan satelit dalam program Huanjing, selain sistem navigasi satelit GPS dan GLONASS. Untuk pertahanan antisatelit, Cina telah berhasil melakukan uji coba senjata antisatelit (ASAT) pada 2007 pada satu satelit cuaca FY-1C yang telah dipensiunkan.²¹⁶

3.1.3 Sengketa wilayah Cina terkait konsep pertahanan

Terdapat beberapa kasus sengketa wilayah yang melibatkan Cina, mulai dari sekadar aksi provokatif hingga ke tahap penggunaan kekuatan militer. Sengketa wilayah ini diperhitungkan sebagai dampak dari konsep pertahanan Cina yang secara geografis membagi perimeter pertahanan maritim menjadi dua garis rantai kepulauan, selain pembangunan kapabilitas antiakses yang diterapkan. Sistem pertahanan berlapis Cina dirancang berdasarkan kondisi geografis, memiliki tujuan untuk memberikan ancaman bagi kapal permukaan lawan hingga ke “*Second Island Chain*” (meliputi wilayah yang dibatasi kepulauan sebelah selatan dan timur Jepang hingga melewati Guam di ujung barat Pasifik), demi memenuhi elemen ofensif dan defensif dalam doktrin militer yang meliputi strategi blokade, anti-SLOC, serangan maritim ke darat, antikapal, perlindungan transportasi maritim, serta perlindungan pangkalan angkatan laut.²¹⁷

²¹⁶ BBC News, *Concern over China's missile test*, 19 Januari 2007, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6276543.stm> pada 21 Desember 2011 pk. 14.07 WIB.

²¹⁷ Office of the Secretary of Defense, 2011, *Ibid.*,



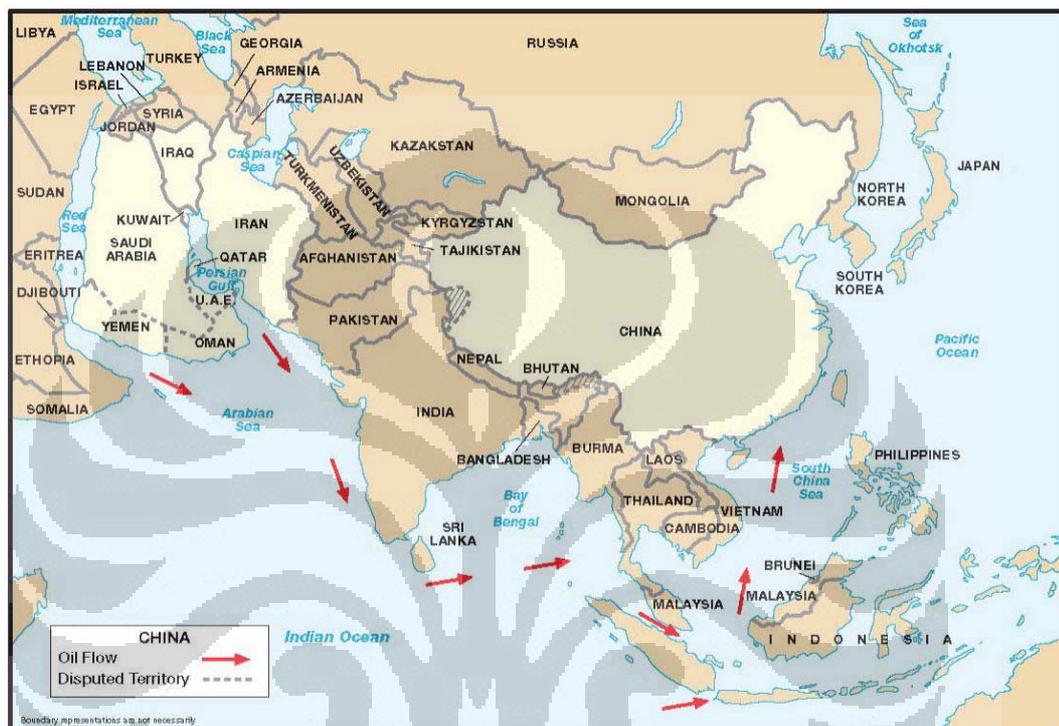
Peta 3.2. “Rantai” Kepulauan sebagai Perimeter Pertahanan Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011*

Konsep tersebut juga turut mengundang permasalahan dengan negara lain yang mengklaim teritori dalam daerah bersangkutan yang menjadi *buffer zone* bagi Cina. Sengketa wilayah yang terjadi merupakan klaim historis yang dilakukan oleh negara-negara di sekitar “rantai” kepulauan tersebut, sebagaimana contohnya sengketa antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara terkait Kepulauan Spratly dan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyudai antara Cina dan Jepang. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, strategis, dan politik dari Laut Cina Selatan, dimana pihak yang mampu mengontrol Laut Cina Selatan memegang pengaruh strategis atas Selat Malaka dan titik kunci navigasi yang menjamin kebebasan perdagangan dan pergerakan militer. Terlebih lagi Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya energi (minyak dan gas) dan perikanan.²¹⁸ Bila Cina berhasil mempertahankan klaim

²¹⁸ Lihat Bob Catley and Makmur Keliat, *Spratlys: The Dispute in the South China Sea* (Aldershot: Ashgate, 1997), hlm. 44-65.

wilayah ini, maka perluasan yurisdiksi Cina hingga mampu mengkomando Laut Cina Selatan akan membawa konsekuensi strategis yang serius, terutama bagi Amerika Serikat sebagai *dominant power* dan Jepang sebagai *great power* yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut dan Asia Tenggara yang sebagai wilayah yang berhubungan dengan Asia Timur melalui Laut Cina Selatan.



Peta 3.3. Jalur Laut Penting Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

Permasalahan Kepulauan Spratly yang terletak di Laut Cina Selatan meliputi klaim atas yurisdiksi teritorial dan maritim antara Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Beijing mengklaim hak teritorial atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, berdasarkan klaim historis bahwa Cina terlebih dahulu menemukan dan menduduki wilayah tersebut dalam penjelajahan yang dilakukan oleh pada masa dinasti.²¹⁹ Namun klaim tersebut juga menyebabkan Cina belum memberikan penjelasan legal atas batas wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan yang spesifik, padahal Vietnam—atas alasan historis juga—telah memasukkan *Johnson South Reef* sebagai bagian dari klaim wilayahnya di Spratly

²¹⁹ Lihat Lu Ning, *Flashpoint Spratlys!* (New York: Dolphin Books, 1995), hlm. 5-35.

pada 1975 serta kemudian memberlakukan ZEE pada 1977. Di lain pihak, Filipina juga melakukan klaim atas sebagian besar Kepulauan Spratly atas nama *Kalayaan* pada 1971 dan mengeluarkan dekrit presiden pada 1978 yang menegaskan bahwa *Kalayaan* merupakan wilayah nasional. Filipina turut memberlakukan ZEE yang mencakup wilayah ini.

Sempat terjadi beberapa kali ketegangan yang diakibatkan oleh isu Kepulauan Spratly. Konflik terburuk terjadi tahun 1988 antara Cina dan Vietnam. Pada Januari 1988, kapal perang Cina berlayar memasuki Kepulauan Spratly dan menurunkan marinir yang kemudian membangun basis pertahanan di *Johnson South Reef*.²²⁰ Pada bulan Maret, Vietnam menanggapi tindakan Cina dengan mengirim kekuatan tambahan ke wilayah tersebut. Cina menanggapi dengan balik mengirim tiga fregat sehingga pecah kontak senjata antara Cina dan Vietnam yang memakan korban dua kapal Angkatan Laut Vietnam dan 70 personel militer Vietnam. Kekalahan Vietnam berujung pada penguasaan Cina atas tujuh pulau karang yang sebelumnya diklaim oleh Vietnam.

Konflik selanjutnya terjadi antara Cina dan Filipina, terkait pendudukan Cina atas *Mischief Reef* pada 8 Februari 1995, dimana pulau karang tersebut merupakan bagian dari *Kalayaan*.²²¹ Sebagai akibat dari pendudukan Cina, Filipina mengecam tindakan Cina, serta membalas menghancurkan penanda wilayah dan penahanan nelayan Cina pada Maret 1995. Filipina juga mengumumkan pelaksanaan modernisasi militer. Krisis ini diselesaikan melalui perjanjian bilateral Cina-Filipina yang ditandatangani pada Agustus 1995 yang menyebutkan penyelesaian masalah tanpa kekerasan sesuai UNCLOS 1982.²²²

Di Singapura pada 13 Agustus 1990, Perdana Menteri Li Peng mengumumkan bahwa “Cina telah siap untuk menggabungkan kekuatan dengan negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan Kepulauan Spratly, selagi mengesampingkan permasalahan kedaulatan.”²²³ Permasalahannya, interpretasi

²²⁰ Chi-kin Lo, *China's Policy towards Territorial Disputes: The Case of South China Sea Islands* (London: Routledge, 1989), hlm 111-138.

²²¹ LTC Stanley E. Meyer, *Incident at Mischief Reef: Implications for the Philippines, China, and the United States* (Pennsylvania: U.S. Army War College, 1996)

²²² *Joint Statement on RP-PRC Consultations on the South China Sea and on Other Areas of Cooperation*, 9-10 Agustus 1995.

²²³ Derek McDougall, *The International Politics of the New Asia Pacific* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1997), hlm. 221.

Cina atas kebijakan tersebut terlihat memiliki implikasi bahwa negara lain harus mengakui kedaulatan Cina sebelum usaha bersama yang dimaksud dapat dilakukan. Walaupun telah ada pembicaraan bilateral antara negara pengklaim, terutama Cina-Vietnam, Cina-Malaysia, Cina-Filipina, dan Vietnam-Filipina, namun pembicaraan tersebut tidak pernah tuntas membahas masalah kedaulatan. Tidak diketahui apakah benar-benar ada dialog yang membahas masalah ini secara substantif, yang mengarah langsung kepada masalah penggunaan sumber daya (masalah sensitif), walaupun masih ada sedikit “perhatian” terhadap niat negara-negara untuk berkembang bersama.²²⁴

Amerika Serikat juga turut andil dalam bersitegang dengan Cina di Laut Cina Selatan dengan dua insiden yang melibatkan militer kedua negara. Peristiwa pertama berupa tabrakan antara pesawat intai EP-3E *Aries II* milik Angkatan Laut Amerika Serikat dengan jet tempur F-8II milik PLAAF pada 1 April 2001. Tabrakan ini diduga terjadi akibat manuver pesawat tempur Cina yang berada dalam posisi terlalu dekat dengan pesawat Amerika Serikat. Akibatnya fatal: pilot F-8II Wang Wei tidak berhasil ditemukan walaupun ia sempat menggunakan kursi lontarnya. Awak pesawat Amerika Serikat sendiri ditahan oleh Cina selama 11 hari setelah mereka berhasil mendaratkan EP-3 yang rusak berat di pangkalan PLA di Pulau Hainan. Peristiwa serupa hampir terulang ketika pada 5 hingga 8 Maret 2009 kapal survei maritim Amerika Serikat USNS *Impeccable* yang sedang melakukan operasi deteksi kapal selam di Laut Cina Selatan dibayangi oleh lima kapal Cina, bahkan melakukan manuver dalam jarak yang sangat dekat sehingga membahayakan. Pada hari terakhir, dalam jarak 75 mil dari Hainan, dua kapal pukat Cina bermanuver di dekat *Impeccable* dalam jarak 15 meter, dimana kemudian salah satu kapal mendekat hingga jarak 7,5 meter. Kemudian, ketika *Impeccable* mengumumkan bahwa mereka akan menyingkir, kedua kapal pukat tersebut justru menghalangi jalan *Impeccable*, dan awak kapal pukat yang bersangkutan justru berusaha memutus kabel sonar tarik yang digunakan *Impeccable* untuk melakukan deteksi. Memang dalam kasus *Impeccable*, kapal tersebut sedang melaksanakan misi intelijen, sehingga Cina merasa perlu mengusir tamu tak diundang tersebut.

²²⁴ Aileen Baviera, *China's Relations with Southeast Asia: Political Security and Economic Interests*, PASCN Discussion Paper No. 99-17, diakses dari <http://pascn.pids.gov.ph/DiscList/d99/s99-17.pdf>, pada 23 Maret 2010 pk 21.59 WIB.

Seorang pengamat Asia Timur menyatakan bahwa faktor *sea power* menjadi konteks dalam perdebatan wilayah maritim ini.²²⁵ Pertama, pasca Perang Dingin manfaat lautan sebagai sarana ekonomi telah melebihi manfaat militer, sehingga terjadi pergeseran bahwa *sea power* tidak selalu dilihat dari kekuatan laut. Seringkali armada dagang yang dimiliki suatu negara berbanding terbalik dengan armada tempurnya (armada dagang banyak >< armada tempur sedikit, dan sebaliknya). Kedua, adanya ZEE sejauh 200nm yang ditambahkan ke batas laut teritorial sejauh 12 mil menyebabkan wilayah laut bebas menyusut menjadi 64 persen dari total wilayah laut dunia. Hal ini berdampak kondisi geografi maritim dari suatu negara yang berpengaruh dalam memutuskan siapa yang memiliki bagian tertentu dari laut, bukannya kekuatan militer yang mengontrol wilayah tersebut. Ketiga, lalu lintas perdagangan yang melewati lautan menjadi amat penting, sehingga potensi perlindungan terhadap kapal-kapal sipil juga meningkat. Negara yang menggunakan kekuatan militer untuk melakukan pengamanan terhadap jalur laut mungkin saja menggunakan kapal selam maupun kapal selam pembawa SLBM; yang terakhir ini dinilai sebagai ancaman strategis oleh negara tetangga, terkait sulitnya mendeteksi kehadiran kapal selam, sehingga sekalipun memiliki kapabilitas BMD/TMD, pencegahan terhadap peluncuran SLBM hampir mustahil untuk dilakukan. Empat, kelangkaan sumber daya alam, ditambah dengan kebutuhan negara industri maupun negara berkembang untuk memperoleh sumber daya energi meningkatkan potensi konflik ketika cadangan sumber daya baru ditemukan. Lima, fakta bahwa cadangan sumber daya energi terutama terdapat di dasar laut menyebabkan negara-negara berebut wilayah yang belum dijelajahi. Contoh nyata dari faktor-faktor diatas dalam hubungan Jepang dan Cina adalah upaya Cina membangun jalur suplai energi dan perdagangan laut yang melewati Samudera Hindia, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Taiwan dan membangun kapabilitas militer untuk menjamin keamanan jalur suplai tersebut, selain melakukan eksplorasi sumber daya alam di landas benua di Laut Cina Timur. Kegiatan ini berdampak pada pandangan Amerika Serikat dan Jepang yang menganggap Cina berusaha memperluas proyeksi kekuatan

²²⁵ James C. Hsiung, "Sea Power, Law of the Sea, and a Sino-Japanese East China Sea 'Resource War'", dalam James C. Hsiung, ed., *China and Japan at Odds: Deciphering the Perpetual Conflict* (New York: Palgrave, 2007), hlm. 133-154.

militernya. Selain itu, dalam penentuan batas wilayah yang dijadikan dasar eksplorasi sumber daya, Jepang dan Cina juga terlibat perdebatan terkait perhitungan yang dilakukan: penetapan ZEE yang dilakukan kedua negara akan berakibat pada wilayah kekuasaan yang bertumpuk karena kelebaran Laut Cina Timur hanya mencapai 360nm di titik terlebar, bahkan hanya mencapai 180nm di titik tersempit. Terlebih lagi, perhitungan yang mengikuti landas benua sebagai perpanjangan dari daratan membuat Cina mengklaim bahwa “landas benua Laut Cina Timur merupakan perpanjangan alami dari wilayah daratan Cina, sehingga Cina memiliki kedaulatan mutlak atas landas benua Cina.” Wilayah yang dicakup oleh klaim ini mencapai Palung Okinawa sejauh 350nm dari pesisir Cina, sehingga bertabrakan dengan kepentingan energi Jepang karena klaim Cina tersebut akan menutup seluruh potensi sumber daya minyak di Laut Cina Timur.

Berdasarkan paparan di atas, maka Kepulauan Senkaku/Diaoyudai turut memiliki peran besar. Kepulauan ini terpisah dari Kepulauan Liu Chiu yang sempat menjadi pangkalan Amerika Serikat pada Perang Dunia II,²²⁶ tetapi Jepang maupun Cina sama-sama melakukan klaim atas Senkaku/Diaoyudai ini dengan alasan historis. Jepang menyatakan bahwa kepulauan tersebut masih berada dalam wilayah teritorialnya sejak 1895, sehubungan dengan adanya Keputusan Kabinet pada Januari 1895 untuk menandai Senkaku sebagai daerah kekuasaan Jepang, masuk ke dalam Kepulauan Nansei Shoto. Kepulauan ini tidak termasuk daerah yang dipindahtanggankan dari Dinasti Qing Cina ke Jepang dalam Perjanjian Shimonoseki yang berlaku mulai Mei 1895. Selain itu, Senkaku juga tidak dihitung sebagai wilayah yang dilepaskan oleh Jepang pada Pasal II *San Francisco Peace Treaty 1951*. Pada akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat justru memakainya sebagai sasaran latihan bagi pesawat Angkatan Udara yang dipangkalkan di Kepulauan Liu Chiu. Hanya saja, berdasarkan klaim Jepang bahwa kepulauan tersebut masuk dalam Kepulauan Liu Chiu, pada *Agreement Between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands 1971* kepulauan

²²⁶ *Senkaku / Diaoyutai Islands*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm>, pada 13 Okt 2011 pk. 23.37 WIB. Contoh skenario konflik terbuka dalam kasus Senkaku/Diaoyudai dikemukakan oleh Richard C. Bush, *op cit.*, hlm. 223-229. Bush juga mengemukakan bahwa opini publik dan beda pemahaman antara administrasi sipil-institusi militer ataupun masyarakat yang tidak dapat dimonitor seluruhnya berpotensi mendestabilisasi wilayah lebih jauh.

ini masuk sebagai wilayah yang dikembalikan Amerika Serikat kepada Jepang. Menurut Jepang, pada waktu itu Cina tidak mengajukan keberatan atas penguasaan Jepang terhadap Senkaku. Baru pada pertengahan 1970-an dengan adanya isu pengembangan eksplorasi minyak di landas benua Laut Cina Timur, Cina dan Taiwan mempertanyakan Senkaku.²²⁷

Sementara di lain sisi, Cina berargumen bahwa kepulauan Diaoyudai telah ada dalam survei kewilayahan Cina sejak 1430, dan sejak itu eksis sebagai bagian Taiwan. Dari masa tersebut, kepulauan ini telah kerap digunakan sebagai basis bagi para nelayan Cina. Pada 1874, Jepang mengambil Kepulauan Liu Chiu secara paksa, namun Diaoyudai masih tetap berada di tangan Cina. Baru pada 1895, bagian Taiwan (termasuk Diaoyudai) diserahkan pada Jepang setelah kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang Pertama. Pasca Perang Dunia II, tepatnya pada 1945, Diaoyudai dikembalikan ke Cina. Pengembalian tersebut sesuai dengan persetujuan antara negara-negara *Big Three* yang dilakukan di Kairo pada 1943. Pada tahun 1970-an terjadi pengembalian wilayah dari Amerika Serikat ke Jepang, namun Cina memutuskan untuk tidak meributkan Senkaku sebab masih berorientasi pada penghindaran konflik luar negeri.

Beberapa perdebatan yang terjadi karena Senkaku ini dapat dilihat dalam rangkaian peristiwa berikut.²²⁸ Pada Desember 1995, Jepang mulai mendeteksi kehadiran kapal-kapal Cina di perairan sekitar Kepulauan Senkaku, sehingga efektif pada Juni 1996 Jepang memberlakukan ZEE di sekeliling Senkaku (baru efektif pada 20 Juli 1996). Dalam selang waktu tersebut, makin banyak kapal perang, kapal penelitian, maupun kapal eksplorasi minyak Cina yang menerobos ke dalam ZEE yang diberlakukan Jepang. Pada Juli 1996, pembangunan mercusuar yang dilakukan Jepang di salah satu pulau Senkaku memicu protes anti-Jepang yang berlangsung terutama di Hong Kong dan Taiwan. Selain protes keras dari Cina, pembangunan tersebut juga memicu upaya pendaratan dari aktivis-aktivis nasionalis Cina, Taiwan, dan Jepang untuk menaikkan bendera negara masing-masing. Pada 2001 Cina dan Jepang telah menyepakati *Prior Notification Agreement* dimana kedua pihak harus memberitahukan bila mereka ingin melakukan kegiatan di perairan sekitar Senkaku. Namun hanya saja penerobosan wilayah tetap terjadi, sebagaimana dicontohkan

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

pada kasus kapal survei Cina pada 2003 dan 2004²²⁹, kapal selam Cina pada 2004, serta kapal nelayan Cina yang menabrak kapal JCG pada 2010.

3.1.4 Gelar militer *forward presence* dalam kasus Taiwan

Gelar militer *forward presence* Cina terutama dapat ditemukan dalam kasus Taiwan. *China's National Defense 2006* menyatakan bahwa:

*“The struggle to oppose and contain the separatist forces for ‘Taiwan independence’ and their activities remains a hard one. By pursuing a radical policy for ‘Taiwan independence,’ the Taiwan authorities aim at creating ‘de jure independence’ through ‘constitutional reform,’ thus still posing a grave threat to China’s sovereignty and territorial integrity.”*²³⁰

Konsepsi ancaman dari Taiwan tersebut menjadi dasar Cina untuk melakukan upaya agar perimbangan di Selat Taiwan menjadi lebih menguntungkan bagi Cina. Beijing terlihat siap untuk menunda unifikasi paksa dengan Taiwan sepanjang perkembangan masih mengarah kepada kecenderungan unifikasi dan biaya konflik lebih besar daripada keuntungannya. Beijing sementara ini lebih memfokuskan pencegahan kemerdekaan *de jure* Taiwan, sambil melanjutkan upaya resolusi damai di bawah kerangka “satu negara, dua sistem” yang mampu memberikan Taiwan otonomi sebagai pertukaran dari unifikasinya dengan Cina.²³¹ Cina melakukan strategi koersif (dengan sedikit elemen persuasif) dalam hal ini yang mengikutkan instrument politik, ekonomi, budaya, hukum, diplomatik, dan militer. Walaupun demikian, dalam kunjungannya ke *U.S. War College* pada Agustus 1997, Wakil Kepala Akademi Militer PLA Li Jijun menyatakan bahwa Cina tidak bisa menjamin untuk tidak menggunakan kekuatan militer sebagai cara terakhir untuk menghentikan intervensi asing di Taiwan.²³² Dari segi militer, hal ini membawa *concern* tersendiri bagi Amerika Serikat dan negara Asia Timur lainnya

²²⁹ James J. Prysztup, “Japan-China Relations: Not The Best Of Times”, dalam *Comparative Connections* Vol.6 No. 3, 1 Oktober 2004, hlm.2. diakses dari http://csis.org/files/media/isis/pubs/0403qjapan_china.pdf pada 18 Juni 2012 pk. 15.12. Prysztup menyebutkan bahwa sepanjang 2003 Jepang hanya mencatat 8 kali penerobosan Cina di perairan sekitar Senkaku, sedangkan pada Juni 2004 saja telah terjadi 16 kali penerobosan oleh Cina.

²³⁰ Bab I, “The Security Environment”, dalam *China's National Defense 2006*, *op cit.*

²³¹ Office of Secretary of Defense, 2007, *ibid.*

²³² Letnan Jenderal Li Jijun, “Traditional Military Thinking and the Defensive Strategy of China: An Address at the United States War College”, *U.S. Army War College Letort Paper* No. 1, 29 Agustus 1997, hlm. 5.

karena Cina telah melakukan penggelaran garis depan (*forward deployment*) di bagian selatan yang langsung berseberangan dengan Taiwan. Terjadi konsentrasi militer dari ketiga matra yang besar di *military region* (MR) Nanjing, Guangzhou, dan Jinan dengan aspek penggelaran utama meliputi rudal balistik jarak pendek (SRBM), kapabilitas perang amfibi, dan antiserangan udara jarak jauh yang modern. Penggelaran ini terjadi sejak tahun 1995-1996 hingga sekarang dengan pemicu berupa pidato Lee Teng-hui di Amerika Serikat. Secara rinci, pada 2007 penggelaran kekuatan tersebut telah mencapai jumlah berikut:

Tabel 3.2. Kekuatan Militer Cina di Selat Taiwan 2007

Angkatan Darat		
	Total	Area Selat Taiwan
Personel aktif	1.400.000	400.000
Grup	18	8
Divisi Infanteri	25	9
Brigade Infanteri	33	12
Divisi/Brigade Lapis Baja	9	4
Brigade Lapis Baja	11	4
Divisi Artileri	3	3
Brigade Artileri	15	5
Brigade Marinir	2	2
Tank	7.000	2.700
Unit Artileri (pucuk)	11.000	3.200

Angkatan Udara		
	Total	Mampu menjangkau Taiwan
Tempur	1.550	425
Pembom	775	275
Transpor	450	75

Angkatan Laut		
	Total	Armada Timur dan Selatan
<i>Destroyer</i>	25	16
<i>Frigates</i>	47	40
Kapal Pendarat Tank	25	22
Kapal Pendarat Sedang	25	20
Kapal Selam Diesel	53	28
Kapal Selam Nuklir	5	0
Patroli Pantai	41	34

* **Sumber:** Office of Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of People's Republic of China 2007*.

Beijing memiliki beberapa opsi tindakan yang didasarkan pada tujuan penguasaan wilayah ataupun pemberian tekanan politik yang cukup besar untuk mencapai penyelesaian konflik dengan cepat sebelum pihak luar sempat melakukan intervensi. Konsekuensi dengan aspek penggelaran kekuatan yang telah disebutkan, maka opsi tindakan Cina dapat dijabarkan sebagai berikut²³³:

Pengerahan Kekuatan Terbatas. Opsi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, misal serangan *cyber* terhadap jaringan komputer Taiwan yang berada dalam infrastruktur politik, militer, dan ekonomi untuk mengacaukan kepemimpinan. Pasukan khusus PLA dapat disusupkan ke Taiwan untuk melakukan sabotase terhadap ekonomi, politik, dan militer. Selain itu, ancaman pasukan khusus dan SRBM dapat diarahkan pada situs pertahanan udara dan komunikasi Taiwan untuk menekan Taiwan agar bersikap lebih akomodatif.

Serangan Rudal dan Serangan Udara. Cina dapat melakukan serangan udara dan serangan SRBM mendadak terhadap situs-situs pertahanan udara Taiwan, termasuk di dalamnya adalah pangkalan udara, instalasi radar, pangkalan rudal, asset ruang angkasa, dan fasilitas komunikasi yang mampu mendukung resistansi Taiwan. Putusnya lini komunikasi dapat menghilangkan kepemimpinan politik dan militer serta mematahkan semangat bertempur militer Taiwan, sekaligus menghambat upaya Taiwan untuk memicu intervensi oleh dunia internasional.

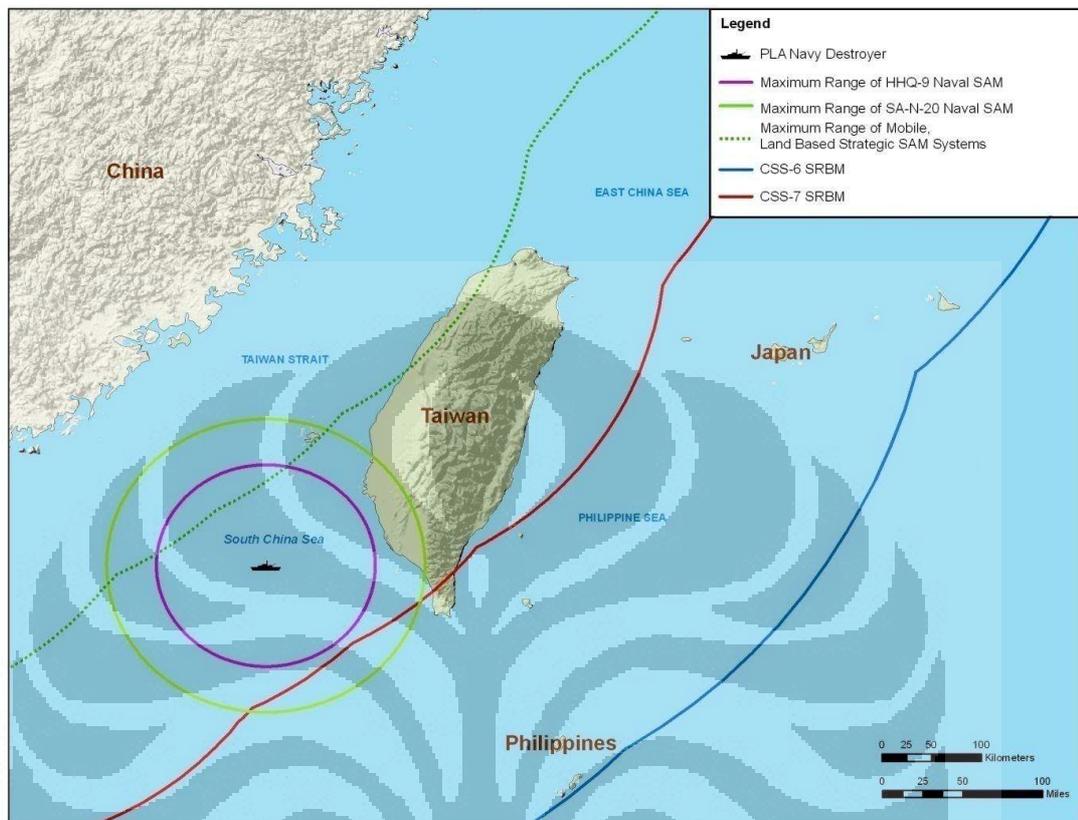
²³³ Office of Secretary of Defense, 2007, *ibid.*, hlm. Office of Secretary of Defense, 2010, *ibid.*, hlm.

Blokade. Cina dapat mengancam Taiwan dengan kemungkinan menggelar blokade, atau langsung melakukan blokade sebagai taktik untuk menekan di tahap prakonflik. Cina juga dapat mengumumkan bahwa tiap kapal menuju Taiwan wajib berhenti di pelabuhan Cina daratan untuk diinspeksi terlebih dahulu, atau mengumumkan jalur masuk ke pelabuhan maupun bandara sebagai wilayah latihan militer maupun ujicoba rudal. Doktrin militer Cina juga memasukkan tindakan seperti blokade udara, serangan rudal, peranjauan, atau apapun yang akan menghalangi akses ke Taiwan, dengan pertimbangan bahwa blokade tradisional—walau lebih efektif—akan melemahkan kapabilitas PLAAN.

Serbuan Amfibi. Kebanyakan literatur strategi Cina menuliskan bahwa terdapat beberapa strategi serbuan amfibi terhadap Taiwan, dengan Operasi Pendaratan Gabungan (*Joint Island Landing Campaign*) sebagai strategi paling menonjol. Strategi ini merupakan suatu operasi kompleks yang bergantung pada koordinasi logistik, perang elektronik, serta dukungan udara dan laut untuk mematahkan atau melubangi beberapa titik dari pertahanan pantai Taiwan. Personel yang didaratkan akan ditugaskan untuk mendirikan basis operasi lanjutan di pesisir yang telah dikuasai, serta melakukan serangan lebih lanjut dengan tujuan memecah, mengamankan, hingga menduduki seluruh pulau maupun sasaran kunci di pulau tersebut. Tercatat pada September 2005, Cina melakukan latihan militer skala besar yang melibatkan ketiga matra yang secara eksplisit berkaitan dengan invasi terhadap Taiwan. Sejak 1989 hingga 2005, tercatat Cina telah mengadakan 11 kali latihan militer dengan skenario Taiwan.

Hanya saja kompleksitas pelaksanaan strategi ini sangat membutuhkan kesiapan militer Cina dalam menjamin *air and sea superiority* di wilayah bersangkutan, Pelaksanaan strategi ini dapat dipastikan akan mengundang intervensi internasional, masih ditambah dengan *combat loss* dan rumitnya situasi perang kota (dalam konteks berhasil melakukan pendaratan di Taiwan), sehingga membawa risiko politik dan militer bagi Beijing. Sejauh ini, Beijing masih belum untuk mengambil tindakan militer sepenuhnya terhadap Taiwan terkait kapabilitas militer yang belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan politis di pulau tersebut. Pembukaan konflik yang prematur, ditambah kemungkinan intervensi Amerika

Serikat, malah akan menyedot seluruh kekuatan PLA untuk waktu lama selain berpotensi menghancurkan militer yang belum selesai dibangun.

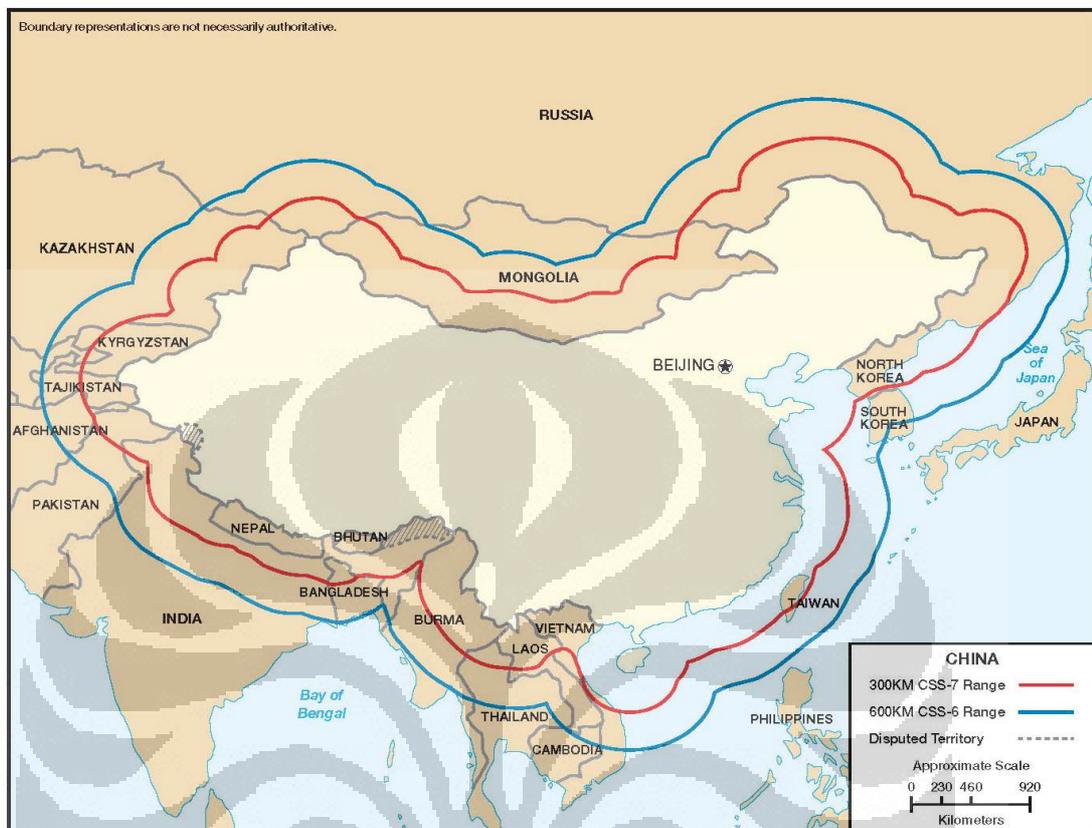


Peta 3.4. Jangkauan SAM Cina terhadap Taiwan

**Sumber: Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011*

Pemanfaatan kapabilitas nuklir sebagai diplomasi koersif ditunjukkan sejak akhir 2005, dengan penggelaran sekitar 710-790 unit SRBM CSS-6 dan CSS-7 oleh Cina di daerah militer yang berada persis di seberang Taiwan. Bila ditotal, penggelaran SRBM Cina mencapai 100 unit per tahunnya dengan jarak jangkauan serta akurasi yang ditingkatkan pada versi baru SRBM tersebut. Selain itu, Cina juga melakukan penggelaran SAM jarak jauh S-300PMU2 buatan Rusia yang mampu menjangkau pesisir Taiwan sebelah utara. Peta di atas menunjukkan bahwa dalam situasi konflik, sistem pertahanan udara yang terpasang di atas *destroyer* Cina akan menambah cakupan proyeksi militer dalam melakukan blokade ataupun invasi, selain tentunya dengan kehadiran kapal induk pesawat tempur Cina akan mampu beroperasi lebih lama di wilayah sasaran dibandingkan dengan pesawat

tempur yang berpangkalan di darat. Peta selanjutnya akan menunjukkan jangkauan SRBM Cina dengan lebih luas:



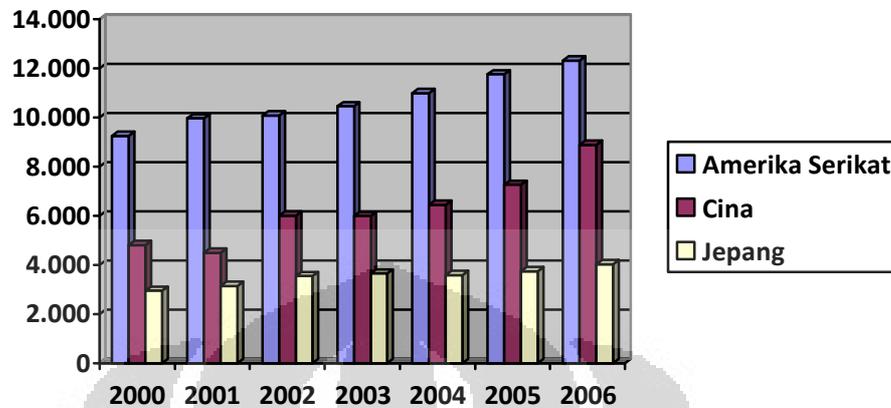
Peta 3.5. Jangkauan SRBM Cina

*Sumber: Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

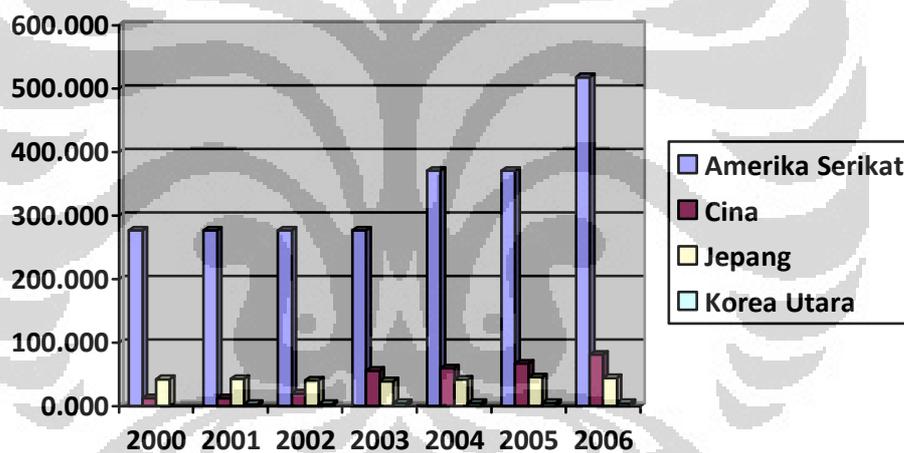
3.2 Balance of Force Cina-Jepang-Amerika Serikat

Bagian selanjutnya dalam bab ini akan memaparkan komparasi *power* antara ketiga negara yang juga akan menjadi pertimbangan Jepang dalam menentukan strategi pertahanannya. *Power* agregat akan dihitung melalui peningkatan dan komparasi GDP, pertumbuhan ekonomi, estimasi pertumbuhan ekonomi dan GDP, peningkatan & komparasi anggaran pertahanan, komposisi anggaran, beda estimasi anggaran, serta gelar kekuatan negara sekutu dan negara sumber ancaman dalam NDPG 2005. Sebelumnya perlu diingat bahwa negara-negara dengan sistem terpinpin cenderung tidak mengumumkan anggaran mereka secara rinci, sehingga perhitungan anggaran dan tingkat kesiapan angkatan bersenjata mereka tidak dapat dijabarkan dengan sangat akurat.

3.2.1 GDP dan Anggaran Militer Cina-Jepang-Amerika Serikat



Grafik 3.1. GDP (PPP) Cina-Jepang-AS 2000-2006 (dalam miliar US\$)



Grafik 3.2. Anggaran Militer Cina-Jepang-AS 2000-2006 (dalam miliar US\$)

Estimasi anggaran militer di atas disusun dari *CIA World Factbook 2000-2006* dan menunjukkan bahwa GDP dan anggaran militer Cina terus meningkat bila dibandingkan dengan Jepang yang cenderung stagnan. Bahkan pada 2003, estimasi yang diberikan menunjukkan bahwa anggaran militer Cina telah melampaui Jepang. Dalam konteks persentase anggaran militer dari GDP, menurut SIPRI, sejak 1990 Cina diperhitungkan memiliki anggaran militer rata-rata sebesar 1 hingga 2 persen

dari GDP.²³⁴ Berdasarkan data dari *Office of the Secretary of Defense*, pada 4 Maret 2007 Cina mengumumkan kenaikan anggaran militer sebesar 17,8 persen sehingga menyimpulkan anggaran militer resmi sebesar 45 miliar US\$.²³⁵ Perkembangan ini melanjutkan kecenderungan kenaikan anggaran militer Cina yang secara signifikan melebihi pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Analisis yang dilakukan dari anggaran Cina dan data GDP dari IMF dalam kurun 2000-2006 menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahanan per tahun mencapai 11,8 persen, dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan GDP per tahun sebesar 9,2 persen (telah disesuaikan dengan nilai inflasi). Buku putih Cina juga mencantumkan analisis yang serupa, bahwa dalam kurun 1990-2005, rata-rata pertumbuhan anggaran pertahanan per tahun mencapai 9,6 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan GDP per tahun sebesar 9,7 persen. Di luar pertumbuhan anggaran militer Cina yang substansial, informasi anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh Cina tidak mencakup kategori pembelanjaan yang luas seperti pembiayaan kekuatan strategis, pengadaan kapabilitas dari luar negeri, R&D militer, serta kekuatan paramiliter. Terkait hal ini, *Defense Intelligence Agency* (DIA) memperkirakan bahwa total pembelanjaan Cina yang berhubungan dengan militer mencapai 85 hingga 125 miliar US\$. Analisis dari *Office of the Secretary of Defense* menyebutkan bahwa anggaran militer Cina tersebut dialokasikan terutama dalam program-program modernisasi PLA, yaitu: investasi pertahanan dalam negeri, pengembangan industri pertahanan mandiri, R&D dan iptek, teknologi *dual-use*, serta akuisisi teknologi atau kapabilitas dari luar negeri.

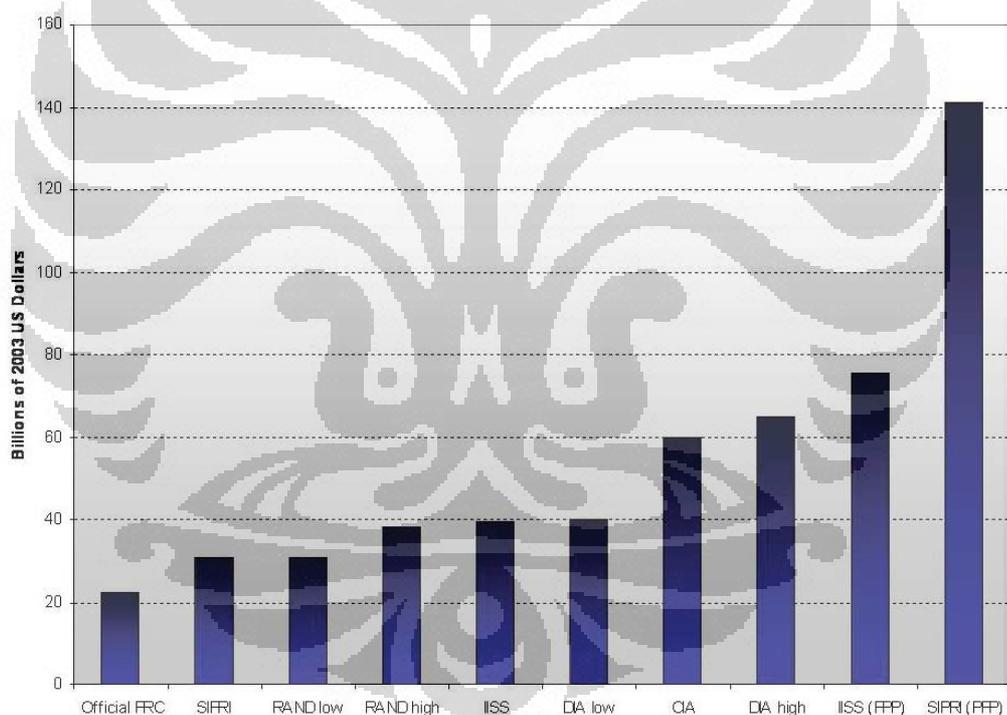
Sedangkan penghitungan anggaran yang tidak transparan, ditambah dengan Cina yang tidak memenuhi standar pelaporan anggaran militer internasional turut menyebabkan estimasi pembelanjaan militer Cina menjadi sangat berbeda antar-institusi. Misal, perbedaan estimasi antara institusi pemerintah maupun institusi swadaya tertentu terhadap anggaran militer Cina di tahun 2003 mencapai 30,6 hingga 141 miliar US\$ dengan dasar nilai tukar resmi maupun *purchasing power parity* (PPP), padahal Cina secara resmi mengumumkan anggaran militer di tahun

²³⁴ *The SIPRI Military Expenditure Database*, diakses dari <http://milexdata.sipri.org/> pada 5 Januari 2012 pk. 12.14 WIB.

²³⁵ *Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*, hlm. 25-26.

tersebut sebesar 22,3 miliar US\$. Estimasi yang diberikan oleh RAND pada 2005 dalam melakukan komparasi ekonomi Amerika Serikat dan Cina, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun hingga 2010, untuk kemudian melambat secara bertahap ke tingkat 3 persen per tahun pada 2025. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 3 persen per tahun dan pertumbuhan ekonomi Cina rata-rata sebesar 5 persen per tahun, maka ekonomi Cina pada 2025 akan berkembang menjadi setengah ekonomi Amerika Serikat pada 2003.²³⁶

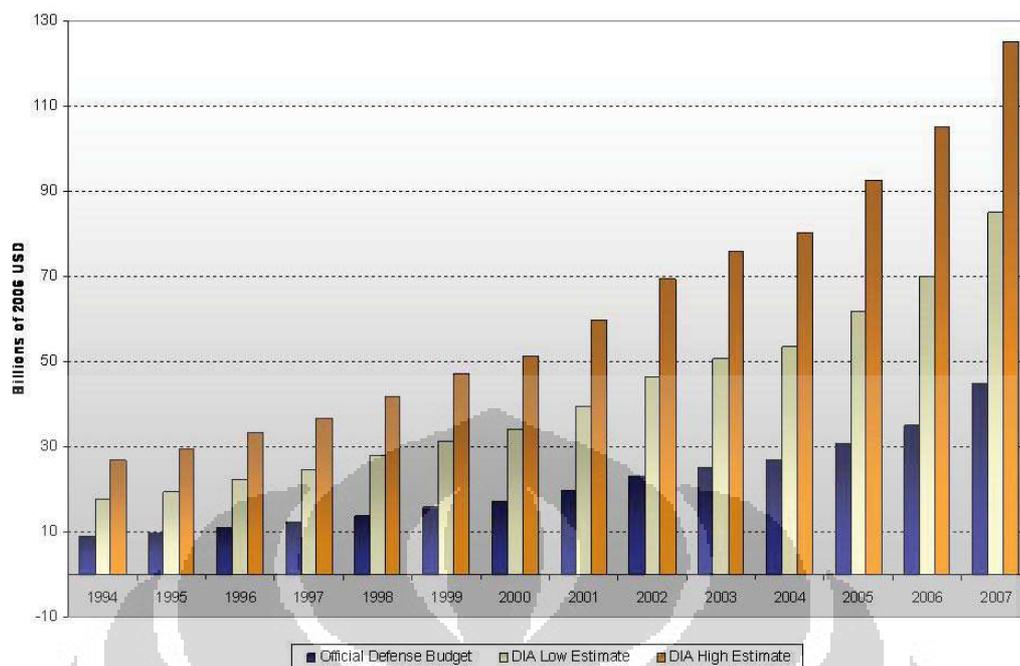
Dua grafik berikut akan menunjukkan seberapa besar perbedaan estimasi dari beberapa sumber yang dikumpulkan oleh *Office of the Secretary of Defense* terhadap anggaran militer Cina:



Grafik 3.3. Estimasi Anggaran Militer Cina 2007, sumber non-pemerintah

*Sumber: Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

²³⁶ Crane, Cliff, Medeiros, Mulvenon, dan Overholt, *Modernizing China's Military: Opportunities and Constraints*, RAND Monograph 2005, diakses dari http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG260-1.pdf pada



Grafik 3.4. Estimasi DIA terhadap Anggaran Militer Cina 1994-2007

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

Beralih kepada Jepang, pada dasarnya pembatasan anggaran militer hanya sebesar 1 persen dari GDP sejak era 1970-an dan mahalanya alutsista produksi sendiri telah membuat keterbatasan bagi Jepang dalam mengembangkan kapabilitas militernya. Kondisi ekonomi Jepang juga tidak banyak membantu karena GDP Jepang cenderung stagnan di kisaran 54-55 miliar US\$ sejak pertengahan 1990-an²³⁷, terlebih lagi dengan fluktuasi nilai yen terhadap dollar. Sejak 1996, depresiasi nilai yen menyebabkan nilai total anggaran militer Jepang mengalami penurunan sebesar lebih dari 20% dalam dollar, dari 10 miliar US\$ pada 1994 ke 7,8 miliar US\$ pada 1997. Pada akhir 1998, pulihnya nilai yen baru menaikkan kembali nilai dari anggaran militer Jepang, namun demi mengurangi hutang dan defisit anggaran Jepang tetap memangkas lebih dari 8 miliar US\$ yang sebelumnya dialokasikan dalam proyeksi anggaran untuk modernisasi pertahanan 1996-2000. Anggaran pada tahun 1999 dibatasi senilai anggaran militer tahun 1998.²³⁸

²³⁷ *The SIPRI Military Expenditure Database, ibid.*

²³⁸ Tim Huxley & Susan Willett, "Arming East Asia", *IISS Adelphi Paper 329*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 19-20

Pasca Perang Dingin persentase anggaran militer Amerika Serikat dari GDP telah berkurang setelah sebelumnya mencapai puncak 5,7 persen dari GDP pada tahun 1988, bahkan berangsur-angsur menurun ke titik 3 persen dari GDP pada kurun 1999-2001. Jumlah ini berangsur-angsur naik ke tingkat 4-4,7 persen pada kurun 2001-2010 sehubungan kampanye *war on terror* yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan penggelaran kekuatan militer ke Afghanistan, Irak, dan Samudera Hindia. Namun, pasca krisis ekonomi 2008, situasi yang lebih serius dihadapi oleh Amerika Serikat dengan terjadinya krisis. Situasi ini berdampak pada 2009 dengan rencana pemotongan anggaran militer yang cukup signifikan. Anggaran militer pada 2011-2012 diperkirakan mengalami penurunan ke tingkat 3,3-4,3 persen dari GDP, setelah sebelumnya pada puncak *war on terror* di tahun 2010, anggaran militer tercatat mencapai 4,7 persen dari GDP. Dalam angka, pemotongan anggaran yang akan berlangsung selama sepuluh tahun ke depan secara kasar mencapai 490 miliar US\$. Walaupun demikian, tetap ada perkiraan bahwa setelah tahun 2014 anggaran militer Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan sebesar 10-12 miliar US\$ per tahun, setelah pada 2013 anggaran militer akan dikurangi sebesar 8,5 juta US\$ dari tahun 2012, sehingga berada di tingkat 523,8 miliar US\$.²³⁹

3.2.2 Kekuatan dan Penggelaran Militer

3.2.2.1 Militer Cina

Kekuatan personel militer aktif Cina pada tahun 2011 telah mencapai 2.285.000 jiwa, dengan didukung oleh 660.000 personel paramiliter dan sekitar 510.000 personel cadangan. Jumlah tersebut merupakan perkembangan dari tahun 2006 dengan jumlah personel militer aktif sebanyak 2.255.000 jiwa. Namun jumlah personel paramiliter justru menurun, hingga kurang dari setengah jumlah personel pada 2006 sebanyak 1.500.000 jiwa; demikian halnya dengan jumlah personel cadangan yang pada 2006 mencapai sekitar 800.000 jiwa.

²³⁹ Anthony A. Cordesman, *The US Defense Budgets and Changes in Strategy: Pre FY2013 Budget Submission Report* (CSIS, 23 Januari 2012)

Tabel 3. 3. Kekuatan <i>People's Liberation Army (PLA)</i>			
		2006	2011
Personel	regular	sekitar 1.600.000	sekitar 1.600.000
Lapis Baja	MBT	7.580+ 1.200 Type-96 1.000 Type-88A/Type-88B 80 Type-98A 300 Type-79 5.000 Type-59-II/Type-59-I	7.050 4.300 Type-59/Type-59D/Type-59-II 300 Type-79 500 Type-88A/B 1.500 Type-96/Type-96A 450 Type-98A/Type-99
	<i>Light Tank</i>	1.000 400 Type-62-1 600 Type-63A	800 200 Type-05 AAV ZTD-05 400 Type-62 200 Type-63A
	AIFV	1.000 Type-86A (<i>WZ-501</i>)	2.390 40 Type-03 (ZBD-03) 500 Type-04 (ZBD-04) 250 Type-05 AAV (ZBD-05) 700 Type-86/Type-86A (<i>WZ-501</i>) 750 Type-92 150 Type-92A
	APC	5.500 Angkut pasukan: 2.300 Type-63-II/Type-63-I/Type-63A/Type-63C 300 Type-89-I Bersenjata: 200 Type-77-11 600+ Type-92 100 WZ-523	2.700 Angkut pasukan: 1.650 Type-63/Type-63C 350 Type-89 Bersenjata: 100 Type-09 (ZBL-09) 500 Type-92B 100 WZ-523
Artileri		17.700+	12.462+

Artileri	<i>self-propelled</i>	1.200 122mm: 200 Type 070-I dan 500 Type-89 152mm: 500 Type-83	1.710 122mm: 1,296 Type-70-I, Type-89, Type-07 PLZ-07 152mm: 324 Type-83 155mm: 90 Type-05 PLZ-05
	<i>towed</i>	14.000 100mm: Type-59 (M-1944) 122mm: Type-54-1 (M-30) M-1938, Type-60 (D-74), dan Type-83 130mm: Type-59 (M-46) dan Type-59-I 152mm: Type-54 (D-1) dan Type-66 (D-20) 155mm: 150 Type 88 WAC-21	6.246 122mm: Type-54-1 (M-30) M-1938, Type-83, Type-60 (D-74), dan Type-96 (D-30) 130mm: 270 Type-59 (M-46) dan Type-59-I 152mm: 2,106 Type-54 (D-1) dan Type-66 (D-20) 155mm: 150 Type 88 WAC-21
	meriam/ mortir	100 120mm: 100 2S23 <i>NONA-SVK</i>	150+ 120mm: 100 2S23 <i>NONA-SVK</i> dan 50+ PLL-05
MRL		2.400+ <i>self-propelled:</i> 122mm: Type-89 130mm: Type-70 <i>towed:</i> 122mm: Type-81 130mm: Type-82 273mm: Type-83 320mm: Type-96 (WS-1)	1,770+ <i>self-propelled:</i> 107mm: beberapa 122mm: 1.620 Type-81/Type-89 300mm: 96 Type-03 <i>PHL-03</i> <i>towed:</i> 107mm: 54 Type-63
Mortir		? <i>self-propelled:</i> 82mm: Type-82 120mm: Type-55 <i>towed:</i> 81mm: Type-W87	2.586 <i>self-propelled:</i> 120mm: Type-55 <i>towed:</i> 81mm: Type-W87 82mm: Type-53 (M-37), Type-

	<p>82mm: Type-53 (M-37), Type-67, dan Type-82</p> <p>100mm: Type-71</p> <p>120mm: Type-55</p> <p>160mm: Type-56 (M-160)</p>	<p>67, dan Type-82</p> <p>100mm: Type-71</p> <p>120mm: Type-55</p> <p>160mm: Type-56 (M-160)</p>
Helikopter	<p>Attack: 31 WZ-9</p> <p>Assault: 8 SA-342 <i>Gazelle</i></p> <p>Angkut berat: 3 Mi-6 "<i>Hook</i>"</p> <p>Angkut sedang: 45 Mi-171, 50 Mi-171V5 40 MI-17 (Mi-8MT) "<i>Hip-H</i>" 50 Mi-8T "<i>Hip</i>" 19 S-70C (S-70C2) <i>Black Hawk</i></p> <p>Angkut ringan: 53 AS-350 <i>Ecureuil</i></p> <p>Multifungsi: 61 AS-365/Z-9 (AS-365N) <i>Dauphin</i> 2 8 SA-316 <i>Alouette III</i> Z-10</p>	<p>Attack: 6-10 WZ-10</p> <p>Medium reconnaissance: 22 Mi-17 "<i>Hip-H</i>" 12 Mi-17V7 8 SA-316 <i>Alouette III</i> 80 Z-9/9B, 100 Z-9 WA, 26 Z-9W</p> <p>Angkut berat: 3 Mi-6 "<i>Hook</i>" 4 Mi-26 "<i>Halo</i>" 7 SA-321 <i>Super Frelon</i></p> <p>Angkut sedang: 50 Mi-8T "<i>Hip</i>" 57 Mi-171, 9 Mi-171V, 42 Mi-171V5, 8 Mi-172 18 S-70C2 (S-70C) <i>Black Hawk</i></p> <p>Angkut ringan: 53 AS-350 <i>Ecureuil</i></p>

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*



Peta 3.6. Pengelaran Kekuatan Darat Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

Pengembangan kapabilitas alutsista PLA pada 2011 dapat dilihat pada penambahan jumlah tank tempur utama (*Main Battle Tank—MBT*), kehadiran artileri swagerak kaliber 155mm, serta penambahan mortir swagerak kaliber 120mm dan kendaraan tempur infanteri lapis baja (*Armored Infantry Fighting Vehicle—AIFV*) Sedangkan dari segi dukungan udara, pada 2011 PLA telah memiliki helikopter serbu buatan lokal WZ-10 dan angkut berat Mi-26 “*Halo*”. Alutsista yang mengalami pemensiunan adalah MBT Type 59 dan Type-88, angkut personel lapis baja (*Armored Personnel Carrier—APC*) Type-63 dan Type-77, artileri tarik (*towed artillery*) kaliber 100mm, serta peluncur roket multilaras (*Multiple Rocket Launcher—MLR*) kaliber 130mm dan 273mm.



Peta 3.7. Penggelaran Kekuatan Udara Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

Tabel 3.4. Kekuatan People's Liberation Army – Air Force (PLA-AF)		
	2006	2011
Personel	sekitar 400.000	300.000-330.000
Tempur	5.064 Fighter: 400 J-7II/J-7IIA, 36 J-7C, 296 J-7E, 24 J-7G "Fishbed" 80 J-8, 62 J-8D, 11 J-8F, 28 J-8 IIB, 24 J-8 IID, 40 J-8III "Finback" 62 J-10	Fighter: 240 J-7, 240 J-7E, 96 J-7G "Fishbed" 72 J-8B, 72 J-8D, 48 J-8F, 48 J-8H "Finback" 95 J-11, 43 Su-27SK, 32 Su-27UBK "Flanker"

	116 J-11/Su-27SK “ <i>Flanker</i> ” Fighter-bomber: 73 Su-30MKK “ <i>Flanker</i> ” 13 JH-7, 26 JH-7A Attack: 722 MiG-19 “ <i>Farmer</i> ” 408 Q-5C/Q-5D “ <i>Fantan</i> ”	Fighter-bomber: 144+ J-10 24+ J-11B “ <i>Flanker</i> ” 73 Su-30MKK “ <i>Flanker</i> ” 72 JH-7/JH-7A Attack: 408 Q-5C/Q-5D/Q-5E “ <i>Fanta</i> ”
Pembom	222 Ringan/taktis: 94 H-5, F-5, F-5B “ <i>Beagle</i> ” Berat/strategis: 20 H-6H, 50 H-6E/H-6F/H-6H, 12 H-6H “ <i>Badger</i> ”	82 Berat/strategis: H-6A/H-6E/H-6H/H-6M “ <i>Badger</i> ”
Transpor	296+ Angkut berat: 13 Il-76MD “ <i>Candid-B</i> ” Angkut sedang: 4 An-12 “ <i>Cub</i> ” 2 Il-18 “ <i>Coot</i> ” 41 Y-7 “ <i>Coke</i> ”/Y-7H “ <i>Curl</i> ” 17+ Tu-154M “ <i>Careless</i> ” 20 Y-11 8 Y-12 Angkut ringan: 170 Y-5 “ <i>Colt</i> ”	336+ Angkut berat: 18 Il-76MD “ <i>Candid-B</i> ” Angkut sedang: 4 Y-8 “ <i>Cub</i> ” Angkut ringan: 41 Y-7 “ <i>Coke</i> ”/Y-7H “ <i>Curl</i> ” 20 Y-11 8 Y-12 170 Y-5 “ <i>Colt</i> ” Penumpang: 2 Il-18 “ <i>Coot</i> ” 17 Tu-154M “ <i>Careless</i> ” 15 B737-200 (VIP) 5 CL-61 <i>Challenger</i>

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Pada 2006, angkatan udara Cina (*People’s Liberation Army-Air Force* atau PLAAF) memiliki total sebanyak 2.700 *combat aircraft*. Kekuatan tersebut didukung oleh 10 unit pesawat tanker HY-6. PLAAF juga memiliki 80 unit helikopter angkut pasukan Mi-8 *Hip*; angkut VIP AS-332 *Super Puma*; serta heli multifungsi Z-9 (lisensi AS-365N *Dauphin*) dan Bell 214. Pada 2011, tren yang

berlangsung pada PLAAF adalah pengurangan jumlah alutsista yang terbilang sudah kuno. Contohnya, penempur J-6 (lisensi MiG-19S “*Farmer*” era 1950-an) dan versi awal J-7 (lisensi MiG-21F “*Fishbed*” era 1960-an), serta pembom ringan H-5 (lisensi Il-28 “*Beagle*”) dan versi awal H-6 (lisensi Tu-16 “*Badger*”). Selain itu, peningkatan kapabilitas *air superiority* terus ditingkatkan dengan kelanjutan beberapa program pengembangan pesawat tempur *stealth* (pesawat pertama dari Chengdu, J-20, telah berhasil melakukan uji darat pada Januari 2011) dan kapabilitas serang dengan melengkapi pembom H-6 dengan rudal jelajah jarak jauh. Namun, pada Juni 2006 program AEW&C KJ-200 mengalami kemunduran yang disebabkan kecelakaan yang dialami oleh satu-satunya prototipe KJ-200, walaupun Cina telah mengoperasikan sebanyak empat unit pesawat tipe ini. Kemunduran tersebut disebabkan oleh tewasnya kebanyakan personel inti dari program AEW&C Cina.²⁴⁰

²⁴⁰ KongJing-200 Airborne Early Warning & Control Aircraft, *op cit.*



Peta 3.8. Pengelaran Kekuatan Maritim Cina

***Sumber:** Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2007*

		2006	2011
Personel	Regular	sekitar 255.000	sekitar 255.000
	penerbangan laut	26.000	26.000
<i>Aircraft Carrier (CV)</i>		-	1 (ujicoba) <i>Kuznetsov</i>
<i>Destroyer (DD)</i>		28	13
		DDG:	DDGHM:

		<p>2 <i>Guangzhou</i></p> <p>3 <i>Hangzhou</i> (RF <i>Sovremenny</i>)</p> <p>2 <i>Lanzhou</i></p> <p>1 <i>Luda</i> III</p> <p>11 <i>Luda</i> Type-051</p> <p>1 <i>Luhai</i></p> <p>2 <i>Luhu</i> (Type 052A)</p> <p>1 <i>Luzhou</i></p> <p>1 <i>Luda</i> II</p> <p>5 <i>Luda</i> mod Type-051DT</p>	<p>4 <i>Hangzhou</i> (RF <i>Sovremenny</i>)</p> <p>2 <i>Luyang</i> (Type 052B)</p> <p>2 <i>Luyang II</i> (Type 052C)</p> <p>1 <i>Luhai</i> (Type 051B)</p> <p>2 <i>Luhu</i> (Type 052)</p> <p>DDGM:</p> <p>2 <i>Luzhou</i> (Type 051C)</p>
<i>Frigates</i> (FF)		<p>48</p> <p>FFG:</p> <p>13 <i>Jianghu</i> Type I</p> <p>9 <i>Jianghu</i> Type II</p> <p><i>Jianghu</i> Type III</p> <p>1 <i>Jianghu</i> IV</p> <p>6 <i>Jianghu</i> Type V</p> <p>4 <i>Jiangwei</i> I</p> <p>10 <i>Jiangwei</i> II</p> <p>2 <i>Jiangkai</i></p>	<p>65</p> <p>FFGHM:</p> <p>2 <i>Jiangkai</i> (Type 054)</p> <p>7 <i>Jiangkai</i> II (Type 054A)</p> <p>4 <i>Jiangwei</i> I (Type 053H2G)</p> <p>10 <i>Jiangwei</i> II (Type 053H3)</p> <p>FFGH:</p> <p>1 <i>Jianghu</i> IV (Type 053H1Q)</p> <p>FFGM:</p> <p>2 <i>Luda</i> mod (Type-051DT)</p> <p>FFG:</p> <p>11 <i>Jianghu</i> I (Type 053H)</p> <p>8 <i>Jianghu</i> II (Type 053H1)</p> <p>3 <i>Jianghu</i> III (Type 053H2)</p> <p>6 <i>Jianghu</i> V (Type 053H1G)</p> <p>9 <i>Luda</i> (Type-051/051D/051Z)</p> <p>1 <i>Luda</i> II (Type 051G)</p> <p>1 <i>Luda</i> III (Type 051G II)</p>
Amfibi		335	239
	Kapal pendarat (LS)	<p>LST:</p> <p>7 <i>Yukan</i></p> <p>10 <i>Yuting</i></p> <p>9 <i>Yuting</i> II</p> <p>LSM:</p>	<p>LSD:</p> <p>1 <i>Yuzhao</i></p> <p>LST:</p> <p>7 <i>Yukan</i></p> <p>9 <i>Yuting</i></p>

		<p>1 <i>Yudao</i> 1 <i>Yudeng</i> 13 <i>Yuhai</i> 22 <i>Yulian</i> 10 <i>Yunshu</i></p>	<p>10 <i>Yuting II</i> LSM: 10 <i>Yubei</i> 1 <i>Yudeng</i> (Type 073) 10 <i>Yuhai</i> 30 <i>Yuliang</i> 10 <i>Yunshu</i> (Type 073A)</p>
	Kendaraan pendarat (LC)	<p>LCU: 10 <i>Yubei</i> 120 <i>Yunnan</i> LCM: 20 <i>Yuchin</i> UCAC/ACV: 10</p>	<p>LCU: 120 <i>Yunnan</i> LCM: 20 <i>Yuchin</i> LCAC: 1 UCAC: 10</p>
Kapal selam		<p>58 SSBN: 1 <i>Xia</i> SSN: 4 <i>Han</i> (Type 091) SSG: 1 mod <i>Romeo</i> (Type S5G) SSK: 10 <i>Kilo</i> 1 <i>Ming</i> (Type ES5C/D) 19 <i>improved Ming</i> (Type ES5E) 15 <i>Romeo</i> (Type ES3B) 9 <i>Song</i> 2 <i>Yuan</i> SS: 1 <i>Golf</i></p>	<p>71 SSBN: 1 <i>Xia</i> (Type 092) 2 <i>Jin</i> (Type 094) SSN: 4 <i>Han</i> (Type 091) 2 <i>Shang</i> (Type 093) SSG: 1 mod <i>Romeo</i> (Type SSG) SSK: 12 <i>Kilo</i> (2 Project 877, 2 Project 636, 8 Project 636N) 20 <i>Ming</i> (4 Type 035, 12 Type 035G, 4 Type 035B) 8 <i>Romeo</i> (Type 033) 16 <i>Song</i> (Type 039/039G) 4 <i>Yuan</i> (Type 39A/B) SS: 1 <i>Golf</i></p>
Kapal patroli		<p>343 PFM: 16 <i>Houxin</i> 7 <i>Huang</i></p>	<p>211+ PCFG: 65+ <i>Houbei</i> (Type 022) 11 <i>Huangfen</i> (Type 021)</p>

	<p>15 <i>Huangfeng/Hola</i> (FSU <i>Osa</i> I-Type) 4 <i>Houbei</i></p> <p>PFC: 98 <i>Hainan</i></p> <p>PCC: 2 <i>Haijui</i> 20 <i>Haiqing</i></p> <p>PCI: 15 <i>Haizui</i>, 35 <i>Shanghai</i> (<100 ton)</p> <p>PCR: 30 (<100 ton)</p>	<p>PCG: 6 <i>Houjian</i> (Type 037/II) 20 <i>Houxin</i> (Type 037/IG)</p> <p>PCC: 3 <i>Haijui</i> (Type 037/I) 50 <i>Hainan</i> (Type 037) 22 <i>Haiqing</i> (Type 037/IS)</p> <p>PB: 34+ <i>Haizui/Shanghai III</i> (Type 062/I)</p>
Pesawat tempur	<p>642</p> <p>Fighter: 26 J-7 (MiG-21F) "<i>Fishbed-C</i>" 50 J-8/J-8A, 50 J-8B, 200 J-8IIA, 20 J-8D "<i>Finback</i>"</p> <p>Attack: 18 JH-7 48 Su-30Mk2 "<i>Flanker</i>" 30 Q-5 "<i>Fantan</i>" 200 J-6 (MiG-19) "<i>Farmer-B</i>"</p>	<p>192</p> <p>Fighter: 36 J-7/J-7E "<i>Fishbed</i>" 48 J-8F/J-8H "<i>Finback</i>"</p> <p>Fighter-bomber: 84 JH-7/JH-7A 24 Su-30Mk2 "<i>Flanker</i>"</p> <p>Attack: 30 Q-5 "<i>Fantan</i>"</p>
Pesawat pembom	<p>130</p> <p>Ringan/taktis: 100 H-5, F-5, F-5B "<i>Beagle</i>"</p> <p>Berat/strategis: 30 H-6D "<i>Badger</i>"</p>	<p>50</p> <p>Ringan/taktis: 20 H-5 "<i>Beagle</i>"</p> <p>Berat/strategis: 30 H-6G "<i>Badger</i>"</p>
Pesawat transpor	<p>66</p> <p>Angkut sedang:: 4 Y-8 (An-12BP) "<i>Cub-A</i>"</p> <p>Angkut ringan: 7 Y-7 (An-24) "<i>Coke</i>", 6 Y-7H (An-26) "<i>Curl</i>" 2 Yak-42</p>	<p>66</p> <p>Angkut sedang: 4 Y-8 "<i>Cub</i>"</p> <p>Angkut ringan: 4 Y-7 "<i>Coke</i>", 6 Y-7H "<i>Curl</i>" 2 Yak-42 50 Y-5 "<i>Colt</i>"</p>

	50 Y-5 "Colt"	
--	---------------	--

Tabel 3.6. Kekuatan <i>People's Liberation Army-Marine Corps (PLA-M)</i>		
	2006	2011
Personel	Sekitar 10.000	Sekitar 10.000
<i>Light tank</i>	150 Type-63A	164 62 Type-63A 62 Type-05 AAV ZTD-05
APC	60+ Angkut: 60 Type-63 Bersenjata: Type-92	248 Angkut: 60 Type-63C 62 Type-86 124 Type-05 AAV ZBD-05
Artileri	<i>self-propelled</i>	- 40+ 122mm: 20+ Type-07, 20+ Type 89
	<i>towed</i>	122mm: Type-83 -
MRL	107mm: Type-63.	107mm: Type-63.
Mortir	-	82mm

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Dalam melakukan *mine warfare* PLAN didukung oleh 130 unit kapal penyapu ranjau 310 ton kelas *Wosao*, *Futi*, 520 ton *T-43*, serta *minelayer* 3.500 ton kelas *Wolei*. Sedangkan dukungan suplai logistik merupakan tanggungjawab bagi dengan 163 unit kapal pendukung (termasuk kelas AH *Qiongsha* serta AO *Fuqing* dan *Nanchang*). Sedangkan alutsista udara PLAN terdiri dari 420 unit *combat aircraft* antikapal selam PS-5 (SH-5); patroli maritim Y-8X; tanker HY-6; ditambah dengan 59 unit helikopter antikapal selam Z-9C (lisensi AS-565SA *Panther*); Ka-28 (Ka-27PL) *Helix-A*; dan angkut pasukan Mi-8. Dalam melakukan proyeksi maritim ke samudera, diperkirakan Cina masih akan menambah jumlah kapal induk sebanyak dua sampai empat unit hingga 2050 yang desainnya didasarkan pada Shi Lang.

3.2.2.2 Militer Jepang

Kekuatan SDF pada 2011 meliputi 247.746 jiwa tentara regular dan 12.636 jiwa paramiliter aktif, sedangkan tentara cadangan SDF berjumlah 56.379 jiwa. Kekuatan ini berkembang dari tahun 2006 dimana jumlah personel regular SDF sebanyak 240.400 jiwa dan personel paramiliter sebanyak 12.250 jiwa. Demikian halnya dengan jumlah personel cadangan pada 2011 sebanyak 56.379 jiwa, bertambah dari sebelumnya 41.800 jiwa pada 2006.²⁴¹

Tabel 3.7. Kekuatan <i>Japan Ground Self-Defense Force</i> (JGSDF)			
		2006	2011
Personel		sekitar 148.300	151.641
Lapis Baja		1.880	1.800
	MBT	980	850
		700 Type-74, 280 Type-90	13 Type 10, 517 Type-74, 320 Type-90
	<i>Reconnaissance vehicles</i>	100 Type-87	100 Type-87
	AIFV	70 Type-89	70 Type-89
	APC	730	780
		Angkut pasukan: 30 Type-60, 340 Type-73	Angkut pasukan: 310 Type-73
		Bersenjata: 200 Type-82, 160 Type-96	Bersenjata: 220 Type-82, 250 Type-96
Artileri		1.980	1.880
	<i>self-propelled</i>	250	210
		155mm: 140 Type-75, 20 Type-99	155mm: 80 Type-75, 50 Type-99
		203mm: 90 M110A2	203mm: 80 M110A2
	<i>towed</i>	480	420
		155mm: FH-70	155mm: FH-70

²⁴¹ Untuk rencana modernisasi Jepang 2011-2012 selengkapnya, lihat *Defense Programs and Budget of Japan. Overview of FY2011 Budget Request* yang dikeluarkan Jepang.

	MRL	110 <i>self-propelled:</i> 130mm: 20 Type-75 227mm: 90 MLRS	100 <i>self-propelled:</i> 227mm: MLRS
	Mortir	1.140 <i>self-propelled:</i> 120mm: 20 <i>towed:</i> 81mm: 670 107mm: 90 120mm: 360	1.150 <i>self-propelled:</i> 120mm: 20 <i>towed:</i> 81mm: 670 107mm: 50 120mm: 410
	Pesawat transpor	20 Angkut ringan: 10 Beech 350 <i>King Air</i> (LR-2) Multi fungsi: 10 MU-2 (LR-1)	12 Angkut ringan: MU-2 (LR-1) dan Beech 350 <i>King Air</i> (LR-2)
	Helikopter	443 <i>Attack:</i> 90 AH-1S <i>Cobra</i> <i>Reconnaisance:</i> 120 MD-500 Angkut berat: 50 CH-47J/CH-47JA <i>Chinook</i> Angkut sedang: 3 AS-332L <i>Puma</i> 30 UH-60JA <i>Black Hawk</i> Angkut ringan: 150 Bell 205 (UH-1J)	437 <i>Attack:</i> 78 AH-1S <i>Cobra</i> 7 AH-64D <i>Apache Longbow</i> 26 OH-1* <i>Reconnaisance:</i> 118 OH-6D <i>Cayuse</i> Angkut berat: 54 CH-47J/CH-47JA <i>Chinook</i> Angkut sedang: 3 AS-332L <i>Puma</i> 3 EC-225LP <i>Super Puma MkII+</i> Angkut ringan: 148 Bell 205 (UH-1J)
	SSM	100 Type-88	100 Type-88

*pengganti OH-6D/MD-500

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Kekuatan ini masih dilengkapi dengan 230 unit peluncur roket kaliber 89mm, selain 630 rudal antitank yang terdiri dari 190 Type-79 *Jyu-MAT* dan 440 *Chu-MAT*. Kemudian, pada 2011 JGSDF juga melakukan pengadaan 7 unit helikopter tempur AH-64D *Apache Longbow*, 26 unit helikopter observasi/serang ringan Kawasaki OH-1, serta 6 unit helikopter angkut sedang/VIP dari seri Eurocopter *Puma*. Di sisi lain, terjadi pergeseran peran UH-60JA *Black Hawk* menjadi helikopter SAR (Kementerian Pertahanan Jepang tetap mendefinisikan UH-60JA sebagai helikopter serbaguna), selain pengurangan alutsista lama seperti helikopter serang AH-1S, helikopter angkut UH-1J, dan helikopter observasi OH-6 masing-masing sebanyak dua unit.²⁴²

Tabel 3.8. Kekuatan Japan Air Self-Defense Force (JASDF)		
	2006	2011
Personel	Sekitar 45.900	47.123
Pesawat tempur	280 Fighter: 150 F-15J <i>Eagle</i> 40 F-2 70 F-4EJ <i>Phantom II</i> Reconnaissance: 20 RF-4EJ <i>Phantom II</i>	374 Fighter: 202 F-15J <i>Eagle</i> Fighter-bomber: 87 F-2/ F-2B 72 F-4EJ <i>Phantom II</i> Reconnaissance: 13 RF-4EJ <i>Phantom II</i>
Pesawat transpor	40 Angkut sedang: 10 C-130H <i>Hercules</i> 20 C-1 10 U-4	60 Angkut sedang: 16 C-130H <i>Hercules</i> Penumpang: 13 Beech T-400 26 C-1 5 Gulfstream IV (U-4)

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Pada 2011 ASDF memiliki sebanyak 50 unit helikopter yang terdiri dari 38 heli SAR UH-60J *Blackhawk* dan 15 heli angkut berat CH-47J *Chinook*, sedikit

²⁴² *Ibid.*

berbeda komposisinya dari tahun 2006 ketika ASDF memiliki 30 heli SAR UH-60J *Black Hawk*, 10 heli angkut berat CH-47J *Chinook*, dan 10 heli angkut KV-107. Selain itu, pada 2006 Jepang masih didukung oleh 10 unit pesawat AEW&C E-2C *Hawkeye* dan empat unit E-767, serta satu unit pesawat perang elektronik EC-1. Kapabilitas AEW&C ini mengalami peningkatan jumlah pada 2011 terkait konversi empat unit YS-11 menjadi pesawat perang elektronik YS-11E, selain pengadaan tiga unit E-2C tambahan. Jepang juga mengembangkan kapabilitas *air refuelling* dan angkut penumpang/kargo dengan pengadaan empat unit tanker *wide-body* KC-767 dari Amerika Serikat. Dari empat unit yang dipesan, dua pesawat telah dikirimkan ke Jepang masing-masing pada Februari dan Maret 2008, sedangkan pesawat ketiga datang pada Maret 2009. Ketiga pesawat tanker ini berhasil mencapai *initial operational capability* (IOC) pada April 2009, sedangkan pesawat keempat dijadualkan datang pada kuartal pertama 2010.²⁴³ Jepang juga tengah mengharapkan, produksi pesawat angkut C-2 dipercepat untuk menggantikan C-1, terkait jarak jangkauannya yang terlalu pendek dan muatannya yang terlalu sedikit untuk mobilisasi kekuatan yang lebih efektif.²⁴⁴ Jepang juga positif memilih F-35A *Lightning II* dari program JSF Amerika Serikat sebagai pengganti pembom-tempur F-4EJ *Kai Phantom II*, dimana empat pesawat pertama dijadualkan datang pada Maret 2017. Pemilihan ini dilakukan terkait mahalnya upaya mengembangkan pesawat tempur generasi ke-5 secara mandiri (Mitsubishi ATD-X), namun Jepang akan membatalkan pesanan apabila terjadi kenaikan harga atau keterlambatan penyerahan dari Lockheed Martin. Situasi dilematis ini terjadi pada partisipan program JSF, terkait waktu pengembangan yang terlalu lama karena F-35 menemui banyak masalah dalam pengembangannya.²⁴⁵

²⁴³ *Boeing KC-767J Aerial Refueling Tankers Join Active Air Wing in Japan*, diakses dari <http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=678> pada 28 Februari 2012 pk. 18.42 WIB.

²⁴⁴ *Japanese AF Calls For Speedy C-2 Deliveries*, diakses dari http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_channel.jsp?channel=defense&id=news/asd/2011/07/19/04.xml&headline=Japanese%20AF%20Calls%20For%20Speedy%20C-2%20Deliveries pada 28 Februari 2012 pk. 18.45 WIB.

Defense Programs and Budget of Japan, *op cit.*, hlm. 5

²⁴⁵ “F-35 customers express concerns over cost”, dalam *Combat Aircraft Monthly* Vol. 13 No. 5, Maret 2012, hlm. 7. Dalam kolom editorial di halaman 5, jurnalis penerbangan Jamie Hunter juga menulis bahwa terdapat permasalahan desain pada F-35C (varian kapal induk) yang membahayakan keselamatan operasional di laut, selain memperlambat program JSF itu sendiri.

Tabel 3.9. Kekuatan <i>Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)</i>			
		2006	2011
Personel	reguler	44.500	45.518
	penerbangan laut	sekitar 9.800	sekitar 9.800
<i>Aircraft carrier (CV)</i>		-	2 CVH: 2 Hyuga
<i>Cruisers (C)</i>		-	2 CGHM: 2 Atago
<i>Destroyers (DD)</i>		44 DDG: 6 Asagiri, 2 Hatakaze, 11 Hatsuyuki, 4 Kongou, 9 Murasame, 3 Tachikaze, 5 Takanami (Improved Murasame) DD: 2 Haruna, 2 Shirane	30 DDGGM: 6 Asagiri, 9 Murasame, 5 Takanami DDGM: 2 Hatakaze, 4 Kongou, 1 Tachikaze DDM: 1 Haruna, 2 Shirane
<i>Frigates (FF)</i>		6 FFG: 6 Abukuma, 1 Ishikari, 1 Yubari	16 FFGM: 6 Abukuma, 10 Hatsuyuki
Amfibi		26	25
	Kapal pendarat (LS)	LST: 3 Osumi, 2 Yura	LST: 3 Osumi, 2 Yura
	Kendaraan pendarat (LC)	LCU: 2 Yusotei LCM: 13 ACV: 6 LCAC	LCU: 2 Yusotei LCM: 12 ACV: 6 LCAC
<i>Kapal Selam (SS)</i>		16 SSK: 6 Harushio, 9 Oyashio, 1 Yuushio	18 SSK: 5 Harushio, 11 Oyashio, 2 Soryu
<i>Patroli (P)</i>		9 PFM: 6 Hayabusa PHM: 3 Ichi-Go	6 PBFG: 6 Hayabusa
<i>Pesawat sayap tetap</i>		80 ASW: 80 P-3C <i>Orion</i>	95 ASW: 2 P-1** 93 P-3C <i>Orion</i>

Helikopter	92 ASW: 84 SH-60J <i>Seahawk</i> , 8 SH-60K <i>Seahawk</i>	93 ASW: 61 SH-60J <i>Seahawk</i> , 31 SH-60K <i>Seahawk</i> , 1 USH-60K <i>Seahawk</i>
------------	---	---

**selebihnya dalam pesanan

***Sumber:** IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Pada bulan Maret 2009, Jepang menaikkan kapabilitas operasi maritim dengan menggantikan *helicopter-carrying destroyer* kelas *Haruna* dengan *helicopter-carrying destroyer* kelas *Hyuga*. Yang menarik disini adalah *Hyuga*; walaupun secara disebut sebagai “*destroyer* pembawa helikopter”, rancang bangun kapal dengan bobot tempur sekitar 20.000 ton tersebut merupakan CVL/CVH²⁴⁶ yang diperhitungkan melebihi LPH 18.500 ton kelas *Iwo Jima* Amerika Serikat, bahkan mendekati CVL 22.000 ton kelas *Invincible* milik Inggris. Di tahun yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang juga mengumumkan pengembangan dua kapal serupa, namun dengan bobot tempur mencapai 27.000 ton (sepertiga kali lebih besar dari *Hyuga*). Kapal dengan kode 22DDH ini disiapkan untuk mengoperasikan pesawat tempur STOVL F-35B *Lightning II* dan *tilt-rotor* V-22 *Osprey*, selain helikopter angkut dan helikopter antikapal selam.²⁴⁷ Pada Maret 2011, Jepang meresmikan CVH *Ise* yang sekelas dengan *Hyuga*, sehingga total CVH yang dimiliki Jepang sebanyak dua unit. Argumen resmi yang dikemukakan Jepang adalah kapal ini khusus untuk melakukan patroli maritim dan menunjang kapabilitas antikapal selam, bukan untuk dilengkapi munisi ofensif atau difungsikan untuk melakukan pendaratan di wilayah konflik. Perkembangan selanjutnya, pengerjaan 22DDH telah dimulai pada 27 Januari 2012, dengan rencana peluncuran pada

²⁴⁶ CVL: *Light Aircraft Carrier* atau Kapal Induk Ringan.

CVH: *Helicopter Carrier* atau Kapal Induk Pengangkut Helikopter.

LPH: *Landing Platform, Helicopter*. Sama dengan CVH, namun lebih dimanfaatkan untuk mendukung serbuan amfibi atau operasi pendaratan.

STOVL: *Short Take-Off and Vertical Landing* atau Tinggal Landas Pendek dan Mendarat Vertikal.

²⁴⁷ *Details of New Japanese ‘Helicopter Destroyer’*, diakses dari

<http://www.defencetalk.com/details-of-new-japanese-helicopter-destroyer-27119/> pada 28 Februari 2012 pk. 19.01 WIB.

2015.²⁴⁸ Bersama Amerika Serikat, Jepang juga akan mengembangkan lebih lanjut sistem BMD yang akan melengkapi *cruiser* maupun *destroyer Aegis*.²⁴⁹

3.2.2.3 Militer Amerika Serikat di Jepang

Total personel Amerika Serikat yang bertugas di Jepang pada 2011 tercatat sebanyak 35.598 jiwa. Jumlah tersebut sedikit bertambah dibandingkan tahun 2006, dimana total personel Amerika Serikat tercatat sebanyak 35.372 jiwa. Bertambahnya personel tersebut lebih banyak dialami oleh marinir dan angkatan darat, sedangkan personel angkatan laut dan angkatan udara, justru berkurang.

Tabel 3.10. Kekuatan <i>United States Army, Japan</i> (USARJ)		
	2006	2011
Personel	1.690	2.677

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Kekuatan US Army kebanyakan berasal dari *9th Theater Army Area Command* yang dipangkalan di Camp Zama. Secara keseluruhan USARJ berperan mengelola sistem informasi peperangan, deteksi ancaman, suplai amunisi, keamanan pangkalan, dan memberikan bantuan transpor udara. Sedangkan unit yang dipangkalan di Okinawa terutama memiliki fungsi deteksi ancaman dan pertahanan udara. Kekuatan ini dilengkapi dengan radar, rudal *Patriot/PAC-3* dengan kapabilitas antibalistik, serta beberapa unit helikopter multifungsi *UH-60 Black Hawk* dan pesawat angkut ringan *UC-35*.²⁵⁰

Tabel 3.11. Kekuatan <i>United States 5th Air Force</i> (US 5th AF)		
	2006	2010
Personel	13.443	12.380
Pesawat tempur	42	42
	<i>Fighter:</i> 24 F-15C/D <i>Eagle</i>	<i>Fighter:</i> 24 F-15C/D <i>Eagle</i>

²⁴⁸ *Japan to Build New Helicopter Destroyer*, 24 November 2009, diakses dari <http://www.naval-technology.com/news/news70595.html> pada 28 Februari 2012 pk. 19.03 WIB.

²⁴⁹ *Defense Programs and Budget of Japan*, *op cit.*, hlm. 3

²⁵⁰ *United States Army, Japan*, diakses dari <http://www.usarj.army.mil/> pada 28 Februari 2012 pk. 19.06 WIB.

	Fighter-bomber: 18 F-16C/D <i>Fighting Falcon</i>	Fighter-bomber: 18 F-16C/D <i>Fighting Falcon</i>
Pesawat transpor	14 Angkut sedang: 10 C-130E/H <i>Hercules</i> Penumpang/VIP: 4 C-21 <i>Learjet</i>	14 Angkut sedang: 10 C-130H <i>Hercules</i> Penumpang/VIP: 2 C-21J <i>Learjet</i> 2 C-12J <i>Huron</i>

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Pada 2011 5th *Air Force* didukung oleh 2 unit pesawat peringatan dini E-3B *Sentry*, ditambah 8 unit helikopter *combat search-and-rescue* (CSAR) HH-60G *Pave Hawk*, beberapa UH-1N *Iroquois*, dan satu *Special Operations Group*. Jumlah kekuatan pendukung ini tidak berubah sejak 2006, di luar penggantian jenis pesawat angkut penumpang/VIP dan jumlah personel yang berkurang.

Tabel 3.12. Kekuatan United States Navy 7th Fleet (USN 7th Fleet)			
		2006	2011
Personel	Reguler	4.313	3.539
<i>Aircraft carrier</i> (CV)		1 CV: Kitty Hawk	1 CVN: Nimitz
<i>Cruisers</i> (C)		2 CGHM: 2 Ticonderoga	2 CGHM: 2 Ticonderoga
<i>Destroyers</i> (DD)		6 DDGHM: 2 Arleigh Burke Flight IIA DDGM: 4 Arleigh Burke Flight I/II	7 DDGHM: 3 Arleigh Burke Flight IIA DDGM: 4 Arleigh Burke Flight I/II
Amfibi		5	5
	Kapal komando	LCC: 1 Blue Ridge	LCC: 1 Blue Ridge
	Kapal pendarat	4 LHD: 1 Wasp LPD: 1 Austin LSD: 1 Harpers Ferry, 1	4 LHD: 1 Wasp LPD: 1 Austin LSD: 1 Harpers Ferry, 1 Whidbey

	<i>Whidbey Island</i>	<i>Island</i>
Pesawat sayap tetap	56 <i>Fighter-bomber:</i> 50 F/A-18C/D <i>Hornet</i> , F/A-18E/F <i>Super Hornet</i> <i>ASW:</i> 6 S-3B <i>Viking</i>	56 <i>Fighter-bomber:</i> 50 F/A-18 C/D <i>Hornet</i> , F/A-18E/F <i>Super Hornet</i> <i>ASW:</i> 6 S-3B <i>Viking</i>
Transpor	3-6 <i>Angkut sedang:</i> 2 C-2 <i>Greyhound</i> 1-4 C-9B <i>Skytrain II</i>	3-6 <i>Angkut sedang:</i> 2 C-2 <i>Greyhound</i> 1-4 C-9B <i>Skytrain II</i>
Helikopter	5 <i>ASW:</i> 4 SH-60F <i>Seahawk</i> 1 SH-3H <i>Sea King</i>	4 <i>ASW:</i> 4 SH-60F <i>Seahawk</i>

***Sumber:** IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Kekuatan 7th *Fleet* terbagi dua antara grup tempur utama berisi kapal induk, kapal penjelajah (*cruiser*), dan kapal perusak (*destroyer*) yang dipangkalan di Yokosuka, ditambah grup tempur pendukung berisi kapal serbu amfibi dan penyapu ranjau (*mine countermeasures*) yang dipangkalan di Sasebo. Grup tempur di Sasebo dilengkapi dengan dua unit kapal *mine countermeasures* (MCO) pada 2006, sedangkan pada 2011 kekuatan ini bertambah menjadi 4 unit. Sedangkan bila tidak sedang melaut, armada udara kapal induk (*carrier air wing*—CVW) yang terdiri dari delapan skadron dipangkalan di Atsugi. Armada udara kapal induk ini juga berfungsi vital dalam menyediakan informasi pertahanan bagi Amerika Serikat maupun Jepang, dengan kapabilitas AEW&C yang dimiliki empat unit E-2C *Hawkeye*, serta kapabilitas perang elektronik yang dimiliki empat hingga lima unit EA-6B *Prowler*. Di tahun 2011, armada udara ini telah mengalami modernisasi, seperti penggantian pesawat tempur F-14 *Tomcat* dan pesawat tempur serang F/A-18C/D *Hornet* menjadi F/A-18E/F *Super Hornet* selain E-2C *Hawkeye* menjadi E-

2C *Hawkeye 2000*. Sedangkan penggantian pesawat perang elektronik EA-6B *Prowler* dengan EA-18G *Growler* baru diperintahkan pada Februari 2012.²⁵¹

Tabel 3.13. Kekuatan <i>United States Marine Corps</i> (USMC) III MEF		
	2006	2011
Personel	15.926	17.002
Pesawat tempur	2 <i>Marine Air Group</i>	18 <i>Fighter-bomber:</i> 18 F/A-18D <i>Hornet</i>
Pesawat transpor		12 <i>Angkut sedang/tanker:</i> 12 KC-130J <i>Hercules</i>
Helikopter/ <i>tilt-rotor</i>		34 <i>Angkut berat:</i> 10 CH-53E <i>Sea Stallion</i> <i>Angkut sedang:</i> 12 CH-46E <i>Sea Knight</i> <i>Tilt-rotor:</i> 12 MV-22B <i>Osprey</i>

***Sumber:** IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

Selain kekuatan yang dipangkalan di Jepang, 7th *Fleet* masih memiliki unit-unit pendukung lain, di antaranya dua hingga tiga unit kapal selam serang nuklir (SSN kelas *Los Angeles*) kelas serta satu skadron helikopter angkut (tipe MH-60S *Knighthawk*) sedang yang dipangkalan di Pelabuhan Apra, Guam. Modernisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat berkaitan erat dengan kapabilitas deteksi ancaman dan proyeksi power yang lebih baik, selain mewujudkan sistem informasi peperangan dan interoperabilitas yang lebih efektif dalam rangka memenangkan peperangan modern. Mengenai kekuatan nuklir Amerika Serikat yang menjadi *nuclear umbrella* bagi sekutunya, modernisasi yang terjadi adalah teknologi rudal serta wahana pembawa/peluncur *delivery system* untuk menjamin akurasi dan survivabilitas sistem. Walaupun demikian, Amerika Serikat telah mulai mengurangi

²⁵¹ *EA-18G Growlers to replace EA-6B Prowlers*, diakses dari http://www.cnicy.navy.mil/Japan/NewsAndCurrentInfo/PressReleases/CNICY_A283918 pada 28 Februari 2012 pk. 19.10 WIB.

kekuatan nuklir sejak SALT dan START yang dirundingkan dengan Soviet pada masa Perang Dingin. Penjabaran kekuatan pada kurun 2006-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14. Kekuatan Nuklir Amerika Serikat		
	2006	2011
USN		
Kapal selam	14 SSBN: 4 <i>Ohio</i> 10 <i>Ohio (mod)</i>	14 SSBN: <i>Ohio (mod)</i>
Rudal balistik	SLBM: UGM-93A <i>Trident C-4</i> UGM-133A <i>Trident II D-5</i>	SLBM: UGM-133A <i>Trident II D-5</i>
USAF		
Pesawat pembom	115 94 B-52 <i>Stratofortress</i> 21 B-2A <i>Spirit</i>	95 75 B-52H <i>Stratofortress</i> 20 B-2A <i>Spirit</i>
Rudal jelajah	1.300+ ALCM: 900+ AGM-86B 400+ AGM-129	1.602 ALCM: 1.142 AGM-86B 460 AGM-129
Rudal balistik	500 ICBM: 500 LGM-30G <i>Minuteman III</i> 50 LGM-118A <i>Peacekeeper</i>	450 ICBM: LGM-30G <i>Minuteman III</i>

*Sumber: IISS, *Military Balance 2006-2007* dan *Military Balance 2011*

3.3 Lingkungan Strategis Asia Timur

Keamanan Asia Timur memiliki kompleksitas yang berbeda dari keamanan di Eropa. Permasalahan yang terjadi di wilayah ini tidak dapat dijelaskan secara gamblang dengan konsep keamanan klasik yang berlaku di Eropa, salah satunya disebabkan oleh sulitnya membedakan tingkatan konflik regional dan global. Berakhirnya Perang Dingin menyisakan keunikan dalam dinamika keamanan Asia

Timur. Terdapat kehadiran militer Amerika Serikat yang besar di wilayah ini, selain beberapa aktor negara yang memiliki kepentingan keamanan, terutama negara pemilik keunggulan teknologi dan kapabilitas nuklir. Sebagai akibatnya, Asia Timur dicirikan dengan konsentrasi besar kapabilitas militer, tingginya tensi hubungan antarnegara, kapasitas ekonomi dan teknologi untuk mendukung *hi-tech arms race*, serta absennya *framework* keamanan multilateral.

Terkait *arms race*, ada pula pendapat yang tidak menyetujui istilah tersebut. Dalam *Arming East Asia*, Huxley dan Willett menyebutkan bahwa keamanan Asia Timur lebih banyak didominasi oleh “modernisasi”.²⁵² Secara resmi, negara-negara Asia Timur berargumen bahwa pengembangan kapabilitas militer mereka dimaksudkan untuk mengganti perlengkapan maupun senjata konvensional yang sudah dimakan usia dan tertinggal dengan perkembangan teknologi. Modernisasi tersebut memicu modernisasi di negara tetangga, namun dengan skala yang lebih kecil daripada *arms race*. Hanya saja, memang ada beberapa negara dengan kemampuan teknologi yang mendukung memilih untuk mengembangkan kapabilitas non-konvensional, seperti Cina dan Korea Utara yang mengembangkan senjata nuklir beserta wahana peluncurnya (untuk Cina masih ditambah dengan senjata laser maupun rudal antisatelit) ataupun Jepang dengan *theater missile defense/ballistic missile defense* (TMD/BMD). Taiwan sempat membuat situasi memanas dengan membeli sistem TMD/BMD dari Amerika Serikat, sedangkan Korea Selatan memilih untuk tidak mengembangkan kapabilitas nuklir maupun antisatelit dengan pertimbangan kedua kapabilitas tersebut akan menambah ketegangan di Asia Timur. Pembelanjaan militer yang terjadi sehubungan dengan modernisasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu²⁵³:

- Meningkatnya pemasukan negara sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang cepat sebelum krisis ekonomi 1997.
- Pengaruh angkatan bersenjata dalam *decision-making* politik dan ekonomi di beberapa negara Asia Timur.

²⁵² Huxley & Willett, *ibid.*, hlm.9-10

²⁵³ *Ibid.*

- Modernisasi militer dan pengembangan industri pertahanan sebagai bagian dari modernisasi nasional dan industrialisasi. Sebagai akibatnya, *arms supplier* harus menyediakan kompensasi ekonomi (*offset*) bagi negara pembeli.
- *National prestige*, terkait hubungan dengan negara tetangga maupun persepsi publik dalam negeri.
- Ketidakpastian atas masa depan strategis Asia Timur.
- Peningkatan isu keamanan maritim.
- Tekanan dari *arms supplier*.

Kompleksitas tersebut kian rumit dengan budaya strategis masing-masing negara yang unik, selain sikap bermusuhan (*enmity*) yang dimiliki negara-negara Asia Timur dalam hubungan regionalnya. Sikap bermusuhan ini timbul dari persepsi tiap negara terhadap apa yang tetangganya lakukan. Selain itu, sikap bermusuhan juga muncul terkait kompetisi sengit negara-negara Asia Timur untuk memperluas pengaruh dan dominasi ekonomi, terlebih lagi dengan ekspansi militer Jepang pada masa Perang Dunia II yang kerap menjadi sandungan. Misalnya, hubungan Korea dengan Jepang yang diganggu oleh identitas nasional Korea yang anti-Jepang (terkait aneksasi Korea oleh Jepang pada awal abad ke-19), atau kecurigaan Cina terhadap Jepang dalam hubungan keamanan Amerika Serikat-Jepang yang lebih erat pada 1997. Negara-negara Asia Timur (termasuk beberapa pengamat Asia Timur dari Barat) juga mempersepsikan transformasi pertahanan Jepang sebagai upaya untuk “bergerak menjadi negara normal”. Kemudian, kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh perdana menteri Jepang yang ditentang oleh Cina dan Korea. Kunjungan tersebut merupakan kebutuhan untuk politik konservatif dalam negeri Jepang, namun diterjemahkan oleh Cina dan Korea sebagai pembenaran atas kolonialisme dan peperangan di masa lampau. Persepsi tersebut muncul karena kuil tersebut merupakan peristirahatan terakhir bagi tentara Jepang yang gugur terutama pada Perang Dunia II, termasuk 14 penjahat perang Kelas-A. Persepsi yang sama juga muncul karena upaya Jepang untuk menganulir sejarah agresi dan tindak kejahatan yang dilakukan pada masa Perang Dunia II melalui penulisan ulang buku sejarah untuk sekolah. Tetapi langkah menganulir sejarah tersebut dan menuliskannya ulang sebagai “pemujaan dan pembenaran terhadap

perang”²⁵⁴, serta masih ditambah pernyataan yang dilontarkan oleh pemimpin politik Jepang terkait isu Perang Dunia II, menyebabkan negara tetangganya menganggap Jepang sebagai negara yang sombong dan seolah tidak peduli terhadap tindakan terdahulu yang menghancurkan banyak negara. Dikhawatirkan Jepang akan kembali melakukan hal serupa di masa depan, ketika “transformasi”-nya telah berhasil dilakukan. Buku teks tersebut pada akhirnya direvisi, namun berdasarkan permohonan penulisnya dan tidak disebabkan oleh klaim Cina dan Korea Selatan.²⁵⁵ Camilla Soerensen menyatakan bahwa memburuknya kondisi diplomatik Cina-Jepang disebabkan oleh tiga perkembangan. Pertama, akhir dari sistem bipolar dengan runtuhnya Soviet menyebabkan naiknya kembali ketegangan sejarah dan kecurigaan antar dua negara tersebut. Kedua, perkembangan pesat ekonomi dan militer Cina telah meningkatkan kegelisahan Jepang dan mendorong Jepang untuk memperoleh status “negara-normal”. Perkembangan domestik ini telah meningkatkan konflik antara kepentingan strategis Cina dan Jepang. Ketiga, entah kegagalan atau ketidakpedulian Amerika Serikat pada keseimbangan hubungannya dengan Jepang dan Cina, terutama pasca “war on terror”, yang berakibat pada menguatnya sentimen negatif dalam hubungan keamanan Cina-Jepang.²⁵⁶

3.3.1 Hubungan Jepang-Cina

Identitas ganda yang dimiliki Cina, serta persepsi internalnya terhadap Jepang memiliki dampak yang tidak sederhana. Bagi beberapa analis, sebagai sesama negara terkuat di Asia Timur, kekuatan ekonomi Cina berpotensi memicu

²⁵⁴ Sejarawan Jepang Saburo Ienaga mengungkapkan Jepang telah banyak melakukan penulisan ulang sejarah yang berakibat pada bias pemahaman antara generasi muda dan generasi tua di Jepang. Sedangkan James Prysztup menuliskan bahwa dalam pembelaannya terhadap tuntutan Cina dan Korea Utara, Jepang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Jepang menekankan “pentingnya menghargai perbedaan pandangan dalam masyarakat”, sehingga Kementerian Pendidikan hanya menerapkan sistem kajian materi terhadap beberapa penerbit yang menyediakan calon buku teks sekolah. Distrik sekolah bebas untuk memilih buku yang telah lolos kajian sebagai bahan ajaran. Lihat James J. Prysztup, “*Japan-China Relations: The Past is Always Present*”, diakses dari http://csis.org/files/media/isis/pubs/0101qjapan_china.pdf pada 13 Juni 2011 pk. 18.15 WIB.

²⁵⁵ James J. Prysztup, “*Japan-China Relations: Spiraling Downward*”, *Comparative Connections* Vol. 3 No. 3, 1 Oktober 2001, diakses dari http://csis.org/files/media/isis/pubs/0103qjapan_china.pdf pada 13 Juni 2011 pk. 18.20 WIB.

²⁵⁶ Camilla T. N. Soerensen, “*Strategic ‘Triangularity’ in Northeast Asia: The Sino-Japanese Security Relationship and U.S. Policy*”, dalam *Asian Perspective*, Vol. 30, No. 3, 2006, hlm. 99-128.

pembangunan militer Jepang dengan “perang dingin” lanjutan muncul sebagai skenario terburuk. Dengan demikian, maka pesatnya pertumbuhan Cina memiliki “bahaya jangka panjang bagi keamanan Asia Pasifik”.²⁵⁷ Bulan Maret 1996 ditandai dengan Krisis Selat Taiwan ketiga, dimana Cina melakukan ujicoba nuklir selain penembakan rudal di perairan sekitar Taiwan. Salah satu rudal ini mendarat tidak jauh dari Okinawa, yang mengakibatkan Perdana Menteri Hashimoto mengungkapkan kekhawatiran perlunya evakuasi. Insiden ini juga “menimbulkan luka mendalam terhadap keamanan Jepang dan kebanyakan penduduk Jepang mempertanyakan kebijakan *no-first-use* Cina.” Sedangkan dampak langsung dari ujicoba tersebut adalah transportasi udara dan laut Jepang yang terganggu.

Sebagai akibatnya, Jepang menghentikan aliran dana investasi dan meminta Cina untuk menghentikan ujicoba nuklir. Cina membalasnya dengan menyatakan bahwa penghentian dana investasi tersebut merupakan campur tangan Jepang dalam urusan dalam negeri Cina, padahal Jepang masih harus bertanggungjawab terhadap kejahatan perang yang dilakukan pada masa Perang Dunia II. Pada April 1996, Presiden Clinton dan PM Hashimoto mendeklarasikan kelanjutan aliansi keamanan berdasarkan pertimbangan “situasi yang mungkin timbul di wilayah sekitar Jepang dan memiliki pengaruh penting bagi keamanan dan kedamaian Jepang”. Cina melihatnya sebagai tanggapan Jepang atas ujicoba rudal dan pemasukan Taiwan ke dalam wilayah cakupan aliansi, sehingga memprotesnya dengan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya *containment* serta instrumen bagi dominasi Amerika Serikat dan militerisme Jepang.

Deklarasi ini masih dilanjutkan pada musim gugur 1997, dengan revisi garis besar pertahanan Jepang yang berfokus pada “situasi di sekitar Jepang” dimana beberapa pejabat menyatakan bahwa Taiwan termasuk dalam “daerah sekitar Jepang”. Cina merespon dengan tuduhan bahwa revisi tersebut “merupakan klaim atas Selat Taiwan sebagai ranah kerjasama keamanan Amerika Serikat-Jepang”. Di tahun yang sama, Lee Kuan Yew (masih sebagai Menteri Senior Singapura) menyatakan bahwa Asia-Pasifik “tidak pernah mengalami masa dimana Jepang dan Cina sama-sama kuat. Beberapa ketegangan menjadi tidak dapat dihindarkan”.²⁵⁸

²⁵⁷ Bessho, *ibid.*, hlm. 32-33

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

Musim gugur 1998 menandai peningkatan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat dalam pengembangan TMD/BMD sebagai respon atas ujicoba rudal Korea Utara. Cina melancarkan protes berkepanjangan karena melihat sistem tersebut sebagai penihilan *deterrence* dari rudal Cina, selain menilai pemilikan BMD sebagai jalan mundur menuju militerisme dan dapat dijadikan basis bagi pengembangan rudal balistik oleh Jepang.²⁵⁹ Pada November 1998, Cina berusaha melancarkan serangan politik agar Jepang mengakui bahwa Taiwan tidak termasuk wilayah yang tercakup dalam garis besar pertahanannya yang direvisi. Jepang menolak untuk melakukan klarifikasi, justru balik mempertanyakan pandangan positif Cina terhadap aliansi keamanan. Pada Maret 1999, Perdana Menteri Cina Zhu Rongji kembali mengkritik apa yang dinilainya sebagai pemasukan Taiwan ke dalam wilayah cakupan BMD/TMD Amerika Serikat-Jepang, sehingga “mencampuri urusan dalam negeri Cina”, namun Jepang tetap mengesahkan garis besar pertahanan yang baru.²⁶⁰ Pada Maret 2000, kenaikan Chen Shui-bian (kandidat Partai Demokrat Progresif yang pro-kemerdekaan) sebagai presiden Taiwan memicu pernyataan Cina bahwa Amerika Serikat dan Jepang “telah memompa kesombongan kelompok separatis di Taiwan, mengacaukan kedaulatan dan keamanan Cina, serta membahayakan kedamaian dan stabilitas Asia-Pasifik.”²⁶¹

Walaupun demikian, isu eksplorasi Laut Cina Timur masih berusaha dibicarakan oleh kedua negara. Di sela Pertemuan ASEAN di Singapura, 22 Juli 2000, Menteri Luar Negeri dari dua belah pihak menyepakati untuk mempercepat usaha-usaha yang ditujukan untuk menyelesaikan perjanjian terkait dengan pengembangan bersama ladang minyak dan gas di Laut Cina Timur.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Haruko Satoh dalam tulisan “*Japan: What future with China?*”, dalam Lam Peng Er, Narayanan Ganesan, & Colin Dürkop, ed., *East Asia Relations with a Rising China* (Korea: Konrad Adenauer Stiftung, 2010), hlm. 197. Satoh menulis bahwa berdasarkan konteks historis, maka Cina yang kuat telah menjadi hal baru bagi Jepang. Cina memberikan standar pengukuran baru bagi Jepang dalam peringkat dan status, terkait tolok ukur kesuksesan Jepang sejauh ini di dunia internasional yang disusun dan didominasi Barat. Standar Barat tersebut, ditambah dengan perbedaan ideologi di akhir Perang Dunia II, telah menyebabkan identitas regional ditinggalkan begitu saja dan memicu perbedaan pendapat yang amat kontras di antara penduduk kedua negara.

²⁵⁹ Green, *op cit.*, hlm. 92.

²⁶⁰ Richard C. Bush, “*China-Japan Tensions 1995-1996: Why They Happened, What to Do*”, *Brookings Policy Paper* No. 16, Juni 2009, hlm. 6.

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Perkembangan hubungan yang semakin baik ditandai dengan keputusan Perdana Menteri Fukuda untuk tidak mengunjungi Kuil Yasukuni, yang seringkali menjadi masalah sensitif yang mempengaruhi hubungan Cina-Jepang.

Akan tetapi, tantangan kembali terjadi dengan dugaan media atas masuknya kapal selam Cina ke perairan Jepang (dan berdiam di bawah air selama dua jam) pada 10 November 2004 di dekat Pulau Shikoku dan Kyushu. MSDF untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia II menyatakan keadaan siaga penuh dan mengerahkan *destroyer* serta pesawat patroli untuk mengejar kapal selam yang bersangkutan, dimana kapal selam tersebut kemudian melarikan diri ke perairan Cina. Enam hari berikutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Wu Dawei menyatakan pada Duta Besar Jepang untuk Cina Koreshige Anami bahwa Cina menyesali insiden yang disebabkan oleh “masalah teknis” pada peralatan di dalam kapal selam kelas *Han* yang sedang berlatih tersebut. Menteri Perdagangan Jepang Shoichi Nakagawa memiliki ide lain; beliau menduga bahwa kapal selam tersebut terlibat dalam eksplorasi gas alam di sekitar Senkaku.²⁶²

Pada 2003-2004 Perdana Menteri Wen Jiabao kerap mengkritik kunjungan Perdana Menteri Jepang Koizumi ke Kuil Yasukuni, dimana Kuil Yasukuni merupakan peristirahatan terakhir bagi korban perang Jepang termasuk 14 penjahat perang Kelas-A. Wen mengkritik tindakan ini sebagai kesalahan penanganan dari “sejarah agresi Jepang terhadap Cina.”²⁶³ Kemudian, di musim semi 2005 terjadi demonstrasi besar-besaran yang menyebar ke 30 kota di Cina, termasuk melibatkan banyak komunitas Cina di luar negeri. Protes ini terjadi kembali pada Agustus 2006, namun lebih sporadis dan lebih tidak terdengar. Selain kunjungan rutin ke Kuil Yasukuni, demonstrasi ini juga disebabkan oleh penulisan ulang buku sejarah yang menjadi pelajaran sekolah Jepang. Penulisan ulang tersebut menghilangkan tindakan agresi serta kejahatan yang dilakukan Jepang dalam Perang Dunia II. Cina (dan negara yang menjadi korban penjajahan Jepang pada Perang Dunia II) khawatir bahwa penulisan ulang tersebut akan

²⁶² J. Sean Curtin, “Submarine puts Japan-China ties into a dive”, *Asia Times Online* 17 November 2004, diakses dari <http://www.atimes.com/atimes/Japan/FK17Dh01.html> pada 14 Februari 2012 pk. 02.00 WIB.

“Japanese Minister Links China's Sub Intrusion to Gas Exploration”, *Voice of America* 15 November 2004, diakses dari <http://www.voanews.com/tibetan-english/news/a-28-a-2004-11-15-4-1-90260567.html> pada 14 Februari 2012 pk.01.58 WIB.

²⁶³ Bush, *op cit.*

menyebabkan generasi muda Jepang tidak menyadari kesalahan pemerintah Jepang di masa lampau, sehingga memungkinkan kesalahan yang sama terulang kembali. Kemudian, menyikapi pertemuan Amerika Serikat dan Jepang pada April 2005 yang menyetujui penyelesaian damai Selat Taiwan sebagai “tujuan strategis bersama”, Wen menekankan kembali bahwa “aliansi keamanan Amerika Serikat-Jepang memang merupakan hubungan bilateral, namun Cina tidak bisa membiarkan begitu saja karena aliansi tersebut menyangkut isu Taiwan. Taiwan merupakan isu dalam negeri Cina dimana kekuatan asing tidak boleh ikut campur, baik secara langsung maupun tidak langsung.”²⁶⁴

Dari segi ekonomi saling ketergantungan Cina dan Jepang sudah menjadi lebih mendalam, yang ditunjukkan dengan hubungan yang sebelumnya vertikal pada kurun 1974-1987 (Jepang sebagai negara maju, memiliki peran utama menyediakan alat-alat teknologi bagi industri Cina, serta memiliki nilai ekspor ke Cina yang tinggi) menjadi lebih horisontal sejak tahun 1987-sekarang (nilai impor barang Jepang dari Cina telah menjadi lebih tinggi nilai daripada nilai ekspor Jepang ke Cina, apalagi industri Jepang melaksanakan *outsourcing* ke Cina untuk menekan biaya karena kondisi ekonomi yang stagnan).²⁶⁵ Ketergantungan ini makin jelas dengan posisi Cina yang telah melampaui Amerika Serikat pada 2004 sebagai mitra dagang Jepang yang terbesar, dengan total nilai transaksi sebesar 213 miliar US\$.²⁶⁶

3.3.2 Hubungan Jepang-Korea Utara

Normalisasi hubungan antara Korea Utara dan Jepang terjadi pada musim semi 1990, setelah Uni Soviet melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan. Sebagaimana yang Jepang lakukan dalam normalisasi dengan Korea Selatan, maka semua klaim pada masa kolonial harus diselesaikan, salah satunya dengan melibatkan “ganti rugi perang” pada Korea Utara. Upaya normalisasi yang

²⁶⁴ *Op cit.*

²⁶⁵ Kokubun Ryosei, “*The Shifting Nature of Japan–China Relations After the Cold War*” dalam Lam Peng Er, ed., *Japan’s Relation with China: Facing a Rising Power* (New York: Routledge, 2006), hlm. 26-27.

²⁶⁶ Paul Blustein, “*China Passes U.S. in Trade with Japan: 2004 Figures Show Asian Giant’s Muscles*”, dalam *The Washington Post* 27 Januari 2005, diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A40192-2005Jan26.html> pada 13 Februari 2012 pk. 01.35 WIB.

dilakukan Jepang ini memiliki tujuan untuk menstabilkan situasi di Semenanjung Korea. Hanya saja dengan sikap Korea Utara yang menutupi adanya peristiwa penculikan terhadap warganegara Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an oleh pasukan khususnya, hubungan Jepang dan Korea Utara tidak mengalami perbaikan. Contohnya pada perundingan normalisasi tahun 1992, ketika delegasi Jepang mempertanyakan peristiwa penculikan tersebut, delegasi Korea Utara justru memutuskan untuk menghentikan pembicaraan.²⁶⁷

Sejak 1998, terjadi tiga peristiwa yang kemudian memperburuk sentimen anti-Korea Utara di Jepang.²⁶⁸ Pertama, peristiwa ujicoba peluncuran rudal Taepodong oleh Korea Utara yang melintasi Jepang di sebelah utara, setelah peristiwa sebelumnya yang terjadi pada 1993. Pada Agustus 1998, Korea Utara melakukan penembakan rudal Taepo Dong 1 dengan dalih berusaha meluncurkan satelit. Rudal ini gagal mencapai orbit, serta tingkat tiga dari rudal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tingkat satu rudal ini mendarat di Laut Jepang, sedangkan tingkat duanya melintasi Jepang bagian utara dan mendarat di perairan sebelah timur Jepang. Peristiwa ujicoba rudal tersebut memiliki beberapa dampak. Frustrasi yang diungkapkan oleh media dan politisi Jepang atas keharusan mengandalkan satelit mata-mata Amerika Serikat untuk memonitor situasi Laut Jepang mengakibatkan Jepang memulai program pengembangan satelitintai mandiri. Kemudian, iklim politik di Jepang memberikan penerimaan terhadap konsep TMD/BMD yang akan dikaji lebih lanjut bersama Amerika Serikat. Ujicoba ini bahkan juga memberikan angin segar politik untuk mengeluarkan hukum yang menspesifikasi peran yang dapat diambil SDF dalam mengembangkan wilayah sekitar Jepang. Namun pada tahun 2000, Jepang kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa setengah juta ton beras pada Korea Utara. Jepang mengharapkan bantuan ini mampu melunakkan Korea Utara sehingga mereka mau kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan isu-isu lain yang belum terbahas. Pada 24 Februari 2003 Korea Utara diketahui melakukan percobaan peluncuran rudal jelajah antikapal. Direktur JDA Shigeru Ishiba memperingatkan Korea Utara bahwa Jepang sanggup meluncurkan *preemptive strike* untuk mempertahankan diri bila situasinya memang menuntut. Ishiba

²⁶⁷ Kawashima, *op cit.*, hlm. 81.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

kembali mengulangi pernyataan tersebut di London dengan menambahkan “konstitusi Jepang memungkinkan beliau untuk mengambil posisi tersebut. Terlalu lambat apabila serangan balasan baru dilakukan ke Korea Utara setelah serangan rudal mereka mendarat di Jepang.”²⁶⁹

Kedua, pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh kapal-kapal bersenjata dari Korea Utara terhadap wilayah perairan Jepang, yang diduga bertujuan untuk melakukan “tindakan permusuhan”. Pada Desember 2001 salah satu kapal ini ditenggelamkan setelah melakukan serangan pada kapal penjaga pantai Jepang yang berusaha menghalau mereka dari perairan Jepang.²⁷⁰ Kemudian pada September 2002, ketika bangkai kapal ini diangkat, penyidik Jepang menemukan bahwa kapal tersebut dimuati berbagai macam persenjataan, selain memiliki modifikasi khusus untuk mendukung operasi spionase.²⁷¹ Sebagai tindak lanjutnya, Jepang menjerat sepuluh awak kapal Korea Utara yang selamat salah satunya dengan tuduhan upaya pembunuhan di samping tuduhan lain. Pelanggaran ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada Maret 1999 JCG dan MSDF memergoki dua kapal mencurigakan di lepas pantai Semenanjung Noto. Ketika JCG dan MSDF meminta kedua kapal tersebut berhenti untuk diperiksa, kedua kapal tersebut justru melarikan diri, sekalipun JCG dan MSDF melepaskan tembakan peringatan. Berdasarkan analisis situasi, diperkirakan kedua kapal merupakan kapal mata-mata Korea Utara yang disamarkan. Peristiwa Maret 2001 memang tidak melibatkan kapal, tetapi terjadi penemuan skuter bawah air di muara Sungai Kurobe di Prefektur Toyama.²⁷² Analisis yang dilakukan memberi kesimpulan bahwa peralatan tersebut merupakan sarana penyusupan ke Jepang bagi agen Korea Utara.

Ketiga, meningkatnya rasa frustrasi di Jepang sehubungan dengan ketidakjelasan kasus penculikan warganegara yang dilakukan Korea Utara pada 1970 dan 1980-an. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Koizumi pada

²⁶⁹ Matthews, “*Japan’s New Nationalism*”, *op cit*.

²⁷⁰ “*North Korea’s Espionage Operations in Japan*”, dalam *National Police Agency Focus Vol. 271* diakses dari <http://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten271/english/0402.html> pada 1 Maret 2012 pk. 07.01 WIB.

²⁷¹ *Ibid*. Kapal Korea Utara tersebut sekarang dipamerkan di Museum Penjaga Pantai Yokohama. Situs dan brosur informasi mengenai kapal tersebut dapat diakses melalui http://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/kouhou/jcgm_yokohama/ (dalam Bahasa Jepang)

²⁷² “*North Korea’s Espionage Operations in Japan*”, *op cit*.

September 2002, Kim Jong-il mengakui bahwa Korea Utara memang telah melakukan penculikan terhadap warganegara Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an, selain menginformasikan bahwa kebanyakan korban penculikan tersebut telah meninggal.²⁷³ Dari segi keseriusan masalah terdapat empat aspek yang harus dipertimbangkan Pertama, penculikan tersebut dilakukan oleh agen khusus Korea Utara yang menyusup ke Jepang. Dalam hukum internasional yang tradisional, maka tindakan tersebut sudah dapat digolongkan sebagai tindakan mengundang perang, sehingga berakibat negara pelaku dikutuk oleh komunitas internasional. Kedua, apabila kedua negara memiliki hubungan diplomatik, maka negara yang menjadi korban memiliki kemungkinan untuk menyampaikan protes melalui saluran diplomatik, atau bahkan peringatan atas tindakan pembalasan yang dapat diambil. Kendalanya, hubungan Jepang dan Korea Utara masih harus dinormalisasi, selain sikap bermusuhan Korea Utara terhadap Jepang yang ditunjukkan secara terang-terangan sehingga menjadi sulit untuk melakukan komunikasi yang bertujuan untuk membahas isu penculikan ini. Ketiga, tingkat keseriusan dari tindakan penculikan ini menyebabkan Korea Utara menutup mulut rapat-rapat ketika isu ini diangkat kembali oleh Jepang. Keempat, konstitusi Jepang yang tidak memungkinkan pembalasan militer terhadap Korea Utara, selain tidak adanya alternatif bagi Jepang untuk memaksa Korea Utara mengakui perbuatannya. Sebagai dampak, satu-satunya cara bagi Jepang adalah dengan berusaha “menyadarkan” Korea Utara melalui diplomasi dan pemberian bantuan bahwa penyelesaian masalah penculikan ini merupakan kepentingan mereka sendiri. Upaya demikianlah yang dilakukan Koizumi pada saat melakukan pertemuan dengan Jong-il. Namun pengakuan tersebut memperburuk opini masyarakat Jepang terhadap Korea Utara sehingga upaya normalisasi hubungan kembali tersendat.

Ketika *Six Party Talks* dimulai di Beijing pada 2003, Jepang menekankan bahwa isu nuklir, rudal pembawanya, serta isu penculikan warganegara harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Jepang bisa melanjutkan upaya normalisasi hubungan dan menyediakan bantuan ekonomi dan keuangan. Namun, Pyongyang terus berargumentasi dengan menyebut Tokyo seharusnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut selama masih membawa isu penculikan.

²⁷³ Kawashima, *op cit.*, hlm. 81-82.

Silang pendapat tersebut terus terjadi hingga ujicoba rudal Korea Utara pada April 2009 membubarkan *Six Party Talks* untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Amerika Serikat dan Korea Selatan menganggap tindakan Jepang dengan bersikeras mengedepankan isu tersebut mengancam agenda utama perundingan, yaitu denuklirisasi Korea Utara dengan transparan.²⁷⁴

Pada akhir Mei 2010, investigasi internasional terhadap meledak dan tenggelamnya ROKS *Cheonan* pada 26 Maret sebelumnya menyimpulkan bahwa kehancuran kapal tersebut disebabkan oleh torpedo yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara.²⁷⁵ Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bagi Jepang bahwa Korea Utara merupakan ancaman yang potensial dan kredibel.²⁷⁶ Pada 20 Mei 2010, Perdana Menteri Hatoyama menyatakan mendukung Korea Selatan yang memutuskan untuk agar DK PBB menjatuhkan resolusi bagi Korea Utara. Pada tanggal 23 Mei 2010, Korea Selatan menyatakan mengajukan permohonan pada DK PBB untuk memperluas sanksi terhadap Korea Utara yang ada sejak 2006 dan 2009 sebagai dampak ujicoba rudal dan nuklir. Menyikapi hal ini, pada tanggal 28 Mei Tokyo menyatakan bahwa Jepang akan mengetatkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dalam bentuk pembatasan pengiriman uang individu ke Korea Utara. Jepang juga mengesahkan undang-undang yang mengizinkan JCG untuk menginspeksi kapal-kapal di laut bebas yang dicurigai membawa persenjataan maupun teknologi nuklir Korea Utara.

3.3.3 Hubungan Jepang-Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan melakukan normalisasi hubungan pada 1965, termasuk di dalamnya terdapat bantuan ekonomi sebesar 800 juta US\$ yang memicu ekonomi Korea Selatan. Pada normalisasi hubungan antara Korea Utara dan Jepang, Korea Selatan sempat mengekspresikan keraguan terhadap aliran dana ganti rugi perang dari Jepang ke Korea Utara. Korea Selatan mengkhawatirkan dana tersebut akan digunakan oleh Korea Utara untuk membangun kekuatan

²⁷⁴ Axel Berkofsky, "Japan North Korea Relations. Bad and Not Getting Better", *ISPI Policy Brief* No. 193 – Juli 2010, hlm. 4, diakses dari

http://www.ispionline.it/it/documents/PB_191_2010.pdf pada 23 Januari 2012 pk. 23.23 WIB.

²⁷⁵ Joint Civilian Military Investigation Group, *Investigation Result on the Sinking of ROKS "Cheonan"*, Kamis 20 Mei, 2010, hlm. 3, diakses dari

http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/20_05_10jigreport.pdf pada 10 Mei 2012 pk 18.58 WIB.

²⁷⁶ Berkofsky, *ibid.*, hlm. 1.

militernya. Walaupun demikian, pada 1969 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mendorong Perdana Menteri Eisaku Sato untuk menyatakan bahwa keamanan Korea Selatan penting bagi keamanan Jepang sendiri. Klausula Korea ini sekaligus mendorong Jepang untuk bergerak lebih aktif dalam keamanan regional.²⁷⁷

Jepang dan Korea Selatan merupakan *regional partners* yang kuat, selain dua negara yang unggul di Asia Timur dari segi teknologi dan ekonomi.²⁷⁸ Pada 2006, tercatat nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 78,5 miliar US\$, sedangkan jumlah warganegara yang saling berkunjung mencapai 4,46 juta jiwa. Sebuah peningkatan yang pesat dari permulaan masa normalisasi hubungan yang mencatat nilai perdagangan bilateral sebanyak 240 juta US\$ serta jumlah warganegara yang saling berkunjung sebanyak 10,000 jiwa. Kemudian dari aspek budaya, baik budaya Jepang maupun Korea saling mempengaruhi preferensi warganegara masing-masing. Misal, “*Korean wave*” (*hallyu*) yang sekaligus mempopulerkan budaya pop Korea di Jepang. Demikian halnya dengan budaya Jepang, misal film animasi Jepang yang populer di Korea Selatan dan bertambahnya *izakaya*²⁷⁹ yang ada di Seoul. Kemudian, pada invasi Amerika Serikat ke Irak 2004, Korea Selatan dan Jepang sama-sama mengirimkan pasukan (dalam konteks Jepang, spesifik sebagai bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi). Hanya saja, hubungan bilateral ini kerap menjadi lebih kompleks karena faktor opini publik yang ada dalam perubahan politik domestik, selain permasalahan historis.

Contoh opini publik ini dapat dilihat dalam gelombang sentimen anti-Jepang maupun anti-Korea yang meningkat sehingga mempersulit upaya diplomasi. Politisi dan media juga kerap menyalahkan isu sejarah dan perbedaan nasional, sehingga pada akhirnya justru memperkuat kecenderungan konflik dan mempersempit potensi kebersamaan. Sebagaimana Cina lakukan, pemimpin politik Korea Selatan kerap mengangkat pernyataan acak dari politisi atau aktivis Jepang yang ditujukan untuk konsumsi domestik dan menjadikannya sebagai bukti bahwa

²⁷⁷ Declan Hayes, *ibid.*, hlm. 113-114.

²⁷⁸ Park Cheol-hee, “*The Future of Korea-Japan’s Strategic Relationship: A Case for Cautious Optimism*”, dalam *Shifting Strategic and Political Relations with the Koreas* (Joint U.S.-Korea Academic Studies, 2009), hlm. 101-118.

²⁷⁹ Restoran model pub yang khas di Jepang.

Jepang akan melakukan remilitarisasi untuk mengembalikan keunggulan seperti pada masa Perang Dunia.²⁸⁰ Isu historis yang amat sensitif juga menyebabkan Korea memberlakukan larangan budaya yang meliputi buku-buku, film, dan musik dari Jepang. Larangan tersebut baru dicabut sebagian pada tahun 1998 pada masa pemerintahan Kim Dae-jung, dan dihapuskan sepenuhnya pada tahun 2004.²⁸¹ Namun pada 2005, di Jepang terbit *manga* (komik) *Kenkanryu* yang menjelek-jelekkkan *Korean Wave*. Tindakan ini kemudian dibalas oleh Korea dengan penerbitan komik *Hyömillyu* yang menjelek-jelekkkan penyebaran budaya Jepang.²⁸²

Kebijakan yang berseberangan antara Korea Selatan dan Jepang juga menjadi sorotan selaku negara yang sama-sama beraliansi dengan Amerika Serikat.²⁸³ Contohnya, Korea Selatan tidak ikut menggelar sistem TMD/BMD ataupun tidak ikut serta dalam *Proliferation Security Initiative* (PSI), yaitu sistem interdiksi laut yang bertujuan untuk mencegah pemindahan WMD secara diam-diam. Korea Selatan di bawah Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun juga melaksanakan *Sunshine Policy*, dimana Korea Selatan berusaha untuk melunakkan Korea Utara melalui bantuan ekonomi dan upaya interaksi dua-arah. Sedangkan Jepang juga mencantumkan Korea Utara sebagai salah satu sumber ancaman potensial dalam NDPG. Kemudian dalam *Six-Party Talks* yang diadakan untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara, Jepang cenderung mengikuti posisi keras Amerika Serikat yang berusaha melucuti program nuklir Korea Utara, melalui pemberian sanksi dan pembatasan yang lebih keras dibandingkan dengan yang tercantum dalam resolusi PBB. Menyikapi kasus penculikan yang dilakukan Korea

²⁸⁰ T.J. Pempel, “*Beyond Bilateral Approaches: Regionalizing Japan-Korea Tensions*”, dalam *Shifting Strategic and Political Relations with the Koreas* (Joint U.S.-Korea Academic Studies, 2009), hlm. 129.

²⁸¹ “*Seoul set to lift ban on most Japanese films, comics, videos*”, *Japan Times Online* 20 Oktober 1998, diakses dari <http://www.japantimes.co.jp/text/nn19981020a1.html> pada 15 Februari 2012 pk. 00.17 WIB

Ilya Garger, “*Thank You for the Music*”, *Time Online* 22 September 2003 diakses dari <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,488903,00.html> pada 15 Februari 2012 pk. 00.18 WIB

²⁸² Norimitsu Onishi, “*Ugly Images of Asian Rivals Become Best Sellers in Japan*”, *The New York Times* 19 November 2005, diakses dari http://www.nytimes.com/2005/11/19/international/asia/19comics.html?_r=1&ei=5090&en=b0d32e601cb39284&ex=1290056400&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=all pada 15 Februari 2012 pk. 00.20 WIB

²⁸³ Pempel, *op cit.*, hlm. 128.

Utara, Jepang terus menuntut kejelasan dari Korea Utara mengenai nasib warganegara yang diculik, berbeda dengan Korea Selatan yang cenderung tidak mengangkat isu tersebut atas kekhawatiran memperburuk upaya perbaikan hubungan Utara-Selatan. Pengaruh dari politik domestik kembali menjadi alasan atas posisi yang bertentangan ini selain berakhirnya Perang Dingin memberikan *strategic flexibility* yang lebih baik; perkembangan dan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara menyebabkan munculnya perbedaan yang kian memuncak. Kepemimpinan Kim dan Roh membawa Korea Selatan ke arah politik kiri, sedangkan kepemimpinan Koizumi (di luar kunjungan ke Beijing dan Seoul) membawa Jepang ke politik kanan. Hubungan Korea-Jepang juga bertambah sulit terkait pandangan Korea Selatan terhadap usaha Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Korea Selatan memandang upaya Jepang tersebut merupakan bentuk kompetisi dengan Cina dalam pengaruh dan status. Pertimbangan lainnya, posisi Jepang di DK PBB akan memperkuat posisi Amerika Serikat dengan kuatnya dukungan Jepang terhadap Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, pada 2005 baik Cina dan Korea menentang upaya Jepang untuk memperoleh kursi di DK PBB.

Kemudian, pada April-Mei 2006 Seoul mengirimkan 20 kapal patrol bersenjata untuk mencegah survei Jepang terhadap Kepulauan Takeshima/Dokdo.²⁸⁴ Kepulauan tersebut diklaim oleh kedua negara namun pada saat ini berada di bawah kekuasaan Korea sejak Perang Dunia II. Permasalahan lainnya, Prefektur Shimane di Jepang seringkali mengungkit kembali isu Takeshima sebagai wilayah historis dari prefektur tersebut. Jepang berusaha membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, namun Korea Selatan enggan menanggapi.

Walaupun demikian, hubungan Jepang-Korea selatan masih dianggap optimis terkait dengan kesamaan sistem yang dianut (liberal-demokrasi) dan adanya tujuan strategis bersama (menghindari ancaman dari Korea Utara dan menghadapi kebangkitan Cina). Dalam wawancara yang dilakukan Studi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat terhadap pengamat Korea di East Asia Institute, para pengamat tersebut menyatakan pentingnya Korea Selatan untuk tetap sepihak

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 120-121.

dengan Jepang dan tidak menjadikan isu historis sebagai dasar ancaman bagi hubungan kedua negara. Alasan yang lebih tepat untuk tidak terlibat langsung dengan Jepang dalam kerjasama militer adalah menghindari provokasi terhadap Cina.²⁸⁵

3.3.4 Hubungan Jepang-Taiwan

Pasca normalisasi hubungan Cina dengan Jepang pada 1972, Jepang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dalam *Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China 1972*, Jepang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah dari Cina. Jepang memahami dan menghormati sepenuhnya pernyataan Cina bahwa Taiwan merupakan bagian dari Cina, sehingga Jepang tidak menyetujui kemerdekaan Taiwan.²⁸⁶ Walaupun demikian, Jepang tetap mempertahankan hubungan nonformal dengan Taiwan, terutama berupa hubungan dagang swasta dan pariwisata.²⁸⁷

Lima belas tahun terakhir setelah Perang Dingin berakhir, hubungan Taiwan dan Jepang telah berkembang ke arah yang lebih luas yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan *power* militer dan ekonomi Cina, perkembangan politik di Taiwan dan Jepang, serta pertumbuhan ekonomi Taiwan.²⁸⁸ Pada masa 1996, Presiden Lee Teng-hui membawa Taiwan ke arah kapitalisme pasar dan demokrasi liberal, setelah sebelumnya menghadapi kepemimpinan Kuomintang (KMT) yang otoriter dan korup. Lee yang berlatar pendidikan Jepang, berhasil mengembangkan *goodwill* bagi Taiwan yang melebihi sekadar birokrasi, melalui penghindaran isu tradisional dalam hubungan Cina-Jepang, dukungan terhadap demokrasi dan HAM, sambutan terhadap budaya Jepang dan peran pada masa kolonial, serta ketahanan terhadap tekanan dari Cina. Dampaknya, Taiwan

²⁸⁵ *Understanding Security Relations on the Korean Peninsula: South Korea's Strategic Perceptions on the Region and Beyond*, wawancara East Asia Institute-Army Directed Studies Office, 23 April 2010, hlm. 4-5.

²⁸⁶ *Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China 1972*, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html> pada 15 Februari 2012 pk 02.41 WIB.

²⁸⁷ Kokubun Ryosei, *op cit.*, hlm. 31.

²⁸⁸ David Fouse, "Special Assesment Japan-Taiwan Relations: A Case of *Tempered Optimism*", *Asia-Pacific Center for Security Studies Special Assesment*, Oktober 2004, hlm. 1.

memperoleh dua kemenangan diplomatik dari Jepang pada masa pemerintahan Lee: 1.) keputusan Jepang untuk tidak mengeluarkan Taiwan secara eksplisit dari “wilayah sekitar Jepang” dalam revisi *Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation* 1997 walaupun menemui tekanan dari Cina, dan 2.) PM Obuchi dari Jepang tidak mau menandatangani “*three nos policy*” (tidak ada kemerdekaan bagi Taiwan, tidak ada *Two Chinas Policy*, tidak ada keikutsertaan Taipei dalam badan internasional yang berdasar kenegaraan) sekalipun kebijakan ini diadopsi administrasi Clinton pada 1998. Kemudian pada 2001, Lee berhasil memperoleh visa ke Jepang untuk “tujuan medis” sekalipun mendapat tentangan dari Cina. Beberapa pengamat melihat dukungan bagi Taiwan ini tidak terlepas dari naiknya politisi baru di Jepang yang menganggap Jepang sudah cukup meminta maaf atas kesalahan di masa lampau, selain perlakuan amat baik bagi para politisi dan pejabat Jepang pada masa kepemimpinan Lee.²⁸⁹

Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian tahun 2000, Taiwan berusaha mempererat hubungan ekonomi, politik, dan keamanan dengan Jepang. Salah satunya dengan menggeser dasar hubungan luar negeri dari latar sejarah dan budaya menjadi latar nilai politik, ekonomi, serta keamanan yang dimiliki kedua negara. Kebijakan ini dapat dilihat dalam pidato Presiden Chen pada 9 September 2002 yang meminta Jepang mendukung konsep “*Asia-Pacific Democracy Alliance*”, yaitu kerjasama keamanan demi mempertahankan kemerdekaan, demokrasi, dan HAM di Asia Timur. Chen juga mendorong Jepang untuk mengadakan perjanjian free trade dengan Taiwan, Amerika Serikat, dan ASEAN. Menyikapi hal ini, PM Koizumi dalam pidatonya tiga hari kemudian menyatakan bahwa Jepang memiliki “peran penting” dalam menciptakan lingkungan dimana Taiwan dan Cina bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan aman. Walaupun respon ini tidak seperti yang diharapkan oleh Taiwan, penekanan Koizumi pada “penyelesaian masalah lintas-Selat Taiwan dengan damai tanpa menggunakan kekerasan” menunjukkan posisi Jepang untuk terus berhubungan dengan Taiwan walaupun kepentingan terhadap Cina yang merupakan *power* ekonomi dan militer baru di Asia Timur. Keinginan untuk tetap berhubungan ini juga terlihat dari peristiwa pada November 2002, ketika Kementerian Luar Negeri

²⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Jepang akhirnya merevisi panduan kunjungan pemerintah ke Taiwan di bawah tekanan administrasi Koizumi. Sebelumnya, panduan tersebut melarang perjalanan ke Taiwan dilakukan oleh kepala divisi ataupun pejabat negara dengan jabatan yang lebih tinggi, namun setelah revisi berubah menjadi mengizinkan perjalanan “dalam kasus tertentu”. Kemudian, pada 14 Desember 2003 perayaan ulang tahun Kaisar Akihito diadakan di *Taipei Office of the Japanese Interchange Association* (kedutaan *de facto* Jepang di Taiwan) untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Pejabat tinggi Taiwan, termasuk Sekjen Kepresidenan Chiou I-jen, Menteri Luar Negeri Eugene Chien, dan Wakil Kepala KMT Vincent Siew tercatat menghadiri perayaan ini. Sebelas hari berikutnya, tepatnya 25 Desember, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshiro Mori tiba di Taipei untuk melakukan kunjungan pribadi selama tiga hari walaupun menemui protes Cina. Mori merupakan mantan perdana menteri Jepang selain Takeo Fukuda (1981) yang pernah berkunjung ke Taiwan. Walaupun berkeras kunjungannya tidak memiliki urusan politik, namun Mori menemui Presiden Chen, mantan presiden Lee, serta tokoh-tokoh politik Taiwan demi memahami kebijakan Taiwan.

Hubungan Jepang dengan Taiwan dinilai tidak memiliki dasar pemikiran strategis, sebab Jepang tidak memiliki kerangka kerja strategis yang luas untuk berhubungan dengan Taiwan. Yoshihide Soeya, pengamat dari Universitas Keio, menyatakan bahwa pertimbangan utama Jepang sejak 1956 hanyalah Taiwan tidak menjadi pos militer terluar dari Cina. Selain itu, hubungan Jepang dan Taiwan, termasuk perluasan cakupan wilayah dalam Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang hingga mencapai Taiwan pada 1997, lebih disebabkan oleh kepentingan Amerika Serikat.²⁹⁰ Sedangkan pada Juli 1997 Direktur JDA Fumio Kyuma menyatakan bahwa berdasarkan kajian atas garis besar pertahanan revisi tersebut, maka tidak ada perlunya bagi Jepang untuk memasukkan krisis Taiwan ke dalam *joint planning* sebenarnya.²⁹¹ Hanya saja, kenaikan Chen Shui-bian yang pro-kemerdekaan sebagai presiden Taiwan pada tahun 2000 sempat memicu kewaspadaan Jepang terhadap stabilitas di Selat Taiwan. Menyikapi kenaikan ini, Jepang mulai merancang skenario kontingensi, selain mulai membicarakan hubungan keamanan trilateral bersama Amerika Serikat dan Taiwan. Selain itu,

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹¹ *Ibid.*

pada 2003 Jepang menugaskan Mayor Jenderal (Purn.) Yoichi Nagano ke kantor *Japanese Interchange* di Taipei; pertama kalinya pejabat eks-SDF ditugaskan ke Taiwan sejak Jepang memutuskan hubungan diplomatik pada 1972. Namun, pada praktiknya ketika di tahun 2002-2004 Presiden Chen mengungkapkan ide “*defense referendum*”, Jepang tidak serta-merta mendukung, tetapi lebih “mengingat” Taiwan untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan lebih banyak dalam hubungan Cina-Taiwan (itupun dilakukan secara diam-diam setelah Amerika Serikat memberikan kritik terbuka pada Taiwan).

Kritik Jepang ini menuai protes dari Taiwan, terutama dari eks-Presiden Lee. Lee menuduh Jepang bertindak lemah dan selalu mundur menghadapi tentangan Cina. Kritik lain juga diterima oleh perwakilan Taiwan di Jepang yang mengklaim bahwa MOFA telah membahayakan Taiwan dalam menangani isu referendum, karena MOFA tidak berhasil menerjemahkan makna referendum tersebut terhadap parlemen dan media. Jepang sendiri menyatakan bahwa Jepang masih akan tetap mempertahankan *One China Policy* dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, sebagaimana dikemukakan Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi pada April 2004 dalam kunjungannya ke Beijing.

Walaupun dukungan terhadap Taiwan dari Jepang menguat, namun terlihat bahwa Jepang tidak akan mengambil tindakan yang membahayakan hubungan dagangnya dengan Cina. Apalagi hubungan dagang tersebut disebut sebagai salah satu faktor kenaikan kembali ekonomi Jepang yang stagnan. Selain itu kepemimpinan Taiwan sekarang tidak mau melepaskan klaim atas Kepulauan Senkaku, sehingga mendorong Jepang untuk mempertahankan situasi. Posisi Jepang sekarang akan menguntungkan rencana pengamanannya Amerika Serikat yang ada dalam *Taiwan Security Act*, sebagai suatu koordinasi trilateral yang diperlukan antara ketiga negara dalam menghadapi kontingensi yang mungkin terjadi di kawasan tersebut. Jepang memang mengambil langkah yang lebih proaktif dalam hubungannya dengan Taiwan sehingga menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk melaksanakan *Taiwan Security Act*, namun langkah Jepang tersebut lebih ditujukan untuk mengembangkan koordinasi kebijakan dengan Amerika Serikat.²⁹²

²⁹² Jason Chen menulis bahwa Jepang cenderung meningkatkan dukungan bagi Taiwan yang didorong oleh pengaruh Amerika Serikat dalam aliansi keamanan, selain unsur realisme Jepang untuk menjamin *security interest* mereka sendiri. Contohnya, mengirimkan perwira MSDF sebagai

3.4 Analisis *Balance of Force* Cina- Jepang-Amerika Serikat

Penulis menetapkan tiga indikator dalam melakukan penghitungan kuantitatif terhadap *balance of force*, yaitu kekuatan laut, kekuatan udara, dan kemampuan rudal. Tiga indikator ini didasarkan pada pendapat analis militer yang berpendapat bahwa pertumbuhan militer Cina dengan cepat dapat menjadi risiko keamanan bagi negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat dan sekutunya di Pasifik). Pertama, Richard A. Bitzinger menyebutkan perkembangan kapabilitas militer negara-negara Asia (termasuk Cina) dilakukan melalui revolusi teknologi militer yang melibatkan pembangunan kapabilitas *blue-water navy*, pengoperasian pesawat tempur generasi keempat pengoperasian pesawat AEW&C, dan *air-refueling*, pengadaan rudal udara-ke-udara jarak jauh dan rudal antikapal, serta pengembangan jaringan C4ISR.²⁹³ Kedua, dalam *Future Wargame 20XX Series* yang disusun oleh Michael Vickers dan Robert Martinage, terdapat *large peer competitor* (LPC) yang didasarkan pada Cina. *Wargame* ini memaparkan asumsi tahun 2025-2030 dimana rezim RMA yang dibangun oleh LPC memungkinkan mereka melakukan tiga macam skenario perang:

- Invasi LPC ke Timur Jauh Rusia untuk mengamankan cadangan gas dan minyak bumi, dengan kedok melindungi penduduk LPC yang tinggal di lembah Sungai Amur.
- Invasi LPC ke Kazakhstan untuk menghabisi teroris Uighur yang melakukan penetrasi perbatasan ke dalam Xinjiang, selain tujuan tambahan untuk mengamankan jalur pipa gas dan minyak, serta suplai air.
- Intervensi LPC dalam konflik internal Indonesia untuk mendirikan rezim pro-LPC demi mengamankan akses terhadap sumber daya alam seperti gas alam di Natuna atau ladang minyak Sumatera.²⁹⁴

penyelia militer bagi AL Taiwan pada Maret 2004 dan pernyataan bersama Amerika Serikat-Jepang pada 2005 yang secara eksplisit menyebutkan penyelesaian isu Taiwan secara damai merupakan “tujuan strategis bersama” dari kedua negara. Selengkapnya lihat Jason Chen, “Japan’s Policies Towards Taiwan: Trends, Causes, and Implications for the Future of Tokyo-Taipei Relations”, dalam *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 6 No.1, Winter 2006, hlm. 53-61.

²⁹³ Richard A. Bitzinger, “Come The Revolution: Transforming the Asia Pacific’s Militaries”, dalam *Naval War College Review*, Spring 2005, Vol. 58 No. 4, hlm. 42-43.

²⁹⁴ Michael Vickers dan Robert Martinage, *Future Warfare 20xx Series: Lessons Learned Report*, (Center for Strategic and Budgetary Assesment, Desember 2001), hlm. 2-4.

Ketiga, Richard D. Fisher Jr. mengemukakan bahwa modernisasi kekuatan laut Cina berpusat pada kapal induk, kapabilitas amfibi, dan kapal selam nuklir yang dipersenjatai rudal jelajah. Modernisasi tersebut dimaksudkan untuk membalikkan “penghinaan” pada masa dominasi Barat dan Jepang, selain memastikan posisi Cina sebagai pemimpin regional, melalui komitmen pembangunan kapabilitas proyeksi kekuatan global berupa kekuatan laut dan udara pada 2020. Cina juga diperkirakan tidak ragu untuk memanfaatkan peningkatan kapabilitas teknologi militernya dalam mewujudkan keunggulan luar angkasa. Tindakan ini, menurut Fisher Jr., menunjuk kepada satu fakta bahwa Cina membangun kapabilitas militer yang melebihi kebutuhan pertahanan regionalnya, dengan trajektori yang menandingi Amerika Serikat untuk mendominasi militer Asia untuk kemudian mewujudkan dominasi tambahan ke wilayah strategis yang menjadi prioritas lainnya.²⁹⁵

Kekuatan darat hanya akan bermanfaat apabila invasi sudah tidak terbendung, yang mengakibatkan mandala peperangan bergeser ke wilayah daratan suatu negara. Sedangkan strategi negara-negara Asia Timur adalah penangkalan sebelum ancaman mencapai wilayah teritorial, yang berarti ancaman sudah harus dinetralkan ketika masih berada di laut, contohnya Jepang sendiri yang masih memegang konsep perimeter pertahanan 1.000nm dan menambah kapabilitas tanker udara dan kapal induk ringan untuk mendukung konsep pertahanan tersebut. Di sisi lain, dalam paparan sebelumnya disebutkan bahwa dalam kondisi perang yang dipicu oleh negara lain atas intervensinya terhadap kepentingan Cina, maka Cina akan sanggup untuk melaksanakan *preemptive strike* serta strategi antiakses sebagai perpanjangan dari strategi *two island chain*. Untuk itu, Cina melakukan pembangunan kapabilitas perang laut melalui pembangunan armada kapal selam, peningkatan jumlah dan kapabilitas *destroyer*, pembelian dan rekondisi kapal induk untuk memenuhi target proyeksi *blue-water navy* 2050. Kondisi demikian sesuai dengan kebanyakan pendapat analis keamanan bahwa pembangunan kekuatan laut Cina berpotensi mengancam dominasi Barat (terutama sebagai pihak yang menjalankan *sea control* di wilayah pengaruhnya) di kawasan Asia-Pasifik. Kebutuhan strategi itu masih didukung analisis lain bahwa negara Asia Timur

²⁹⁵ Richard D. Fisher Jr., *China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach* (Connecticut: Praeger, 2008), hlm. 184 dan 213.

melakukan kompetisi dalam upaya pengamanan SLOC yang vital bagi kebutuhan energi dan ekonomi mereka. Untuk itu, kekuatan laut yang mampu bertindak sebagai ekstensi kedaulatan suatu negara (sebagaimana menjadi tujuan dari *blue-water navy*) menjadi hal yang krusial.

Konsep *seapower* memiliki *concern* utama sebagai kapasitas untuk mempengaruhi entitas lain berdasarkan apa yang suatu negara lakukan di lautan, sehingga dapat dikatakan *seapower* merupakan cara untuk “membentuk” suatu hasil di daratan negara lain.²⁹⁶ Pemikiran ini dipicu oleh empat fungsi dari laut itu sendiri, yaitu sebagai sumber daya, sarana transportasi, jalur informasi, dan wilayah kekuasaan. Sebagai dampaknya, peran dari kekuatan laut terbagi ke dalam dua macam, yakni kerjasama maritim atau konflik dan kompetisi. Peran tersebut dapat dilihat dalam fungsi angkatan laut modern yang terbagi ke dalam empat macam, yaitu *sea control*, operasi ekspedisi, keteraturan (*good order*) di laut, serta pemeliharaan terhadap konsensus maritim.²⁹⁷ *Sea control* merupakan fungsi klasik angkatan laut, dimana negara yang memiliki kekuatan dominan di laut akan memiliki kebebasan memanfaatkan laut dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya, walaupun dalam perkembangannya paham ini perlahan-lahan bergeser ke arah pengawasan jalur laut demi keamanan bersama, terkecuali bagi entitas yang dinilai mengancam keamanan sistem internasional. Operasi ekspedisi menekankan pentingnya penggunaan angkatan laut untuk mengamankan situasi konflik di seberang lautan yang diperkirakan akan membahayakan sistem ekonomi maupun pasokan energi internasional. Keteraturan di laut menunjuk pada angkatan laut berfungsi untuk melakukan penjagaan laut teritorial untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi ilegal maupun perusakan lingkungan, terkait dengan kesinambungan keamanan laut dan perdagangan internasional yang melewati wilayah tersebut. Pemeliharaan terhadap konsensus maritim menekankan fungsi angkatan laut sebagai alat diplomasi yang mampu digunakan untuk melakukan kerjasama pencegahan maupun pembentukan institusi yang akan dimanfaatkan untuk mencegah konflik.

²⁹⁶ Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for the Twenty-first Century*, (New York: Routledge, 2004), hlm. 23.

²⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

Hedley Bull berpendapat bahwa kekuatan laut memiliki tiga keuntungan utama dibandingkan kekuatan darat dan kekuatan udara: pertama, kekuatan laut menjamin fleksibilitas, dimana mereka dapat dikirim ke segala tempat dan dapat ditarik sewaktu-waktu ketika urusan negara sudah selesai. Hal ini memiliki dampak pada komando yang lebih mudah untuk diatur. Kedua, kekuatan laut memberikan “keberadaan” bagi suatu negara, sebab kehadiran armada laut akan “menyampaikan ancaman, memberikan kepastian, atau membuat suatu negara memperoleh *prestige*”. Terakhir, Bull menyebutkan bahwa kekuatan laut akan memberikan universalitas terkait kemampuan mengarungi lautan yang menghubungkan seluruh dunia.²⁹⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh Geoffrey Till, dimana beliau mengungkapkan lima macam keunggulan kekuatan laut²⁹⁹:

Pertama, kebebasan dari *host-nation support* maupun komplikasi politik yang muncul dari kerjasama keamanan tersebut. Penggunaan kekuatan laut yang mampu dikirim sekali jalan akan menghindari potensi friksi yang mungkin timbul dari gesekan antara militer dengan sipil di suatu negara. Till mencontohkan kepentingan Amerika dan Eropa di Timur Tengah menyebabkan mereka harus memanggalkan kekuatan dilaut, terkait situasi lokal yang sensitif terhadap kekuatan militer asing yang dipangkalkan di wilayah mereka.

Kedua, di era rudal balistik dan rudal jelajah, kekuatan laut yang dilengkapi munisi jarak jauh dan armada udara pendukung akan memiliki jangkauan strategis yang lebih baik, sekalipun belum mampu menyamai kekuatan udara.

Ketiga, fleksibilitas dan ukuran dari alutsista maritim memungkinkan mereka mengangkut lebih banyak variasi persenjataan. Variasi persenjataan yang ada pada bermacam kapal di suatu armada, ditambah dengan penempatan geografis dari suatu kapal atau suatu armada, akan memiliki dampak pada pihak yang menjadi sasaran diplomasi dari pemilik kekuatan laut. Contohnya, pembelian dan penyelesaian kapal induk eks-Rusia oleh Cina menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya kian menganggap Cina siap memberikan pengaruh lebih besar di kawasan Asia-Pasifik.

²⁹⁸ Hedley Bull, “*Sea Power and Political Influence*”, dalam *Adelphi Paper* 122 (1976), hlm. 6, sebagaimana dikutip oleh J.J Widen, “*Naval Diplomacy—A Theoretical Approach*”, dalam *Diplomacy & Statecraft*, 22:4, 2011, hlm. 718.

²⁹⁹ *Op cit.*, hlm. 260-261.

Keempat kemampuan mengontrol kekuatan laut. Kekuatan laut terbilang lebih mudah untuk digelar dalam suatu wilayah dan ditarik kembali bila situasi berubah menjadi tidak menguntungkan, sehingga mengurangi tanggungjawab pihak yang mengerahkan kekuatan laut tersebut. Berkurangnya tanggungjawab ini juga disebabkan dengan sedikitnya kehadiran warga sipil di laut, sehingga mengurangi potensi jumlah korban yang tidak bersalah apabila pecah konflik dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin manuver militer yang lancar. Konflik di laut juga cenderung kurang sensitif dibandingkan konflik di daratan maupun konflik di atas wilayah udara musuh, sehingga berdampak pada penilaian bahwa penggunaan kekuatan laut cenderung kurang provokatif, kurang berbahaya, dan lebih terkontrol dari penggunaan kekuatan dua matra yang lain.

Kelima, kekuatan laut memiliki mobilitas strategis. Lautan bebas menjamin keleluasaan bergerak dari suatu kekuatan laut, berbeda dengan kekuatan darat maupun kekuatan udara. Kekuatan darat akan sangat tergantung pada logistik pendukungnya, sehingga memindahkan kekuatan tersebut untuk mencapai skala tempur yang efektif merupakan sesuatu yang sulit dilakukan dalam waktu singkat. Sedangkan kekuatan udara pada praktiknya masih memerlukan apa yang disebut dengan *transit time* yang mengurangi mobilitas mereka.³⁰⁰

Keunggulan-keunggulan tersebut pada praktiknya juga akan didukung dengan teknologi persenjataan modern sehingga angkatan laut mampu menjadi sebuah kekuatan militer yang kredibel.³⁰¹ Implikasi dari *forward presence* AL tersebut adalah kemampuan untuk memberikan daya dukung yang efektif bagi kebijakan luar negeri suatu negara.³⁰² Aspek terpenting dari kemampuan tersebut adalah sebagai respon terhadap suatu krisis—termasuk penangkalan—dan mendemonstrasikan kehendak nasional (*national will*) sebagai elemen penting dari

³⁰⁰ *Transit time*: waktu yang dibutuhkan untuk melintasi wilayah negara lain. Waktu transit ini kerap dipengaruhi oleh kewajiban pesawat asing untuk mendarat di bandara yang ditunjuk oleh otoritas suatu negara, ataupun terbang memutar di wilayah udara tertentu sambil menunggu izin melintas diberikan.

³⁰¹ Lihat, NN, “Bukan Sekedar Alat Perang,” dalam Edisi Koleksi *ANGKASA, Kapal Induk: Benteng Raksasa Yang Mendunia* (Jakarta: Dinas Penerangan AURI), hlm. 6-11; NN, “Monster yang Mematikan,” dalam Edisi Koleksi *ANGKASA, Kapal Selam: The Silent Warrior* (Jakarta: Dinas Penerangan AURI), hlm. 3-6.

³⁰² Lihat, Mayor Laut (P) Salim, “Membedah Peran Universal TNI Angkatan Laut,” diakses dari <http://www.tandef.net/membedah-peran-universal-tni-angkatan-laut>, pada 1 Des 2009, pk 10.00 WIB.

strategi penangkalan (*deterrence*).³⁰³ Hal ini membuat AL menjadi amat diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan politik sehingga turut mempengaruhi perilaku dan strategi negara dalam sistem internasional.

Dalam konsep *aerospace power*, maka definisi pemanfaatan kekuatan udara adalah “eksploitasi terhadap lingkungan di atas permukaan bumi oleh kendaraan maupun alat-alat yang digunakan dalam operasi memenuhi tujuan nasional.”³⁰⁴ Keunggulan yang menjadi ciri dari *aerospace power* dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, fleksibilitas dari segi operasi yang mampu dijalani sekali jalan, termasuk pemilihan alutsista yang digunakan berdasarkan mandala dan lingkungan operasi. Banyaknya tipe alutsista, ataupun bermacam kapabilitas yang dimiliki suatu kekuatan udara akan memberikan lebih banyak alternatif bagi pemimpin militer dalam suatu operasi. Misal, sebuah pesawat *fighter-bomber* yang memiliki fungsi ganda sebagai penempur udara-ke-udara maupun penyerang darat akan mengurangi alokasi pesawat tempur lain yang dibutuhkan untuk melakukan *air cover*³⁰⁵ dalam suatu misi serang, sehingga pesawat tempur yang tidak digunakan untuk melindungi misi serang tersebut dapat digunakan untuk melakukan misi lain seperti patroli perimeter udara kawan.

Kedua, konsentrasi pelaksanaan misi udara dapat difokuskan pada satu sasaran maupun berpindah-pindah pada beberapa sasaran. Waktu reaksi serta kecepatan yang dimiliki oleh kekuatan udara untuk menyelesaikan misi menjadi kunci bagi operasi yang melibatkan banyak sasaran. Kecepatan gerak ini, ditambah dengan kemampuan kekuatan udara untuk menempuh jarak jauh dan masuk lebih dalam ke wilayah musuh (*interdiksi*), memberikan kebebasan bergerak yang lebih baik pada suatu militer sebagai poin ketiga. *Interdiksi* dengan banyaknya pilihan misi yang mampu dijalani ini tidak dapat dilakukan oleh kekuatan laut, sebab kekuatan laut hanya mampu mencapai ke pesisir musuh.

³⁰³ Linton F. Brooks, “*Naval Power and National Security: The Case for the Maritime Strategy*,” dalam *International Security*, Vol. 11, No.2 (Autumn, 1986), hlm.69

³⁰⁴ Clayton K.S. Chun, *Aerospace Power in the Twenty-first Century : A Basic Primer*, (Colorado: USAF Academy, 2001), hlm. 3.

³⁰⁵ Perlindungan udara dalam sebuah misi serang, biasanya dilakukan oleh pesawat tempur dengan kapabilitas *air superiority*. Pesawat tersebut didesain untuk mewujudkan keunggulan suatu pihak dalam pertempuran udara, dengan memanfaatkan kemampuan deteksi dan rudal jarak menengah dan jauh untuk menghancurkan pesawat lawan. Sebagai tambahan, pesawat tempur tipe ini biasanya dimanfaatkan untuk melakukan patroli untuk mengamankan ruang udara suatu negara.

Sekalipun kekuatan laut memiliki rudal serang jarak jauh, rudal tersebut tidak akan mampu digunakan untuk memonitor dan menilai situasi di wilayah musuh secara langsung, ataupun menjalankan peran lain di luar fungsi destruktif. Sebagai poin keempat, kekuatan udara juga akan memberikan pengaruh pada tempo dan *timing* jalannya peperangan melalui keputusan yang diambil petinggi militer atau pemimpin lapangan, yang seringkali dilakukan dalam tempo yang sangat cepat.

Kelima, kekuatan udara dapat memiliki perspektif global atau memberikan gambaran yang lebih luas mengenai mandala peperangan atau wilayah operasional. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan satelit sebagai pemasok data situasi yang mampu memberikan gambaran posisi dan manuver musuh ketika mereka belum mencapai jarak pandang. Sebagai poin terakhir, dengan jumlah awak yang lebih sedikit (bahkan tidak berawak pada alutsista semacamUCAV³⁰⁶) dan teknologi tempur yang maju, maka kekuatan udara akan memberikan pengurangan korban di kalangan sendiri bila dibandingkan dengan kekuatan laut atau kekuatan darat.

Secara politis dan pembiayaan, kekuatan udara dapat menjadi alat untuk memberikan *deterrence* politik dengan biaya yang lebih murah dari kekuatan maritim dan pengeluaran kekuatan darat besar-besaran.³⁰⁷ Logika sederhana dari faktor teknis yang ada dalam kekuatan udara ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: sebuah pesawat pembom dengan kecepatan jelajah sekitar 300 knot (sekitar 500 kilometer per jam) memiliki kemampuan untuk tiba di sasaran lebih cepat dari sebuah *cruiser* dengan kecepatan maksimum sekitar 30 knot (sekitar 50 kilometer per jam), dengan radius tempur atau jarak jangkauan yang mampu dibandingkan. Dari segi mobilitas, lebih mudah untuk mengirim satu *flight* kekuatan udara ketimbang mengirim satu armada laut. Apalagi dengan memanfaatkan kapabilitas *stealth*, maka interdiksi yang dilakukan oleh kekuatan udara akan sulit dideteksi; munculnya armada udara yang bersangkutan di atas kota-kota penting akan sangat menjatuhkan moral militer maupun penduduk

³⁰⁶ *Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)*, pesawat tidak berawak yang mampu dipersenjajati untuk menjalankan tugas-tugas tempur. UCAV merupakan pengembangan dari *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* yang biasanya digunakan sebatas melakukan misi pengintaian.

³⁰⁷ Christopher Chan, "Viewpoints: Re-Thinking The Political Relevance of Airpower", dalam *Pointer Journals*, Vol. 32 No. 4, 2004 diakses dari <http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications/pointer/journals/2004/v30n4/viewpoints.p rint.html?Status=1> pada 15 Februari 2012 pk. 02.36 WIB.

dalam situasi perang. Kemudian dari segi cakupan sensor, sebuah sensor dengan resolusi tinggi akan mampu mencakup wilayah yang lebih luas. Contoh, satelit mata-mata dan pesawat AEW&C. Cina terlihat mengembangkan kekuatan ini secara serius, baik melalui pengadaan sensor jarak jauh seperti pesawat AEW&C, peluncuran satelit komunikasi (diduga dengan teknologi *dual-use*), kapabilitas *air refueling*, dan serta pesawat-pesawat tempur dengan kapabilitas *stealth* dan *air superiority*.

Hanya saja, pada akhirnya kekuatan udara akan lebih bertindak sebagai komplemen dari kekuatan maritim sehubungan dengan kekuatan maritim yang cenderung bersifat *self-contained*. *Self-contained* di sini bermakna kekuatan laut memiliki kapabilitas suplai logistik mandiri, baik berupa pesawat, helikopter, maupun kapal angkut logistik yang tergabung ke dalam satu armada. Dampaknya, suatu armada laut dapat mempertahankan siaga (*on station*) di wilayah perairan yang strategis hingga menemui tiga kondisi: kerusakan berat atau ditenggelamkan oleh musuh, mencapai kejenuhan awak, atau habisnya suplai di kapal angkut sehingga armada tersebut perlu digantikan oleh armada lain. Kondisi ini berbeda dengan armada udara yang hanya dapat digelar dari suatu basis udara depan (*Forward Operating Base—FOB*) sehingga efektivitasnya dibatasi jarak antara pangkalan dan wilayah operasi tersebut. Kebutuhan akan FOB ini diilustrasikan dengan penggunaan pangkalan di Thailand oleh kekuatan udara Amerika Serikat pada masa Perang Vietnam, ataupun pangkalan di Arab Saudi pada masa Perang Teluk I. Sekalipun menggunakan *air refueling*, armada udara akan lebih dibatasi oleh daya muat, daya tahan awak, kelelahan (*fatigue*) pada mesin, serta tidak mungkin melakukan suplai logistik selain bahan bakar seperti perbekalan awak dan isi-ulang amunisi, ditambah dengan reparasi sewaktu mengudara. Kekuatan udara juga tidak mungkin menduduki suatu wilayah sebagaimana bisa dilakukan oleh kekuatan darat dalam lingkungan operasi mereka. Kemudian, walaupun aset luar angkasa memberikan pandangan yang luas, namun mobilitas mereka terbatas dengan harus berada dalam orbit bumi sehingga musuh dapat menebak lokasi mereka melintas untuk kemudian dihancurkan dengan senjata antisatelit. Sedangkan dari segi fisik, konstruksi alutsista udara yang relatif jauh lebih ringan dibandingkan dengan alutsista darat dan alutsista maritim menambah kerentanan alutsista udara

bila mereka beroperasi di wilayah yang padat dengan senjata antiserangan udara lawan. Permasalahan lain dengan menggunakan kekuatan udara adalah perlunya izin untuk melintasi wilayah udara negara lain, apalagi bila membawa munisi aktif. Apalagi kekuatan udara cenderung mengambil rute melewati daratan, terkait dengan prospek timbulnya masalah pada alutsista udara dan harus mendarat darurat di laut (*ditching*) yang akan mengeluarkan lebih banyak biaya dan tenaga untuk melakukan penyelamatan awak; situasi tersebut belum menghitung alutsista yang hilang dari inventaris negara. Hal ini berdampak pada tidak tertutupnya kemungkinan suatu kekuatan udara harus menunggu izin tersebut diberikan oleh pemimpin negara yang bersangkutan, sehingga turut memperlambat waktu tempuh sampai ke sasaran/FOB, membuang bahan bakar yang berharga, dan tentunya lebih menguras stamina awak. Situasi demikian tidak akan ditemui oleh kekuatan laut yang berlayar melalui perairan internasional.

Sebagai alternatif dari armada laut dan armada udara, maka negara-negara memandang rudal balistik dan rudal jelajah sebagai simbol kekuatan nasional dan alutsista yang lebih efektif dari segi biaya. Rudal-rudal ini juga menjadi ancaman asimetris bagi kekuatan udara Amerika Serikat yang masif, apalagi rudal jelajah serang darat yang penggelarannya lebih fleksibel dibandingkan dengan rudal balistik sehingga mampu menjadi ancaman utama dalam suatu operasi militer.³⁰⁸ Rudal serang akan berperan sebagai instrumen yang mampu menambah jangkauan alutsista maritim maupun alutsista udara. Hal ini disebabkan oleh penggunaan rudal serang jarak jauh yang menyumbang keselamatan pesawat maupun kapal peluncurnya, sehubungan dengan kemampuan menjaga jarak di luar serangan langsung dari musuh. Penggunaan rudal tersebut akan mendukung serangan terhadap lawan yang memiliki sistem antiserangan udara yang kuat, dimana serangan menggunakan pesawat biasa menjadi terlalu berbahaya. Terlebih lagi, dari segi pemeliharaan, rudal membutuhkan pemeliharaan, dukungan logistik, dan pelatihan operator yang lebih sedikit dari pesawat maupun kapal.³⁰⁹ Keefektifan rudal menjadi bertambah bila dilihat dari segi *firepower* sebab rudal memiliki bermacam jenis hulu ledak, mulai dari bahan peledak konvensional hingga

³⁰⁸ *Ballistic Missile and Cruise Missile Threat*, National Air and Space Intelligence Center, 2009, hlm. 3.

³⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

nonkonvensional seperti nuklir, biologi, dan kimia. Penggunaan rudal tersebut telah terlihat dengan kecenderungan Cina mengembangkan rudal jelajah dan rudal udara-ke-udara jarak jauh untuk melengkapi kapal perang, pesawat tempur, maupun pesawat pembomnya yang akan digunakan dalam melaksanakan strategi antiakses. Selain Cina, Jepang juga mengembangkan rudal antikapal ASM-2 dan rudal udara-ke-udara AAM-4 yang dipasangkan dengan penempur F-2. Situasi tersebut, ditambah kenyataan bahwa faktor jarak Okinawa dan Guam ke Cina (Okinawa-Shanghai sejauh 820km melintasi Laut Cina Timur dan Guam-Okinawa sejauh 1.220nm melintasi Samudera Pasifik) memerlukan kehadiran armada laut dan armada udara yang dilengkapi rudal serang jarak jauh, membawa pertimbangan penulis kepada penetapan tiga kriteria yang dinilai mampu mewakili kapabilitas ketiga indikator kuantitatif:

- Tonase pada alutsista laut, terkait hubungan antara ukuran dan bobot kapal dengan banyaknya sensor, suplai, serta variasi persenjataan yang mampu dibawa.
- Radius tempur pada alutsista udara, terkait jarak yang mampu dijangkau oleh suatu alutsista dari pangkalan udaranya untuk bertahan di suatu tempat (baik patroli maupun melakukan serangan) dan kembali lagi ke pangkalan dengan bahan bakar minimal.
- Jarak jangkauan pada rudal, terkait unsur utama *firepower* yang dimiliki kekuatan laut maupun kekuatan udara, selain kemampuan bertahan di jarak yang lebih jauh dari jangkauan senjata lawan.

Pengambilan sampel alutsista juga akan didasarkan pada perhitungan komparasi kapabilitas yang ada pada suatu kelas alutsista, misal untuk alutsista laut berupa kapal kelas *destroyer* dipilih jenis *Sovremenny* milik Cina, *Kongo* milik Jepang, dan *Arleigh Burke* milik Amerika Serikat terkait dengan kehadiran rudal antikapal sebagai sistem senjata utama dan kapabilitas sensor yang saling mendekati. Contoh lain, alutsista udara berupa pesawat tempur kelas *air superiority* akan mempertemukan J-11/Su-27 "*Flanker*" Cina dan F-15 *Eagle* yang dimiliki baik Jepang maupun Amerika Serikat berdasarkan jenis rudal, kapabilitas sensor, dan orientasi misi untuk mewujudkan keunggulan udara. Kandidat alutsista yang akan

digunakan sebagai sampel dari militer Cina, Jepang, maupun Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Kandidat Sampel Alutsista

	Cina	Jepang	Amerika Serikat
Alutsista Laut			
<i>Aircraft Carrier</i> (CV/CVH/ CVN)	<i>Shi Lang</i> Bobot: 65.000 ton	<i>Hyuga</i> Bobot: 16.500 ton	<i>Nimitz</i> Bobot: 102.000 ton
<i>Missile Cruiser</i> (CG)	-	<i>Atago</i> Bobot: 10.000 ton	<i>Ticonderoga Mod</i> Bobot: 9.410 ton
<i>Missile Destroyer</i> (DDG)	<i>Sovremenny Mod</i> Bobot: 8.050 ton	<i>Kongo</i> Bobot: 9.485 ton	<i>Arleigh Burke Flight I</i> Bobot: 8.320 ton
<i>Missile Frigate</i> (FFG)	<i>Jianghu IV</i> Bobot: 1.900 ton	<i>Abukuma</i> Bobot: 2.550 ton	<i>Oliver Hazard Perry</i> Bobot: 3.900 ton
Kapal selam strategis (SSBN)	<i>Jin</i> Bobot: 8.500 ton	-	<i>Ohio Mod</i> Bobot: 18.770 ton
Kapal selam taktis (SSN)	<i>Han</i> Bobot: 5.550 ton	-	<i>Los Angeles</i> Bobot: 7.102 ton
Kapal selam taktis (SSG)	<i>Kilo</i> Bobot: 3.120 ton	<i>Oyashio</i> Bobot: 2.700 ton	-
<i>Landing Ship</i> (LSD)	<i>Yuzhao</i> Bobot: 12.300 ton	<i>Shimokita</i> Bobot: 11.000 ton	<i>Harpers Ferry</i> Bobot: 16.695 ton
<i>Landing Ship</i> (LST)	<i>Yuting</i> Bobot: 4.800 ton	<i>Yura</i> Bobot: 590 ton	-
Alutsista Udara			
Pesawat Tempur (<i>Air superiority</i>)	J-11A/B (Su-27SK) "Flanker" Radius tempur: 810nm	F-15J/DJ <i>Eagle</i> Radius tempur: 840nm	F-15C/D <i>Eagle</i> Radius tempur: 840nm

Pesawat Pembom Tempur	J-10A/S Radius tempur: 300nm	F-2A/B Radius tempur: 450nm	F-16C/D <i>Fighting Falcon</i> Radius tempur: 649nm
Pembom	H-6E/F/H (Tu-16) " <i>Badger</i> " Radius tempur: 1.800nm	-	B-52H <i>Stratofortress</i> Radius tempur: 4.175nm
Alutsista Rudal			
ICBM	DF-5A/CSS-4 Jarak jangkau: 6.965nm	-	LGM-30G <i>Minuteman III</i> Jarak jangkau: 7.019nm
IRBM/MRBM	DF-21/CSS-5 Mod 1 / 2 Jarak jangkau: 956nm	-	-
SLBM	JL-2/CSS-NX-4 Jarak jangkau: 4.730nm	-	<i>Trident II D-5</i> Jarak jangkau: 6.500nm
SRBM	DF-15/CSS-6 Jarak jangkau: 323nm	-	-
SSM	HN-2/YH-4 Jarak jangkau: 972nm	RGM-84C <i>Harpoon</i> Jarak jangkau: 70nm	RGM-109D TLAM-D Jarak jangkau: 702nm
ALCM	HN-1B/DH-10 Jarak jangkau: 351nm	-	AGM-86 ALCM Jarak jangkau: 1.296nm
AGM/ASM	C-802KD/CSS-8 Jarak jangkau: 150nm	ASM-2 Jarak jangkau: 54nm	AGM-84 SLAM-ER <i>Harpoon</i> Jarak jangkau: 151nm
AAM	R-77/AA-12 " <i>Adder</i> " Jarak jangkau: 54nm	AAM-4 Jarak jangkau: 54nm	AIM-120C-5 AMRAAM Jarak jangkau: 57nm

**Hyuga* dan *Atago* diklasifikasikan sebagai *destroyer* oleh Jepang terkait alasan politik, namun berdasarkan tonase maka *Atago* dapat diklasifikasikan sebagai *cruiser*, sedangkan *Hyuga* dapat diklasifikasikan sebagai kapal induk ringan/ kapal induk angkut helikopter.

*Jepang cenderung tidak menggunakan terminologi *frigate* dalam melakukan klasifikasi kapal, melainkan *small destroyer* atau *destroyer escort*.

Penghitungan rumus indeks alutsista akan digunakan menggunakan rumus perbandingan antara nilai indikator yang dimiliki suatu alutsista dengan total nilai indikator alutsista suatu matra. Untuk kekuatan laut, maka indeks alutsista dapat dirumuskan dengan memasukkan indikator berupa bobot kapal sebagai berikut:

$$Ik = Bk/Bt$$

(Rumus 3.1)

Ik: Indeks Kapal

Bk: Bobot Kapal

Bt: Total Bobot Kapal

Sehingga menghasilkan tabel indeks sebagai berikut:

Tabel 3.16. Indeks Kapal

Klasifikasi	Tipe	Bk	Ik
<i>Aircraft Carrier</i>	<i>Shi Lang</i> (CV)	65,000	0.572082
<i>Landing Ship Dock</i>	<i>Shimokita</i> (LSD)	11,000	0.096814
<i>Cruiser</i>	<i>Ticonderoga Mod</i> (CG)	9,410	0.082820
Kapal selam strategis	<i>Jin</i> (SSBN)	8,500	0.074811
<i>Destroyer</i>	<i>Arleigh Burke</i> Flight I (DDG)	8,320	0.073227
Kapal selam taktis nuklir	<i>Han</i> (SSN)	5,550	0.048847
Kapal selam taktis	<i>Oyashio</i> (SSG)	2,700	0.023763
<i>Frigate</i>	<i>Abukuma</i> (FFG)	2,550	0.022443
<i>Landing Ship Tank</i>	<i>Yura</i> (LST)	590	0.005193
Bt		113,620	

Sedangkan bagi alutsista udara, indeks alutsista dapat dirumuskan dengan perbandingan yang sama, dengan mengganti indikator bobot kapal dengan radius tempur pesawat sebagai berikut:

$$I_p = R_p/R_t$$

(Rumus 3.2)

I_p : Indeks Pesawat

R_p : Radius Tempur Pesawat

R_t : Total Radius Tempur Pesawat

Sehingga diperoleh tabel di bawah:

Tabel 3.17. Indeks Pesawat

Klasifikasi	Tipe	R_p	I_p
Pesawat Pembom	H-6E/F/H (Tu-16) "Badger"	1,800	0.618557
Pesawat Tempur (<i>Air superiority</i>)	J-11A/B (Su-27SK) "Flanker"	810	0.278351
Pesawat Pembom Tempur	J-10A/S	300	0.103093
R_t		2,910	

Demikian halnya dengan indeks rudal, dimana indikator alutsista sebelumnya yang menggunakan bobot dan radius tempur alutsista digantikan dengan jarak jangkauan rudal:

$$I_r = J_r/J_t$$

(Rumus 3.3)

I_r : Indeks Rudal

J_r : Jarak Jangkauan Rudal

J_t : Total Jarak Jangkauan Rudal

Sehingga menghasilkan tabel di halaman selanjutnya:

Tabel 3.18. Indeks Rudal

Klasifikasi	Tipe	Jr	Ir
ICBM	CSS-4	6,965	0.489424
SLBM	JL-2	4,730	0.332373
IRBM/MRBM	CSS-5 Mod 1 / 2	956	0.067177
SSM	RGM-109 TLAM-D	702	0.049329
ALCM	HN-1B/DH-10	351	0.024664
SRBM	CSS-6	323	0.022697
AGM/ASM	C-802KD/CSS-8	150	0.010540
AAM	R-77/AA-12 "Adder"	54	0.003795
Jt		14,231	

Setelah indeks tersebut dirumuskan, maka penghitungan beralih pada penentuan indeks militer masing-masing negara dan komparasi kekuatan yang dimiliki. Penentuan indeks tersebut dirumuskan dengan:

$$x = Ikp \cdot n$$

(Rumus 3.4)

x = Indeks Militer

Ikp = Indeks Komparasi Alutsista

n = Jumlah Alutsista dalam Suatu Kelas

Nilai indeks negara tersebut akan ditotal untuk menghasilkan keseluruhan indeks militer yang digunakan sebagai pembandingan:

$$Tx = x_1 + x_2 + x_3$$

(Rumus 3.5)

Tx = Total Indeks Militer

x₁ = Cina

x₂ = Jepang

x₃ = Amerika Serikat

sehingga menghasilkan tabel komparasi yang dapat dilihat pada tiga halaman berikut:

Tabel 3.19. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Cina 2006/2011

Negara	Klasifikasi	Ikp	2006		2011	
			Jumlah	X	Jumlah	X
Cina	<i>Aircraft Carrier</i>	0.572082	0	0.000000	1	0.572082
	<i>Landing Ship Dock</i>	0.096814	0	0.000000	3	0.290442
	<i>Cruiser</i>					
	Kapal selam strategis	0.074811	1	0.074811	3	0.224433
	<i>Destroyer</i>	0.073227	28	2.050356	13	0.951951
	Kapal selam taktis nuklir	0.048847	4	0.195388	6	0.293082
	Kapal selam taktis	0.023763	53	1.259439	62	1.473306
	<i>Frigate</i>	0.022443	48	1.077264	65	1.458795
	<i>Landing Ship Tank</i>	0.005193	26	0.135018	26	0.135018
	Pesawat Pembom	0.618556	352	217.731712	132	81.649392
	Pesawat Tempur (<i>Air superiority</i>)	0.27835	1,525	424.483750	1,070	297.834500
	Pesawat Pembom Tempur	0.103092	1,538	158.555496	571	58.865532
	ICBM	0.486348	46	22.372008	66	32.098968
	SLBM	0.332373	20	6.647460	130	43.208490
	IRBM/MRBM	0.067177	35	2.351195	118	7.926886
	SSM	0.049329	185	9.125865	185	9.125865
	ALCM	0.024664	250	6.166000	350	8.632400
	SRBM	0.022697	725	16.455325	204	4.630188
	AGM/ASM	0.01054	385	4.057900	1,070	11.277800
	AAM	0.003794	4,500	17.073000	4,500	17.073000
SUBTOTAL			9,721	889.811987	8,575	577.722130

x₁

Tabel 3.20. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Jepang 2006/2011

Negara	Klasifikasi	Ikp	2006		2011	
			Jumlah	X	Jumlah	X
Jepang	<i>Aircraft Carrier</i>	0.572082	0	0.000000	2	1.144164
	<i>Landing Ship Dock</i>	0.096814	3	0.290442	3	0.290442
	<i>Cruiser</i>	0.08282	0	0.000000	2	0.165640
	Kapal selam strategis					
	<i>Destroyer</i>	0.073227	40	2.929080	30	2.196810
	Kapal selam taktis nuklir					
	Kapal selam taktis	0.023763	16	0.380208	18	0.427734
	<i>Frigate</i>	0.022443	9	0.201987	16	0.359088
	<i>Landing Ship Tank</i>	0.005193	2	0.010386	2	0.010386
	Pesawat Pembom					
	Pesawat Tempur (<i>Air superiority</i>)	0.27835	150	41.752500	202	56.226700
	Pesawat Pembom Tempur	0.103092	110	11.340120	159	16.391628
	ICBM					
	SLBM					
	IRBM/MRBM					
	SSM	0.049329	997	49.181013	997	49.181013
	ALCM					
	SRBM					
	AGM/ASM	0.01054		0.000000		0.000000
	AAM	0.003794	3,541	13.434554	11,088	42.067872
SUBTOTAL			4,868	119.520290	12,519	168.461477

x2

**Tabel 3.21. Indeks Kekuatan Militer Ofensif Amerika Serikat
2006/2011**

Negara	Klasifikasi	Ikp	2006		2011	
			Jumlah	X	Jumlah	X
Amerika Serikat	<i>Aircraft Carrier</i>	0.572082	12	6.864984	11	6.292902
	<i>Landing Ship Dock</i>	0.096814	12	1.161768	4	0.387256
	<i>Cruiser</i>	0.08282	22	1.822040	22	1.822040
	Kapal selam strategis	0.074811	14	1.047354	14	1.047354
	<i>Destroyer</i>	0.073227	50	3.661350	59	4.320393
	Kapal selam taktis nuklir	0.048847	58	2.833126	57	2.784279
	Kapal selam taktis					
	<i>Frigate</i>	0.022443	31	0.695733	22	0.493746
	<i>Landing Ship Tank</i>					
	Pesawat Pembom	0.618556	180	111.340080	146	90.309176
	Pesawat Tempur (<i>Air superiority</i>)	0.27835	415	115.515250	468	130.267800
	Pesawat Pembom Tempur	0.103092	2,264	233.400288	2,148	221.441616
	ICBM	0.486348	550	267.491400	450	218.856600
	SLBM	0.332373	425	141.258525	425	141.258525
	IRBM/MRBM					
	SSM	0.049329	154	7.596666	154	7.596666
	ALCM	0.024664	1,142	28.166288	1,142	28.166288
	SRBM					
	AGM/ASM	0.01054	26,120	275.304800	26,120	275.304800
	AAM	0.003794	15,000	56.910000	15,000	56.910000
SUBTOTAL			46,449	1,255.069652	46,242	1,187.259441

x₃

Tx 2006 = 2,264.401929

Tx 2011 = 1,933.443048

Setelah indeks alutsista negara dan total indeks alutsista diketahui, untuk menghitung perbedaan indeks kekuatan militer maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Cina} = x_1/Tx$$

$$\text{Indeks Jepang} = x_2/Tx$$

$$\text{Indeks Amerika Serikat} = x_3/Tx$$

(Rumus 3.6)

Indeks Kekuatan Militer Ofensif		
	2006	2011
Cina	0.400788441	0.305803345
Jepang	0.033904037	0.065749363
AS	0.565307522	0.628447292

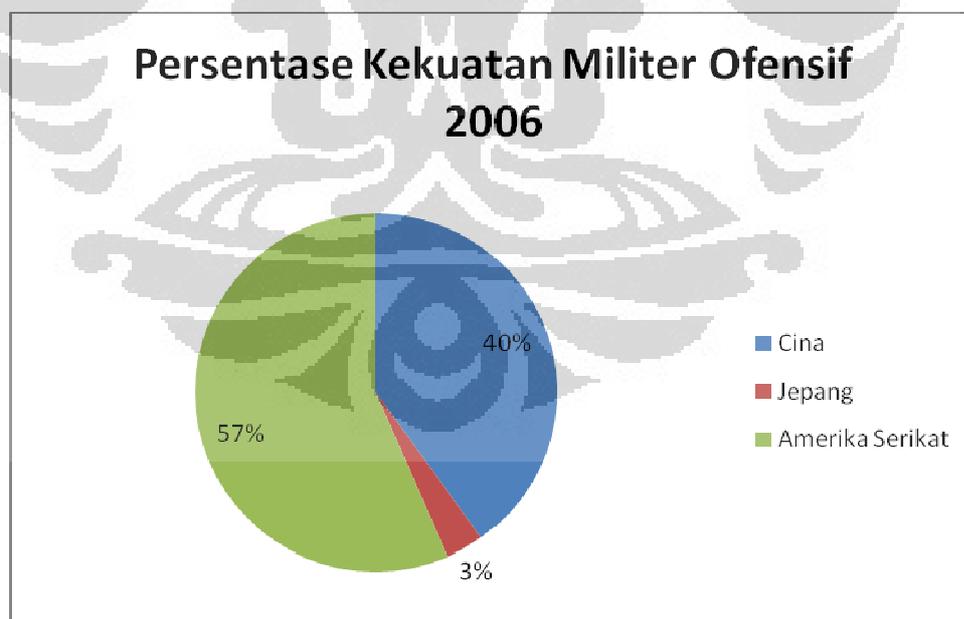


Diagram 3.1. Persentase Kekuatan Militer Ofensif Cina-Jepang-Amerika Serikat 2006

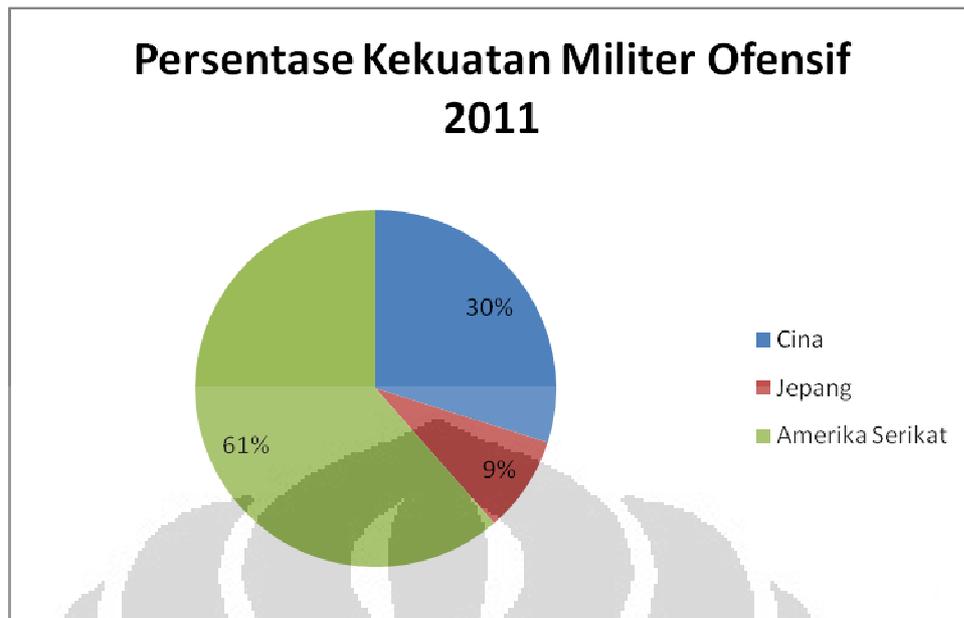


Diagram 3.2. Persentase Kekuatan Militer Ofensif Cina-Jepang-Amerika Serikat 2011

Setelah melalui penghitungan, dapat dilihat bahwa Cina sebenarnya mengalami penurunan jumlah alutsista. Namun perlu dicatat bahwa penurunan tersebut terjadi karena pemensiunan alutsista yang terbilang kuno, terutama pencegat (*interceptor*) seperti MiG-19S/J-6 “*Farmer*” dan varian lama MiG-21F/J-7 “*Fishbed*” serta pembom ringan H-5/Il-28 “*Beagle*” yang dinilai sudah tidak efektif dalam pertempuran modern. Selain itu, terdapat pula kenyataan bahwa Cina memiliki lebih banyak armada kapal patroli dan kapal pendukung dibandingkan dengan *surface combatants*, sehingga bisa dikatakan PLAN belum memiliki komposisi kekuatan yang ideal dalam untuk menghadapi perang terbuka di laut lepas. Secara teknis, kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penghitungan agregat tanpa memperhatikan kualitas dari masing-masing alutsista (misal sebatas mencantumkan seluruh jumlah *combat capable aircraft*) berdampak pada bias penafsiran terhadap postur militer suatu negara dan mengurangi ketepatan perhitungan *balance of force*. Faktor penyelubungan informasi dari Cina juga berdampak pada ketepatan klasifikasi dari alutsista yang dimaksud, sebagaimana dapat dilihat pada segmen alutsista laut Cina dalam sumber data penulis. *Military Balance* 2011 mencatat bahwa terjadi pergeseran klasifikasi beberapa *surface combatants* Cina (sebelumnya tercantum dalam *Military Balance* 2006 sebagai

destroyer) menjadi *frigates* terkait dengan baru adanya informasi yang lebih jelas mengenai tonase, kelengkapan sensor, dan jenis persenjataan yang diangkut. Pada tabel indeks negara yang penulis susun, dapat dilihat bahwa pemensiunan alutsista masih diiringi dengan kecenderungan Cina dan Jepang untuk mengembangkan kapabilitas rudal yang lebih canggih demi mempersenjatai alutsista modern yang akan diakuisisi atau dikembangkan secara mandiri. Hanya saja sehubungan dengan banyaknya alutsista modern yang dibutuhkan untuk sepenuhnya menggantikan alutsista yang dipensiunkan, margin kekuatan Cina dari Amerika Serikat pada 2011 menyusut ke 31 persen, setelah sebelumnya mencapai 16 persen pada tahun 2006. Justru Jepang yang cukup sukses melakukan modernisasi/akuisisi kapabilitas pada tahun 2011 dengan meningkatkan margin kekuatan militer mereka terhadap Cina sebanyak 4 persen dari tahun 2006. Pengembangan kapabilitas tersebut juga menunjukkan bahwa Jepang memiliki kecenderungan melakukan *balancing* dengan Cina. Walaupun demikian, kecepatan modernisasi militer Cina akan tetap berpotensi mengancam bagi Jepang, berdasarkan grafik di atas yang menunjukkan bahwa walaupun mengalami penurunan jumlah dengan pemensiunan alutsista kekuatan militer ofensif Cina tetap masih tiga kali lebih besar dari kekuatan militer ofensif Jepang. Kemudian, upaya *balancing* yang dilakukan oleh Jepang, terutama melalui aliansi keamanan dengan Amerika Serikat, telah memberikan postur bagi Jepang untuk berdiri berhadapan dengan Cina di Asia Timur.

3.5 Analisis pilihan strategi keamanan Jepang, intensi Cina, dan lingkungan strategis Asia Timur

Posisi Jepang dapat dikatakan unik; meminta Amerika Serikat selaku rekanan aliansinya untuk angkat kaki dari Okinawa, namun Jepang masih akan membiayai relokasi tersebut. Tindakan ini terbelang kontras dengan penutupan pangkalan Amerika Serikat yang ada di Eropa, dimana Amerika menutup sendiri pangkalannya dengan pertimbangan kian mahalnya ongkos operasional dan telah hilangnya Soviet sebagai ancaman utama. Berdasarkan pemaparan yang diberikan sebelumnya, penulis melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari posisi Jepang tersebut.

Sejak masa Perang Dingin hingga sekarang, Jepang dapat didefinisikan sebagai pelaku *bandwagoning* dengan Amerika Serikat. Jepang memiliki batas mutlak pada konteks militer dengan adanya Pasal 9 Konstitusi. Sebagai dampak teknisnya, maka Jepang terkena pembatasan dalam anggaran militer dan larangan ekspor persenjataan. Dampak teknis lainnya dapat ditemukan dalam pembatasan fungsi serta kapabilitas SDF, sehingga SDF tidak memiliki kemampuan ofensif jarak jauh dan doktrin operasi militernya dianggap kurang terintegrasi. Pembatasan yang awalnya dilakukan Amerika Serikat sebagai pemrakarsa Konsitusi Jepang ini memang memiliki tujuan utama untuk mencegah bangkitnya militerisme Jepang, namun dengan adanya kenaikan komunisme, Amerika Serikat turut memasukkan ideologi demokrasi dan liberalisme dalam politik Jepang, sehingga Jepang dapat didorong untuk melakukan remilitarisasi terbatas tanpa menimbulkan friksi yang mampu mendestabilisasi Asia Timur. Walaupun sempat menimbulkan protes dari Cina, namun posisi Amerika Serikat tersebut merupakan tindakan nyata untuk memberikan jaminan bagi negara-negara di kawasan Asia Timur bahwa Jepang tidak akan kembali menjadi suatu ekspansionis militer. Pada praktik selanjutnya, penulis melihat bahwa penanaman ideologi ini sesuai dengan faktor-faktor pendorong terbentuknya aliansi keamanan yang dikemukakan oleh Walt, yaitu kesamaan ideologi antara Jepang dan Amerika Serikat. Faktor ini juga diperkuat dengan bantuan ekonomi untuk rekonstruksi perang serta jaminan keamanan (*nuclear deterrence* dan *direct military aid*) yang turut diberikan Amerika Serikat.

Pasca Perang Dingin situasi sudah berubah, dimana ancaman ideologi komunisme sudah menjadi tidak relevan. Pola yang terlihat oleh penulis di sini adalah pergeseran kepentingan dari membendung penyebaran komunisme menjadi pemeliharaan terhadap *status quo*; Jepang kemudian harus bertindak sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat selaku sekutu terbesar Amerika Serikat di Pasifik. Bila sebelumnya posisi Jepang terlihat sebagai satu negara yang pasif dan tidak turut campur dalam keamanan internasional, namun dengan tidak adanya suatu ancaman bersama berupa ideologi pesaing, kali ini dorongan Amerika Serikat terhadap transformasi Jepang didasarkan pada alasan Jepang harus ikut aktif dalam “mewujudkan perdamaian dunia.” Dalam permasalahan *realignment* yang menjadi dasar pertanyaan penelitian ini, perluasan cakupan aliansi hingga ke Guam memiliki

kemungkinan bahwa Amerika Serikat bertujuan untuk mendorong Jepang untuk mengambil sikap lebih asertif dalam peran keamanan di Pasifik. Walaupun demikian, pertimbangan terhadap potensi terselubung Jepang yang ada pada kekuatan ekonomi dan kapabilitas teknologi menyebabkan Amerika Serikat tidak serta merta lepas tangan begitu saja terhadap transformasi pertahanan Jepang. Politik dalam negeri Jepang dan kecenderungan publik untuk mendukung sikap pasifis masih membutuhkan suatu penjamin bahwa Jepang—katakanlah—tidak akan menjadi suatu *nuclear power* baru. Demikian halnya dengan negara-negara Asia Timur, terutama Cina yang masih menganggap bahwa Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang memiliki fungsi membatasi kemampuan militer Jepang. Namun di sisi lain, Amerika Serikat dan Jepang masih merasa perlu mewaspadaikan Cina sehubungan dengan kebangkitan ekonomi, pembangunan militer, dan perluasan pengaruh Cina mulai dari era 1980-an. Walaupun kapabilitas Cina yang telah dihitung dalam perimbangan *balance of force* masih dapat dikatakan belum mampu menandingi kekuatan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang, namun Cina terbilang agresif dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Di sinilah kemudian faktor persepsi terhadap intensi negara berperan dalam mendeterminasi pilihan strategi.

Pembangunan militer Cina secara besar-besaran sehingga menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat dan Jepang penulis nilai terkonfirmasi dengan intensi Cina untuk merevisi *status quo*. Cina dapat dikatakan memiliki indikasi *jackal state* berdasarkan klasifikasi intensi negara yang dikemukakan Schweller: bertindak oportunistik untuk memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya, namun di saat yang sama tidak mau melepaskan apa yang sudah diperolehnya. Penulis mendasarkan pendapat ini pada pemaparan cara-cara militer yang cenderung digunakan Cina dalam menghadapi potensi konflik di Taiwan dan mengamankan jalur energi. Intensi ini terlihat nyata dalam ancaman penggunaan nuklir yang diserukan oleh beberapa petinggi militer Cina terhadap Amerika Serikat. Padahal dalam konteks Asia Timur, faktor Taiwan secara tidak langsung menjadi bagian dari *status quo* yang perlu dipelihara oleh Amerika Serikat. Faktor ini menjadi titik kritis bagi Jepang mengingat Amerika Serikat juga merupakan penyokong utama keamanan Taiwan. Potensi keterlibatan Amerika Serikat bila pecah konflik terbuka

antara Cina dan Taiwan akan menyeret Jepang untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, sekalipun Jepang berusaha untuk netral dalam dinamika hubungannya dengan Taiwan dan Cina. Hal ini berdasarkan konsekuensi yang dikemukakan Bergsmann dalam mendefinisikan aliansi keamanan, dimana keikutsertaan suatu negara dalam aliansi keamanan akan membutuhkan kontribusi sumber daya yang substansial demi membantu rekanan aliansi yang mendapat masalah keamanan.

Kemudian dalam upayanya mempertahankan apa yang telah dimiliki, Cina memiliki kecenderungan yang mengkhawatirkan dengan melaksanakan strategi antiakses yang ditargetkan untuk menghancurkan lawan jauh sebelum mereka memasuki wilayah Cina (dimana lawan masih berada dalam jarak *second island chain*, yaitu Guam sebagai perimeter terluar). Strategi ini kian berbahaya dengan adanya doktrin *active defense* (kerap diterjemahkan sebagai *preemptive strike*) yang dilancarkan Cina terhadap inisiator konflik yang bertujuan untuk menghancurkan lawan, atau setidaknya membuat lawan tidak mampu melakukan eskalasi konflik lebih lanjut. Yang menjadi pertimbangan penulis di sini adalah posisi Jepang dan penggelaran depan Amerika Serikat yang jelas berada pada *first island chain*, sehingga Cina tetap memandang Jepang sebagai sumber ancaman terdekat (Walt menyebutkan faktor kedekatan geografis sebagai salah satu penentu tingkat ancaman). Kedekatan tersebut memiliki implikasinya bahwa strategi keamanan Cina tersebut dapat disebut bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Amerika Serikat dan Jepang apabila kedua negara tersebut dinilai oleh Cina telah melakukan intervensi pada masalah internal atau kepentingan nasional Cina. Bila mau mengikutkan klaim historis sebagai ilustrasi, maka penulis merujuk pada pemaparan kasus Spratly antara Cina dengan Vietnam, ataupun “provokasi” yang dilakukan Cina di perairan sekitar Senkaku. Vietnam disebutkan terpancing oleh Cina untuk membuka serangan, sehingga berkitab pada Cina yang merasa memperoleh legitimasi untuk menyerang balik.³¹⁰ Dalam kasus Senkaku, Jepang masih menahan diri untuk tidak menyerang balik Cina walaupun kapal AL Cina beberapa kali telah melakukan penerobosan. Jika tidak, mungkin konflik yang terjadi sudah mendestabilisasi Asia Timur. Hanya memang tindakan agresif ini hanya berguna

³¹⁰ Lo, *ibid*, hlm.

bila Cina memiliki kekuatan yang benar-benar sudah kredibel untuk menghadapi aliansi keamanan, sehubungan dengan spektrum kapabilitas militer Jepang dan Amerika Serikat yang lebih unggul.

Situasi tersebut dan upaya Jepang meningkatkan keamanannya membawa kesimpulan bahwa Jepang memiliki kredibilitas sebagai pelaku *balancing*, sekurang-kurangnya dalam kapabilitas yang mampu menangkal serangan dari Cina terhadap daratan Jepang. Penulis menarik kesimpulan ini berdasarkan tanggapan Jepang terhadap ancaman di kawasan Asia Timur, yang dapat dilihat pada pemaparan transformasi SDF mulai dari masa perluasan perimeter pertahanan untuk menghadapi pembangunan militer Soviet, pembangunan kapabilitas BMD/TMD sebagai respon dari ancaman nuklir Cina maupun Korea Utara, pengoperasian kapal induk angkut helikopter dan *cruiser* untuk menghadapi bertambahnya armada kapal selam dan kapal induk Cina, serta pengembangan rudal udara-ke-udara dan pesawat tempur baru untuk menghadapi kehadiran pesawat tempur generasi ke-4 dan ke-5 Cina. Terkait dengan keunikan perilaku *balancing* di kawasan Asia Timur, analisis selanjutnya akan diarahkan pada lingkungan strategis Asia Timur.

Konsep *regional security complex* yang dikemukakan oleh Buzan dan Wæver mencantumkan kehadiran satu aktor negara dengan kepentingan yang berlapis di suatu kawasan sehingga mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan tersebut. Amerika Serikat memainkan peran ini di Asia Timur berdasarkan arsitektur keamanan yang dibuatnya sejak masa Perang Dingin antara Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Peran Amerika Serikat ini dapat dikatakan krusial untuk menjembatani perbedaan antara negara-negara di Asia Timur, sehubungan dengan pemaparan yang telah dilakukan dalam subbab sebelumnya mengenai sentimen historis dan kecenderungan nasionalis yang kerap tampil, apalagi bila dikaitkan dengan sengketa wilayah. Faktor pengaruh ini juga menjadi salah satu hal yang memungkinkan Jepang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun dalam konteks sebatas memenuhi tujuan bersama. Misalnya, kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan melalui aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Kerjasama militer langsung antara Jepang dan Korea Selatan masih tidak mungkin dilakukan karena berkaitan dengan persepsi nasional maupun negara lain di kawasan. Bias pandangan antara Jepang dan Korea Selatan justru

berpotensi membuat kerjasama yang dilakukan berubah menjadi ajang saling mencurigai intensi masing-masing (seperti dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya). Selain itu, Cina atau Korea Utara mungkin menganggap kerjasama tersebut merupakan bentuk ancaman baru bagi keamanan mereka. Walaupun demikian, anggapan bahwa Amerika Serikat bertindak sebagai pembatas bagi perkembangan militer Jepang tetap tidak menghilangkan kecurigaan Cina terhadap intensi Amerika Serikat, sebagaimana ditunjukkan dengan upaya Cina untuk memperkuat hubungan dengan Jepang untuk mengimbangi keterikatan Jepang pada Amerika Serikat dan “kejutan terhadap rasa keamanan” yang datang dari keterlibatan Amerika Serikat di kawasan.³¹¹

Buzan dan Wæver menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antar negara-negara di kawasan sehingga perubahan pertahanan di salah satu negara akan berdampak pada pertahanan negara lainnya. Situasi ini telah dipaparkan dalam upaya *balancing* yang dilakukan oleh Jepang sebagai reaksi dari pembangunan kapabilitas militer Cina, namun penulis masih merasa pemaparan tersebut masih kurang menggambarkan dinamika hubungan keamanan Asia Timur. Apalagi melihat kenyataan bahwa konflik terbuka berskala besar belum pernah terjadi, apapun isu yang menyebabkan perselisihan antara negara-negara di Asia Timur. Berdasarkan hubungan antara Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya, penulis mengambil dua pendapat bahwa berpendapat bahwa faktor keterkaitan ekonomi dan mekanisme *engagement* kawasan menjadi alasan bagi tidak terjadinya konflik.

Keterkaitan hubungan ekonomi di Asia Timur yang telah dipaparkan oleh penulis menimbulkan pertimbangan kerugian bila suatu konflik terbuka benar-benar pecah di Asia Timur. Apalagi fakta lain yang belum diungkapkan sebelumnya adalah cukup banyak perusahaan Amerika Serikat maupun Jepang yang memiliki fasilitas produksi di Cina, selain ketergantungan Cina dan Taiwan pada teknologi produksi ataupun teknologi barang jadi yang diimpor dari negara tetangganya

³¹¹ Danielle F. S. Cohen, “Retracing the Triangle: China’s Strategic Perceptions of Japan in Post-Cold War Era”, *Maryland Series in Contemporary Asian Studies* No. 2, 2005. Cohen menyebutkan bahwa dalam hubungan strategisnya dengan Jepang dan Amerika Serikat, Cina memiliki keyakinan bahwa Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang bertujuan untuk mencegah kebangkitan militerisme Jepang. Namun di sisi lain Cina juga tidak menyetujui perkuatan aliansi keamanan tersebut karena ditakutkan mampu mengintervensi kepentingan Cina.

(sekalipun negara Asia Timur memiliki kecenderungan melakukan *reverse-engineering* atau lisensi teknologi). Kemudian dari segi kebutuhan energi dan sumber daya alam yang besar bagi negara industri seperti Jepang, gangguan dalam sistem atau jalur suplai akan berpotensi menghancurkan kesinambungan produksi, sehingga berdampak pada jangka panjang ketahanan ekonomi yang tidak bisa dijamin. Pertahanan negara pun akan terkena imbasnya, sebab operasional, pemeliharaan alutsista dan kapabilitas pertahanan memerlukan ekonomi yang mendukung. Kebutuhan akan stabilitas wilayah ini turut membuat negara-negara Asia Timur memiliki mekanisme *engagement* untuk tetap mempertahankan hubungan mereka dan menghindari konflik yang berkepanjangan. *Engagement* ini lebih bersifat ke arah manajemen konflik daripada mengejar penyelesaian yang definitif, dimana hasil akhirnya berupa *status quo*. Penekanan terhadap manajemen konflik diperlukan di Asia Timur berdasarkan pemaparan posisi opini publik yang sangat menentukan kebijakan pemerintah (terutama di Jepang dan Korea Selatan) dan adanya unsur pemerintahan yang justru menaikkan tensi dalam konflik (seperti pemerintahan prefektur di Jepang yang kerap mengeluarkan pernyataan keras dalam menghadapi isu wilayah), padahal lembaga negara seperti kementerian luar negeri, membutuhkan situasi yang kondusif untuk bisa melaksanakan tugas meredam konflik kenegaraan secara efektif. Konsekuensinya perlu ada upaya untuk mendinginkan opini negatif publik sehingga pemerintah tidak terpaksa mengambil langkah yang akan lebih mendestabilisasi hubungan kedua negara yang berselisih dalam suatu isu. Dalam hubungan Jepang dan Cina, upaya ini disebut oleh seorang pengamat hubungan Cina-Jepang, Kokubun Ryosei, sebagai “ritual manajemen konflik sejak masa lampau melalui berbagai macam jalur komunikasi ataupun utusan yang dikirim secara rahasia”.³¹² Ilustrasi dari *engagement* ini dapat dilihat dalam pemaparan sengketa Senkaku/Diaoyudai, terutama dalam upaya pemerintah Cina dan Jepang menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dengan menahan kelompok aktivis masing-masing negara dari melakukan pendaratan di Senkaku.

Uraian terhadap *engagement* tersebut sekaligus memberikan alasan bagi *realignment* yang disetujui oleh Amerika Serikat dan Jepang. Adanya mekanisme bersangkutan memberi keyakinan bagi Amerika Serikat dan Jepang bahwa tidak

³¹² Yutaka Kawashima, *op cit.*, hlm. 15.

akan ada eskalasi konflik yang berlangsung sedemikian cepat, hingga mampu mendestabilisasi wilayah Asia Timur “hanya dalam semalam”. Implikasinya, postur militer Amerika Serikat pada masa Perang Dingin yang dipertahankan melalui penggelaran depan di Jepang harus dipertimbangkan ulang, sebab dengan tidak adanya ancaman ideologi yang serius seperti pada masa Perang Dingin, kehadiran mereka—apalagi bila ditambah dengan pengembangan kapabilitas yang signifikan—justru berpotensi memanaskan situasi lokal dan regional. Perpindahan III MEF ke Guam merupakan pilihan logis terkait pengurangan tensi di Asia Timur, selain dari segi strategi bahwa perpindahan ini akan menempatkan armada pendarat di ujung batas jangkauan kekuatan konvensional lawan. Dalam situasi konflik, kebutuhan atas penarikan kekuatan juga akan menjadi lebih mudah tanpa harus mengambil risiko berada dalam jangkauan langsung lawan. Militer Amerika Serikat yang terlatih dan superior dari segi kapabilitas juga menjamin kecepatan reaksi dalam situasi krisis, sehingga faktor jarak antara Guam dan Asia Timur tidak menjadi masalah besar. Bila dikaitkan dengan polemik Okinawa, maka pemindahan ini menjadi kian relevan, dengan tujuan memperoleh dukungan publik Jepang kembali sehingga mengurangi tekanan yang diterima oleh aliansi keamanan.

Berdasarkan temuan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian bilateral *U.S.-Japan Roadmap for Realignment Implementation 2006*, faktor utama yang menyebabkan Jepang mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di Pasifik adalah keterikatan Jepang terhadap Amerika Serikat melalui konstitusi, aliansi keamanan bilateral, serta peran keamanan yang dimainkan Amerika Serikat di Asia Timur. Cina, dengan intensi revisionisnya, berperan sebagai satu ancaman bersama bagi Amerika Serikat dan Jepang selaku pemegang dominasi kekuatan di Asia Timur sehingga mendorong perilaku *balancing* dari Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang. Berdasarkan arah transformasi Jepang dan dorongan Amerika Serikat agar Jepang bertindak lebih aktif lagi dalam keamanan regional maupun internasional, maka penulis kemudian memprediksi bahwa Jepang akan mengejar status negara normal dalam 20 tahun ke depan dimana Jepang akan memiliki opsi yang lebih mandiri dan fleksibel dalam menyikapi dinamika Asia Timur, walaupun masih akan tetap mengedepankan Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang.

BAB 4 KESIMPULAN

Pasca Perang Dingin Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang telah mengalami perubahan. Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan oleh pengamat keamanan internasional maupun regional terhadap Asia Timur adalah seberapa besar relevansi Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang dan kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur setelah Uni Soviet sebagai lawan ideologinya runtuh pada 1991. Penulis berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan relevansi tersebut dengan menyorot *U.S.-Japan Roadmap for Realignment Implementation 2006*. Perjanjian ini mengilustrasikan intensi Jepang untuk berperan lebih luas dalam keamanan Asia Timur maupun Pasifik, namun dengan tetap mempertahankan kehadiran Amerika Serikat melalui pembiayaan atas relokasi III MEF dari Okinawa ke Guam, ditambah dengan pembangunan bagi fasilitas militer di Guam yang dapat digunakan bersama oleh SDF maupun militer Amerika Serikat.

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap dinamika keamanan antara Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang dan kehadiran Amerika Serikat di Pasifik masih relevan berdasarkan pembuktian hipotesis *balancing* yang dilakukan Jepang didasarkan pada intensi agresif Cina, *balance of force* yang menguntungkan Jepang, dan lingkungan strategis Asia Timur yang menguntungkan Jepang. Pertama, ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat dari segi keamanan yang disebabkan oleh konstitusi buatan Amerika Serikat yang menghilangkan hak Jepang untuk berperang, kecuali dalam hal membela diri. Kedua, Amerika Serikat di Asia Timur memiliki peran berlapis melalui arsitektur keamanan yang dibangunnya masa Perang Dingin, yaitu sebagai penjamin bagi negara Asia Timur lainnya bahwa Jepang tidak akan bangkit menjadi ekspansionis militer, penjamin bagi kelompok pasifis dalam politik dan publik Jepang bahwa Jepang tidak akan menjadi sebuah *nuclear power*, serta berperan sebagai fasilitator dalam kerjasama keamanan yang melibatkan Jepang. Ketiga, intensi Cina untuk merevisi *status quo* menyebabkan Amerika Serikat dan Jepang selaku pemegang dominasi di Asia-Pasifik untuk melakukan *balancing*, dimana perilaku *balancing* ini ditentukan berdasarkan

penghitungan bahwa jumlah alutsista dan kapabilitas militer Aliansi Keamanan Amerika Serikat dan Jepang masih lebih unggul daripada Cina. Intensi Cina dianggap kredibel sebagai ancaman, sehubungan dengan modernisasi dan strategi militer komprehensif yang didukung dengan anggaran militer yang besar, sehingga berpotensi menghancurkan kekuatan Amerika Serikat dan Jepang dalam konflik. Keempat, saling ketergantungan ekonomi, sistem *engagement*, dan manajemen konflik yang ada Asia Timur telah menyebabkan tidak adanya konflik bersenjata skala besar hingga sekarang, selain menjaga *status quo* di kawasan. Upaya manajemen konflik yang dilakukan terutama berfungsi untuk membentuk opini publik ke arah yang lebih positif, sehingga tidak mengganggu kerja lembaga negara untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi.

Relevansi tersebut tentunya memiliki hubungan erat dengan wilayah dimana suatu kekuatan militer ditempatkan, dalam kasus Aliansi Keamanan Amerika Serikat-Jepang wilayah tersebut adalah Okinawa. Demi memperoleh posisi *balancing* yang lebih efektif, Amerika Serikat harus menggeser marinir selaku pasukan pendarat ke lokasi yang lebih aman dan tidak berada dalam jangkauan langsung lawan. *Deterrence* tidak perlu dikhawatirkan sehubungan dengan armada tempur garis depan yang masih hadir di bagian lain Jepang, selain pembuktian kapabilitas SDF yang mencukupi untuk melakukan pertahanan nasional. Selain itu, perpindahan kekuatan ini bermanfaat untuk mengurangi friksi yang kerap terjadi antara personel militer Amerika Serikat dan penduduk Okinawa, sehingga tekanan publik terhadap Aliansi Keamanan dan pemerintah Jepang akan lebih berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, dan fakta bahwa pembiayaan Jepang di Guam dialokasikan untuk fasilitas militer yang akan digunakan bersama, maka kesimpulan akhir penulis dalam penelitian ini adalah upaya Jepang untuk mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di Pasifik disebabkan oleh target jangka panjang berupa pengejaran status negara normal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonds, Ray, ed. (1986). *The Illustrated Directory of Modern Soviet Weapons*, London: Salamander Books.
- Bush, Richard C. (2010). *The Perils of Proximity: China-Japan Security Relations*. Washington: Brookings Institution Press.
- Buzan, Barry B. dan Wæver, Ole. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calder, Kent E. (2009). *Pacific Alliance: Reviving U.S.-Japan Relations*. New Haven: Yale Publications.
- Cerami, David dan Holcomb Jr., James F., eds. (2001). *U.S. Army War College Guide to Strategy*. Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Chinworth, Michael W. (1992). *Inside Japan's Defense: Technology, Economics, & Strategy*. Washington D.C.: Brassey's.
- Chun, Clayton K.S. (2001). *Aerospace Power in the Twenty-first Century : A Basic Primer*. Colorado: USAF Academy.
- Drifte, Reinhard. (2003). *Japan's Security Relations with China since 1989: From Balancing to Bandwagoning?*. London: Routledge Curzon.
- Er, Lam Peng, Ganesan, Narayanan, dan Dürkop, Colin, eds. (2010). *East Asia Relations with a Rising China*. Korea Selatan: Konrad Adenauer Stiftung.
- Er, Lam Peng, ed. (2006). *Japan's Relations with China: Facing a Rising Power*. New York: Routledge.
- Fisher, Richard J. (2008). *China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach*. Connecticut: Praeger.
- Globke, Werner. (2005). *Warship of the World Fleet Handbook*. Bonn: Bernard & Graefe Verlag.
- Gordon, Andrew, ed. (2003). *Postwar Japan as History*. Berkeley: University of California.
- Gordon, Andrew. (2003). *A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present*. New York: Oxford.

- Green, Michael J. (2001). *Japan's Reluctant Realism*. New York: Palgrave.
- Hayes, Declan. (2001). *Japan, the Toothless Tiger*. Boston: Tuttle Publishing.
- Hsiung, James C. (2007). *China and Japan at Odds: Deciphering the Perpetual Conflict*. New York: Palgrave.
- IISS. (2006). *Military Balance 2006*. London: Routledge.
- IISS. (2011). *Military Balance 2011*. London: Routledge.
- Ikenberry, G. John dan Inoguchi, Takashi, eds. (2003). *Reinventing the Alliance: U.S.-Japan Security Partnership in an Era of Change*. New York: Palgrave
- Kawashima, Yutaka. (2003). *Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century*. Washington: Brookings.
- Lo, Chi-Kin. (1989). *China's Policy towards Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands*. New York: Routledge.
- Miller, David dan Chris. (1986). *Modern Naval Combat*. London: Salamander Books.
- Morton, W. Scott dan Olenik, J. Kenneth. (2004). *Japan: Its History and Culture. Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Scobell, Andrew. (2003). *China's Use of Military Force. Beyond the Great Wall and the Long March*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Till, Geoffrey. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-first Century*. New York: Routledge.
- Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley.

Jurnal dan Research Paper

- Baviera, Aileen. (1999). "China's Relations with Southeast Asia: Political Security and Economic Interests." PASCN Discussion Paper No. 99-17.
- Berkofsky, Axel. (2010). "Japan-North Korea Relations. Bad and Not Getting Better." ISPI Policy Brief No. 193 (Juli 2010).

Berkofsky, Axel. (2009). "Japan-North Korea Relations: (Sad) State of Play and (Sad) Prospects." *IFRI Asia Visions* 17 (Juni 2009).

Bessho, Koro. (1999). "Identities and Security in East Asia." *IISS Adelphi Paper* 325. New York: Oxford University Press.

Bitzinger, Richard A. (2005). "Come the Revolution: Transforming the Asia-Pacific's Militaries." *Naval War College Review* Vol. 58, No. 4 (Autumn 2005).

Bull, Hedley. (1976). "Sea Power and Political Influence." *Adelphi Paper* 122, New York: Oxford University Press.

Bush, Richard C. (2009). "China-Japan Tensions, 1995-2006: Why They Happened, What to Do." *Brookings Policy Paper* No. 16, Juni 2009.

Chan, Christopher. (2004). "Viewpoints: Re-Thinking The Political Relevance of Airpower." *Pointer Journals* 2004, Vol. 32 No. 4.

Cheol-hee, Park. (2009). "The Future of Korea-Japan's Strategic Relationship: A Case for Cautious Optimism." *Shifting Strategic and Diplomatic Relations with the Koreas: Joint U.S.-Korea Academic Studies*.

Cohen, Danielle F.S. (2005). "Retracing the Triangle: China's Strategic Perceptions of Japan in Post-Cold War Era." *Maryland Series in Contemporary Asian Studies* No. 2, 2005 (181).

Cooley, Alexander dan Marten, Kimberley, (2006). "Base Motives. The Political Economy of Okinawa's Antimilitarism." *Armed Forces & Society*, Vol. 32 No. 4, (Juli 2006).

Cordesman, Anthony H. (2011). *The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and Forces of Key Neighboring States*, CSIS, Juli 2011.

Cordesman, Anthony H. dan Hammond, Robert. (2010). *The Military Balance in Asia: 1990-2010. A Quantitative Analysis*. CSIS, 14 September 2010.

Cunningham, Keith B. dan Klemmer, Andreas. (1995). *Restructuring the United States Military Bases in Germany: Scope, Impacts, and Opportunities*. Bonn International Center for Conversion (Juni 1995).

Eldridge, Robert D. (2002). *“Okinawa and U.S.-Japan Relations in the 21st Century: Bilateral and Trilateral Approaches to a Sounder Okinawa Policy.” RIPS Occasional Paper* (Maret 2002).

Flaherty, Michael P. (2001). *“Red Wings Ascendant. The Chinese Air Force Contribution to Antiaccess.” NDU Joint Force Quarterly issue 60* (caturwulan pertama 2001).

Fouse, David. (2004). *“Special Assesment Japan-Taiwan Relations: A Case of Tempered Optimism.” Asia-Pacific Center for Security Studies Special Assesment*, Oktober 2004.

Glaser, Charles L. (1994). *“Realists as Optimists.” International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter 1994/1995).

Goh, Evelyn. (2007). *“Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia. Analyzing Regional Security Strategies.” International Security*, Vol. 32, No. 3 (Winter 2007/08).

Heginbotham, Eric, Ratner, Ely, dan Samuels, Richard J. (2011). *“Tokyo’s Transformation.” Foreign Affairs* Vol. 90 No. 5, (September/Oktober 2011).

Jervis, Robert. (1978). *“Cooperation Under the Security Dilemma.” World Politics*, Vol. 30, No. 2. (Januari 1978).

Heming, Xu. (1998). *The Redefinition of the U.S. Japan Security Alliance and Its Implications to China*. Sigur Center for Asian Studies, 1998.

Huxley, Tim dan Willett, Susan. (1999). *“Arming East Asia.” IISS Adelphi Paper 329*, New York: Oxford University Press.

Iwata, Norio. (1999). *“Procurement Policy and Defense Industry in Japan.” The DISAM Journal*, (Summer 1999).

Kang, David C. (2003). *“Getting Asia Wrong. The Need for New Analytical Frameworks.” International Security*, Vol. 27, No. 4 (Spring 2003).

Matthews, Eugene. (2003). *“Japan’s New Nationalism.” Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 6 (November - Desember, 2003).

Mathur, Arpita, (2004). *“Japan’s Changing Role in the US-Japan Security Alliance.” Strategic Analysis*, Vol. 28, No. 4, 2004.

Mendl, Wolf. (1983). *“Japan and Its Giant Neighbours.” The World Today*, Vol. 39, No. 6 (Juni 1983).

Niquet, Valérie. (2007). "Energy Challenges in Asia", IFRI Note de l'Ifri (Oktober 2007).

Nishihara, Masashi. (2004) "US Security Strategy in Asia and Prospects for an Asian Regional Security Regime." Konferensi IIPS *A New Horizon for Japan's Security Policy—Basic Concept and Framework*.

Pempel, T.J. (2009). "Beyond Bilateral Approaches: Regionalizing Japan-Korea Tensions." *Shifting Strategic and Diplomatic Relations with the Koreans: Joint U.S.-Korea Academic Studies*.

Pryztup, James J. (2004). "Japan-China Relations: Not The Best Of Times." *Comparative Connections* Vol.6 No. 3, 1 Oktober 2004.

Pryztup, James J. (2001). "Japan-China Relations: Spiraling Downward." *Comparative Connections* Vol. 3 No. 3, 1 Oktober 2001.

Samuels, Richard J. (2006). "Japan's Goldilocks Strategy." *The Washington Quarterly* (Autumn 2006).

Samuels, Richard J. (2007). "Securing Japan: The Current Discourse." *Journal of Japanese Studies* Vol. 33 No. 1, 2007

Schweller, Randall. (1994). "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." *International Security*, Vol. 19, No.1 (Summer 1994).

Smith, Sheila A. (2001). "Japan's Uneasy Citizens and the U.S.-Japan Alliance", *Asia Pacific Issues: Analysis from the East-West Center* No.54 (September 2001).

Soerensen, Camilla T. N. (2006). "Strategic 'Triangularity' in Northeast Asia: The Sino-Japanese Security Relationship and U.S. Policy." *Asian Perspective*, Vol. 30, No. 3, 2006.

Tamamoto, Masaru. (1990). "Japan's Search for a World Role", *World Policy Journal*, Vol. 7, No. 3 (Summer, 1990).

Uryu, Kazuhisa. (2006). "Government Procurement as Industrial Policy: In Support of Japan's Defense Aircraft, Start-up and Venture Companies, and Information." *USJP Occasional Paper* 06-14.

Walt, Stephen M. (1985). "Alliance Formation and the Balance of World Power." *International Security*, Vol. 9, No. 4 (Spring 1985).

Tesis

Winward, Lynn H. (Maret 2006). *Bigger Shield: Alliance, Politics, and Military Change in Japan*. Monterey: Naval Postgraduate School.

Meyer, Stanley E. (1996). *Incident at Mischief Reef: Implications for the Philippines, China, and the United States*. Pennsylvania: U.S. Army War College

Rivera, Jerry M. (2002). *Guam USA: America's Forward Fortress in Asia Pacific*, Pennsylvania: U.S. Army War College

Majalah

Combat Aircraft Monthly. Mei 2012. Vol. 13 No. 5. Inggris: Key Publishing.

Military Technology 2008 Issue 11 Vol. XXIII. Jerman: Mönch Publishing.

Military Technology: World Defense Almanac 2008. Issue I Vol. XXXII. Jerman: Mönch Publishing.

Edisi Koleksi Angkasa, Kapal Induk: Benteng Raksasa Yang Mendunia, Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Edisi Koleksi Angkasa XI: Kapal Selam: The Silent Warrior. edisi kedua. Jakarta: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Memoir

Lewis, Jon E., ed. (2002). *The Mammoth Book of Fighter Pilots*. New York: Carroll & Graf Publishers.

Artikel Internet

President Nixon's Speech on "Vietnamization", November 3, 1969, diunduh dari <<http://vietnam.vassar.edu>>

Bergsmann, Stefan, "The Concept of Military Alliance", dalam Reiter, Erich, dan Gartner, Heinz, eds. (2001). *Small States and Alliances*. Wina: Physica-Verlag, diunduh dari <http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/05_small_states_04.pdf>

Blustein, Paul. (2005, 17 Januari). “*China Passes U.S. in Trade with Japan: 2004 Figures Show Asian Giant’s Muscles.*” *The Washington Post*, diunduh dari <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A40192-2005Jan26.html>>

Curtin, J. Sean. (2004, 17 November) “*Submarine puts Japan-China ties into a dive.*” *Asia Times Online* diunduh dari <<http://www.atimes.com/atimes/Japan/FK17Dh01.html>>

Fisher, Richard D., Jr. (2007, 6 Desember). “*Japanese Military Technology Advances*”, diakses dari <http://www.strategycenter.net/research/pubID.173/pub_detail.asp>

Fisher, Richard D., Jr., (2005, 27 Juli). “*China’s Military Power: An Assessment from Open Sources.*” *Testimony before the Armed Services Committee of the U.S. House of Representatives*, 27 Juli 2005, diunduh dari <http://www.strategycenter.net/docLib/20050731_TestRDFHASC072705.pdf>

Garger, Ilya. (2003, 22 September). “*Thank You for the Music.*” *Time Online*, diunduh dari <<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,488903,00.html>>

Onishi, Norimitsu. (2005, 19 November). “*Ugly Images of Asian Rivals Become Best Sellers in Japan.*” *The New York Times*, diunduh dari <http://www.nytimes.com/2005/11/19/international/asia/19comics.html?_r=1&ei=5090&en=b0d32e601cb39284&ex=1290056400&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=all>

Salim, Mayor Laut (P). (2009, 5 Juli). “*Membedah Peran Universal TNI Angkatan Laut.*” diunduh dari <<http://www.tandef.net/membedah-peran-universal-tni-angkatan-laut>>

Samuels, Richard J. (2001, Desember) “*Kishi and Corruption: An Anatomy of the 1955 System.*” *JPRI Working Paper No. 83* (Desember 2001), diunduh dari <<http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp83.html>>

Yoshikawa, Yukie. (2001, 11 Oktober). *The US-Japan-China Mistrust Spiral and Okinotorishima*, diunduh dari <<http://www.japanfocus.org/-yukie-yoshikawa/2541>>

“Japan, U.S. discussing revised plan for relocating Marines from Okinawa.” (2012, 5 Februari). *Japan Today*, diunduh dari <<http://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-u-s-discussing-revised-plan-for-relocating-marines-from-okinawa>>

“Japanese Minister Links China's Sub Intrusion to Gas Exploration.” (2004, 15 November). *Voice of America*, diunduh dari <<http://www.voanews.com/tibetan-english/news/a-28-a-2004-11-15-4-1-90260567.html>>

“Seoul set to lift ban on most Japanese films, comics, videos.” (1998, 20 Oktober). *Japan Times Online*, diunduh dari <<http://www.japantimes.co.jp/text/nn19981020a1.html>>

Okinawa International University. (13 Oktober 2004). “U.S Marine CH-53D Helicopter Crashes into the Okinawa International University Administration Building”, diunduh dari <http://noflyzone.homestead.com/files/the_crash.htm>

Dokumen dan Situs Resmi

National Air and Space Intelligence Center. (2009). *Ballistic Missile and Cruise Missile Threat*. Ohio: Wright-Patterson AFB.

Department of Defense. (2009). *Active Duty Military Personnel Strengths by Regional Area and by Country (309A)*, 31 Desember 2009.

Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China 1954, <<http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm>>

Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953, <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp>

National Police Agency. (Oktober 2005) “North Korea’s Espionage Operations in Japan.” *National Police Agency Focus* Vol. 271, <<http://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten271/english/0402.html>>

Office of Secretary of Defense. (2006). *Annual Report to Congress: Military Power of People’s Republic of China 2006*.

Agreement Between the Government of Japan and The Government of the United States of America Concerning the Implementation of the Relocation of III

Marine Expeditionary Force Personnel and Their Dependents from Okinawa to Guam 2009, <<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/agree0902.pdf>>

Office of Secretary of Defense. (2007). *Annual Report to Congress: Military Power of People's Republic of China 2007*.

Office of the Secretary of Defense. (2011). *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011*.

Security Treaty Between The United States and Japan; September 8, 1951, <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp>

Taiwan Relations Act 1979, <<http://www.taiwandocuments.org/tra01.htm>>
Truman Doctrine 1960, <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp>

USCINCPAC. (1990). *Command History 1990 Vol. 1 (U)* hlm. 90-93, <<http://www.nukestrat.com/korea/CINCPAC91p90-93.pdf>>

United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation, May 1, 2006, <<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/pdfs/doc0605.pdf>>

Kantor Perdana Menteri Jepang <www.kantei.go.jp>

Kementerian Pertahanan Jepang <www.mod.go.jp>

Kementerian Luar Negeri Jepang <www.mofa.go.jp>

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat <www.state.gov>

Situs Data Teknis

<http://airforceworld.com>

www.airforce-technology.com

www.ausairpower.com

www.deagel.com

www.designation-systems.net

www.f-4.nl

www.f-16.net

www.fas.org

www.globalsecurity.org

www.jeffhead.com

www.missilethreat.com

www.rusnavy.com

www.scramble.nl

www.sinodefence.com

www.sipri.org

www.usfj.mil

www3.pref.okinawa.jp

